

LAPORAN PEREKONOMIAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Agustus 2026



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Kalimantan Barat

AGUSTUS 2026

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
Provinsi Kalimantan Barat

VISI BANK INDONESIA

Menjadi Bank Sentral Digital Terdepan yang Berkontribusi Nyata Terhadap Perekonomian Nasional dan Terbaik di antara Negara *Emerging Markets* untuk Indonesia Maju

MISI BANK INDONESIA

- Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
- Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
- Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
- Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
- Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
- Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
- Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif.

Salinan publikasi ini juga dapat diperoleh dengan menghubungi:

Tim Perumusan dan Implementasi KEKDA
Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kalimantan Barat
Jl. Ahmad Yani No.2, Pontianak
Telp : 0561 - 734134
Faks : 0561 – 732033

Versi softcopy buku ini dapat diunduh di:
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat edisi Agustus 2026. Laporan Perekonomian yang sebelumnya bernama Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional ini memiliki empat fungsi utama, yaitu: (i) merupakan pandangan Bank Indonesia terhadap dinamika perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat; (ii) menyajikan informasi terkini mengenai kondisi makroekonomi, stabilitas sistem keuangan, inflasi, sistem pembayaran, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan, serta prospek perekonomian Provinsi Kalimantan Barat ke depan untuk mendukung pembentukan ekspektasi masyarakat yang menjadi pertimbangan penting dalam perumusan berbagai kebijakan di Bank Indonesia; (iii) sebagai media bagi Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas mengenai berbagai pertimbangan yang melandasi keputusan kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran yang ditempuh Bank Indonesia; dan (iv) menjadi referensi penting bagi seluruh mitra kerja dalam melakukan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Dalam penyusunan Laporan Perekonomian ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat telah mendapatkan banyak dukungan data dan informasi dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang kami perlukan dalam menyusun buku ini.

Sebagai penutup, kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Perekonomian ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca agar kualitas kajian ini dapat terus ditingkatkan.

Pontianak, Agustus 2026
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Doni Septadijaya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR TABEL	ix
RINGKASAN UMUM	x
TABEL INDIKATOR	xiii

BAB 1 • PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH 01

1.1. Kondisi Umum	3
1.2. Perkembangan Ekonomi Sisi Penawaran: Lapangan Usaha (LU)	3
1.2.1. Perdagangan Besar dan Eceran	4
1.2.2. Pertanian	6
1.2.3. Pertambangan	7
1.2.4. Industri Pengolahan	8
1.2.5. Konstruksi	10
1.3. Perkembangan Ekonomi Sisi Permintaan	11
1.3.1. Konsumsi Rumah Tangga	11
1.3.2. Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT)	13
1.3.3. Konsumsi Pemerintah	13
1.3.4. Investasi	14
1.3.5. Ekspor-Impor	14
1.3.5.1. Ekspor	14
1.3.5.2. Impor	16

BAB 2 • PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH 21

2.1. Gambaran Umum	23
2.2. Inflasi Bulanan (mtm)	26
2.3. Inflasi Tahunan (yoy)	29
2.4. Inflasi Kota	33
2.5. Program Pengendalian Inflasi Tahun 2026	39

BAB 3 • PEMBIAYAAN DAERAH, SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 43

3.1. Perkembangan Perbankan Secara Umum	45
3.1.1. Dana Pihak Ketiga (DPK)	45
3.1.2. Penyaluran Kredit	47
3.2. Ketahanan Sektor Korporasi	53
3.3. Ketahanan Sektor Perseorangan	55
3.4. Ketahanan Sektor UMKM	57

BAB 4 • PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 63

4.1. Sistem Pembayaran Tunai	65
4.1.1. Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah	65
4.1.2. Penanganan Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya	65
4.2. Sistem Pembayaran Non Tunai	66
4.2.1. Perkembangan Transaksi BI -Real Time Gross Settlement	66
4.2.2. Perkembangan Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia	67
4.2.3. Perkembangan Transaksi BI -FAST	67
4.2.4. Perkembangan Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	68
4.2.5. Perkembangan Transaksi Uang Elektronik	69
4.3. Perkembangan Layanan Keuangan Non Tunai	70
4.3.1. Perkembangan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)	70
4.3.2. Perkembangan Program Elektronifikasi Transaksi Keuangan	71
4.4. Perkembangan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR)	72

BAB 5 • KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN	79
5.1. Gambaran Umum	81
5.2. Ketenagakerjaan	81
5.3. Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan	84
5.3.1. Nilai Tukar Petani (NTP)	84
5.3.2. Perbandingan dengan NTP Provinsi Lain di Kalimantan	85
5.4. Inflasi Pedesaan	86
5.5. Profil Kemiskinan dan Pemerataan	87
5.6. Indeks Pembangunan Manusia	88

BAB 6 • PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH	91
6.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Dunia	93
6.2. Prospek Ekonomi Kalimantan Barat Tahun 2025	93
6.3. Prakiraan Inflasi Daerah Tahun 2025	96
6.4. Rekomendasi	97
DAFTAR ISTILAH	102
TIM PENYUSUN	104

• • • DAFTAR GRAFIK • • •

BAB 1 • Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Grafik 1.1.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat, Kalimantan, dan Nasional	3
Grafik 1.2.	Pemetaan Matriks Komponen PDRB Sisi Penawaran Triwulan I 2026	4
Grafik 1.3.	Penjualan Kendaraan Bermotor di Kalimantan Barat	5
Grafik 1.4.	Perkembangan Kredit Kendaraan dan Multiguna (% yoy) Prov. Kalimantan Barat	5
Grafik 1.5.	Perkembangan Penggunaan Kartu Kredit	5
Grafik 1.6.	Perkembangan Kredit Konsumsi di Kalimantan Barat	5
Grafik 1.7.	Komposisi ADHK PDRB LU Pertanian Kalimantan Barat	6
Grafik 1.8.	Perkembangan Produksi TBS Kelapa Sawit	6
Grafik 1.9.	Perkembangan Rata-Rata Harga TBS (Kelapa Sawit) Kalbar Triwulanan	7
Grafik 1.10.	Perkembangan Luas Lahan	7
Grafik 1.11.	Produksi Padi Kalimantan Barat	7
Grafik 1.12.	Produksi Beras Kalimantan Barat	7
Grafik 1.13.	Perkembangan Realisasi Kredit Sektor Pertanian	7
Grafik 1.14.	Produksi Bauksit	8
Grafik 1.15.	Perkembangan Realisasi Kredit Pertambangan	8
Grafik 1.16.	Produksi Alumina	9
Grafik 1.17.	Volume Ekspor Alumina Triwulanan	9
Grafik 1.18.	Produksi CPO Kalimantan Barat	10
Grafik 1.19.	Kredit Industri Pengolahan	10
Grafik 1.20.	Ekspor CPO Kalimantan Barat	10
Grafik 1.21.	Impor Material Konstruksi	10
Grafik 1.22.	Kredit LU Konstruksi	10
Grafik 1.23.	Pemetaan Matriks Komponen PDRB Sisi Permintaan Triwulan II 2026	11
Grafik 1.24.	Perkembangan Kunjungan Wisman ke Kalimantan Barat	12
Grafik 1.25.	Jumlah Kedatangan Orang di Bandara	12
Grafik 1.26.	Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja	12
Grafik 1.27.	Perkembangan NTP	12
Grafik 1.28.	Perkembangan NTP Subkategori	13
Grafik 1.29.	Indeks Keyakinan Konsumen Pontianak	13
Grafik 1.30.	Persentase Realisasi Belanja APBD Pemprov + Kab/Kota & APBN Kalimantan Barat	14
Grafik 1.31.	Perkembangan Realisasi PMDN	14
Grafik 1.32.	Perkembangan Realisasi PMA	14
Grafik 1.33.	Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor	15

Grafik 1.34.	Perbandingan Proporsi Nilai Ekspor Komoditas	15
Grafik 1.35.	Perbandingan Proporsi Nilai Ekspor Komoditas	15
Grafik 1.36.	Perkembangan Nilai Ekspor Alumina (SITC)	15
Grafik 1.37.	Perkembangan Nilai Ekspor Minyak Kelapa Sawit (SITC)	16
Grafik 1.38.	Perkembangan Nilai Ekspor Bauksit (SITC)	16
Grafik 1.39.	Perkembangan Volume dan Nilai Impor	17
Grafik 1.40.	Perkembangan Nilai Impor Barang Bahan Baku	17
Grafik 1.41.	Perkembangan Nilai Impor Barang Modal	17
Grafik 1.42.	Perkembangan Komposisi Komponen Impor	17
Grafik 1.43.	Perkembangan Nilai Impor Barang Konsumsi	17
Grafik 1.44.	Impor Material Konstruksi	17
Grafik 1.45.	Tren Harga Alumina dan Aluminium Global	18
Grafik 1.46.	Biaya Produksi Alumina	19
Grafik 1.47.	Prospek investasi hilirisasi alumina di Kalimantan Barat hingga tahun 2029	19

BAB 2 • Perkembangan Inflasi Daerah

Grafik 2.1.	Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional	23
Grafik 2.2.	Laju Inflasi Antar Provinsi di Kalimantan dan Nasional s.d. Triwulan II 2026	23
Grafik 2.3.	Perkembangan Inflasi Kabupaten/Kota Sampel Kalimantan Barat	25
Grafik 2.4.	Pergerakan Inflasi Bulanan Kab/Kota Sampel Inflasi di Kalimantan Barat	34
Grafik 2.5.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kab/Kota Sampel Inflasi di Kalimantan Barat	34

BAB 3 • Pembiayaan Daerah, Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Grafik 3.1.	Perkembangan Jenis DPK Perbankan	45
Grafik 3.2.	Perkembangan SBT DPK Perbankan	45
Grafik 3.3.	Posisi Valuta DPK Perbankan TW III 2025 (Rp triliun)	46
Grafik 3.4.	Perkembangan DPK Perbankan Berdasarkan Kegiatan Bank	46
Grafik 3.5.	Pangsa DPK berdasarkan Golongan Nasabah	47
Grafik 3.6.	Pertumbuhan Penghimpunan DPK Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	47
Grafik 3.7.	Persentase Lokasi Bank Asal Penyalur Kredit berdasarkan Jumlah Penyaluran Kredit di Kalimantan Barat	49
Grafik 3.8.	Lokasi Penyaluran Kredit oleh Perbankan Asal Kalimantan Barat	49

• • • DAFTAR GRAFIK • • •

Grafik 3.9. Jenis Kredit Perbankan di Kalimantan Barat	50	Grafik 3.32. Pangsa Pembiayaan UMKM Kalbar Berdasarkan Lapangan Usaha	58
Grafik 3.10. Suku Bunga Tertimbang (SBT) Kredit Perbankan di Kalimantan Barat	50	Grafik 3.33. Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Kategori Debitur	59
Grafik 3.11. Perkembangan LDR dan Rasio NPL Perbankan	51	Grafik 3.34. Perkembangan NPL Kredit UMKM	59
Grafik 3.12. Perkembangan Rasio NPL Perbankan Berdasarkan Jenis Penggunaan	51	Grafik 3.35. Perkembangan NPL Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha	59
Grafik 3.13. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Berdasarkan Kegiatan Bank	53		
Grafik 3.14. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan	53	BAB 4 • Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah	
Grafik 4.15. Perkembangan <i>Non Performing Finance</i> (NPF) Pembiayaan Syariah	53	Grafik 4.1. Perkembangan <i>Inflow-Outflow</i> di KPwBI Prov. Kalimantan Barat	65
Grafik 3.16. Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Ekonomi Utama	54	Grafik 4.2. Perkembangan temuan UPAL di Kalimantan Barat	65
Grafik 3.17. Komposisi Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor Ekonomi	54	Grafik 4.3. Perbandingan Kontributor temuan UPAL di Kalimantan Barat pada TW II 2025 & 2026	65
Grafik 3.18. Penyaluran Kredit kepada Sektor Korporasi di Kalimantan Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan	54	Grafik 4.4. Perkembangan Volume Transaksi BI-RTGS di Kalimantan Barat	66
Grafik 3.19. NPL Kredit kepada Sektor Korporasi di Kalimantan Barat	55	Grafik 4.5. Perkembangan Nominal Transaksi BI-RTGS di Kalimantan Barat	66
Grafik 3.20. Perkembangan Jenis DPK Korporasi Kalimantan Barat	55	Grafik 4.6. Perkembangan Volume Transaksi SKNBI di Kalimantan Barat	67
Grafik 3.21. Perkembangan DPK Sektor Korporasi pada KC/KCP di Kalimantan Barat Berdasarkan Golongan Pemilik	55	Grafik 4.7. Perkembangan Nominal Transaksi SKNBI di Kalimantan Barat	67
Grafik 3.22. Pangsa DPK Sektor Korporasi pada KC/KCP di Kalimantan Barat Berdasarkan Golongan Pemilik	55	Grafik 4.8. Perkembangan Volume Transaksi BI-FAST di Kalimantan Barat	67
Grafik 3.23. Pertumbuhan DPK Perseorangan Berdasarkan Jenis Penempatan	56	Grafik 4.9. Perkembangan Nominal Transaksi BI-FAST di Kalimantan Barat	67
Grafik 3.24. Perkembangan Kredit Perseorangan	57	Grafik 4.10. Perkembangan volume transaksi Kartu Debit di Kalimantan Barat	68
Grafik 3.25. Nominal dan NPL Kartu Kredit Perseorangan	57	Grafik 4.11. Perkembangan nominal transaksi Kartu Debit di Kalimantan Barat	68
Grafik 3.26. Perkembangan Rasio NPL Kredit Perseorangan Berdasarkan Jenis Penggunaan	57	Grafik 4.12. Perbandingan Pangsa Penggunaan Kartu Debit di Kalimantan Barat pada TW II 2025 & 2026	68
Grafik 3.27. Pertumbuhan Nominal Kartu Kredit Perseorangan	57	Grafik 4.13. Perkembangan volume transaksi Kartu Kredit di Kalimantan Barat	68
Grafik 3.28. Pembiayaan UMKM Kalbar Berdasarkan Jenis Penggunaan	57	Grafik 4.14. Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit di Kalimantan Barat	68
Grafik 3.29. Perkembangan Pembiayaan UMKM	58	Grafik 4.15. Perbandingan Pangsa Penggunaan Kartu Kredit di Kalimantan Barat pada TW II 2025 & 2026	69
Grafik 3.30. Pangsa Pembiayaan UMKM Kalbar berdasarkan Jenis Penggunaan	58	Grafik 4.16. Perkembangan Volume Transaksi UE di Kalimantan Barat	69
Grafik 3.31. Pendorong Pertumbuhan Pembiayaan UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha	58	Grafik 4.17. Perkembangan Nominal Transaksi UE di Kalimantan Barat	69

• • • DAFTAR GRAFIK • • •

Grafik 4.19. Perkembangan Posisi <i>Merchant</i> QRIS di Kalimantan Barat	70
Grafik 4.20. Pangsa Kategori <i>Merchant</i> Pengguna QRIS di Kalimantan Barat	70
Grafik 4.21. Persebaran Jumlah <i>Merchant</i> QRIS secara Spasial di Kalimantan Barat	70
Grafik 4.22. Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Kalimantan Barat	71
Grafik 4.23. Perkembangan Nominal Transaksi QRIS di Kalimantan Barat	71
Grafik 4.24. Perkembangan Posisi Pengguna QRIS di Kalimantan Barat	71
Grafik 4.25. Transaksi Valuta Asing di Prov. Kalimantan Barat	72
Grafik 4.26. Transaksi Valuta Asing di Prov. Kalimantan Barat	72
Grafik 4.27. Perkembangan Frekuensi Transaksi <i>Incoming & Outgoing</i> PJP LR di Kalimantan Barat	73
Grafik 4.28. Perkembangan Nominal Transaksi <i>Incoming & Outgoing</i> PJP LR di Kalimantan Barat	73
Grafik 4.29. Perkembangan Frekuensi Transaksi Domestik PJP LR di Kalimantan Barat	73
Grafik 4.30. Perkembangan Nominal Transaksi Domestik PJP LR di Kalimantan Barat	73
Grafik 4.31. Perkembangan Frekuensi Transaksi Domestik PJP LR di Kalimantan Barat	74
Grafik 4.32. Perkembangan Nominal Transaksi Domestik PJP LR di Kalimantan Barat	74

BAB 5 • Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Grafik 5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Barat	82
Grafik 5.2. Tingkat Pertumbuhan Indikator Ketenagakerjaan	82
Grafik 5.3. Perkembangan Tingkat Penyerapan Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Barat dan Nasional	83
Grafik 5.4. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Barat dan Nasional	83
Grafik 5.5. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Formal dan Informal	84
Grafik 5.6. Perkembangan NTP Kalimantan Barat	84
Grafik 5.7. Perkembangan NTP Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Klasifikasi Subsektor	85
Grafik 5.8. Pergerakan NTP Antar Provinsi di Kalimantan	86
Grafik 5.9. Perbandingan Inflasi Pedesaan Kalimantan Barat dan Nasional (mtm)	87
Grafik 5.10. Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kalimantan dan Nasional	87
Grafik 5.11. Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Barat	87
Grafik 5.12. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kalimantan Barat	88
Grafik 5.13. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat dan Nasional	88
Grafik 5.14. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Kalimantan Barat	89

DAFTAR TABEL

BAB 1 • Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Tabel 1.1.	Nominal ADHK PDRB s/d. Triwulan II 2026 Wilayah Kalimantan dan Nasional	3
Tabel 1.2.	Pertumbuhan PDRB s.d. Triwulan I 2026 Sisi Penawaran	4
Tabel 1.3.	Pertumbuhan PDRB s.d. Triwulan II 2026 Sisi Permintaan	11

BAB 2 • Perkembangan Inflasi Daerah

Tabel 2.1.	Perkembangan Inflasi Tahunan (yoy) Kalimantan Barat Berdasarkan Kelompok	24
Tabel 2.2.	Perkembangan Andil Inflasi Tahunan (yoy) Kalimantan Barat Berdasarkan Kelompok	24
Tabel 2.3.	Perkembangan Inflasi Bulanan (mtm)	28
Tabel 2.4.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan (mtm)	28
Tabel 2.5.	Perkembangan Inflasi Tahunan (yoy)	30
Tabel 2.6.	Perkembangan Andil Inflasi Tahunan (yoy)	31
Tabel 2.7.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Tahunan (yoy)	31
Tabel 2.8.	Perkembangan Inflasi Kab/Kota Sampel Inflasi di Provinsi Kalimantan Barat (yoy)	35
Tabel 2.9.	Andil Inflasi Tahunan Kab/Kota Sampel Inflasi di Kalimantan Barat	36
Tabel 2.10.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan di Kab/Kota Sampel Inflasi (mtm)	38

BAB 3 • Pembiayaan Daerah, Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Tabel 3.1.	Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)* (Rp triliun)	45
Tabel 3.2.	Perkembangan Nominal DPK Kalimantan Barat Per Kabupaten/Kota (Rp Triliun)	47
Tabel 3.3.	Perkembangan Kredit Perbankan di Kalimantan (Rp Triliun)	48
Tabel 3.4.	Perkembangan Nominal Kredit Berdasarkan Kabupaten/Kota (Rp Miliar)	52
Tabel 3.5.	Perkembangan NPL Berdasarkan Kabupaten/Kota	52

BAB 5 • Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tabel 5.1.	Indikator Ketenagakerjaan (Ribu jiwa)	82
Tabel 5.2.	Persentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha (Ribu Jiwa)	83
Tabel 5.3.	Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Status Utama Pekerja (Ribu Jiwa)	84
Tabel 5.4.	Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Barat	85
Tabel 5.5.	Perbandingan NTP dengan Provinsi Lain di Kalimantan dan Nasional	86
Tabel 5.6.	Perkembangan Inflasi Pedesaan	87
Tabel 5.7.	IPM Provinsi Wilayah Kalimantan 2020-2025	89
Tabel 5.8.	Perkembangan IPM Kalimantan Barat berdasarkan komponennya	89

RINGKASAN UMUM

LAPORAN PEREKONOMIAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

AGUSTUS 2026

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan II 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 5,61% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 6,14% (yoy).

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan II 2026 terutama ditopang oleh kinerja lapangan usaha industri pengolahan, pertanian, serta perdagangan. Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan andil pertumbuhan masing-masing sebesar 1,36% (yoy), 1,23% (yoy), dan 0,95% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan II 2026 ditopang utamanya oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang masing-masing memberikan andil sebesar 2,17% (yoy) dan 1,92% (yoy).

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Kalimantan Barat pada triwulan II 2026 meningkat menjadi 3,28% (yoy) dari 2,89% (yoy) pada akhir triwulan I 2026, namun tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ serta lebih rendah dibandingkan inflasi nasional dan regional Kalimantan. Peningkatan inflasi terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau; transportasi; serta perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan komoditas utama meliputi emas perhiasan, beras, bahan bakar rumah tangga, ikan baung, dan angkutan udara. Secara bulanan, tekanan inflasi melandai dari 0,57% (mtm) pada April menjadi 0,32% (mtm) pada Mei dan 0,31% (mtm) pada Juni, disertai pergeseran sumber tekanan dari pangan menuju energi dan transportasi. Secara spasial, inflasi meningkat di seluruh wilayah sampel Indeks Harga Konsumen (IHK), dengan inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Sintang, diikuti Kabupaten Ketapang. Keduanya berada sedikit di atas batas atas sasaran inflasi nasional. Untuk menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Barat terus memperkuat strategi 4K melalui keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, yang turut didukung oleh akselerasi program Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS).

Pembiayaan Daerah, Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kredit perbankan wilayah Kalimantan Barat tumbuh sebesar 17,77% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,97% (yoy). Sementara itu, pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 11,57% (yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya 8,91% (yoy). Pertumbuhan kredit segmen UMKM tercatat 1,56% (yoy), mengalami pelemahan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,83% (yoy). Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan Kalimantan Barat tumbuh 9,13% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 9,98% (yoy), yang didorong oleh perlambatan jenis pertumbuhan DPK giro dan DPK deposito. Selain itu, risiko kredit bermasalah di Kalimantan Barat mengalami perbaikan dengan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) sebesar 1,70%, mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya 1,75%, jauh di bawah *threshold* 5%.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Peredaran uang kartal di Provinsi Kalimantan Barat pada Triwulan II 2026 mengalami kondisi *net-inflow* didorong oleh *base effect* besaran *inflow* akibat arus balik pasca Idul Fitri serta pergeseran pola transaksi masyarakat Kalimantan Barat dari uang tunai menuju pembayaran digital sejalan dengan terus meningkatnya volume transaksi QRIS di Kalimantan Barat.

Kinerja sistem pembayaran nontunai di Provinsi Kalimantan Barat secara umum tumbuh stabil. Transaksi nilai besar melalui SKNBI dan BI-RTGS meningkat di Triwulan II 2026, sama halnya dengan transaksi retail non tunai masih menunjukkan persistensi pertumbuhan. Transaksi melalui BI-FAST, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) (a.l. kartu debit dan kartu kredit), dan UE (uang elektronik) masih mencatatkan pertumbuhan dua digit baik dan didominasi kegiatan belanja masyarakat.

Implementasi elektronifikasi transaksi keuangan di Kalimantan Barat terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hingga akhir Triwulan II 2026, jumlah *merchant* QRIS, pengguna, dan volume transaksi tumbuh secara akseleratif. Bank Indonesia melakukan berbagai inisiatif untuk mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), antara lain implementasi QRIS dinamis melalui platform pemerintah daerah yang sudah diimplementasikan di Kota Pontianak (E-Ponti), Kota Singkawang (SIGAP), Kab. Sambas (E-Pakatan), Kab. Landak (SAPALA), Kab. Mempawah (Si Perjaka), Provinsi Kalbar (Samsat)

Aktivitas transaksi antar negara menunjukkan sedikit terkoreksi di triwulan II 2026 secara tahunan. Hal ini tercermin dari penurunan transaksi jual/beli Uang Kertas Asing (UKA) dan transaksi *incoming-outgoing* melalui Layanan Remitansi, menunjukkan adanya moderasi aktivitas lintas negara.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat relatif stabil. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026 tercatat sebesar 4,46%, menurun 0,11% dibandingkan Februari 2026. Rasio kemiskinan pada Maret 2026 tercatat 5,78%, menurun sebesar 0,19% dibandingkan September 2025. Sejalan dengan itu, jumlah penduduk miskin Kalimantan Barat pada Maret 2026 mengalami penurunan sebanyak 9.17 ribu orang atau turun 0,03% dibandingkan September 2025.

Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 176,87 mengalami peningkatan 2,5% (qtq) dibandingkan Triwulan I 2026. Peningkatan ini mengindikasikan adanya peningkatan terhadap daya beli petani. Pada periode tersebut, indeks harga yang diterima petani (It) tercatat sebesar 225,61, sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 127,56.

Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian global tahun 2026 diperkirakan melambat menjadi 3,0%, di tengah ketidakpastian pasar keuangan yang tinggi dan divergensi pertumbuhan antarnegara. Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi global terutama dipengaruhi oleh berlanjutnya perang Timur Tengah dan tensi geopolitik. Harga minyak dan komoditas dunia meningkat tinggi diikuti dengan disrupsi rantai pasok perdagangan antarnegara yang semakin dalam. Dari sisi keuangan global, ruang penurunan *Fed Fund Rate* (FFR) masih terbuka, namun *yield US Treasury* tenor panjang tetap tinggi karena risiko desifit fiskal AS, mendorong aliran modal ke *emerging markets* secara selektif.

Perekonomian Kalimantan Barat tahun 2026 diperkirakan tumbuh di kisaran 4,90 – 5,70% (yoy) dan inflasi yang terjaga. Perekonomian Kalbar didukung oleh kinerja lapangan usaha utama, seperti industri pengolahan dan pertanian, diimbangi dengan tingkat konsumsi masyarakat yang diperkirakan masih terjaga. Sementara itu, secara keseluruhan tahun 2026, inflasi di Kalimantan Barat diperkirakan stabil terjaga pada rentang sasaran target inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

TABEL INDIKATOR MAKROEKONOMI

Indikator	2024				2025				2026	
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II
Ekonomi Makro Regional										
Produk Domestik Regional Bruto (% yoy)	4.98	4.76	4.87	4.98	5.00	5.59	5.31	5.62	6,14	5,61
Berdasarkan Sektor (%-YoY) :										
- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.11	3.42	2.57	1.81	3.02	2.67	2.95	0,06	1,37	5,89
- Pertambangan dan Penggalian	-9.64	-1.26	3.74	16.66	14.94	39.24	33.96	32,60	34,14	10,60
- Industri Pengolahan	4.67	3.99	4.44	-0.04	3.31	3.31	5.99	1,40	3,16	9,00
- Pengadaan Listrik dan Gas	7.13	8.54	7.43	6.57	3.19	2.90	4.03	7,34	5,47	12,71
- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.95	6.76	-1.15	0.17	0.81	1.01	1.24	-1,08	1,31	1,89
- Konstruksi	5.80	5.75	6.45	0.60	5.24	12.13	9.96	7,85	5,92	5,38
- Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.03	5.98	5.66	10.52	7.66	3.94	2.31	6,40	9,58	6,11
- Transportasi dan Pergudangan	6.56	2.09	3.17	8.38	10.74	1.41	1.96	6,25	9,00	2,52
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.27	8.00	4.32	3.53	2.57	2.89	1.79	5,59	12,20	11,11
- Informasi dan Komunikasi	7.95	5.62	6.41	7.57	6.61	6.41	6.62	7,29	4,81	-0,47
- Jasa Keuangan dan Asuransi	4.13	5.92	7.17	2.36	2.01	3.27	0.48	9,48	3,12	1,50
- Real Estate	6.89	9.75	9.42	9.93	3.51	1.87	3.86	6,53	6,02	6,79
- Jasa Perusahaan	9.27	2.10	5.39	7.60	9.56	3.58	2.34	-0,33	2,18	-1,15
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.39	6.77	7.10	7.65	0.18	-0.79	1.17	8,24	6,09	3,42
- Jasa Pendidikan	9.45	8.44	6.29	14.18	3.41	-0.96	0.15	3,18	5,41	2,58
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14.51	2.10	4.66	2.29	6.08	8.39	2.15	4,30	1,27	2,57
- Jasa lainnya	6.15	7.19	2.36	9.30	10.43	9.11	6.82	4,57	2,20	-0,08
Berdasarkan Permintaan (%-YoY) :										
- Konsumsi Rumah Tangga	5.20	5.11	5.08	5.11	5.19	5.44	5.05	5,15	5,73	4,17
- Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	29.63	7.97	3.33	0,25	-0.21	10.47	11.57	5,44	9,98	2,08
- Konsumsi Pemerintah	5.98	4.53	8.79	9.90	-0.61	-0.31	5.30	12,49	28,95	17,55
- PMTB	10.01	6.23	9.10	4,18	-1.14	8.60	10.66	8,21	7,23	6,18
- Ekspor	-11.55	19.46	37.42	69.57	54.37	54.76	27.51	-2,81	3,38	10,63
- Impor	53.51	72.20	83.19	106.84	49.40	104.24	37.93	4,75	13,61	12,73
Indeks Harga Konsumen (IHK)*										
- Provinsi Kalimantan Barat	105.84	106.43	106.00	106,82	106.83	107.71	108.06	108.80	109.92	111,24
- Kota Pontianak	105.44	106.10	105.74	106,33	105.84	107.08	107.32	107.92	108.81	110,33
- Kota Singkawang	105.67	105.87	105.74	106,18	106.62	107.17	107.40	108.20	109.49	110,31
- Kabupaten Sintang	105.19	105.64	105.59	106,30	106.54	106.99	107.47	108.45	109.88	110,96
- Kabupaten Ketapang	106.76	107.40	106.63	108,06	108.62	109.15	109.63	110.49	111.90	113,19
- Kabupaten Kayong Utara	105.86	106.53	106.07	106,73	107.16	107.87	108.54	109.44	110.44	111,41
*Data IHK menggunakan Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 mulai dari Triwulan I 2024										
Laju Inflasi Tahunan (%yoy)*										
- Provinsi Kalimantan Barat	2.51	2.28	1.79	1.71	0.94	1.20	1.94	1.85	2.89	3,28
- Kota Pontianak	2.31	1.98	1.73	1.58	0.38	0.92	1.49	1.50	2.81	3,04
- Kota Singkawang	2.69	1.51	1.45	1.57	0.90	1.23	1.57	1.90	2.69	2,93
- Kabupaten Sintang	2.60	2.15	2.29	1.98	1.28	1.28	1.78	2.02	3.13	3,71
- Kabupaten Ketapang	2.75	2.99	1.83	1.88	1.74	1.63	2.81	2.25	3.02	3,70
- Kabupaten Kayong Utara	2.66	2.98	2.08	2.21	1.23	1.26	2.33	2.54	3.06	3,28
*Data Inflasi Tahunan menggunakan Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 mulai dari Triwulan I 2024										

TABEL INDIKATOR MAKROEKONOMI

Indikator	2024				2025				2026	
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II
Stabilitas Keuangan Daerah										
Perbankan Secara Umum (Rp Miliar)										
Aset (Berdasarkan Lokasi Bank)	105,135	109,129	110,383	109,634	110,442	112,407	113,981	114,534	116,558	118,175
Dana Pihak Ketiga (Berdasarkan Lokasi Bank)	79,161	81,653	82,759	81,248	82,183	84,996	87,272	88,200	90,385	92,204
Kredit (Berdasarkan Lokasi Bank)	94,553	95,520	96,487	99,095	97,204	97,828	98,452	105,856	106,891	115,211
Kredit Korporasi (Rp Miliar)	41,004	41,077	40,916	42,327	40,059	40,392	40,359	46,777	47,408	54,697
- Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	27,420	27,421	27,247	26,973	26,089	25,849	25,863	26,279	25,534	26,795
- Pertambangan dan Penggalian	605	472	381	378	449	505	457	364	326	897
- Industri Pengolahan	3,619	3,603	3,596	4,952	3,473	3,597	3,497	3,867	4,107	7,838
- Listrik, Gas dan Air Bersih	188	182	179	171	163	159	151	5,444	6,303	7,938
- Bangunan	1,113	1,201	1,157	1,185	1,144	1,160	1,207	1,294	1,260	1,181
- Perdagangan, Hotel, dan Restoran	4,655	4,627	4,932	4,969	4,917	5,026	4,866	4,857	5,010	5,273
- Pengangkutan dan Komunikasi	1,813	2,036	1,920	2,029	2,058	2,378	2,563	2,874	3,138	3,234
	8,268	8,238	9,777	10,623	9,101	8,647	10,331	11,875	10,103	10,103
- Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1,452	1,369	1,335	1,494	1,602	1,533	1,565	1,491	1,385	1,322
- Jasa-Jasa	127	156	161	165	159	181	182	301	304	216
- Lainnya	12	9	7	5	4	5	4	2	2	3
Kredit Perseorangan (Rp Miliar)	53,292	54,236	55,488	56,319	56,736	57,043	57,737	58,649	59,057	59,743
- Modal Kerja	13,329	13,247	13,236	12,979	12,872	12,942	12,884	12,638	12,652	12,971
- Investasi	6,445	6,679	6,811	70,486	7,042	7,024	7,098	7,615	7,724	7,967
- Konsumsi / Sektor Rumah Tangga	33,518	34,309	35,441	36,292	36,822	37,078	37,754	38,396	38,681	38,805
Kredit Rumah Tangga (Rp Miliar)	33,518	34,309	34,891	36,291	36,822	36,556	37,754	38,396	38,681	38,805
- Perumahan	9,464	9,626	9,702	9,807	10,152	10,306	10,603	10,940	11,109	11,385
- Ruko/Rukan	571	583	580	581	582	572	572	573	557	559
- Kendaraan	2,551	2,543	2,626	2,644	2,622	2,568	2,467	2,311	2,247	2,254
- Peralatan	338	367	388	410	415	428	428	445	466	482
- Multiguna	18,581	18,995	19,225	20,279	20,441	20,042	20,993	21,335	21,476	21,244
- Lainnya	2,014	2,196	2,370	2,570	2,610	2,639	2,690	2,791	2,826	2,881
Kredit UMKM (Rp Miliar)	29,104	29,099	29,649	29,827	29,611	29,875	29,544	29,767	30,449	30,342
- Mikro	10,975	11,065	11,199	11,271	11,060	11,107	10,882	10,897	11,723	11,679
- Kecil	10,303	10,452	10,980	10,991	11,030	11,234	11,399	11,219	10,494	10,654
- Menengah	7,826	7,582	7,470	7,566	7,522	7,534	7,263	7,650	8,232	8,008
NPL Umum (%)	1.73	2.05	2.03	1.94	2.12	2.24	1.95	1.71	1.75	1.70
NPL Korporasi (%)	1.33	1.77	1.67	1.55	1.68	1.73	1.26	1.07	1.05	0.89
NPL Rumah Tangga (%)	0.90	0.95	0.98	0.98	1.08	1.17	1.21	1.17	1.22	1.29
NPL UMKM (%)	2.63	3.12	3.03	2.75	3.15	3.43	3.20	2.83	2.82	2.91
Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah										
Kliring										
- Volume (lembar)	112,566	119,611	129,345	145,032	104,685	116,813	128,224	156,764	94,708	114,631
- Nominal (Rp miliar)	6,055	5,947	6,561	6,688	6,040	5,922	6,473	7,365	6,179	5,787
RTGS										
- Volume (lembar)	8,268	8,238	9,777	10,623	9,101	8,647	10,331	11,875	10,103	10,031
- Nominal (Rp miliar)	31,674	35,644	52,101	62,297	46,556	35,461	43,019	60,000	56,038	43,164
Tunai (Rp Miliar)										
- Inflow	3,751	3,344	1,877	867	2,464	2,992	977,07	213,21	691	2,250
- Outflow	-2,377	-3,585	-2,597	-5,660	-2,844	-1,927	-3,655	-5,913	-821	-1,668
- Netflow	1,373	-241	-720	-4,793	-380	1,066	-2,678	-5,700	-130	583



Halaman ini sengaja dikosongkan



Bab 1

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah



Pertumbuhan Ekonomi

Triwulan II 2026

5,61%

Triwulan I 2026
6,14%

Triwulan II 2025
5,59%

Investasi

Triwulan II 2026

6,18%

Triwulan I 2026
7,23%

Triwulan II 2025
8,60%

Konsumsi Rumah Tangga

Triwulan II 2026

4,17%

Triwulan I 2026
5,73%

Triwulan II 2025
5,44%

Ekspor

Triwulan II 2026

10,63%

Triwulan I 2026
3,38%

Triwulan II 2025
54,76%

Konsumsi Pemerintah

Triwulan II 2026

17,55%

Triwulan I 2026
28,95%

Triwulan II 2025
- 0,31%



Perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan II 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 5,61% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 6,14% (yoy).

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan II 2026 terutama ditopang oleh kinerja lapangan usaha industri pengolahan, pertanian, serta perdagangan. Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan andil pertumbuhan masing-masing sebesar 1,36%, 1,23%, dan 0,95%.

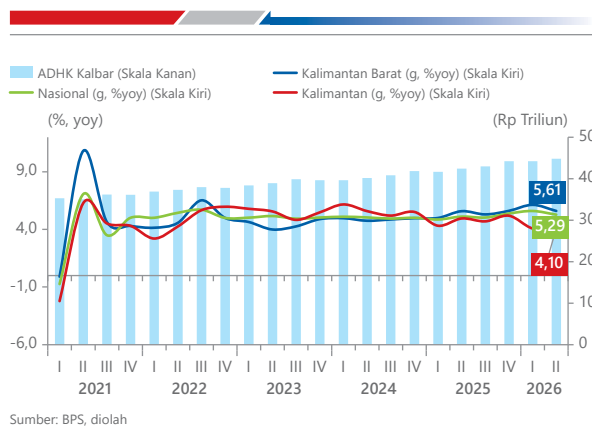
Dari sisi pengeluaran, perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan II 2026 ditopang utamanya oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan PMTB yang masing – masing memberikan andil sebesar 2,17% dan 1,92%.



1.1. KONDISI UMUM

Ekonomi Kalimantan Barat mengalami perlambatan pada triwulan II 2026. Pada periode ini, perekonomian Kalbar tumbuh sebesar 5,61% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 6,14% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kawasan Kalimantan yang sebesar 4,10% (yoy), serta pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada level 5,29% (yoy).

Pada triwulan II 2026, ekonomi Provinsi Kalimantan Barat berkontribusi sebesar 17,06% terhadap total perekonomian kawasan Kalimantan, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat 15,58%. Di sisi lain, perekonomian kawasan Kalimantan memberikan sumbangan sebesar 8,15% terhadap perekonomian nasional pada triwulan II 2026, lebih rendah dibandingkan kontribusi pada triwulan sebelumnya yang tercatat 8,23%.



Grafik 1.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat, Kalimantan, dan Nasional

Tabel 1.1. Nominal ADHK PDRB s/d. Triwulan II 2026 Wilayah Kalimantan dan Nasional

PDRB (Rp miliar)	2025				2025	2026	
	I	II	III	IV		I	II
Kalimantan Barat	41.655	42.464	42.997	44.215	171.331	44.213	44.847
Kalimantan Tengah	29.698	30.443	30.928	33.310	124.379	30.825	31.519
Kalimantan Selatan	38.246	41.344	42.690	42.678	164.958	40.416	43.525
Kalimantan Timur	144.698	147.962	149.271	154.729	596.661	149.021	152.919
Kalimantan Utara	18.344	18.856	19.265	20.004	76.469	19.304	19.792
Kalimantan	272.641	281.068	285.151	294.937	1.133.797	283.778	292.601
Nasional	3.322.543	3.423.021	3.465.069	3.523.635	13.734.267	3.447.683	3.576.209

Sumber: BPS, diolah

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan II 2026 terutama ditopang oleh kinerja lapangan usaha, pertanian, dan perdagangan. Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan andil pertumbuhan masing – masing 1,36%, 1,23%, dan 0,95%. Sementara itu, berdasarkan kontribusi terhadap struktur ekonomi, perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan yang sama didominasi oleh lapangan usaha pertanian (20,96%), industri pengolahan (16,27%), perdagangan (14,31%), dan konstruksi (12,63%). Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor dan konsumsi rumah tangga menjadi pendorong utama pertumbuhan, dengan andil masing – masing sebesar 2,76% dan 2,17%. Kondisi ini mencerminkan akselerasi aktivitas ekspor komoditas daerah dan daya beli masyarakat yang relatif terjaga.

1.2. PERKEMBANGAN EKONOMI SISI PENAWARAN: LAPANGAN USAHA (LU)

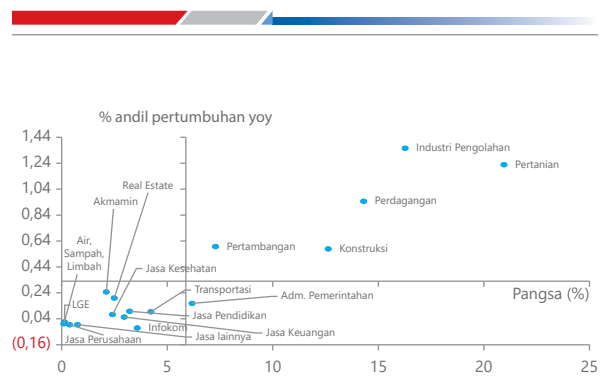
Dari sisi penawaran, kinerja LU triwulan II 2026 melanjutkan pertumbuhan positif pada hampir seluruh komponen lapangan usaha.

Pada triwulan II 2026, berdasarkan pemetaan matriks komponen sisi penawaran, terhadap 5 (lima) LU berada pada kuadran kanan atas, yaitu LU Industri Pengolahan, Pertanian Perdagangan, Konstruksi, dan Pertambangan (Grafik 1.2). Kuadran tersebut didefinisikan sebagai klasifikasi LU yang memiliki

pangsa terhadap perekonomian yang cukup besar¹ dengan tingkat andil pertumbuhan tahun (*year-on-year/yoy*) di atas rata-rata. Sedangkan beberapa LU lainnya masih berada pada kuadran kiri bawah, menunjukkan andil pertumbuhan dan pangsa terhadap perekonomian yang masih terbatas. Adapun pembahasan lebih detail terkait posisi masing-masing LU utama pada dinamika PDRB Kalimantan Barat akan dipaparkan pada bagian berikut ini.

1.2. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh 6,11% (yoy) pada triwulan II 2026. Kinerja tersebut tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,20% (yoy). Kendati demikian, perlambatan ini masih ditopang oleh besarnya ukuran sektor perdagangan dalam struktur perekonomian Kalimantan Barat sehingga masih memberikan andil pertumbuhan sebesar 0,95% dari total pertumbuhan ekonomi Kalbar. Selain itu, LU ini tetap bertahan pada



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.2. Pemetaan Matriks Komponen PDRB Sisi Penawaran Triwulan I 2026

kuadran kanan atas, menggambarkan konsistensi kinerja aktivitas ekonomi perdagangan yang tetap menjadi penopang penting bagi perekonomian daerah mengingat perannya sebagai *intermediary sector* dalam aliran barang dan jasa. Dalam konteks *input – output* dari LU primer dan sekunder (pertanian, industri pengolahan, dan pertambangan), serta pemberi *input* dari LU tersier (akomodasi makan –

Tabel 1.2. Pertumbuhan PDRB s.d. Triwulan I 2026 Sisi Penawaran

Lapangan Usaha	2025				2026		TW I 2026		TW II 2026	
	I	II	III	IV	I	II	Pangsa	Andil Pertumbuhan (%)	Pangsa	Andil Pertumbuhan (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,02	2,67	2,95	0,06	1,37	5,89	22,64	0,38	20,96	1,23
Pertambangan dan Penggalian	14,94	39,24	33,96	32,60	34,14	10,60	7,07	1,56	7,29	0,60
Industri Pengolahan	3,31	3,31	5,99	1,40	3,16	8,98	15,29	0,48	16,27	1,36
Listrik, Gas dan Es	3,19	2,90	4,03	7,34	5,47	12,70	0,12	0,01	0,13	0,02
Air, Sampah, Limbah	0,81	1,01	1,24	-1,08	1,31	1,89	0,11	0,00	0,10	0,00
Konstruksi	5,24	12,13	9,96	7,85	5,92	5,40	11,57	0,59	12,63	0,58
Perdagangan Besar dan Eceran	7,66	3,94	2,31	6,40	9,58	6,11	14,09	1,38	14,31	0,95
Transportasi dan Pergudangan	10,74	1,41	1,96	6,25	9,00	2,52	4,45	0,33	4,23	0,09
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	2,57	2,89	1,79	5,59	12,20	11,29	2,18	0,27	2,12	0,25
Informasi dan Komunikasi	6,61	6,41	6,62	7,29	4,81	-0,47	3,87	0,31	3,58	-0,03
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,01	3,27	0,48	9,48	3,12	1,50	3,00	0,11	2,96	0,05
Real Estate	6,08	1,87	3,86	6,53	6,02	6,79	2,54	0,18	2,49	0,20
Jasa Perusahaan	9,56	3,58	2,34	-0,33	2,18	-1,15	0,39	0,01	0,38	-0,01
Administrasi Pemerintahan	0,18	-0,79	1,17	8,24	6,09	3,42	6,28	0,28	6,18	0,16
Jasa Pendidikan	3,41	-0,96	0,15	3,18	5,41	2,58	3,20	0,20	3,22	0,10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,51	8,39	2,15	4,30	1,27	2,57	2,42	0,04	2,41	0,07
Jasa lainnya	10,43	9,11	6,82	4,57	2,20	-0,43	0,79	0,02	0,75	0,00

Sumber: BPS, diolah

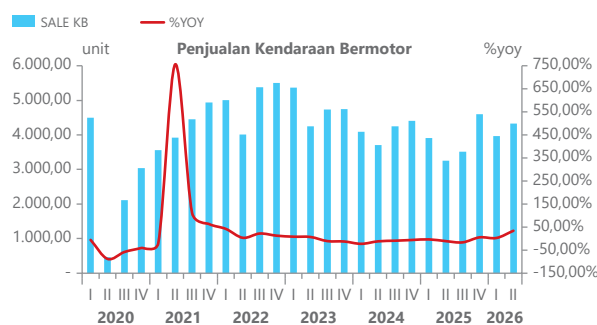
1. *Threshold* yang digunakan dalam pemetaan matriks adalah 0,36% sebagai batas pada andil pertumbuhan ekonomi daerah dan 5,88% sebagai batas pada pangsa komponen PDRB. Penentuan batas threshold yang digunakan merupakan rata-rata andil pertumbuhan dan pangsa lapangan usaha pada triwulan berjalan.

minum, konstruksi, dan jasa). Utamanya, perlambatan LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan II dipengaruhi oleh normalisasi aktivitas ekonomi pasca *magnitude of festive season* dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di Kalimantan Barat, dengan terkonsentrasinya *event* Imlek, Cap Go Meh, Ramadhan, dan Idul Fitri, yang berturut – turut terjadi pada triwulan I 2026.

Memasuki triwulan II, *festive-driven demand* tersebut mengalami relaksasi sehingga pertumbuhan perdagangan kembali menuju pola yang lebih normal. Hal ini terlihat pada penurunan jumlah penumpang angkutan udara di Bandara Supadio. Pada triwulan II 2026, *traffic* perjalanan penumpang di Bandara Supadio Pontianak mengalami penurunan signifikan. Kedatangan penumpang tercatat berkontraksi

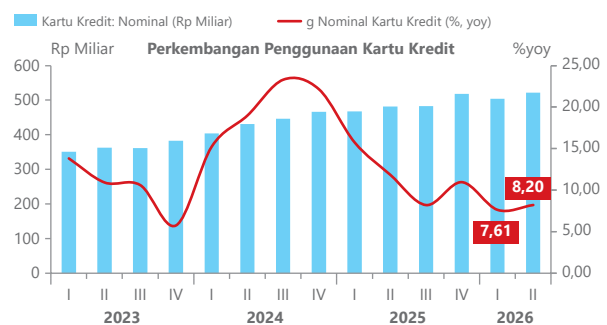
hingga -2,51% (yoy), berbeda dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 33,03% (yoy). Selain itu, jumlah kedatangan penumpang juga melambat ke 5,75% (yoy), setelah sebelumnya yang tumbuh 30,34% (yoy) pada triwulan I 2026.

Perlambatan pertumbuhan pada LU perdagangan turut tecermin dari sisi ekspektasi konsumen dan pembiayaan. Indeks keyakinan konsumen dan indeks penghasilan saat ini tercatat pada level 114,50 dan 124,50 menurun dari 120,05 dan 131,83 pada triwulan sebelumnya. Selain itu, kredit kendaraan bermotor, khususnya roda empat tercatat berkontraksi 19,72% (yoy), mengindikasikan adanya sikap lebih berhati – hati dari konsumen, serta model pembiayaan kredit yang belum diminati oleh calon konsumen². Selain itu, pertumbuhan kredit konsumsi pada triwulan II



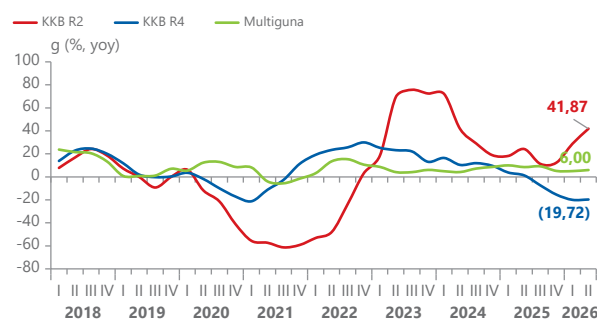
Sumber: GAIKINDO, diolah

Grafik 1.3. Penjualan Kendaraan Bermotor di Kalimantan Barat



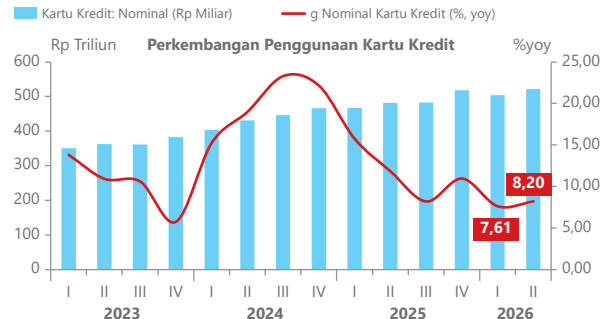
Sumber: Cognos Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.5. Perkembangan Penggunaan Kartu Kredit



Sumber: Cognos Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.4. Perkembangan Kredit Kendaraan dan Multiguna (% yoy) Prov. Kalimantan Barat



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.6. Perkembangan Kredit Konsumsi di Kalimantan Barat

2. Hasil *Liaison* Bank Indonesia

2026 juga tercatat melandai ke level 4,66% (yoy) dari 5,08% (yoy) pada periode sebelumnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa lembaga pembiayaan dan perbankan menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam penyaluran kredit roda empat, termasuk dengan persyaratan uang muka yang lebih tinggi, tenor yang lebih panjang, dan proses verifikasi yang lebih ketat.

1.2.2. Pertanian

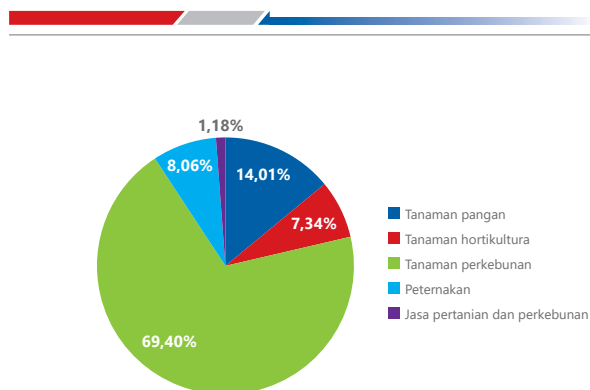
LU Pertanian pada triwulan II 2026 tumbuh 5,89% (yoy), meningkat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yakni 1,61% (yoy). LU pertanian memiliki pangsa terbesar dalam struktur ekonomi Kalimantan Barat, yaitu 20,96%, sekaligus memberikan andil 1,23% terhadap pertumbuhan ekonomi Triwulan II. Secara struktur dalam LU pertanian Kalimantan Barat, 69,40% terdiri dari produk perkebunan, 14,01% tanaman pangan, dan 8,06% peternakan serta sisanya merupakan tanaman hortikultura dan jasa lainnya. Sehingga, perubahan pada produk perkebunan tahunan akan sangat memengaruhi kinerja pertanian Kalimantan Barat.

Pada sub perkebunan, khususnya komoditas tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, terjadi peningkatan pertumbuhan produksi pada triwulan II 2026, yakni sebesar 14,15% (yoy). Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh membaiknya produktivitas tanaman sawit seiring kondisi cuaca yang relatif kondusif sepanjang periode pembentukan buah pada semester

I 2026, sehingga mendukung peningkatan jumlah tandan buah yang memasuki masa panen pada triwulan laporan. Selain itu, sejumlah perusahaan perkebunan juga telah memasuki masa panen optimal pasca program *replanting* yang dilakukan pada tahun – tahun sebelumnya³. Meskipun pertumbuhan tahunan produksi TBS tercatat lebih rendah dari triwulan sebelumnya, secara volume, produksi TBS tercatat masih meningkat dari triwulan I 2026. Kondisi ini dapat dijelaskan sejalan dengan pola musiman produksi kelapa sawit, di mana fase puncak produksi (*peak crop*) umumnya terjadi pada pertengahan hingga akhir tahun.

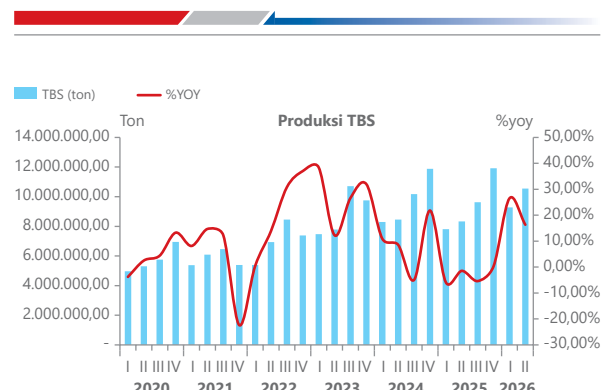
Dari sisi harga, turut terjadi peningkatan pada harga TBS Kalbar secara *year-on-year*. Perkembangan tersebut sejalan dengan penguatan harga CPO di pasar global yang didorong oleh masih terjaganya permintaan ekspor seiring meningkatnya permintaan dari negara importir utama seperti India, serta ekspektasi peningkatan kebutuhan domestik untuk pemenuhan program mandatori biodiesel. Secara umum, rata – rata harga TBS pada triwulan I 2026 sebesar Rp3.264/kg, lebih tinggi dibandingkan rata – rata harga TBS di periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp3.054/kg (Grafik 1.9).

Pada komoditas padi, tercatat luas panen sebesar 49,23 ribu hektare atau tumbuh 0,1% secara tahunan. Dari segi produksi padi dan produksi beras pun mencatatkan pertumbuhan tahunan, masing-masing



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

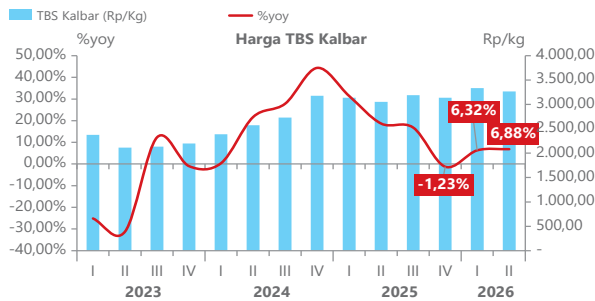
Grafik 1.7. Komposisi ADHK PDRB LU Pertanian Kalimantan Barat



Sumber: Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.8. Perkembangan Produksi TBS Kelapa Sawit

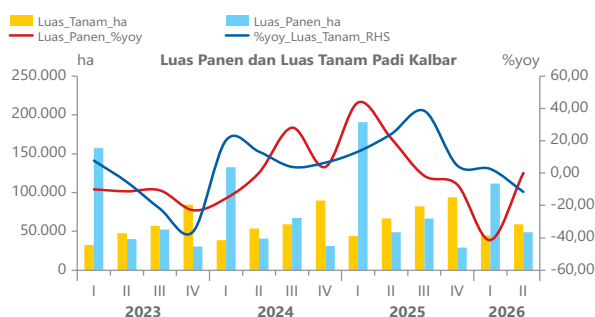
3. Hasil *Liaison* Bank Indonesia.



Sumber: Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Barat, diolah

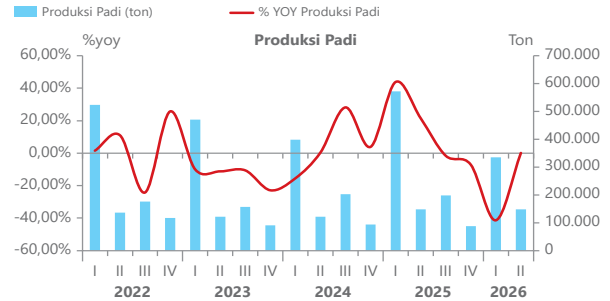
Grafik 1.9. Perkembangan Rata-Rata Harga TBS (Kelapa Sawit) Kalbar Triwulanan

sebesar 147,70 ribu ton dan 121,36 ribu ton, atau tumbuh 0,1% (yoy) dan 39% (yoy). Namun demikian, baik secara luas panen, produksi padi, maupun produksi beras tercatat lebih rendah daripada triwulan sebelumnya. Penurunan angka-angka ini utamanya didorong oleh kondisi musiman produksi padi, di mana pada triwulan I merupakan periode panen raya untuk musim tanam yang dilakukan pada akhir tahun sebelumnya, sedangkan triwulan II adalah periode tanam dan menuju fase vegetatif akhir sebelum masuk ke periode generatif dan panen pada triwulan berikutnya. Hal ini tecermin pada peningkatan penyaluran kredit pertanian pada triwulan II 2026 yang masih tumbuh positif dan berada pada level yang lebih tinggi daripada triwulan I 2026, mengisyaratkan kebutuhan petani terhadap ketersediaan modal kerja untuk menunjang periode awal tanam dan pemeliharaan tanaman⁴.



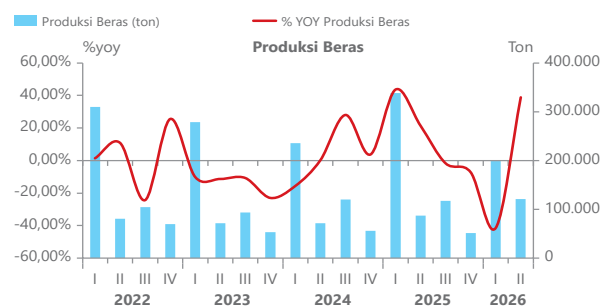
Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dan Kementan, diolah

Grafik 1.10. Perkembangan Luas Lahan



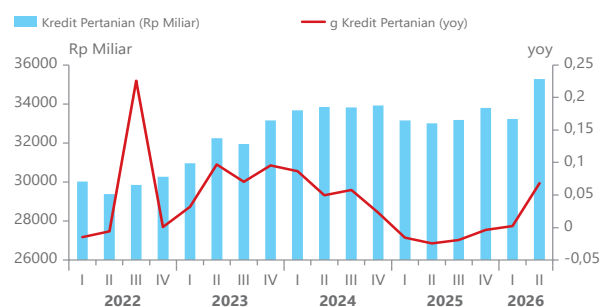
Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dan Kementan, diolah

Grafik 1.11. Produksi Padi Kalimantan Barat



Sumber: Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.12. Produksi Beras Kalimantan Barat



Sumber: Cognos Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.13. Perkembangan Realisasi Kredit Sektor Pertanian

1.2.3. Pertambangan

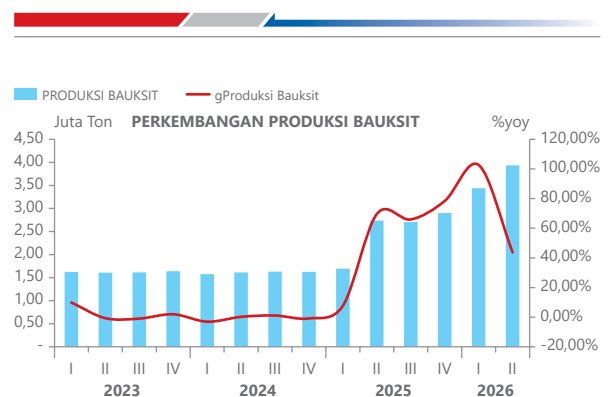
Kinerja LU Pertambangan pada triwulan II 2026 tumbuh 10,60% (yoy). Kinerja sektor pertambangan mencatatkan perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan angka pertumbuhan pada triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 34,14% (yoy). Secara tahunan, kinerja LU pertambangan masih tumbuh positif dan

4. Hasil *Liaison* Bank Indonesia.

signifikan didorong oleh lonjakan penambangan bauksit, pasir silika, dan emas. Pada komoditas bauksit, pertumbuhan tahunan tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 akibat *high-based effect* karena sudah dimulainya akselerasi hilirisasi bauksit pada triwulan II 2025. Meskipun demikian, volume produksi bauksit tercatat meningkat secara triwulanan (*q-to-q*) yang didorong oleh tingginya permintaan bahan baku untuk industri pengolahan alumina yang terus berkembang di Kalimantan Barat, seiring meningkatnya utilisasi fasilitas *refinery* yang telah beroperasi. Beroperasinya fasilitas *refinery* alumina secara penuh dan peningkatan kapasitas industri hilir sehubungan dengan fase dua industri menyebabkan kebutuhan bijih bauksit Kalbar semakin meningkat. Target produksi *smelter grade alumina* dan *chemical grade alumina* dari pelaku industri pada 2026 yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya juga mendorong peningkatan kebutuhan dan penyerapan komoditas bauksit⁵. Peningkatan kapasitas produksi ini mencerminkan berjalannya proses hilirisasi secara bertahap, yang tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga memperkuat kontribusi subsektor pertambangan terhadap perekonomian daerah. Proyeksi permintaan domestik dan ekspor yang tetap solid, ditambah dengan dukungan infrastruktur logistik dan kebijakan hilirisasi pemerintah, turut memperkuat optimisme atas kinerja pertambangan bauksit Kalimantan Barat dalam jangka menengah.

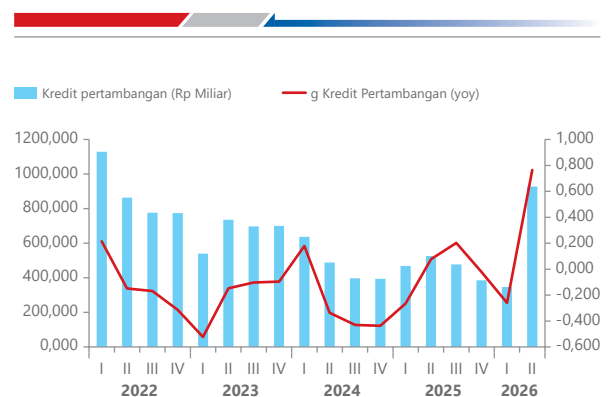
Meski pertumbuhan LU pertambangan mengalami perlambatan secara triwulanan, dari sisi pembiayaan, kredit pertambangan justru mencatatkan akselerasi. Pada triwulan II 2026, kredit pertambangan tumbuh sebesar 76,48% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan I 2026 yang masih mengalami kontraksi 25,93% (yoy). Kondisi ini mengindikasikan mulai menguatnya kebutuhan pembiayaan eksternal pelaku usaha pertambangan seiring dengan berlanjutnya aktivitas produksi dan meningkatnya kebutuhan bahan baku bauksit untuk industri pengolahan alumina. Selain itu, akselerasi ini juga dapat menjadi indikasi semakin

5. Hasil *Liaison* Bank Indonesia



Sumber: Hasil *Liaison* Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.14. Produksi Bauksit



Sumber: Cognos Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.15. Perkembangan Realisasi Kredit Pertambangan

kuatnya dukungan pembiayaan domestik terhadap aktivitas sektor pertambangan, sejalan dengan penguatan implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) berpotensi untuk mendukung akses pembiayaan pelaku usaha, mengingat penempatan DHE SDA di dalam sistem keuangan domestik dapat dimanfaatkan sebagai agunan kredit Rupiah⁶.

1.2.4. Industri Pengolahan

Kinerja LU industri pengolahan tumbuh meningkat menjadi 8,98% (yoy) di triwulan II 2026 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,13% (yoy). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh akselerasi hilirisasi bauksit – alumina yang terus berlangsung, menjadi salah satu motor penggerak

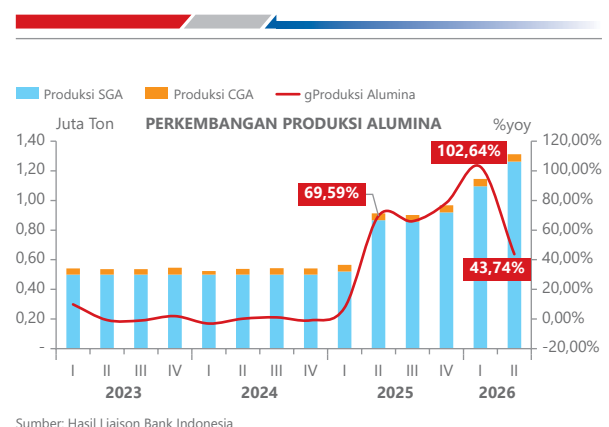
6. Hasil *Liaison* Bank Indonesia

sektor industri pengolahan. Pasca *full operation* sejumlah fasilitas pengolahan alumina dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan kapasitas produksi alumina Kalbar secara signifikan. Pada triwulan II 2026, produksi alumina tercatat tumbuh hingga 43,74% (yoy). Kawasan Industri (KI) Ketapang yang telah mulai memproduksi sejak triwulan II 2025 dan berlanjut hingga triwulan I 2026 dengan total realisasi produksi kumulatif 2026 sebesar 977,36 ribu ton dan kawasan SGAR di Kabupaten Mempawah juga telah memulai aktivitas produksinya sejak triwulan IV 2025 dan turut berlanjut hingga triwulan II 2026 dengan total realisasi produksi sebesar 294,9 ribu ton dengan pengiriman rutin alumina ke perusahaan aluminium domestik, sehingga memperkuat rantai pasok hilir industri aluminium nasional yang strategis⁷. Prospek alumina ke depan semakin menjanjikan, didorong oleh permintaan global terutama dari Tiongkok, yang diperkirakan tetap tinggi seiring kebijakan pembatasan kapasitas produksi aluminium domestik di negara tersebut, serta lonjakan kebutuhan alumina untuk sektor-sektor strategis global seperti kendaraan listrik/*electric vehicle* (EV), energi terbarukan, dan industri konstruksi. Faktor-faktor ini menjadikan Kalimantan Barat sebagai salah satu episentrum dalam mendukung agenda hilirisasi nasional dan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi di luar komoditas tradisional. Hal ini juga mendorong fakta bahwa sejumlah *smelter* dan *refinery* alumina Kalbar tercatat meningkatkan target produksi tahunannya seiring meningkatnya kapasitas utilisasi proyek. Peningkatan industri pengolahan juga seiring dengan peningkatan ekspor alumina pada triwulan II 2026 dibandingkan triwulan I 2025 sebesar 14,33% (yoy), didorong oleh permintaan global terutama dari Tiongkok yang tetap tinggi.

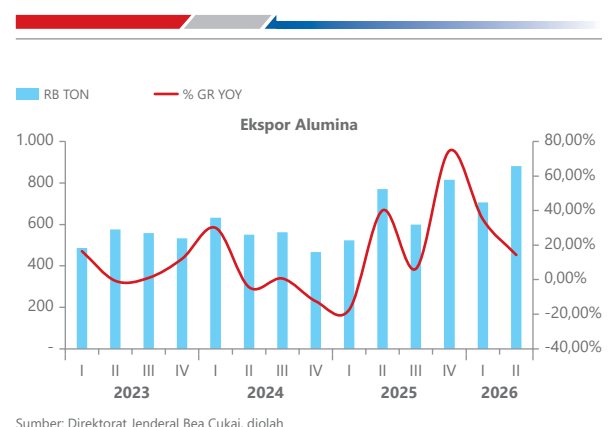
Kinerja subsektor perkebunan, khususnya kelapa sawit yang masih menjadi pangsa terbesar dalam sektor industri pengolahan Kalbar, turut mendorong kinerja industri di triwulan II 2026. Produksi CPO pada triwulan laporan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar 14,15% (yoy). Peningkatan ini didorong oleh

bertambahnya pasokan TBS seiring membaiknya produktivitas perkebunan sawit dan meningkatnya volume panen pada sejumlah sentra produksi di Kalimantan Barat.

Dari sisi permintaan, kinerja industri sawit juga didukung oleh peningkatan harga CPO yang berada pada level lebih tinggi sebesar rata – rata Rp14.762/kg dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp13.619/kg. Hal tersebut juga sejalan dengan masih kuatnya permintaan global dan meningkatnya kebutuhan domestik untuk mendukung program *mandatory* biodiesel nasional, maupun skema *business to business*. Kondisi peningkatan tersebut juga mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas pengolahannya sejak awal 2026, lebih tinggi dibandingkan sepanjang tahun 2025, salah satunya terjadi kepada sejumlah *tenants refinery* di area Pelabuhan Kijing.

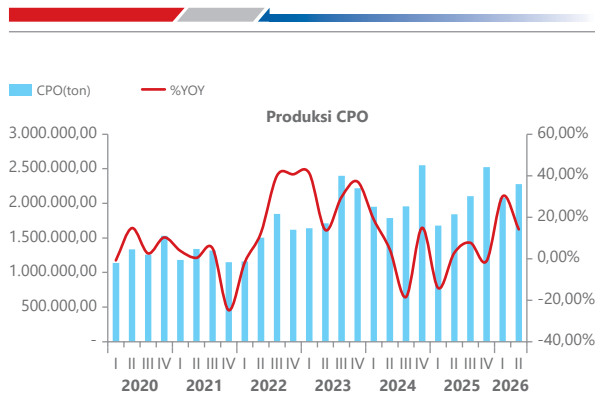


Grafik 1.16. Produksi Alumina



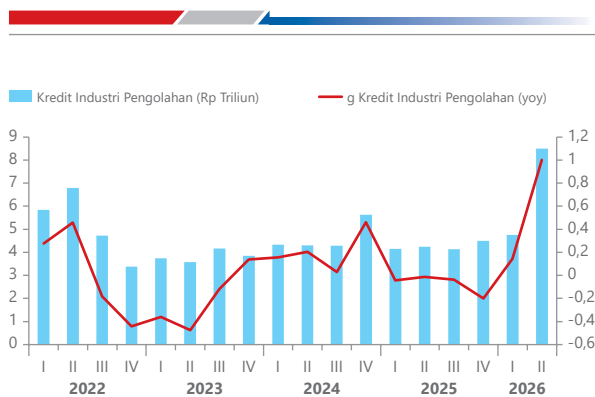
Grafik 1.17. Volume Ekspor Alumina Triwulanan

7. Hasil Liaison Bank Indonesia



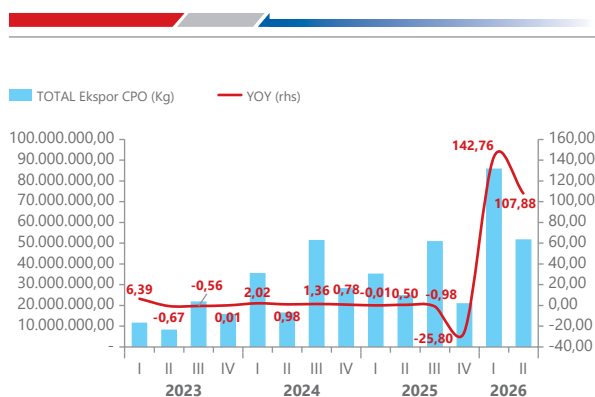
Sumber: Cognos BI, diolah

Grafik 1.18. Produksi CPO Kalimantan Barat



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.19. Kredit Industri Pengolahan



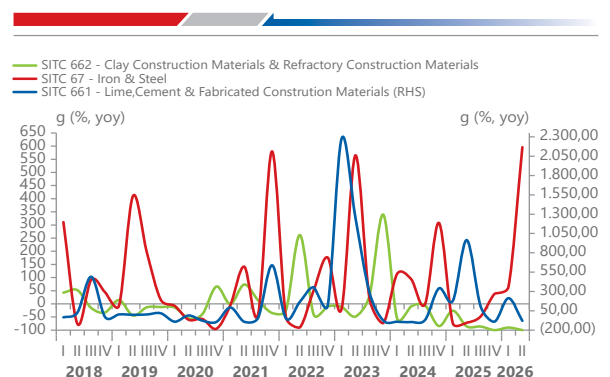
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.20. Ekspor CPO Kalimantan Barat

1.2.5. Konstruksi

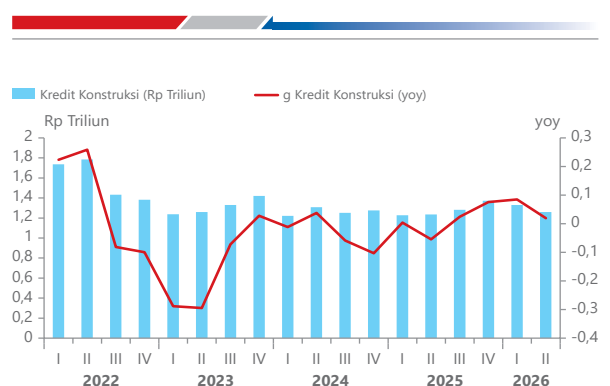
Pada triwulan II 2026, lapangan usaha konstruksi di Kalimantan Barat mencatat pertumbuhan sebesar 5,40% (yoy), sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,95% (yoy). Penurunan ini sejalan dengan menurunnya impor

material konstruksi, khususnya *lime*, *cement* & *fabricated construction materials* serta *clay construction materials* & *refractory construction materials* yang menurun hingga -79,89% (yoy) dan -100% (yoy), menjadi pendukung minimnya aktivitas konstruksi pada triwulan laporan. Sejalan dengan hal tersebut, laju pertumbuhan kredit konstruksi turut melambat ke level 1,95% dari 8,47% di triwulan sebelumnya. Perlambatan sektor konstruksi pada triwulan II 2026 diakibatkan oleh aktivitas konstruksi pemerintah dan swasta yang tertahan serta kecenderungan proyek konstruksi masih dalam tahapan perencanaan *outlook* dan pengadaan. Dari sisi swasta, beberapa proyek strategis di Kalimantan Barat telah memasuki fase penyelesaian atau beralih dari tahap konstruksi ke tahap operasi, seperti relokasi jalan nasional Sei Duri-Kijing dan konstruksi tahap dua KI Ketapang. Adapun konstruksi lanjutan proyek-proyek strategis masih dalam fase persiapan dan administratif awal sehingga belum masuk pada periode pengerjaan yang masif.



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.21. Impor Material Konstruksi



Sumber: Cognos Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.22. Kredit LU Konstruksi

Tabel 1.3. Pertumbuhan PDRB s.d Triwulan II 2026 Sisi Permintaan

Pengeluaran	2025				2026		TW I 2026		TW II 2026	
	I	II	III	IV	I	II	Pangsa	Andil Pertumbuhan (%)	Pangsa	Andil Pertumbuhan (%)
Konsumsi Rumah Tangga	5,19	5,44	5,05	5,15	5,73	4,17	49,22	2,95	48,24	2,17
Konsumsi LNPR	-0,21	10,47	11,57	5,44	9,98	2,08	1,33	0,13	1,22	0,03
Konsumsi Pemerintah	-0,61	-0,31	5,30	12,49	28,95	17,55	11,71	2,75	11,61	1,80
PMTB	-1,14	8,60	10,66	8,21	7,23	6,18	30,82	2,05	33,69	1,92
Ekspor	54,37	54,76	27,51	-2,81	3,38	10,63	19,05	0,85	20,75	2,76
Impor	49,40	104,24	37,93	4,75	13,61	12,73	12,64	11,26	15,55	2,66
Total (yoy)	5,00	5,59	5,31	5,62	6,14	5,61				

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

1.3. PERKEMBANGAN EKONOMI SISI PERMINTAAN

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan II 2026 ditopang utamanya oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,17% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,73% (yoy), kemudian investasi yang tumbuh sebesar 6,18% (yoy) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,23% (yoy) (Tabel 1.3).

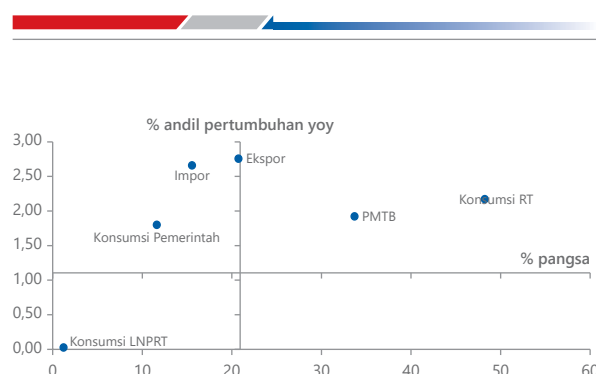
Berdasarkan matriks komponen PDRB sisi permintaan triwulan II 2026 (Grafik 1.21), diketahui bahwa investasi dan konsumsi rumah tangga tercatat berada di kuadran kanan atas. Sehingga menunjukkan bahwa komponen tersebut memiliki andil dan pangsa yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Sementara itu, pada kuadran kiri atas terdapat kelompok pengeluaran konsumsi pemerintah, ekspor,

dan impor. Kuadran kiri atas menggambarkan andil pertumbuhan yang tinggi meski secara pangsa belum dominan dalam PDRB Kalimantan Barat. Konsumsi lembaga non profit rumah tangga berada di kuadran kiri bawah, karena secara andil dan pangsa berada sedikit di bawah rata-rata andil pertumbuhan dan pangsa sektor pengeluaran lainnya.

1.3.1. Konsumsi Rumah Tangga

Kinerja konsumsi Rumah Tangga (RT) tumbuh 4,17% (yoy) pada triwulan II 2026. Kinerja pertumbuhan ini melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,73% (yoy). Perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2026 terjadi sejalan dengan perlambatan LU perdagangan besar dan eceran yang disebabkan oleh tingginya konsumsi masyarakat pada periode *rally* HBKN pada triwulan sebelumnya, mulai dari Tahun Baru, Tahun Baru Imlek, Cap Go Meh, Nyepi, Ramadan dan Idul Fitri. Selain itu, kondisi tekanan inflasi yang sedikit lebih tinggi turut berdampak pada pelemahan daya beli rumah tangga. Inflasi umum pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 0,31% (mtm) dan 3,28% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,25% (mtm) dan 2,89% (yoy), sehingga kenaikan harga secara umum turut menekan daya beli riil masyarakat dan menjadi salah satu faktor yang menahan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2026.

Di samping itu, perlambatan konsumsi rumah tangga turut dipengaruhi oleh moderasi mobilitas dan aktivitas pariwisata, tecermin salah satunya dari perlambatan pertumbuhan jumlah wisatawan

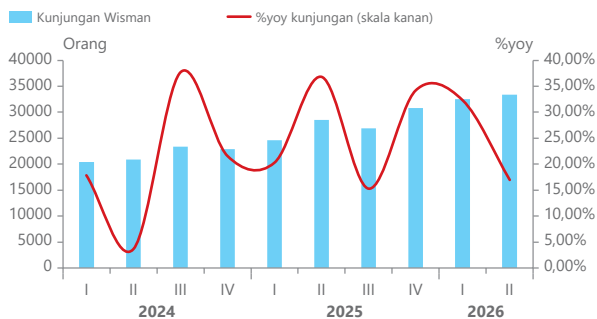


Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.23. Pemetaan Matriks Komponen PDRB Sisi Permintaan Triwulan II 2026

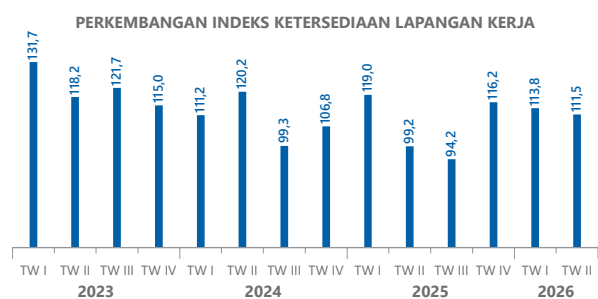
mananegara di Kalimantan Barat pada triwulan II 2026 sebesar 16,97% (yoy) dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh hingga 32,29% (yoy). Hal ini juga sejalan dengan penurunan jumlah kedatangan orang di bandara Kalimantan Barat, yang pada triwulan sebelumnya tercatat meningkat 30,34% (yoy) turun menjadi 5,75% (yoy). Pelemahan jumlah wisman dan volume kedatangan di bandara tersebut berpotensi menahan aktivitas ekonomi pada sektor perdagangan, akomodasi dan makan minum, serta transportasi, yang selanjutnya dapat menekan pendapatan dan daya beli masyarakat di Kalimantan Barat. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 111,5, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 113,8, mengindikasikan moderasi kondisi pasar kerja yang berpotensi memengaruhi pendapatan dan daya beli masyarakat serta menahan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Perlambatan konsumsi rumah tangga yang lebih rendah tertahan oleh peningkatan tingkat penerimaan petani, yang tercermin dari naiknya Nilai Tukar Petani (NTP) yang berada pada angka 176,73 pada triwulan I 2026, lebih tinggi dibandingkan NTP pada triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 170,42. Peningkatan NTP terutama didorong oleh perbaikan pada subsektor perkebunan, sejalan dengan meningkatnya pendapatan petani kelapa sawit yang berpotensi memperkuat daya beli dan konsumsi masyarakat. Meski demikian, NTP subsektor hortikultura mengalami sedikit penurunan menjadi 106,58 pada triwulan II 2026 dari sebelumnya 109,13 pada triwulan I 2026.



Sumber: KPw BI Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.24. Perkembangan Kunjungan Wisman ke Kalimantan Barat



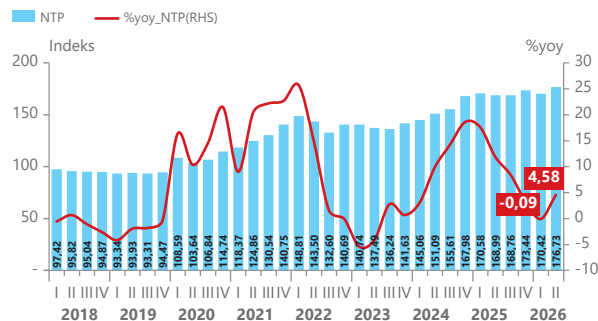
Sumber: KPw BI Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.26. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja



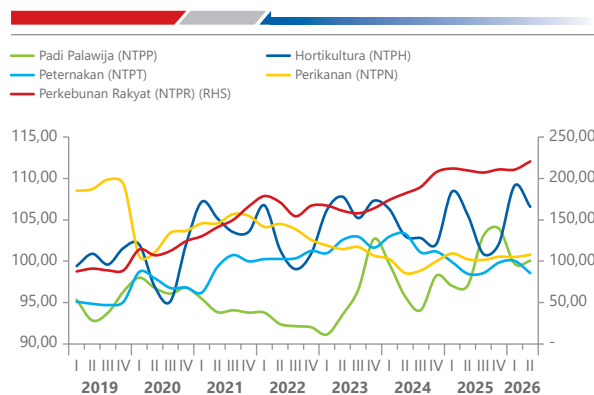
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.25. Jumlah Kedatangan Orang di Bandara



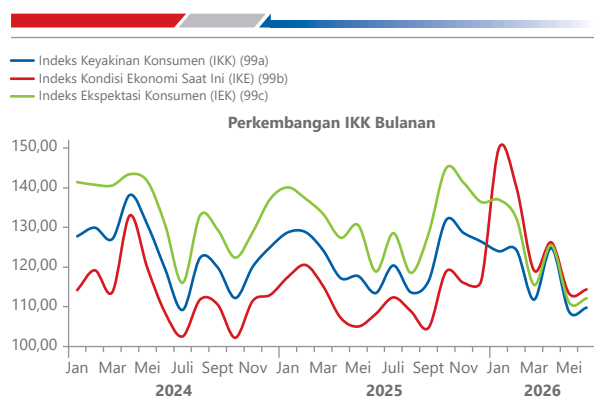
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.27. Perkembangan NTP



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.28. Perkembangan NTP Subkategori



Sumber: KPw BI Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.29. Indeks Keyakinan Konsumen Pontianak

1.3.2. Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRRT)

Kinerja konsumsi LNPRRT pada triwulan II 2026 tumbuh 2,08% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,98% (yoy). Faktor utama yang menyebabkan penurunan konsumsi LNPRRT ialah berkurangnya aktivitas organisasi keagamaan dan sosial pada triwulan II dibandingkan dengan triwulan sebelumnya akibat normalisasi pasca kondisi rally HBKN pada awal tahun 2026. Aktivitas sosial dan keagamaan yang meningkat signifikan pada triwulan I mendorong tingginya konsumsi LNPRRT pada periode tersebut, sehingga aktivitas pada triwulan II kembali ke tingkat yang lebih normal.

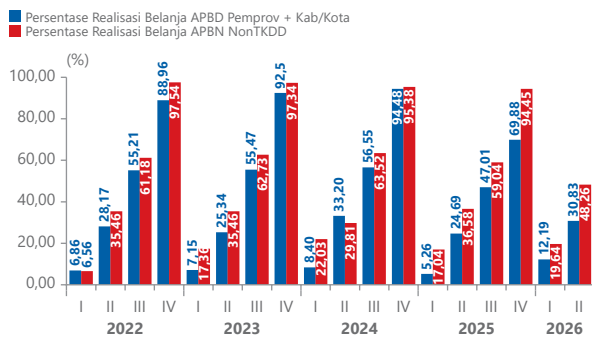
Selain itu, belum terdapat kegiatan berskala besar pada organisasi sosial, politik, dan kemasyarakatan pada periode ini. Berkurangnya intensitas sejumlah kegiatan rutin selama periode libur pertengahan

tahun membuat sebagian kegiatan lembaga sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan ditunda atau mengalami penyesuaian jadwal sehingga turut menekan konsumsi lembaga non profit rumah tangga.

1.3.3. Konsumsi Pemerintah

Konsumsi pemerintah pada triwulan II 2026 tumbuh 17,55% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan di triwulan lalu sebesar 28,95% (yoy). Perlambatan terutama disebabkan oleh menurunnya realisasi belanja pemerintah daerah setelah akselerasi pada triwulan sebelumnya, serta belum optimalnya belanja barang dan jasa akibat lambatnya proses pengadaan. Dari sisi belanja pegawai, perlambatan turut dipengaruhi oleh normalisasi belanja setelah pembayaran THR pada triwulan I 2026, meskipun pembayaran gaji ke-13 pada triwulan II 2026 menjadi faktor yang menahan perlambatan. Selain itu, adanya penghentian sementara operasional sejumlah SPPG selama triwulan ini turut menekan konsumsi pemerintah untuk pelaksanaan program Asta Cita pemerintah. Secara tahunan, perlambatan terutama tercermin pada realisasi belanja operasi pemerintah daerah yang berbalik dari pertumbuhan sebesar 122,81% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi terkontraksi 17,20% (yoy) pada triwulan II 2026. Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh belanja pegawai yang melambat dari pertumbuhan 101,12% (yoy) menjadi terkontraksi 17,33% (yoy), serta belanja barang dan jasa yang berbalik dari pertumbuhan 258,29% (yoy) menjadi terkontraksi 25,41% (yoy). Hal ini mengindikasikan bahwa dorongan belanja pemerintah pada triwulan II tidak sekuat akselerasi pada awal tahun.

Namun demikian, perlambatan konsumsi pemerintah yang lebih dalam tertahan oleh masih tingginya realisasi belanja pemerintah di Kalimantan Barat terhadap total pagu anggaran. Hingga akhir triwulan II 2026, persentase realisasi belanja negara dan belanja daerah di Kalimantan Barat masing-masing mencapai 30,83% dan 48,26% dari total pagu, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 24,69% dan 36,58%. Dengan demikian, peningkatan



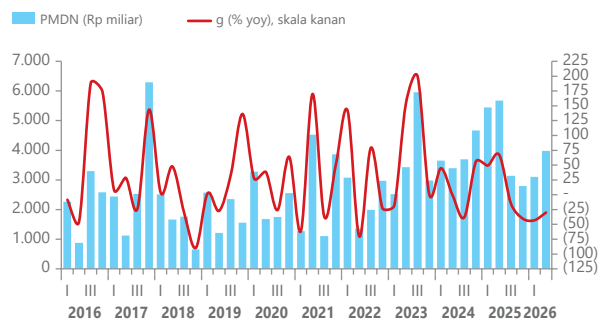
Sumber: Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat

Grafik 1.30. Persentase Realisasi Belanja APBD Pemprov + Kab/Kota & APBN Kalimantan Barat

realisasi belanja secara kumulatif tetap memberikan dukungan terhadap konsumsi pemerintah, meskipun laju pertumbuhannya melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

1.3.4. Investasi / Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB)

Kinerja investasi pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh 6,18% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,23% (yoy). Perlambatan ini terutama tercermin dari penurunan signifikan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang tumbuh 32,43% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh hingga 148,49% (yoy). Perlambatan investasi juga sejalan dengan menurunnya realisasi belanja modal pemerintah daerah, yang pada triwulan II terkontraksi sebesar 50,66% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan I yang tumbuh hingga 210,43% (yoy). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akselerasi investasi pemerintah untuk pembangunan daerah pada triwulan II tidak sekuat triwulan sebelumnya. Dari sisi aktivitas fisik, perlambatan juga dipengaruhi oleh selesainya fase konstruksi sejumlah proyek, termasuk Kawasan Industri Ketapang yang memasuki tahap *commissioning* fase II, serta proyek relokasi Jalan Sei Duri-Kijing yang telah selesai, sehingga kebutuhan investasi konstruksi dan pengadaan barang modal menjadi lebih terbatas.



Sumber: DPMPSTP Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.31. Perkembangan Realisasi PMDN



Sumber: DPMPSTP Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.32. Perkembangan Realisasi PMA

Namun demikian, perlambatan investasi tertahan oleh membaiknya kinerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Realisasi PMDN pada triwulan II 2026 masih terkontraksi 29,96% (yoy), tetapi membaik dibandingkan kontraksi 42,98% (yoy) pada triwulan I 2026. Hal ini sejalan dengan masih berlangsungnya pembangunan Kawasan Industri Pulau Penebang di Kab. Kayong Utara.

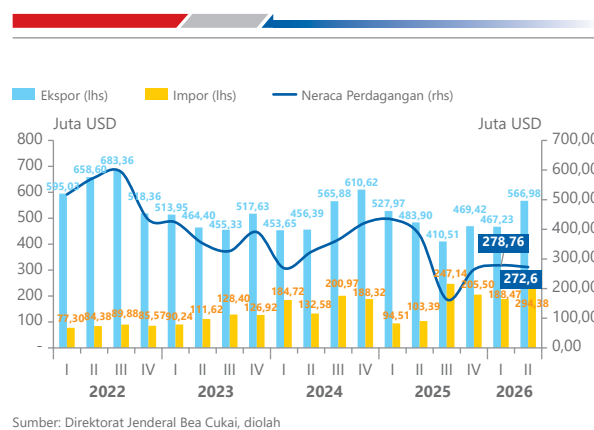
1.3.5. Ekspor-Impor

1.3.5.1. Ekspor

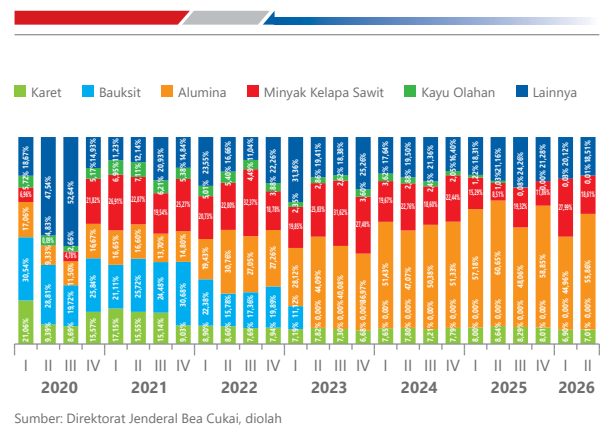
Kinerja ekspor luar negeri pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 10,63% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,38% (yoy). Peningkatan kinerja ekspor sejalan dengan meningkatnya nilai ekspor Kalimantan Barat pada triwulan II yang tercatat sebesar 566,98 juta

USD, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 467,23 juta USD. Peningkatan nilai ekspor didorong oleh kenaikan volume dan aktivitas komoditas unggulan, khususnya alumina, seiring semakin optimalnya operasional smelter di Kalimantan Barat. Volume ekspor alumina tercatat mencapai 881,28 ribu ton pada triwulan II, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 706,45 ribu ton. Penguatan harga alumina global juga meningkatkan nilai ekspor alumina, yang tercatat tumbuh 4,47% (yoy) pada triwulan II, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 31,99% (yoy). Selain itu, peningkatan aktivitas perdagangan internasional juga tercermin dari pelaksanaan ekspor perdana *direct call* Terminal Kijing pada 29 Juni 2026, yang memungkinkan pengiriman komoditas dari Kalimantan Barat dilakukan secara langsung ke negara tujuan.

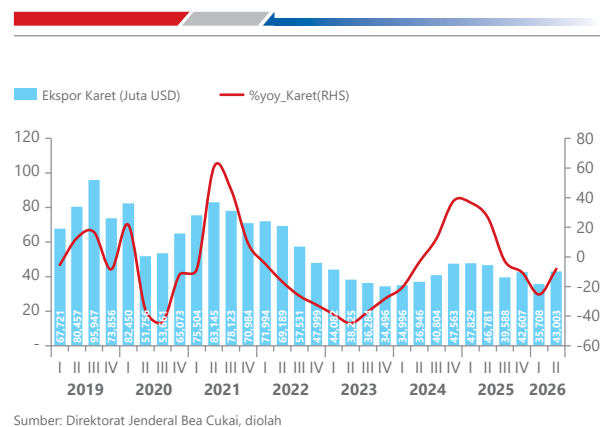
Di sisi lain, pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi sedikit tertahan oleh menurunnya nilai ekspor minyak kelapa sawit, yakni senilai 114,24 juta USD, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 144,76 juta USD. Penurunan ekspor ini terjadi pada subkomoditas biodiesel (FAME) serta produk pemurnian minyak mentah kelapa sawit (RBDPO) dan minyak mentah inti kelapa sawit (RBDPKO).



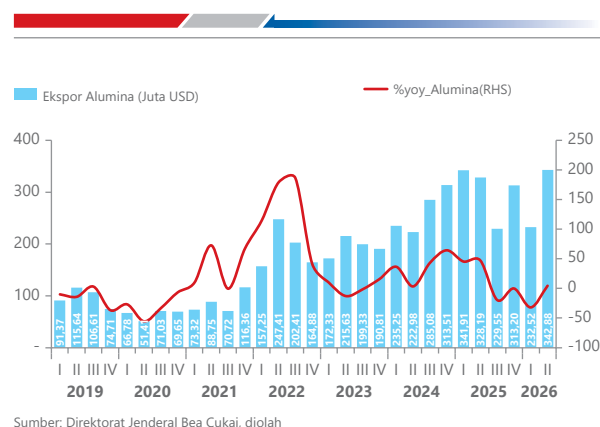
Grafik 1.33. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor



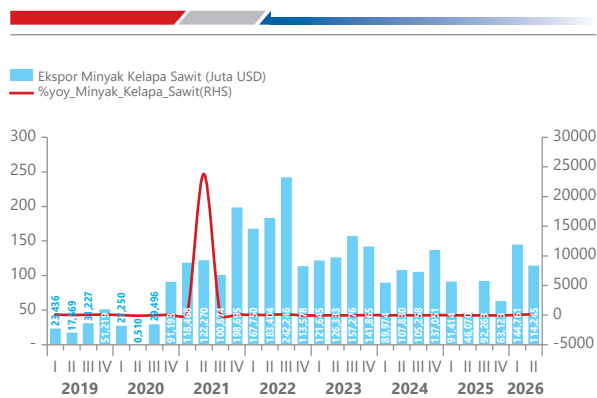
Grafik 1.34. Perbandingan Proporsi Nilai Ekspor Komoditas



Grafik 1.35. Perbandingan Proporsi Nilai Ekspor Komoditas

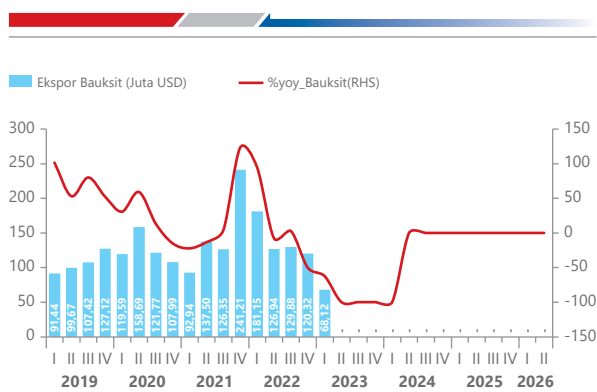


Grafik 1.36. Perkembangan Nilai Ekspor Alumina (SITC)



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.37. Perkembangan Nilai Ekspor Minyak Kelapa Sawit (SITC)



Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

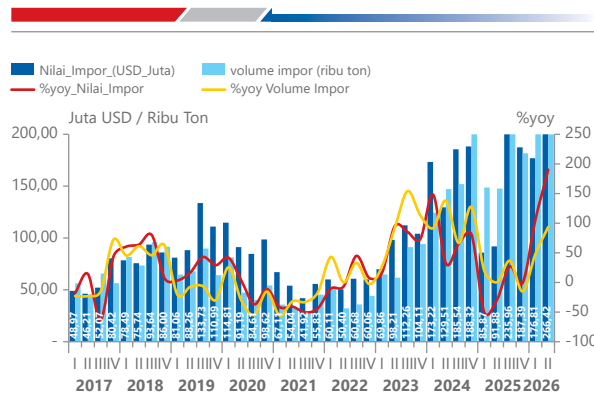
Grafik 1.38. Perkembangan Nilai Ekspor Bauksit (SITC)

1.3.5.2. Impor

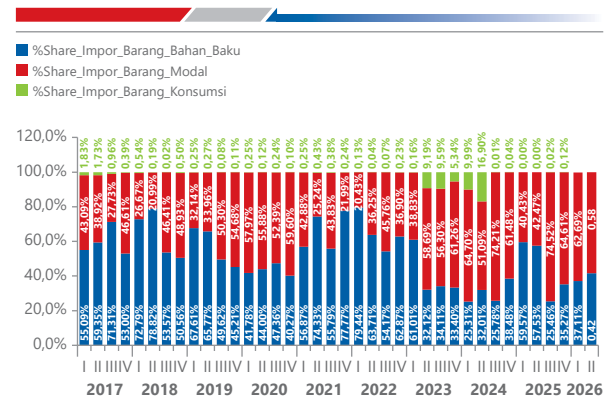
Kinerja impor Kalimantan Barat mencatat pertumbuhan sebesar 12,73% (yoy), sedikit rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,61% (yoy). Meskipun demikian, perlambatan tersebut terjadi di tengah nilai impor yang tetap meningkat secara nominal. Moderasi pertumbuhan terutama dipengaruhi oleh tingginya basis pembandingan pada triwulan II 2025, ketika impor meningkat signifikan seiring tingginya kebutuhan barang modal dan material untuk mendukung pembangunan kawasan industri, smelter alumina, serta infrastruktur pendukungnya. Tingginya realisasi impor pada periode yang sama tahun sebelumnya menyebabkan ruang pertumbuhan impor pada triwulan II 2026 secara tahunan menjadi lebih terbatas, meskipun secara triwulanan aktivitas impor masih menunjukkan peningkatan.

Perlambatan impor juga sejalan dengan penurunan nilai impor barang konsumsi, meskipun impor barang bahan baku/penolong dan barang modal masih menunjukkan peningkatan. Impor barang konsumsi pada triwulan II tercatat 284,77 ribu ton, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 341,32 ribu ton. Di sisi lain, kinerja impor tetap tumbuh, didorong oleh impor barang bahan baku yang meningkat dari 65,62 juta ton pada triwulan I menjadi 110,87 juta ton pada triwulan II. Impor barang modal juga meningkat dari 110,85 juta ton pada triwulan I menjadi 155,27 juta ton pada triwulan II selanjutnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas industri dan investasi masih membutuhkan pasokan mesin, peralatan, dan bahan baku dari luar negeri, namun peningkatan tersebut belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan impor secara keseluruhan melampaui laju pertumbuhan pada triwulan sebelumnya.

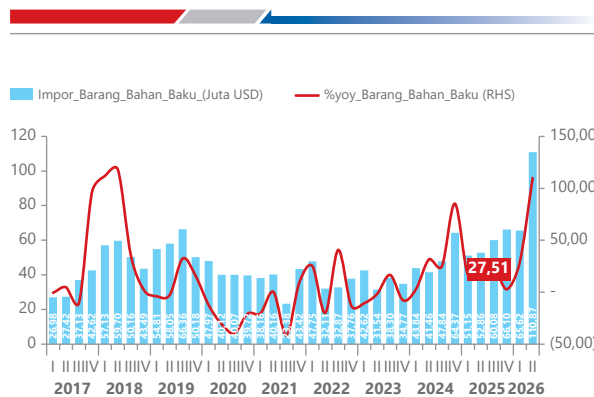
Dari sisi material konstruksi, perlambatan terutama berkaitan dengan menurunnya impor material bangunan olahan dan bahan bangunan dari tanah liat, meskipun impor besi dan baja masih meningkat signifikan. Kinerja impor komponen besi dan baja tumbuh hingga 595,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 64,79% (yoy), seiring dengan masih berlangsungnya pembangunan sistem pembangkit listrik di Kawasan Industri Pulau Penebang. Namun, impor material kapur, semen, dan bahan bangunan olahan berkontraksi 79,89% (yoy), berbalik arah dari periode sebelumnya yang tumbuh hingga 213,25% (yoy). Penurunan juga terjadi pada impor bahan konstruksi dari tanah liat dan bahan konstruksi tahan api yang berkontraksi sebesar -100% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 90,40% (yoy). Pelemahan impor kedua kelompok material tersebut mengindikasikan adanya penurunan kebutuhan pada sebagian tahapan konstruksi atau proyek yang sebelumnya membutuhkan material bangunan dalam jumlah besar, sehingga peningkatan impor besi dan baja belum sepenuhnya mampu mengompensasi moderasi pada kelompok material lainnya.



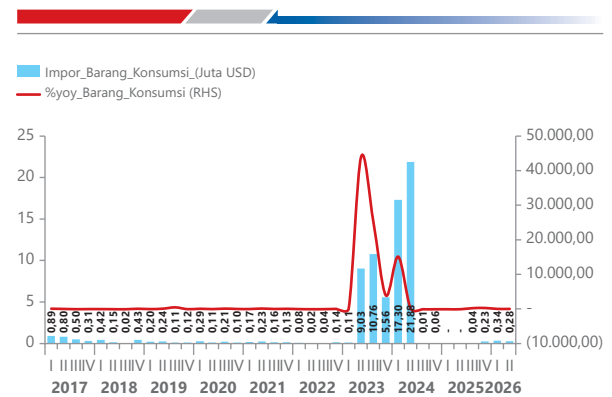
Grafik 1.39. Perkembangan Volume dan Nilai Impor



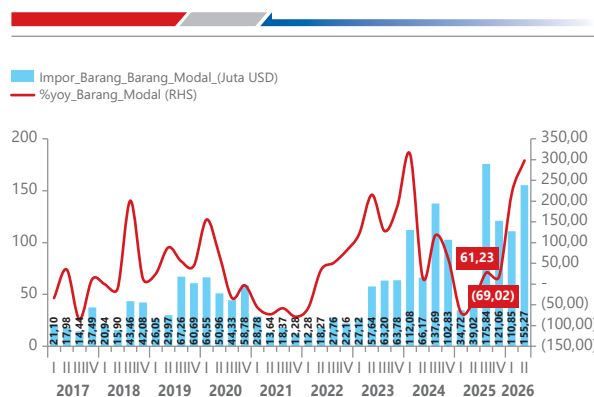
Grafik 1.42. Perkembangan Komposisi Komponen Impor



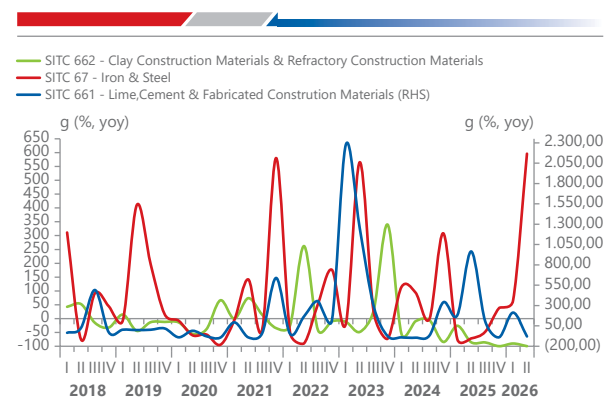
Grafik 1.40. Perkembangan Nilai Impor Barang Bahan Baku



Grafik 1.43. Perkembangan Nilai Impor Barang Konsumsi



Grafik 1.41. Perkembangan Nilai Impor Barang Modal



Grafik 1.44. Impor Material Konstruksi

BOKS 1 Prospek Hilirisasi Bauksit Kalimantan Barat di Tengah Tekanan Harga Alumina dan Risiko Pasokan Bauksit

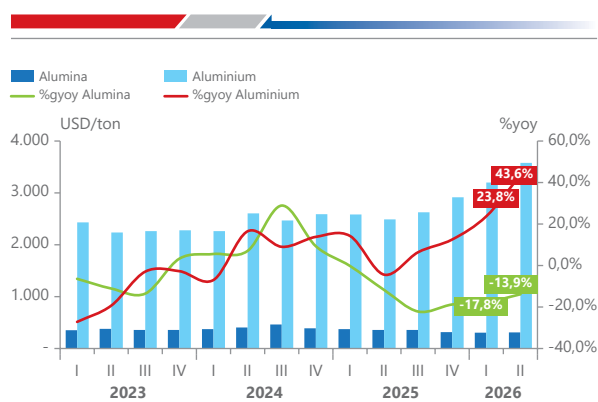
Kalimantan Barat tengah memasuki fase penguatan hilirisasi bauksit seiring dengan berkembangnya kapasitas pengolahan alumina dan industri aluminium nasional. Pengembangan fasilitas pengolahan di sejumlah wilayah, di antaranya Kab. Mempawah, Kab. Ketapang dan Kab. Kayong Utara, mulai menggeser struktur industri dari aktivitas berbasis komoditas mentah menuju pengolahan yang bernilai tambah. Fasilitas pengolahan alumina yang telah beroperasi memiliki kapasitas sekitar 1–2 juta ton per tahun, sementara pengembangan tahap berikutnya diarahkan pada pembangunan fasilitas peleburan aluminium dengan kapasitas yang diperkirakan mencapai 600 ribu–1 juta ton per tahun. Perkembangan tersebut menandai semakin terbentuknya rantai nilai bauksit–alumina–aluminium di Kalimantan Barat sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu basis pengembangan industri mineral bernilai tambah di kancah nasional.

Namun, penguatan kapasitas industri alumina berlangsung di tengah kondisi pasar global yang menghadapi tekanan. Penambahan kapasitas *refinery* di Tiongkok, Indonesia, dan India mendorong peningkatan produksi alumina global yang lebih

cepat dibandingkan pertumbuhan penyerapannya. CRU, perusahaan riset dan *market intelligence* global, memperkirakan pasar alumina masih berada dalam kondisi surplus pada 2026, sehingga harga alumina cenderung berada di bawah tekanan dan baru berpotensi menguat kembali mulai 2027 seiring peningkatan kebutuhan dari *smelter* aluminium dan penyesuaian kapasitas produksi.

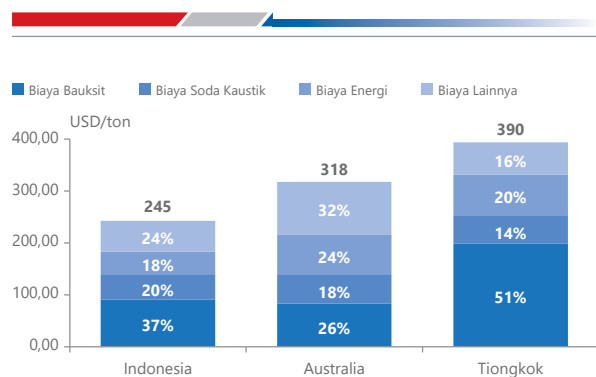
Pada saat yang sama, pengembangan kapasitas *smelter* baru di Indonesia menciptakan tambahan kebutuhan alumina di dalam negeri. Kondisi ini membuka peluang bagi produsen alumina Kalimantan Barat untuk memperkuat orientasi pasar domestik di tengah tekanan harga global. Peluang tersebut terlihat melalui pengembangan *smelter* aluminium, salah satunya di Kalimantan Utara. Berdasarkan informasi publik, kapasitas *smelter* tersebut mencapai 500 ribu ton aluminium per tahun dan ditargetkan dapat mencapai kapasitas produksi penuh pada akhir 2026. Pengembangan fasilitas tersebut berpotensi menciptakan sumber permintaan baru terhadap alumina domestik, sekaligus membuka peluang penguatan integrasi antarwilayah dalam rantai nilai industri aluminium nasional.

Peluang pasar domestik tersebut menjadi semakin relevan seiring dengan keunggulan industri alumina Indonesia dari sisi biaya produksi yang ditopang oleh kedekatan *refinery* dengan sumber bauksit domestik serta ketersediaan sumber energi lokal. Berdasarkan estimasi Shanghai Metals Market (SMM), biaya produksi alumina Indonesia berada sekitar US\$245 per ton, lebih rendah dibandingkan Australia sebesar US\$318 per ton dan Tiongkok sekitar US\$390 per ton. Dalam kondisi harga global yang tertekan, struktur biaya yang kompetitif menjadi keunggulan signifikan untuk menjaga margin sekaligus mendukung daya saing alumina domestik sebagai bahan baku industri aluminium nasional.



Sumber: London Metal Exchange, diolah

Grafik 1.45. Tren Harga Alumina dan Aluminium Global



Sumber: Shanghai Metal Market, diolah

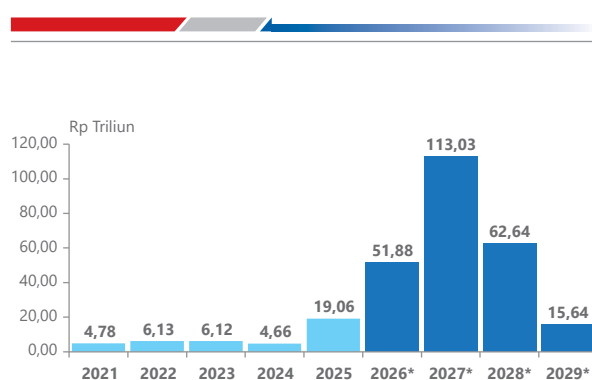
Grafik 1.46. Biaya Produksi Alumina

Dengan demikian, di tengah tekanan harga alumina global, pasar domestik menjadi semakin strategis dalam memberikan kepastian penyerapan produksi. Dalam hal ini, tekanan pasar global justru dapat menjadi momentum untuk memperkuat keterkaitan antara industri alumina Kalimantan Barat dan pengembangan smelter aluminium nasional.

Kendati demikian, peluang penguatan hilirisasi tersebut menghadapi tantangan baru dari sisi hulu, khususnya terkait ketersediaan bahan baku bauksit. Peningkatan kapasitas pengolahan alumina dan bertambahnya potensi penyerapan domestik membutuhkan kontinuitas pasokan bijih bauksit agar utilisasi *refinery* dapat tetap terjaga. Dalam perkembangannya, kendala dan ketidakpastian RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) pada sejumlah IUP (Izin Usaha Produksi) pemasok mulai memberikan tekanan terhadap rantai pasok bauksit di Kalimantan Barat. Terbatasnya volume produksi pada sejumlah pemasok menyebabkan sumber bahan baku yang dapat disalurkan kepada *refinery* menjadi semakin terbatas. Sejumlah IUP di Kalimantan Barat telah membatasi produksi bauksit, sehingga menekan ketersediaan bahan baku bagi *refinery* alumina. Berdasarkan estimasi Institut pour l'Histoire de l'Aluminium dan sejumlah sumber informasi lainnya, produksi 1 ton alumina setidaknya membutuhkan sekitar 2 hingga 2,5 ton bijih bauksit.

Kondisi tersebut membuka kemungkinan pemenuhan sebagian kebutuhan bahan baku melalui impor bauksit apabila pasokan domestik belum mencukupi. Namun, langkah tersebut berpotensi meningkatkan biaya pengadaan dan logistik sekaligus mengurangi manfaat ekonomi dari keterkaitan antara sumber daya bauksit domestik dan industri pengolahannya. Kondisi ini menjadi perhatian mengingat Kalimantan Barat merupakan salah satu basis sumber daya bauksit nasional, namun kapasitas pengolahannya berpotensi tidak sepenuhnya ditopang oleh pasokan domestik akibat kendala produksi dan perizinan.

Ke depan, prospek industri alumina Kalimantan Barat diperkirakan tetap positif, meskipun penguatannya berlangsung secara bertahap. Dalam jangka pendek, surplus alumina global masih berpotensi menahan kenaikan harga sehingga peningkatan kapasitas produksi perlu diimbangi dengan efisiensi dan kepastian pasar. Adapun, dalam jangka menengah, penambahan kapasitas aluminium domestik berpotensi meningkatkan kebutuhan alumina sekaligus memperkuat integrasi rantai pasok nasional. Dengan dukungan pasokan bahan baku, energi, dan logistik yang memadai, perkembangan tersebut berpotensi mendorong peningkatan utilisasi industri, aktivitas perdagangan, dan nilai tambah ekonomi daerah.



Sumber: DPMPTSP, diolah

Grafik 1.47. Prospek investasi hilirisasi alumina di Kalimantan Barat hingga tahun 2029



Bab 2

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Bulanan Gabungan Kota IHK

Triwulan II 2026

0,31% (mtm)

Triwulan I 2026

0,25% (mtm)

Triwulan II 2025

0,32% (mtm)

Inflasi Tahun Kalender Gabungan Kota IHK

Triwulan II 2026

2,24% (ytd)

Triwulan I 2026

1,03% (ytd)

Triwulan II 2025

2,56% (ytd)

Inflasi Tahunan Gabungan Kota IHK

Triwulan II 2026

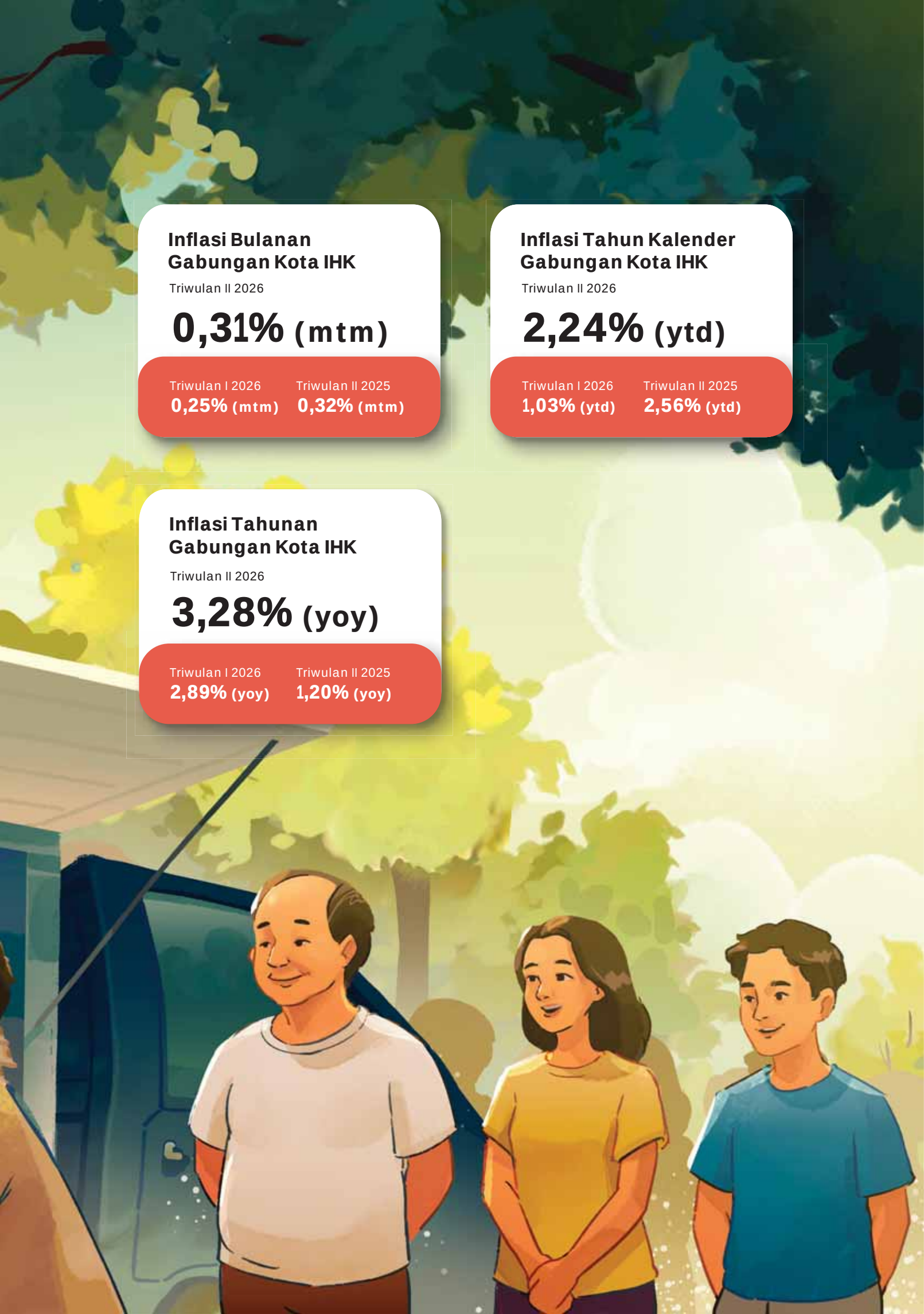
3,28% (yoy)

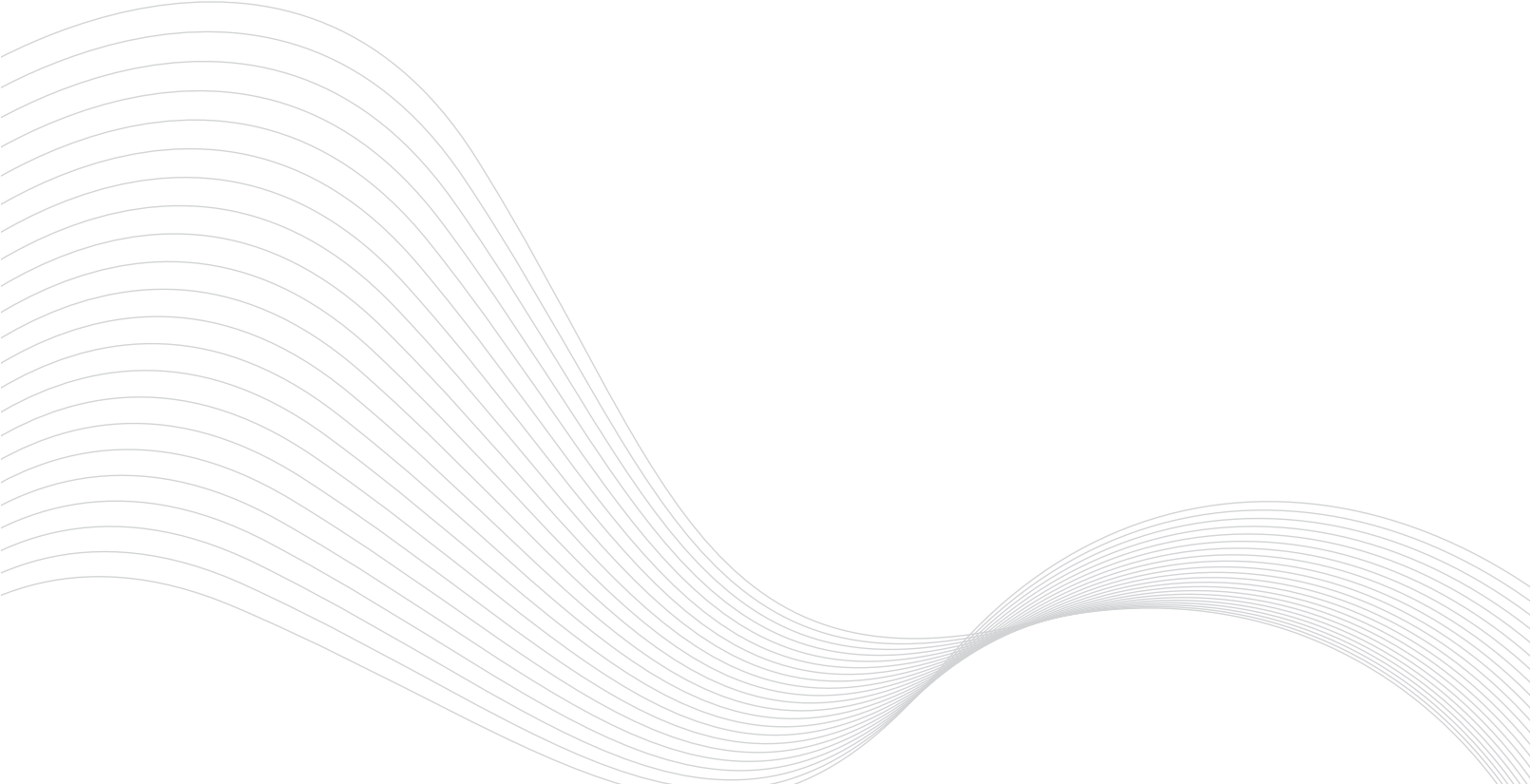
Triwulan I 2026

2,89% (yoy)

Triwulan II 2025

1,20% (yoy)





Inflasi Kalimantan Barat pada triwulan II 2026 meningkat menjadi 3,28% (yoy) dari 2,89% (yoy) pada akhir triwulan I 2026, namun tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ serta lebih rendah dibandingkan inflasi nasional dan regional Kalimantan. Peningkatan inflasi terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau; transportasi; serta perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan komoditas utama meliputi emas perhiasan, beras, bahan bakar rumah tangga, ikan baung, dan angkutan udara. Secara bulanan, tekanan inflasi melandai dari 0,57% (mtm) pada April menjadi 0,32% (mtm) pada Mei dan 0,31% (mtm) pada Juni, disertai pergeseran sumber tekanan dari pangan menuju energi dan transportasi. Secara spasial, inflasi meningkat di seluruh wilayah IHK, dengan inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Sintang, diikuti Kabupaten Ketapang. Keduanya berada sedikit di atas batas atas sasaran inflasi nasional. Untuk menjaga stabilitas harga, TPID se-Kalimantan Barat terus memperkuat strategi 4K melalui keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, yang turut didukung oleh akselerasi program Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS).



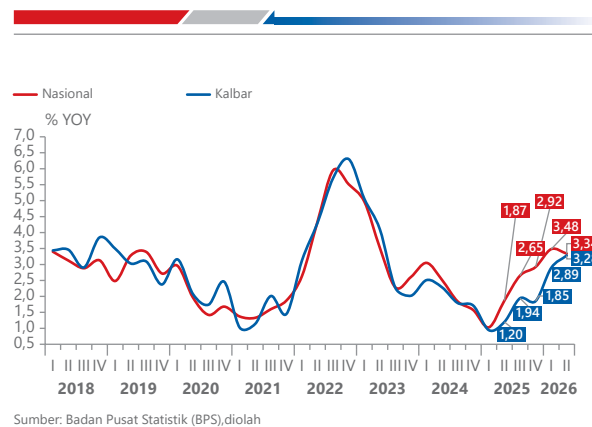
2.1. GAMBARAN UMUM

Inflasi Kalimantan Barat selama triwulan II 2026 (Grafik 2.1) tercatat sebesar 3,28% (yoy), lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3,34% (yoy) dan juga lebih rendah dari inflasi regional Kalimantan (Grafik 2.2) yang sebesar 3,65% (yoy). Namun demikian, tingkat inflasi pada triwulan II 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 2,89% (yoy).

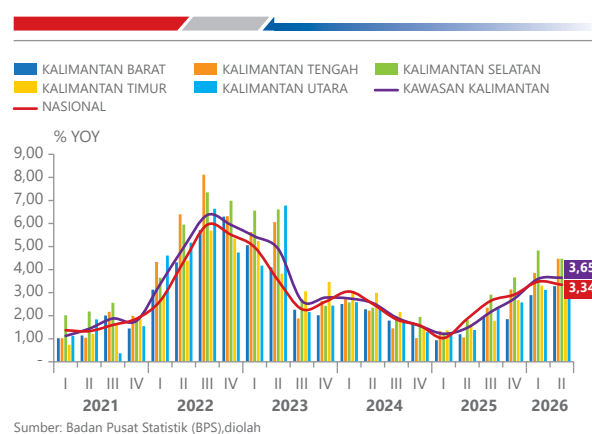
Berdasarkan kelompok pengeluaran, tekanan inflasi tahunan pada triwulan II didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,28%

(yoy) dengan andil 1,55% (yoy), kelompok transportasi sebesar 5,11% (yoy) dengan andil 0,59% (yoy), serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,81% (yoy) dengan andil 0,39% (yoy).

Berdasarkan jenis komoditas, inflasi tahunan pada triwulan II 2026 terutama bersumber dari emas perhiasan sebesar 42,15% (yoy) dengan andil 0,34% (yoy), beras sebesar 4,64% (yoy) dengan andil 0,23% (yoy), dan bahan bakar rumah tangga sebesar 8,16% (yoy) dengan andil 0,18% (yoy). Tingginya harga emas di tingkat konsumen merupakan transmisi dari kenaikan harga emas dunia selama setahun terakhir, sejalan dengan meningkatnya permintaan terhadap emas sebagai aset aman di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Penguatan nilai tukar USD terhadap rupiah secara tahunan juga meningkatkan harga emas dalam denominasi rupiah, sedangkan biaya pengolahan dan margin penjualan turut memengaruhi harga di tingkat konsumen. Kenaikan harga beras secara tahunan terutama mencerminkan akumulasi tekanan pasokan akibat produksi padi Kalimantan Barat yang belum merata sepanjang tahun. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Barat, produksi beras mengalami tren yang menurun terutama sejak tahun 2024 dikarenakan alih fungsi sawah ke sawit yang cukup kuat. Produksi padi Januari-April 2026 tercatat 370.774 ton gabah kering giling (GKG), turun sekitar 21.437 ton atau 5,4 persen dibanding Januari-April 2025 yang sebesar 392.211 ton. Selanjutnya, Kenaikan bahan bakar rumah tangga terutama berkaitan dengan penyesuaian harga LPG nonsubsidi atau Bright Gas yang mulai berlaku pada 18 April 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan setelah harga tidak berubah sejak 2023, di tengah kenaikan biaya pengadaan LPG, penguatan nilai tukar USD terhadap rupiah, dan meningkatnya harga energi global. Di Kalimantan Barat, harga Bright Gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg naik sekitar 17–18%.



Grafik 2.1. Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional



Grafik 2.2. Laju Inflasi Antar Provinsi di Kalimantan dan Nasional s.d. Triwulan II 2026

Tabel 2.1. Perkembangan Inflasi Tahunan (yoy) Kalimantan Barat Berdasarkan Kelompok

Inflasi Kelompok Barang (%yoy)	2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Umum	5,06	4,10	2,26	2,02	2,51	2,28	1,79	1,71	0,94	1,20	1,94	1,85	2,89	3,28
Makanan, Minuman dan Tembakau	4,74	3,88	2,95	2,94	5,36	4,51	3,03	3,25	2,98	1,33	3,56	2,87	2,72	4,28
Pakaian dan Alas Kaki	0,48	1,92	2,52	3,27	1,93	1,11	1,02	1,21	1,55	1,72	1,37	0,64	0,47	0,67
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	3,35	2,15	1,00	0,81	0,33	0,19	0,25	0,14	-5,72	0,20	0,24	0,34	6,83	2,10
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	4,23	1,97	1,64	1,61	0,41	0,54	0,61	0,05	0,35	-0,02	-0,57	-0,74	-0,44	1,51
Kesehatan	-0,54	0,76	1,20	0,33	1,13	0,87	0,68	1,03	1,24	1,04	1,18	0,61	0,49	0,69
Transportasi	15,98	13,24	2,36	2,56	0,92	1,88	1,09	0,04	0,90	1,05	1,23	1,63	2,43	5,11
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,09	0,30	0,65	0,46	0,35	-0,03	-0,20	-0,29	-0,56	-0,57	-0,56	-0,38	-0,10	1,14
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	2,81	0,74	3,98	3,42	0,93	0,72	1,27	1,32	1,70	1,84	0,15	0,25	0,29	0,47
Pendidikan	1,36	1,36	0,55	0,57	1,18	1,18	3,18	3,10	2,39	2,60	2,41	2,45	2,89	2,70
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	3,53	3,12	2,58	1,13	1,11	1,12	1,06	1,26	0,95	1,27	1,22	1,04	0,98	1,82
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	6,69	5,00	4,17	2,25	2,45	2,76	3,54	3,33	3,79	3,91	3,75	6,15	7,84	5,81

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 2.2. Perkembangan Andil Inflasi Tahunan (yoy) Kalimantan Barat Berdasarkan Kelompok

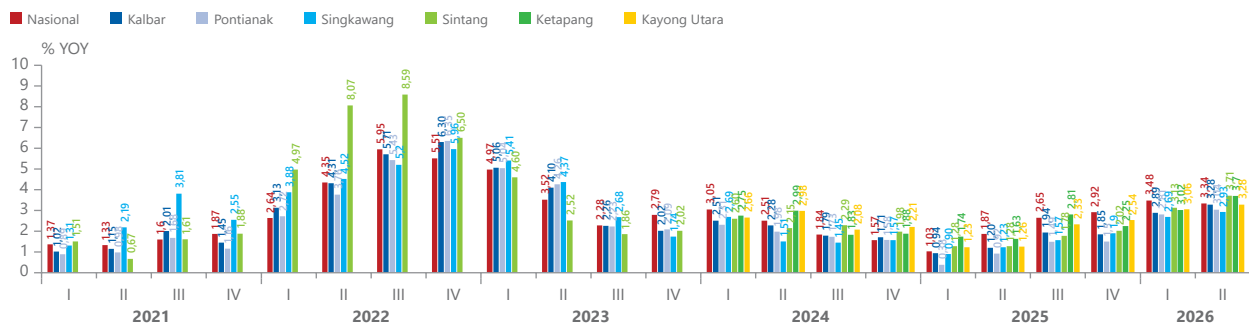
Inflasi Kelompok Barang (%yoy)	2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Umum	5,06	4,10	2,26	2,02	2,51	2,28	1,79	1,71	0,94	1,20	1,94	1,85	2,89	3,28
Makanan, Minuman dan Tembakau	1,59	1,32	0,98	0,98	1,88	1,60	1,07	1,16	1,08	0,48	1,28	1,04	1,00	1,55
Pakaian dan Alas Kaki	0,02	0,10	0,12	0,16	0,09	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,06	0,03	0,02	0,03
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,56	0,36	0,17	0,13	0,05	0,03	0,03	0,02	-0,79	0,03	0,03	0,05	0,88	0,29
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,22	0,10	0,08	0,08	0,02	0,03	0,03	0,00	0,02	0,00	-0,03	-0,04	-0,02	0,08
Kesehatan	-0,02	0,02	0,03	0,01	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01	0,02
Transportasi	1,90	1,58	0,31	0,34	0,11	0,22	0,13	0,00	0,10	0,12	0,14	0,19	0,28	0,59
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,00	0,01	0,03	0,02	0,02	0,00	-0,01	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	0,06
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,05	0,01	0,07	0,06	0,02	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01
Pendidikan	0,06	0,06	0,02	0,02	0,04	0,04	0,12	0,12	0,09	0,10	0,09	0,09	0,11	0,10
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,28	0,24	0,20	0,09	0,10	0,10	0,09	0,11	0,08	0,11	0,11	0,09	0,09	0,16
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,39	0,29	0,24	0,13	0,16	0,18	0,23	0,22	0,25	0,26	0,25	0,41	0,52	0,39

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Secara spasial, peningkatan inflasi Kalimantan Barat pada triwulan II 2026 sejalan dengan laju inflasi (Grafik 2.3) seluruh kabupaten/kota sampel IHK Kalimantan Barat. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sintang sebesar 3,71% (yoy), diikuti Kabupaten Ketapang sebesar 3,70% (yoy), Kabupaten Kayong Utara sebesar 3,28% (yoy), Kota Pontianak sebesar 3,04% (yoy), dan Kota Singkawang sebesar 2,93% (yoy). Dibandingkan triwulan I 2026, inflasi di kelima wilayah tersebut

meningkat, masing-masing dari 3,13%; 3,02%; 3,06%; 2,81%; 2,68% (yoy).

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi pada seluruh wilayah IHK terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini memberikan andil sebesar 1,12% (yoy) di Pontianak, 1,45% (yoy) di Singkawang, 1,82% (yoy) di Sintang, 2,18% (yoy) di Ketapang, dan 2,04% (yoy) di Kayong Utara. Inflasi kelompok makanan, minuman,



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Grafik 2.3. Perkembangan Inflasi Kabupaten/Kota Sampel Kalimantan Barat

dan tembakau utamanya didorong oleh komoditas beras, yang termasuk dalam 10 komoditas utama penyumbang inflasi di seluruh wilayah IHK. Kenaikan harga beras secara tahunan terutama mencerminkan akumulasi tekanan pasokan akibat produksi padi Kalimantan Barat yang belum merata sepanjang tahun. Pada awal triwulan II 2026, produksi padi mengalami penurunan, antara lain tercermin dari produksi April 2026 yang hanya mencapai 49,08 ribu ton GKG atau turun 62,57% dibandingkan bulan sebelumnya dan 38,19% dibandingkan April 2025. Berakhirnya periode panen raya, kenaikan harga gabah di tingkat produsen, serta meningkatnya permintaan selama HBKN Idul Adha turut menjaga harga beras pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan Juni 2025.

Peningkatan inflasi tahunan juga didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya di seluruh kabupaten/kota sampel IHK yang masing-masing mengalami andil inflasi tahunan Kota Pontianak 0,24% (yoy), Kab. Ketapang 0,49% (yoy), Kota Singkawang 0,40% (yoy), Kab. Sintang 0,98% (yoy), dan Kab. Kayong Utara 0,47% (yoy). Kenaikan inflasi ini utamanya didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan di tingkat konsumen yang merupakan transmisi dari kenaikan harga emas dunia selama setahun terakhir, sejalan dengan meningkatnya permintaan terhadap emas sebagai aset aman di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Penguatan nilai tukar USD terhadap rupiah secara tahunan juga meningkatkan harga emas dalam

denominasi rupiah, sedangkan biaya pengolahan dan margin penjualan turut memengaruhi harga di tingkat konsumen.

Pada triwulan III 2026, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Barat berupaya menjaga tingkat inflasi pada rentang target nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$. Terpantau inflasi tahunan Kalimantan Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 3,18% (yoy), melandai dibandingkan posisi akhir triwulan II 2026 yang sebesar 3,28% (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluarannya, inflasi tahunan masih terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,94% (yoy) dengan andil sebesar 1,44% (yoy). Sementara itu, dari sisi komoditas, komoditas utama penyumbang andil inflasi terbesar Juli 2026 adalah emas perhiasan, minyak goreng, beras, ikan baung, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,31%; 0,18%; 0,17%; 0,17%; 0,17% (yoy). Komoditas tersebut juga telah menjadi sumber tekanan inflasi pada Juni 2026, yang menunjukkan persistensi tekanan harga pangan, komoditas global, dan energi rumah tangga. Dibandingkan bulan sebelumnya, andil emas perhiasan, beras, dan bahan bakar rumah tangga melandai, sedangkan andil minyak goreng dan ikan baung meningkat. Selanjutnya, TPID Provinsi Kalimantan Barat senantiasa berkomitmen untuk terus berinovasi melakukan pengendalian inflasi jangka pendek dan jangka menengah panjang yang efektif agar inflasi bergerak stabil pada target sasaran.

2.2. INFLASI BULANAN (MTM)

Pada April 2026, Kalimantan Barat mengalami inflasi sebesar 0,57% (mtm), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,13% (mtm). Tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 0,96% (mtm) dengan andil 0,35% (mtm). Inflasi kelompok ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,33% (mtm) dan lebih tinggi daripada rerata inflasi April selama tiga tahun terakhir sebesar 0,60% (mtm). Perkembangan ini menunjukkan bahwa tekanan pangan di Kalimantan Barat masih meningkat meskipun permintaan masyarakat secara umum mulai mengalami normalisasi pasca periode *rally* HBKN di bulan sebelumnya yang mencakup HBKN Cap Go Meh, Nyepi, dan Idul Fitri.

Berdasarkan komoditas, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama bersumber dari beras, minyak goreng, cabai rawit, dan ikan kembung yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 1,02%; 3,25%; 8,90%; dan 3,46% (mtm). Beras dan minyak goreng masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,05% (mtm), sedangkan cabai rawit dan ikan kembung masing-masing memberikan andil sebesar 0,04% (mtm). Kenaikan harga beras sejalan dengan penurunan produksi padi lokal. Produksi padi dalam bentuk gabah kering giling (GKG) di Kalimantan Barat pada April 2026 tercatat sebesar 49,08 ribu ton, menurun 62,57% (mtm) dan 38,19% (yoy). Inflasi minyak goreng terutama dipengaruhi oleh peningkatan biaya produksi, khususnya kenaikan harga kemasan plastik. Secara nasional, harga bahan kemasan plastik dilaporkan meningkat sekitar 30–80% pada April 2026 akibat gangguan rantai pasok global, eskalasi geopolitik di Timur Tengah, dan masih tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor. Tekanan harga juga diperkuat oleh kenaikan harga CPO global yang mengalami kenaikan signifikan sebesar 5,41% dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan harga cabai rawit terutama disebabkan oleh keterbatasan pasokan lokal seiring penurunan produksi di Kabupaten Sambas dan Kubu Raya pada periode transisi tanam. Terbatasnya pasokan menyebabkan harga cabai rawit di Kubu Raya sempat

mencapai sekitar Rp130.000 per kilogram pada April 2026. Tekanan harga di Kalimantan Barat berlawanan dengan perkembangan nasional yang mengalami deflasi cabai rawit seiring berlangsungnya panen di sentra Jawa. Perbedaan tersebut menunjukkan masih terbatasnya transmisi pasokan antardaerah dalam meredam gangguan produksi cabai lokal. Sementara itu, harga ikan kembung meningkat sejalan dengan berkurangnya pasokan hasil tangkapan nelayan yang dipengaruhi oleh berkurangnya frekuensi melaut akibat perubahan kondisi arus dan perairan yaitu sirkulasi arus *Eddy*, serta kenaikan biaya operasional, khususnya bahan bakar solar.

Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh deflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,67% (mtm), dengan andil deflasi sebesar 0,05% (mtm). Penurunan tersebut diperkirakan terutama dipengaruhi oleh koreksi harga emas perhiasan yang mengalami deflasi sebesar 3,76% (mtm) dengan andil deflasi sebesar 0,11% (mtm), sejalan dengan penurunan harga emas global pada April 2026. Secara komoditas, penahan inflasi terbesar berasal dari daging ayam ras yang mengalami deflasi 6,20% (mtm) dan memberikan andil deflasi sebesar 0,11% (mtm). Penurunan harga daging ayam ras didorong oleh normalisasi permintaan pasca- *rally* HBKN Cap Go Meh, Nyepi, dan Idul Fitri, serta pasokan yang relatif berlimpah. Kondisi tersebut didukung oleh prognosa neraca produksi tahunan Kalimantan Barat yang mencatat surplus daging ayam ras lebih dari 12 ribu ton. Selain itu, penurunan harga jagung pakan dan bibit ayam atau *day-old chick* (DOC) secara nasional turut menurunkan biaya produksi peternak.

Pada Mei 2026, Kalimantan Barat mengalami inflasi sebesar 0,32% (mtm), lebih rendah dibandingkan April 2026 sebesar 0,57% (mtm), tetapi sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,28% (mtm). Meskipun melandai dibandingkan bulan sebelumnya, inflasi Mei masih relatif tinggi secara historis dan terutama mencerminkan transmisi penyesuaian harga energi.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi

sebesar 1,20% (mtm) dan memberikan andil sebesar 0,16% (mtm). Tekanan pada kelompok ini terutama bersumber dari komoditas bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi sebesar 5% (mtm) memberikan andil inflasi sebesar 0,11% (mtm). Kenaikan harga bahan bakar rumah tangga terutama dipengaruhi oleh transmisi penyesuaian harga LPG nonsubsidi yang diberlakukan sejak 18 April 2026. Untuk wilayah Kalimantan Barat, harga LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kg meningkat dari Rp97.000 menjadi Rp114.000 per tabung atau sekitar 17,5%, sedangkan LPG ukuran 12 kg meningkat dari Rp202.000 menjadi Rp238.000 per tabung atau sekitar 17,8%. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai respons terhadap kenaikan harga energi global dan pergerakan nilai tukar rupiah di tengah eskalasi ketegangan geopolitik global. Meskipun penyesuaian harga resmi telah berlaku sejak pertengahan April, dampaknya terhadap inflasi lebih kuat pada Mei karena harga baru berlaku selama satu bulan penuh dan ditransmisikan secara bertahap dari agen, pangkalan, hingga pengecer.

Di sisi lain, tekanan inflasi tertahan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 0,21% (mtm) dengan andil deflasi sebesar 0,08% (mtm). Deflasi pada kelompok ini didorong oleh penurunan harga telur ayam ras, cabai rawit, dan daging ayam ras yang masing-masing mengalami deflasi sebesar 7,19%; 18,34%; 6,81% (mtm) dengan andil deflasi masing-masing 0,10%; 0,09%; 0,07% (mtm). Deflasi telur ayam ras dipengaruhi oleh meningkatnya produksi telur dari peternak lokal, terutama di Singkawang sebagai sentra utama produksi telur ayam ras di Kalimantan Barat. Peningkatan produksi tersebut tidak diikuti oleh penyerapan pasar. Dari sisi permintaan, penangguhan operasional lebih dari 100 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Barat mengurangi penyerapan telur untuk kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat memperkirakan kondisi tersebut menyebabkan sekitar 1,2–1,5 juta butir telur per minggu berpotensi tidak terserap. Penyerapan juga menurun seiring normalisasi permintaan masyarakat pasca *rally* HBKN Cap Go Meh, Nyepi, dan Idul Fitri. Deflasi cabai rawit mengandung unsur koreksi dari harga April yang relatif tinggi,

setelah meningkat 8,90% (mtm) pada April, harga cabai rawit turun 18,34% pada Mei. Sementara itu, penurunan harga daging ayam ras terutama dipengaruhi oleh kelebihan pasokan (*oversupply*) sejalan dengan proyeksi neraca produksi daging ayam ras Kalimantan Barat yang mencatat surplus lebih dari 12 ribu ton dalam setahun.

Pada Juni 2026, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kalimantan Barat tercatat mengalami inflasi sebesar 0,31% (mtm), relatif stabil dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,32% (mtm). Meskipun lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,44% (mtm), realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan rerata inflasi Kalimantan Barat pada bulan Juni selama tiga tahun terakhir sebesar 0,10% (mtm).

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi Juni 2026 terutama bersumber dari kelompok transportasi yang mengalami inflasi sebesar 1,59% (mtm) dan memberikan andil sebesar 0,18% (mtm). Tekanan inflasi pada kelompok tersebut terutama berasal dari angkutan udara, bensin, dan pelumas/oli mesin, yang mengalami inflasi masing-masing sebesar 8,27%; 1,65%; 4,70% (mtm) dengan andil masing-masing sebesar 0,08%; 0,07%; 0,03% (mtm). Kenaikan tarif angkutan udara dipengaruhi oleh kombinasi tekanan biaya dan peningkatan permintaan. Dari sisi biaya, harga avtur yang masih berada pada level tinggi mendorong Pemerintah memberikan ruang kepada maskapai untuk mengenakan biaya tambahan bahan bakar atau *fuel surcharge* maksimum sebesar 50% dari Tarif Batas Atas sesuai kelompok pelayanan. Dari sisi permintaan, berlangsungnya periode libur sekolah pada Juni meningkatkan mobilitas masyarakat dan jumlah penumpang, sehingga memperkuat tekanan terhadap tarif angkutan udara. Inflasi bensin terutama disebabkan oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamina yang berlaku sejak 10 Juni 2026, dimana harga Pertamina meningkat sekitar 32% menjadi Rp16.650 per liter. Sementara itu, kenaikan harga pelumas/oli mesin diperkirakan mencerminkan transmisi tertunda dari lonjakan harga minyak bumi pada periode sebelumnya akibat dinamika geopolitik global, depresiasi nilai tukar, serta meningkatnya biaya produksi oli mesin dan produk turunannya.

Di sisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas hortikultura, yaitu sawi hijau, ketimun, kacang panjang, bayam, kangkung, buncis, dan terong, yang mengalami deflasi masing-masing sebesar 20,32%; 29,12%; 29,93%; 20,40%; 4,35%; 18,68%; 4,94% (mtm) dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,09%; 0,07%; 0,05%; 0,05%; 0,02%; 0,02%; 0,01% (mtm). Penurunan harga

yang terjadi secara serentak pada berbagai jenis sayuran mengindikasikan meningkatnya pasokan pada periode panen dari sentra produksi Kalimantan Barat, antara lain Kubu Raya, Bengkayang, dan Landak. Kondisi hujan yang masih berada di bawah ambang ekstrem diperkirakan turut menjaga aktivitas panen dan distribusi, meskipun curah hujan Kalimantan Barat pada Juni secara umum masih relatif tinggi.

Tabel 2.3. Perkembangan Inflasi Bulanan (mtm)

Kelompok Barang	Tw III 2025			Tw IV 2025			Tw I 2026			Tw II 2026		
	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Umum	0,47	-0,26	0,11	0,17	0,23	0,28	0,27	0,51	0,41	0,57	0,32	0,31
Makanan, Minuman dan Tembakau	1,17	-0,46	-0,08	0,38	0,30	0,36	0,42	0,95	1,07	0,96	-0,21	0,09
Pakaian dan Alas Kaki	0,07	-0,01	0,00	0,07	0,05	0,00	0,10	0,00	0,37	0,13	0,16	0,01
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,11	0,04	0,02	0,02	0,02	0,07	0,10	0,02	0,09	0,32	1,20	0,09
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0,43	-0,06	0,01	-0,03	-0,10	-0,03	0,06	0,32	0,04	0,63	0,40	0,67
Kesehatan	-0,11	0,09	0,09	0,02	0,06	-0,11	0,20	0,15	0,10	0,03	-0,01	0,16
Transportasi	-0,29	-0,90	0,78	-0,73	0,71	0,73	-0,02	0,48	0,41	1,04	1,03	1,59
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,04	-0,01	-0,01	0,00	0,03	-0,03	-0,06	0,07	0,06	0,37	0,58	0,04
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	-0,15	0,00	0,03	-0,02	0,16	0,01	0,00	0,01	0,16	0,19	0,14	0,09
Pendidikan	2,13	0,07	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07	0,00	0,03	0,01	0,00	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,13	0,01	0,00	0,02	0,00	0,10	0,00	0,03	0,17	0,64	0,64	0,22
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,04	0,10	0,64	1,71	0,52	0,70	1,29	1,29	-0,21	-0,67	-0,17	0,21

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Tabel 2.4. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan (mtm)

	April 2026			Mei 2026			Juni 2026		
	0,57%			0,32%			0,31%		
	Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil
Inflasi	ANGKUTAN UDARA	6,77	0,06	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	5,00	0,11	ANGKUTAN UDARA	8,27	0,08
	BERAS	1,02	0,05	PEMELIHARAAN/SERVICE	10,84	0,09	BENSIN	1,65	0,07
	MINYAK GORENG	3,25	0,05	SAWI HIJAU	21,87	0,08	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	8,21	0,06
	CABAI RAWIT	8,90	0,04	IKAN BAUNG	10,69	0,05	WORTEL	21,05	0,04
	IKAN KEMBUNG/IKAN GEMBUNG/ IKAN BANYAR/ IKAN GEMBOLO/ IKAN ASO-ASO	3,46	0,04	PELUMAS/OLI MESIN	7,81	0,05	PELUMAS/OLI MESIN	4,70	0,03
	PELUMAS/OLI MESIN	5,08	0,03	BAWANG MERAH	11,19	0,04	UDANG BASAH	3,38	0,03
	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	1,25	0,03	MINYAK GORENG	2,46	0,04	MINYAK GORENG	1,64	0,02
	TOMAT	24,61	0,03	BERAS	0,71	0,04	CABAI RAWIT	5,03	0,02
	KETIMUN	12,62	0,03	PERBAIKAN RINGAN KENDARAAN	15,15	0,02	CUMI-CUMI	5,45	0,02
	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	3,57	0,03	TELEPON SELULER	2,99	0,02	IKAN NILA	2,45	0,02

Tabel 2.4. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan (mtm) Lanjutan

	April 2026			Mei 2026			Juni 2026		
	0,57%			0,32%			0,31%		
	Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil
Deflasi	DAGING AYAM RAS	-5,12	-0,10	TELUR AYAM RAS	-7,19	-0,10	SAWI HIJAU	-20,32	-0,09
	EMAS PERHIASAN	-4,57	-0,05	CABAI RAWIT	-18,34	-0,09	KETIMUN	-29,12	-0,07
	TELUR AYAM RAS	-3,69	-0,05	ANGKUTAN UDARA	-6,81	-0,07	KACANG PANJANG	-29,93	-0,05
	JERUK	-5,86	-0,02	DAGING AYAM RAS	-2,05	-0,04	BAYAM	-20,40	-0,05
	BAWANG PUTIH	-2,55	-0,01	IKAN KEMBUNG/ IKAN GEMBUNG/ IKAN BANYAR/IKAN GEMBOLO/ IKAN ASO-ASO	-2,59	-0,03	KANGKUNG	-4,35	-0,02
	BUNCIS	-8,25	-0,01	CUMI-CUMI	-6,42	-0,03	BUNCIS	-18,68	-0,02
	PASTA GIGI	-1,03	-0,01	KANGKUNG	-5,68	-0,02	TERONG	-4,94	-0,01
	UDANG BASAH	-0,60	0,00	UDANG BASAH	-2,59	-0,02	BUAH NAGA	-8,20	-0,01
	IKAN PATIN	-3,10	0,00	CABAI MERAH	-9,31	-0,02	BAWANG PUTIH	-1,82	-0,01
	PEPAYA	-2,74	0,00	EMAS PERHIASAN	-1,66	-0,02	OYONG/GAMBAS/ BESTRU/EMES	-18,05	0,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

2.3. INFLASI TAHUNAN (YOY)

Inflasi Kalimantan Barat pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 3,28% (yoy). Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi pada akhir triwulan I 2026 yang sebesar 2,89% (yoy), dan sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi nasional triwulan II sebesar 3,34% (yoy). Akselerasi inflasi terutama terkonsentrasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok transportasi; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 4,28%; 5,11%; 5,81% (yoy), serta memberikan andil masing-masing sebesar 1,55%; 0,59%; 0,39% (yoy).

Berdasarkan komoditas, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau utamanya didorong oleh komoditas beras, ikan baung, dan minyak goreng yang mengalami inflasi masing-masing sebesar 4,64%; 37,02%; 9,15% (yoy) dengan andil masing-masing sebesar 0,23%; 0,16%; 0,13% (yoy). Kenaikan harga beras secara tahunan terutama mencerminkan akumulasi tekanan pasokan akibat produksi padi Kalimantan Barat yang belum merata sepanjang tahun. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Barat, produksi beras mengalami tren yang menurun terutama sejak tahun

2024 dikarenakan alih fungsi sawah ke sawit yang cukup kuat. Produksi padi Januari-April 2026 tercatat 370.774 ton gabah kering giling (GKG), turun sekitar 21.437 ton atau 5,4 persen dibanding Januari-April 2025 yang sebesar 392.211 ton. Sementara itu, ikan baung tercatat berulang kali menjadi salah satu penyumbang inflasi Kalimantan Barat selama semester I 2026. Inflasi ikan baung disebabkan oleh pasokan yang relatif tidak elastis karena masih banyak bergantung pada hasil tangkapan perairan umum, sedangkan pengembangan budidayanya belum sebesar komoditas ikan air tawar lain seperti nila, lele, dan patin. Populasi ikan endemik di Danau Sentarum dan Sungai Kapua, termasuk ikan baung, juga terus mengalami penurunan akibat tingginya eksploitasi serta menurunnya kualitas air. Kenaikan harga minyak goreng terutama dipengaruhi oleh masih tingginya harga minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) sebagai bahan baku utama minyak goreng. Harga referensi CPO pada Juni 2026 tercatat sebesar USD1.029,51 per metrik ton, meningkat sekitar 20,2% dibandingkan Juni 2025 yang sebesar USD856,38 per metrik ton.

Selanjutnya, pada kelompok transportasi, inflasi terutama didorong oleh komoditas angkutan udara yang mengalami inflasi sebesar 17,28% (yoy)

dengan andil sebesar 0,15% (yoy). Tekanan harga dipengaruhi oleh masih tingginya biaya avtur dan penerapan kebijakan batas maksimum biaya tambahan bahan bakar atau *fuel surcharge* sejak tahun 2026. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026, maskapai diperbolehkan mengenakan *fuel surcharge* hingga maksimal 50% dari tarif batas atas untuk pesawat jet. Sementara itu, pada kelompok perawatan pribadi lainnya inflasi utamanya didorong oleh emas perhiasan yang mencatatkan tingkat inflasi dan andil inflasi tertinggi di triwulan II 2026 masing-masing sebesar 42,15% (yoy) dan 0,34% (yoy). Tingginya harga emas di tingkat konsumen merupakan transmisi dari kenaikan harga emas dunia selama setahun terakhir, sejalan dengan meningkatnya permintaan terhadap emas sebagai aset aman di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Penguatan nilai tukar USD terhadap rupiah secara tahunan juga meningkatkan harga emas dalam denominasi rupiah, sedangkan biaya pengolahan dan margin penjualan turut

memengaruhi harga di tingkat konsumen. Meskipun demikian, tekanan dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mulai melandai dibandingkan triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut konsisten dengan mulai terkoreksinya harga emas dunia selama triwulan II 2026, sehingga kenaikan harga emas secara tahunan masih tinggi, tetapi momentum kenaikannya dibandingkan triwulan sebelumnya mulai berkurang.

Di samping itu, komoditas bahan bakar rumah tangga juga turut menjadi peringkat 3 pendorong inflasi pada triwulan II 2026, dengan inflasi sebesar 8,16% (yoy) dan andil inflasi sebesar 0,18% (yoy). Kenaikan terutama berkaitan dengan penyesuaian harga LPG nonsubsidi atau Bright Gas yang mulai berlaku pada 18 April 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan setelah harga tidak berubah sejak 2023, di tengah kenaikan biaya pengadaan LPG, pelemahan nilai tukar, dan meningkatnya harga energi global. Di Kalimantan Barat, harga Bright Gas ukuran 5,5 kg dan 12 kg naik sekitar 17–18%.

Tabel 2.5. Perkembangan Inflasi Tahunan (yoy)

Inflasi Kelompok Barang (%yoy)	2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Umum	5,06	4,10	2,26	2,02	2,51	2,28	1,79	1,71	0,94	1,20	1,94	1,85	2,89	3,28
Makanan, Minuman dan Tembakau	4,74	3,88	2,95	2,94	5,36	4,51	3,03	3,25	2,98	1,33	3,56	2,87	2,72	4,28
Pakaian dan Alas Kaki	0,48	1,92	2,52	3,27	1,93	1,11	1,02	1,21	1,55	1,72	1,37	0,64	0,47	0,67
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	3,35	2,15	1,00	0,81	0,33	0,19	0,25	0,14	-5,72	0,20	0,24	0,34	6,83	2,10
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	4,23	1,97	1,64	1,61	0,41	0,54	0,61	0,05	0,35	-0,02	-0,57	-0,74	-0,44	1,51
Kesehatan	-0,54	0,76	1,20	0,33	1,13	0,87	0,68	1,03	1,24	1,04	1,18	0,61	0,49	0,69
Transportasi	15,98	13,24	2,36	2,56	0,92	1,88	1,09	0,04	0,90	1,05	1,23	1,63	2,43	5,11
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,09	0,30	0,65	0,46	0,35	-0,03	-0,20	-0,29	-0,56	-0,57	-0,56	-0,38	-0,10	1,14
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	2,81	0,74	3,98	3,42	0,93	0,72	1,27	1,32	1,70	1,84	0,15	0,25	0,29	0,47
Pendidikan	1,36	1,36	0,55	0,57	1,18	1,18	3,18	3,10	2,39	2,60	2,41	2,45	2,89	2,70
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	3,53	3,12	2,58	1,13	1,11	1,12	1,06	1,26	0,95	1,27	1,22	1,04	0,98	1,82
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	6,69	5,00	4,17	2,25	2,45	2,76	3,54	3,33	3,79	3,91	3,75	6,15	7,84	5,81

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 2.6. Perkembangan Andil Inflasi Tahunan (yoy)

Andil Inflasi Kelompok Barang (%yoy)	2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Umum	5,06	4,10	2,26	2,02	2,51	2,28	1,79	1,71	0,94	1,20	1,94	1,85	2,89	3,28
Makanan, Minuman dan Tembakau	1,59	1,32	0,98	0,98	1,88	1,60	1,07	1,16	1,08	0,48	1,28	1,04	1,00	1,55
Pakaian dan Alas Kaki	0,02	0,10	0,12	0,16	0,09	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,06	0,03	0,02	0,03
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,56	0,36	0,17	0,13	0,05	0,03	0,03	0,02	-0,79	0,03	0,03	0,05	0,88	0,29
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,22	0,10	0,08	0,08	0,02	0,03	0,03	0,00	0,02	0,00	-0,03	-0,04	-0,02	0,08
Kesehatan	-0,02	0,02	0,03	0,01	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,01	0,02
Transportasi	1,90	1,58	0,31	0,34	0,11	0,22	0,13	0,00	0,10	0,12	0,14	0,19	0,28	0,59
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,00	0,01	0,03	0,02	0,02	0,00	-0,01	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01	0,06
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,05	0,01	0,07	0,06	0,02	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01
Pendidikan	0,06	0,06	0,02	0,02	0,04	0,04	0,12	0,12	0,09	0,10	0,09	0,09	0,11	0,10
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,28	0,24	0,20	0,09	0,10	0,10	0,09	0,11	0,08	0,11	0,11	0,09	0,09	0,16
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,39	0,29	0,24	0,13	0,16	0,18	0,23	0,22	0,25	0,26	0,25	0,41	0,52	0,39

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 2.7. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Tahunan (yoy)

	Kalbar			Kota Pontianak			Kota Singkawang		
	3,28% (yoy)			3,04% (yoy)			2,93% (yoy)		
	Komoditas	yoy	Andil	Komoditas	yoy	Andil	Komoditas	yoy	Andil
Inflasi	EMAS PERHIASAN	42,15	0,34	ANGKUTAN UDARA	18,46	0,29	EMAS PERHIASAN	43,43	0,23
	BERAS	4,64	0,23	EMAS PERHIASAN	43,25	0,21	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	12,05	0,19
	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	8,16	0,18	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	8,22	0,18	BERAS	3,13	0,15
	IKAN BAUNG	37,02	0,16	PELUMAS/OLI MESIN	28,62	0,18	SIGARET KRETEK MESIN (SKM)	3,41	0,12
	ANGKUTAN UDARA	17,28	0,15	BERAS	3,89	0,17	MINYAK GORENG	7,90	0,11
	MINYAK GORENG	9,15	0,13	IKAN NILA	21,51	0,15	IKAN KEMBUNG/ IKAN GEMBUNG/ IKAN BANYAR/IKAN GEMBOLO/ IKAN ASO-ASO	11,01	0,11
	IKAN NILA	16,24	0,12	BENSIN	2,14	0,11	CABAI RAWIT	31,35	0,10
	PELUMAS/OLI MESIN	19,47	0,11	PEMELIHARAAN/SERVICE	11,74	0,11	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	3,21	0,09
	PEMELIHARAAN/SERVICE	12,92	0,11	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	13,41	0,09	BAWANG MERAH	31,57	0,07
	CABAI RAWIT	28,80	0,10	IKAN KEMBUNG/ IKAN GEMBUNG/ IKAN BANYAR/IKAN GEMBOLO/ IKAN ASO-ASO	9,28	0,09	SAWI HIJAU	20,24	0,07

Tabel 2.7. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Tahunan (yoy) Lanjutan

	Kalbar			Kota Pontianak			Kota Singkawang		
	3,28% (yoy)			3,04% (yoy)			2,93% (yoy)		
	Komoditas	yoy	Andil	Komoditas	yoy	Andil	Komoditas	yoy	Andil
Deflasi	KETIMUN	-24,03	-0,06	UDANG BASAH	-12,41	-0,11	DAGING BABI	-17,20	-0,22
	UDANG BASAH	-6,36	-0,06	DAGING AYAM RAS	-4,08	-0,05	TELUR AYAM RAS	-6,95	-0,10
	DAGING BABI	-12,75	-0,03	POPOK BAYI SEKALI PAKAI/ DIAPERS	-7,51	-0,04	MASKER	-3,73	-0,01
	TERONG	-10,39	-0,02	BISKUIT	-7,85	-0,03	KOPI BUBUK	-1,62	-0,01
	POPOK BAYI SEKALI PAKAI/ DIAPERS	-2,19	-0,01	KETIMUN	-35,39	-0,03	BAWANG BOMBAY	-10,34	0,00
	SABUN DETERGEN BUBUK	-2,25	-0,01	PENGHARUM CUCIAN/ PELEMBUT	-8,21	-0,02	PEMBERSIH LANTAI	-1,74	0,00
	BISKUIT	-2,69	-0,01	DAGING BABI	-7,83	-0,02	OYONG/GAMBAS/ BESTRU/EMES	-4,36	0,00
	BAYAM	-5,08	-0,01	TELUR AYAM RAS	-1,29	-0,01	KEMBUNG DIAWETKAN	-4,94	0,00
	DAGING AYAM RAS	-0,57	-0,01	SEMANGKA	-10,00	-0,01	SABUN MANDI CAIR	-0,71	0,00
	PENGHARUM CUCIAN/ PELEMBUT	-3,12	-0,01	PEMBALUT WANITA	-3,50	-0,01	KETIMUN	-1,94	0,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

	Kabupaten Sintang			Kabupaten Ketapang			Kabupaten Kayong Utara		
	3,71% (yoy)			3,70% (yoy)			3,28% (yoy)		
	Komoditas	yoy	Andil	Komoditas	yoy	Andil	Komoditas	yoy	Andil
Inflasi	EMAS PERHIASAN	42,82	0,91	IKAN BAUNG	39,76	0,55	EMAS PERHIASAN	28,55	0,45
	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	12,08	0,31	EMAS PERHIASAN	44,64	0,43	BERAS	7,21	0,42
	BERAS	3,58	0,21	BERAS	5,77	0,35	SIGARET KRETEK MESIN (SKM)	9,44	0,31
	DAGING SAPI	17,42	0,19	MINYAK GORENG	12,27	0,24	DAGING AYAM RAS	12,58	0,26
	SAWI HIJAU	85,05	0,18	IKAN BANDENG/IKAN BOLU	21,23	0,21	MINYAK GORENG	7,07	0,16
	CABAI RAWIT	23,96	0,14	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	9,89	0,19	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	6,52	0,14
	NASI DENGAN LAUK	8,00	0,12	PEMELIHARAAN/SERVICE	24,31	0,17	PELUMAS/OLI MESIN	10,42	0,12
	BAWANG MERAH	16,08	0,10	CABAI RAWIT	22,36	0,11	BAWANG MERAH	20,54	0,11
	IKAN NILA	20,00	0,10	IKAN NILA	10,55	0,11	UDANG BASAH	8,64	0,10
	BAYAM	23,74	0,07	IKAN TENGGIRI	17,66	0,10	CABAI RAWIT	20,38	0,09
Deflasi	TELUR AYAM RAS	-5,65	-0,07	KETIMUN	-28,94	-0,12	KETIMUN	-11,93	-0,11
	IKAN ASIN LAIS	-22,65	-0,04	BAYAM	-21,14	-0,08	DAUN SINGKONG	-22,89	-0,05
	KETIMUN	-18,07	-0,03	TERONG	-15,03	-0,07	TERONG	-6,98	-0,02
	IKAN LAIS	-5,13	-0,03	UDANG BASAH	-6,90	-0,05	BUKU TULIS BERGARIS	-1,74	-0,01
	MASKER	-7,80	-0,02	SABUN DETERGEN BUBUK	-5,71	-0,04	DETERGEN CAIR	-5,10	-0,01
	DAGING BABI	-9,42	-0,01	TOMAT	-14,02	-0,03	SABUN MANDI	-2,50	-0,01
	ANGKUTAN UDARA	-2,08	-0,01	KACANG PANJANG	-15,43	-0,02	SABUN DETERGEN BUBUK	-1,03	-0,01
	TISSU	-1,45	-0,01	JERUK	-4,07	-0,02	MASKER	-8,63	-0,01
	SUSU BUBUK UNTUK BAYI	-5,31	0,00	PEMBERSIH LANTAI	-4,65	-0,02	PEMBERSIH LANTAI	-1,51	0,00
	TERONG	-2,99	0,00	SABUN MANDI CAIR	-4,45	-0,01	SUSU BUBUK	-0,46	0,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Memasuki triwulan III 2026, inflasi IHK Kalimantan Barat pada Bulan Juli 2026 tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$. Inflasi Juli 2026 tercatat sebesar 3,18% (yoy), melandai dibandingkan posisi akhir triwulan II 2026 yang sebesar 3,28% (yoy). Meskipun masih berada dalam rentang sasaran, inflasi Kalimantan Barat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 2,88% (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluarannya, inflasi tahunan masih terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,94% (yoy) dengan andil sebesar 1,44% (yoy). Sementara itu, dari sisi komoditas, komoditas utama penyumbang andil inflasi terbesar Juli 2026 adalah emas perhiasan, minyak goreng, beras, ikan baung, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,31%; 0,18%; 0,17%; 0,17%; 0,17% (yoy). Komoditas tersebut juga telah menjadi sumber tekanan inflasi pada Juni 2026, yang menunjukkan persistensi tekanan harga pangan, komoditas global, dan energi rumah tangga. Dibandingkan bulan sebelumnya, andil emas perhiasan, beras, dan bahan bakar rumah tangga melandai, sedangkan andil minyak goreng dan ikan baung meningkat.

Meskipun inflasi secara tahunan melandai, hal yang perlu menjadi perhatian adalah fenomena tekanan harga dalam jangka pendek yang justru meningkat. Secara bulanan, Kalimantan Barat mengalami inflasi sebesar 0,38% (mtm), lebih tinggi dibandingkan Juni 2026 yang sebesar 0,31% (mtm), bahkan menjadi inflasi bulanan tertinggi di antara seluruh provinsi ketika secara nasional terjadi deflasi sebesar 0,14% (mtm). Oleh karena itu, TPID se-Kalimantan Barat senantiasa memperkuat komitmen untuk terus berinovasi dan mengakselerasi upaya pengendalian inflasi jangka pendek dan jangka menengah panjang yang efektif dalam menjaga inflasi bergerak stabil pada target sasaran tahun 2026 sebesar $2,5 \pm 1\%$.

2.4. INFLASI KOTA

Secara spasial, peningkatan inflasi Kalimantan Barat pada triwulan II 2026 sejalan dengan laju inflasi (Grafik 2.3) seluruh kabupaten/kota sampel IHK Kalimantan Barat. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sintang

sebesar 3,71% (yoy), diikuti Kabupaten Ketapang sebesar 3,70% (yoy), Kabupaten Kayong Utara sebesar 3,28% (yoy), Kota Pontianak sebesar 3,04% (yoy), dan Kota Singkawang sebesar 2,93% (yoy). Dibandingkan triwulan I 2026, inflasi di kelima wilayah tersebut meningkat, masing-masing dari 3,13%; 3,02%; 3,06%; 2,81%; 2,68% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, inflasi Sintang dan Ketapang berada sedikit di atas batas atas sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$, sedangkan Pontianak, Singkawang, dan Kayong Utara masih berada dalam rentang sasaran.

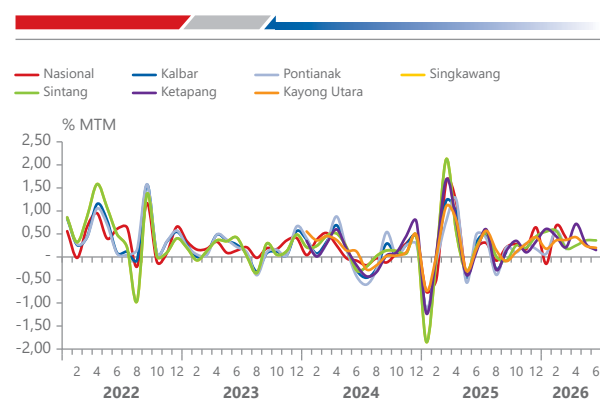
Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi pada seluruh wilayah IHK terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini memberikan andil sebesar 1,12% (yoy) di Pontianak, 1,45% (yoy) di Singkawang, 1,82% (yoy) di Sintang, 2,18% (yoy) di Ketapang, dan 2,04% (yoy) di Kayong Utara. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau utamanya didorong oleh komoditas beras, yang termasuk dalam 10 komoditas utama penyumbang inflasi di seluruh wilayah IHK. Kenaikan harga beras secara tahunan terutama mencerminkan akumulasi tekanan pasokan akibat produksi padi Kalimantan Barat yang belum merata sepanjang tahun. Pada awal triwulan II 2026, produksi padi mengalami penurunan, antara lain tercermin dari produksi April 2026 yang hanya mencapai 49,08 ribu ton GKG atau turun 62,57% dibandingkan bulan sebelumnya dan 38,19% dibandingkan April 2025. Berakhirnya periode panen raya, kenaikan harga gabah di tingkat produsen, serta meningkatnya permintaan selama HBKN Idul Adha turut menjaga harga beras pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan Juni 2025. Selain beras, komoditas cabai rawit juga turut menjadi 10 komoditas utama penyumbang inflasi di seluruh wilayah IHK, kecuali Pontianak. Kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi oleh produksi lokal yang belum selalu mampu memenuhi kebutuhan, khususnya ketika berlangsung masa transisi tanam di sejumlah sentra produksi seperti Sambas dan Kubu Raya. Kenaikan harga juga meningkat menjelang Idul Adha, sebagaimana tercermin dari kenaikan harga cabai rawit merah di Sambas dari Rp80.000 menjadi Rp90.000 per kilogram pada akhir Mei 2026. Tidak masuknya cabai rawit dalam sepuluh penyumbang utama inflasi Pontianak

tidak menunjukkan bahwa komoditas tersebut tidak mengalami kenaikan harga. Harga cabai rawit di Pontianak selama periode Iduladha masih berada pada kisaran Rp56.000–Rp80.000 per kilogram, tetapi andilnya relatif lebih kecil dibandingkan komoditas lain yang mengalami kenaikan lebih tinggi atau memiliki bobot konsumsi lebih besar, seperti angkutan udara, emas perhiasan, dan bahan bakar rumah tangga. Selain itu, posisi Pontianak sebagai pusat perdagangan dan distribusi turut memberikan akses terhadap sumber pasokan yang relatif lebih beragam.

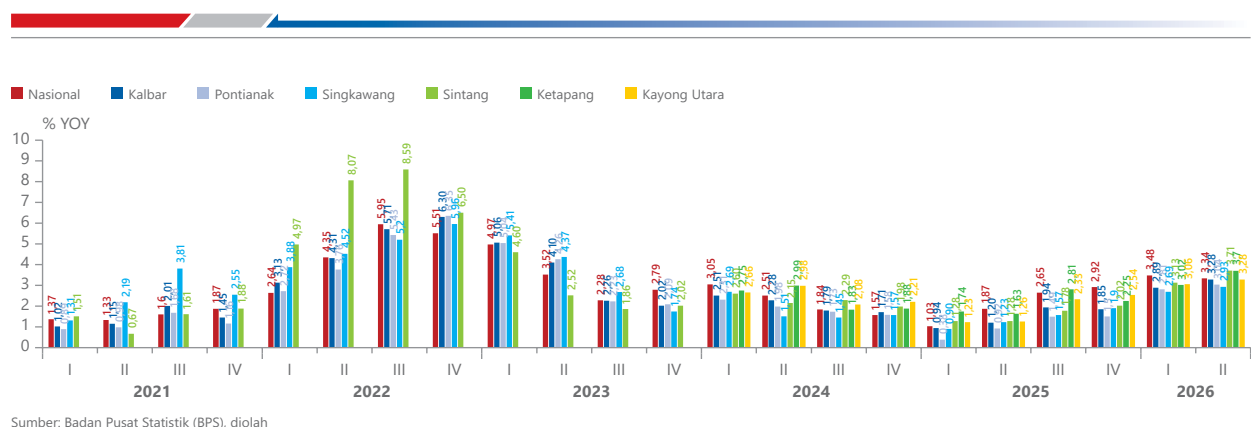
Peningkatan inflasi tahunan juga didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya di seluruh kabupaten/kota sampel IHK yang masing-masing mengalami andil inflasi tahunan Kota Pontianak 0,24% (yoy), Kab. Ketapang 0,49% (yoy), Kota Singkawang 0,40% (yoy), Kab. Sintang 0,98% (yoy), dan Kab. Kayong Utara 0,47% (yoy). Kenaikan inflasi ini utamanya didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan di tingkat konsumen yang merupakan transmisi dari kenaikan harga emas dunia selama setahun terakhir, sejalan dengan meningkatnya permintaan terhadap emas sebagai aset aman di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Depresiasi nilai tukar rupiah secara tahunan juga meningkatkan harga emas dalam denominasi rupiah, sedangkan biaya pengolahan dan margin penjualan turut memengaruhi harga di tingkat konsumen.

Perbedaan karakter inflasi antarwilayah juga terlihat pada kelompok transportasi. Tekanan kelompok transportasi paling menonjol di Pontianak dan

Ketapang, dengan andil inflasi tahunan masing-masing sebesar 0,85% (yoy) dan 0,46% (yoy). Sementara itu, kelompok transportasi memberikan andil sebesar 0,28% (yoy) di Singkawang, 0,27 % (yoy) di Kayong Utara, dan relatif terbatas sebesar 0,10% (yoy) di Sintang. Tingginya tekanan transportasi di Pontianak terutama dipengaruhi kenaikan tarif angkutan udara, sedangkan tekanan di wilayah lainnya lebih banyak berasal dari penyesuaian harga bensin dan pelumas. Kenaikan tarif angkutan udara sejalan dengan penerapan biaya tambahan bahan bakar atau *fuel surcharge* maksimal sebesar 50% dari tarif batas atas sejak Mei 2026 akibat kenaikan harga avtur, di tengah meningkatnya permintaan perjalanan selama HBKN Idul Adha dan libur sekolah. Sementara itu, kenaikan harga bensin berkaitan dengan penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada 10 Juni 2026, termasuk harga Pertamina di Kalimantan Barat menjadi sekitar Rp16.650 per liter.



Grafik 2.4. Pergerakan Inflasi Bulanan Kab/Kota Sampel Inflasi di Kalimantan Barat



Grafik 2.5. Perkembangan Inflasi Tahunan Kab/Kota Sampel Inflasi di Kalimantan Barat

Tabel 2.8. Perkembangan Inflasi Kab/Kota Sampel Inflasi di Provinsi Kalimantan Barat (yoy)

Kelompok Barang	Inflasi Tahunan (% yoy)																	
	Kota Pontianak						Kota Singkawang						Kabupaten Sintang					
	Tw I 2025	Tw II 2025	Tw III 2025	Tw IV 2025	Tw I 2026	Tw II 2026	Tw I 2025	Tw II 2025	Tw III 2025	Tw IV 2025	Tw I 2026	Tw II 2026	Tw I 2025	Tw II 2025	Tw III 2025	Tw IV 2025	Tw I 2026	Tw II 2026
Umum	0,38	0,92	1,49	1,50	2,81	3,04	0,90	1,23	1,57	1,90	2,69	2,93	1,28	1,28	1,78	2,02	3,13	3,71
Makanan, Minuman dan Tembakau	2,31	0,03	2,61	2,32	1,87	3,91	3,13	1,89	2,45	2,84	2,61	3,81	2,06	1,91	2,67	2,05	3,94	5,35
Pakaian dan Alas Kaki	3,27	3,36	2,68	1,55	0,79	0,89	0,70	0,68	0,67	0,50	0,69	0,94	0,32	0,19	0,28	0,07	0,00	3,04
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-6,64	0,23	0,16	0,21	7,62	1,72	-5,52	0,16	0,11	0,44	6,57	1,19	-0,90	-0,06	1,10	1,23	2,81	2,02
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0,11	-0,49	-1,44	-1,69	-0,43	1,44	0,40	0,37	0,59	0,58	0,29	2,89	1,39	1,24	1,02	0,81	0,02	0,96
Kesehatan	1,54	1,31	1,37	1,00	0,60	0,69	0,29	-0,15	0,57	0,88	0,60	1,28	0,29	-0,57	-0,60	-2,48	-1,40	0,28
Transportasi	1,35	1,52	1,70	2,27	3,40	5,87	0,67	0,36	0,48	0,66	1,12	2,85	0,21	0,44	0,71	1,07	0,64	0,99
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,81	-0,83	-0,71	-0,52	-0,27	1,33	-0,08	-0,24	-0,17	-0,12	0,11	0,83	-0,20	-0,20	-0,08	0,24	0,31	0,53
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	2,87	3,02	0,29	0,57	0,66	0,40	1,26	1,68	0,79	0,71	0,53	1,21	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,34
Pendidikan	3,13	3,30	2,69	2,69	3,22	3,06	1,22	1,68	2,87	3,28	3,83	3,35	0,00	0,65	0,77	0,77	0,77	0,33
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,74	1,66	1,81	1,52	1,41	2,04	0,09	0,05	0,09	0,09	0,17	2,23	3,32	2,03	0,36	0,15	0,00	4,53
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	2,45	2,35	1,41	2,78	4,54	3,72	4,49	5,67	6,78	8,56	8,75	6,65	4,84	4,35	5,58	10,20	12,97	10,09

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Kelompok Barang	Inflasi Tahunan (% yoy)											
	Kabupaten Ketapang						Kabupaten Kayong Utara					
	Tw I 2025	Tw II 2025	Tw III 2025	Tw IV 2025	Tw II 2026	Tw I 2026	Tw I 2025	Tw II 2025	Tw III 2025	Tw IV 2025	Tw I 2026	Tw II 2026
Umum	1,74	1,63	2,81	2,25	3,70	3,02	1,23	1,26	2,33	2,54	3,06	3,28
Makanan, Minuman dan Tembakau	3,82	2,43	5,04	3,36	4,59	3,36	2,84	1,37	3,71	4,01	2,99	4,44
Pakaian dan Alas Kaki	-0,16	0,27	0,20	-0,38	-0,05	0,07	0,01	0,01	-0,23	-0,29	0,04	0,04
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-5,33	0,26	0,31	0,35	3,73	6,62	-5,11	0,00	0,02	0,03	6,21	1,94
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,64	0,08	-0,36	-0,49	1,30	-0,82	0,09	0,20	-0,19	-0,16	0,34	1,81
Kesehatan	1,39	1,64	2,03	0,46	0,45	0,91	0,29	0,44	-0,39	-0,13	0,01	1,08
Transportasi	0,14	0,37	0,55	0,62	5,55	1,10	0,03	0,44	0,52	0,54	0,60	2,66
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,41	-0,37	-0,61	-0,44	1,26	0,03	0,03	0,03	-0,05	-0,05	-0,05	0,01
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,09	0,09	-0,59	-0,78	0,44	-0,78	0,02	0,22	0,93	0,93	1,02	0,10
Pendidikan	0,37	0,37	0,85	0,85	0,85	0,85	0,20	0,20	3,77	3,77	3,77	3,77
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,55	1,02	0,77	0,75	0,48	0,70	1,54	0,79	0,11	0,25	0,25	1,64
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4,74	4,99	5,10	8,86	7,18	10,33	7,44	8,14	9,06	9,64	12,43	7,17

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 2.9. Andil Inflasi Tahunan Kab/Kota Sampel Inflasi di Kalimantan Barat

Kelompok Barang	Inflasi Tahunan (% yoy)																	
	Kota Pontianak						Kota Singkawang						Kabupaten Sintang					
	Tw I 2025	Tw II 2025	Tw III 2025	Tw IV 2025	Tw I 2026	Tw II 2026	Tw I 2025	Tw II 2025	Tw III 2025	Tw IV 2025	Tw I 2026	Tw II 2026	Tw I 2025	Tw II 2025	Tw III 2025	Tw IV 2025	Tw I 2026	Tw II 2026
Umum	0,38	0,92	1,49	1,50	2,81	3,04	0,90	1,23	1,57	1,90	2,69	2,93	1,28	1,28	1,78	2,02	3,13	3,71
Makanan, Minuman dan Tembakau	0,66	0,01	0,74	0,66	0,55	1,12	1,18	0,71	0,92	1,07	1,00	1,45	0,70	0,65	0,90	0,70	1,35	1,82
Pakaian dan Alas Kaki	0,14	0,15	0,12	0,07	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03	0,04	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,12
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-1,06	0,04	0,03	0,03	1,14	0,27	-0,73	0,02	0,01	0,06	0,82	0,16	-0,15	-0,01	0,19	0,21	0,47	0,34
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,00	-0,02	-0,06	-0,07	-0,02	0,06	0,02	0,02	0,03	0,03	0,01	0,14	0,09	0,08	0,07	0,05	0,00	0,06
Kesehatan	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	0,00	0,02	0,02	0,02	0,03	0,01	-0,01	-0,02	-0,07	-0,04	0,01
Transportasi	0,19	0,21	0,24	0,32	0,48	0,83	0,07	0,04	0,05	0,07	0,11	0,28	0,02	0,04	0,07	0,11	0,06	0,10
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,05	-0,05	-0,04	-0,03	-0,02	0,08	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,04	-0,01	-0,01	-0,08	0,02	0,02	0,04
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,05	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Pendidikan	0,17	0,18	0,15	0,15	0,18	0,17	0,04	0,06	0,11	0,12	0,14	0,12	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,07	0,17	0,18	0,15	0,14	0,21	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,26	0,17	0,11	0,02	0,01	0,00	0,24
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,15	0,15	0,09	0,18	0,29	0,24	0,26	0,33	0,39	0,50	0,52	0,40	0,45	0,41	0,53	0,97	1,25	0,98

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Kelompok Barang	Inflasi Tahunan (% yoy)											
	Kabupaten Ketapang						Kabupaten Kayong Utara					
	Tw I 2025	Tw II 2025	Tw III 2025	Tw IV 2025	Tw I 2026	Tw II 2026	Tw I 2025	Tw II 2025	Tw III 2025	Tw IV 2025	Tw I 2026	Tw II 2026
Umum	1,74	1,63	2,81	2,25	3,02	3,70	1,23	1,26	2,33	2,54	3,06	3,28
Makanan, Minuman dan Tembakau	1,80	1,15	2,35	1,59	1,61	2,18	1,30	0,63	1,69	1,83	1,39	2,04
Pakaian dan Alas Kaki	-0,01	0,01	0,01	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-0,53	0,03	0,03	0,03	0,61	0,36	-0,64	0,00	0,00	0,00	0,72	0,24
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,05	0,01	-0,03	-0,04	-0,06	0,09	0,01	0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,11
Kesehatan	0,02	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,02
Transportasi	0,01	0,03	0,05	0,05	0,09	0,46	0,00	0,04	0,05	0,06	0,06	0,27
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,00
Pendidikan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,10	0,07	0,05	0,05	0,04	0,03	0,10	0,05	0,01	0,02	0,02	0,10
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,31	0,33	0,34	0,59	0,70	0,49	0,45	0,50	0,56	0,61	0,80	0,47

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Perkembangan inflasi bulanan di 5 (lima) wilayah IHK Kalimantan Barat sepanjang triwulan II 2026 menunjukkan pola yang beragam. Hampir seluruh wilayah mengalami inflasi sepanjang April-Juni 2026, kecuali Kota Singkawang yang mencatatkan deflasi sebesar 0,13% (mtm) pada Bulan Mei 2026. Deflasi ini didukung oleh komoditas telur ayam ras yang mengalami deflasi sebesar 13,02% (mtm) dengan andil 0,18% (mtm), cabai rawit yang mengalami deflasi sebesar 21,90% (mtm) dengan andil deflasi sebesar 0,11% (mtm), dan daging ayam ras yang mengalami deflasi sebesar 2,56% (mtm) dengan andil deflasi sebesar 0,06% (mtm). Penurunan harga komoditas telur ayam ras dan daging ayam ras disebabkan oleh penurunan penyerapan akibat penutupan sementara sejumlah dapur SPPG di Kalimantan Barat di tengah pasokan yang tinggi akibat masuknya periode produksi telur Singkawang yang menjadi sentra produksi telur ayam ras di Kalimantan Barat. Sementara itu, penurunan harga cabai rawit mencerminkan membaiknya keseimbangan pasokan dan permintaan setelah kenaikan harga pada April 2026.

Pada April 2026, inflasi bulanan tertinggi terjadi di Kabupaten Ketapang sebesar 0,72% (mtm). Inflasi terutama bersumber dari komoditas minyak goreng, cabai rawit, dan beras. Sebaliknya, inflasi terendah terjadi di Kabupaten Sintang sebesar 0,25% (mtm). Beberapa komoditas penahan inflasi diantaranya emas perhiasan, kacang panjang, dan bahan bakar rumah tangga.

Pada Mei 2026, inflasi bulanan tertinggi terjadi di Kota Pontianak sebesar 0,43% (mtm). Inflasi ini didorong oleh komoditas sawi hijau, bahan bakar rumah tangga, dan pemeliharaan/service. Sementara itu, inflasi terendah terjadi di Kabupaten Singkawang sebesar 0,13% (mtm), yang didorong oleh telur ayam ras, cabai rawit, dan daging ayam ras. Pada

Mei, komoditas bahan bakar rumah tangga menjadi komoditas utama penyumbang inflasi hampir di seluruh wilayah IHK, kecuali Kabupaten Kayong Utara. Hal ini terutama berkaitan dengan terbatasnya paparan konsumsi masyarakat Kayong Utara terhadap kenaikan harga LPG nonsubsidi. Penyesuaian harga yang berlaku sejak 18 April 2026 hanya mencakup LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg, sedangkan harga LPG bersubsidi ukuran 3 kg tidak mengalami penyesuaian. Berdasarkan Statistik Perumahan Kabupaten Kayong Utara, pada 2023 sekitar 93,1% rumah tangga menggunakan LPG 3 kg sebagai bahan bakar utama untuk memasak. Sementara itu, pengguna LPG 5,5 kg dan 12 kg masing-masing hanya sebesar 3,0% dan 0,8%. Dominannya penggunaan LPG 3 kg menyebabkan kenaikan harga LPG nonsubsidi hanya berdampak langsung pada sebagian kecil rumah tangga.

Pada bulan Juni 2026, inflasi bulanan tertinggi terjadi di Kota Singkawang sebesar 0,46% (mtm). Inflasi ini didorong oleh komoditas angkutan udara, bensin, dan ikan tongkol. Secara umum, bensin menjadi komoditas utama penyumbang inflasi di seluruh wilayah IHK. Tekanan bensin bersumber dari kenaikan harga Pertamina pada 10 Juni 2026 dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter di Kalimantan Barat, atau meningkat sekitar 32,1%. Sementara itu, inflasi terendah terjadi di Kabupaten Ketapang sebesar 0,15% (mtm), yang didorong oleh deflasi pada komoditas hortikultura, diantaranya ketimun, kacang panjang, bayam, dan sawi hijau. Pada bulan Juni 2026, tercatat seluruh wilayah mengalami deflasi pada komoditas hortikultura, utamanya ketimun seiring meningkatnya pasokan di tengah kondisi cuaca dengan curah hujan sedang dan stabil, sehingga mendukung panen komoditas tersebut.

Tabel 2.10. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan di Kab/Kota Sampel Inflasi (mtm)

		April 2026			Mei 2026			Juni 2026		
		Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil
PONTIANAK Apr: 0,59% Mei: 0,43% Jun: 0,37%	Inflasi	ANGKUTAN UDARA	7,11	0,12	SAWI HIJAU	70,17	0,16	ANGKUTAN UDARA	9,46	0,16
		BERAS	1,36	0,06	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	5,63	0,13	BENSIN	1,82	0,09
		BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	2,48	0,05	PEMELIHARAAN/ SERVICE	8,74	0,08	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	11,28	0,08
		IKAN KEMBUNG/ IKAN GEMBUNG/ IKAN BANYAR/IKAN GEMBOLO/ IKAN ASO-ASO	5,04	0,05	PELUMAS/OLI MESIN	12,34	0,08	DAGING AYAM RAS	5,68	0,07
		PELUMAS/OLI MESIN	8,36	0,05	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	7,89	0,05	WORTEL	36,52	0,05
	Deflasi	DAGING AYAM RAS	-10,38	-0,13	ANGKUTAN UDARA	-7,20	-0,13	SAWI HIJAU	-41,10	-0,16
		TELUR AYAM RAS	-5,92	-0,08	TELUR AYAM RAS	-9,50	-0,11	BAYAM	-38,84	-0,07
		JERUK	-15,28	-0,03	CABAI RAWIT	-20,97	-0,07	BUNCIS	-32,13	-0,03
		EMAS PERHIASAN	-3,97	-0,03	IKAN KEMBUNG/ IKAN GEMBUNG/ IKAN BANYAR/IKAN GEMBOLO/ IKAN ASO-ASO	-4,15	-0,05	KETIMUN	-41,00	-0,03
		UDANG BASAH	-3,55	-0,03	UDANG BASAH	-4,21	-0,03	KACANG PANJANG	-25,77	-0,03
SINGKAWANG Apr: 0,42% Mei: -0,13% Jun: 0,46%	Inflasi	SEMANGKA	24,47	0,06	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	1,64	0,05	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	4,96	0,08
		SAWI HIJAU	13,32	0,05	BAWANG MERAH	16,81	0,04	BENSIN	1,30	0,06
		MINYAK GORENG	3,06	0,04	AYAM GORENG	3,96	0,04	WORTEL	26,28	0,04
		KUE KERING BERMINYAK	4,13	0,03	KURSI	7,84	0,03	TELUR AYAM RAS	2,87	0,03
		CABAI RAWIT	6,16	0,03	KUE KERING BERMINYAK	4,14	0,03	BERAS	0,70	0,03
	Deflasi	TELUR AYAM RAS	-8,59	-0,13	TELUR AYAM RAS	-13,02	-0,18	DAGING AYAM RAS	-0,84	-0,02
		DAGING AYAM RAS	-1,54	-0,04	CABAI RAWIT	-21,90	-0,11	KETIMUN	-13,22	-0,02
		BAWANG MERAH	-6,79	-0,02	DAGING AYAM RAS	-2,56	-0,06	KANGKUNG	-4,26	-0,01
		EMAS PERHIASAN	-1,98	-0,02	IKAN KEMBUNG/ IKAN GEMBUNG/ IKAN BANYAR/IKAN GEMBOLO/ IKAN ASO-ASO	-4,06	-0,04	IKAN TENGGIRI	-2,90	-0,01
		KACANG PANJANG	-4,63	-0,01	KANGKUNG	-9,95	-0,04	NANAS	-18,35	-0,01
SINTANG Apr: 0,25% Mei: 0,36% Jun: 0,36%	Inflasi	DAGING SAPI	5,13	0,06	BAWANG MERAH	16,85	0,10	BENSIN	1,59	0,07
		CABAI RAWIT	6,24	0,05	SAWI HIJAU	28,68	0,08	DAGING AYAM RAS	3,71	0,06
		GULA PASIR	8,40	0,04	NASI DENGAN LAUK	4,38	0,07	CABAI RAWIT	8,93	0,06
		SEMANGKA	21,54	0,03	BERAS	1,14	0,07	NASI DENGAN LAUK	3,47	0,05
		KUE KERING BERMINYAK	10,67	0,02	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	2,41	0,06	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	1,52	0,04
	Deflasi	EMAS PERHIASAN	-3,87	-0,12	TELUR AYAM RAS	-12,59	-0,17	KETIMUN	-33,34	-0,07
		KACANG PANJANG	-15,11	-0,05	CABAI RAWIT	-14,96	-0,12	KACANG PANJANG	-20,66	-0,06
		BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	-1,17	-0,03	DAGING AYAM RAS	-6,03	-0,11	TERONG	-23,58	-0,05
		DAGING AYAM RAS	-1,66	-0,03	ANGKUTAN UDARA	-9,71	-0,04	BAWANG MERAH	-3,11	-0,02
		TELUR AYAM RAS	-1,73	-0,02	EMAS PERHIASAN	-1,38	-0,04	BAWANG PUTIH	-2,65	-0,02

Tabel 2.10. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan di Kab/Kota Sampel Inflasi (mtm) Lanjutan

KETAPANG Apr: 0,72% Mei: 0,28% Jun: 0,15%	Inflasi	MINYAK GORENG	4,98	0,10	IKAN BAUNG	11,43	0,19	BENSIN	1,63	0,06
		CABAI RAWIT	13,01	0,08	PEMELIHARAAN/ SERVICE	24,31	0,16	IKAN NILA	4,88	0,05
		BERAS	1,11	0,07	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	7,48	0,14	MINYAK GORENG	2,38	0,05
		LEMARI PAKAIAN	5,83	0,05	MINYAK GORENG	4,39	0,09	IKAN KEMBUNG/IKAN GEMBUNG/ IKAN BANYAR/ IKAN GEMBOLO/ IKAN ASO-ASO	3,81	0,05
		IKAN BAUNG	3,18	0,05	PERBAIKAN RINGAN KENDARAAN	29,10	0,07	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	8,72	0,05
	Deflasi	EMAS PERHIASAN	-5,56	-0,08	CABAI RAWIT	-16,99	-0,12	KETIMUN	-29,83	-0,12
		DAGING AYAM RAS	-2,94	-0,08	SAWI HIJAU	-3,05	-0,08	KACANG PANJANG	-43,40	-0,10
		DAGING SAPI	-1,90	-0,02	CABAI MERAH	-8,03	-0,07	DAGING AYAM RAS	-3,33	-0,09
		PEMBERSIH LANTAI	-2,92	-0,01	BAYAM	-10,51	-0,07	BAYAM	-17,38	-0,06
		TERONG	-2,01	-0,01	IKAN KEMBUNG/ IKAN GEMBUNG/ IKAN BANYAR/IKAN GEMBOLO/ IKAN ASO-ASO	-13,08	-0,06	SAWI HIJAU	-11,41	-0,06
KAYONG UTARA Apr: 0,43% Mei: 0,24% Jun: 0,20%	Inflasi	KETIMUN	18,68	0,15	KETIMUN	11,70	0,11	MINYAK GORENG	3,66	0,08
		CABAI RAWIT	11,54	0,07	SAWI HIJAU	8,80	0,06	IKAN PARI	9,24	0,05
		BERAS	0,89	0,05	KACANG PANJANG	36,25	0,06	PELUMAS/OLI MESIN	3,96	0,05
		BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	2,11	0,04	BAWANG MERAH	10,69	0,06	CABAI MERAH	14,96	0,03
		IKAN BAWAL	10,52	0,04	MINYAK GORENG	2,43	0,05	BAN LUAR MOTOR	6,37	0,03
	Deflasi	EMAS PERHIASAN	-5,90	-0,13	DAGING AYAM RAS	-5,54	-0,13	KETIMUN	-23,18	-0,25
		BAWANG PUTIH	-11,36	-0,11	TELUR AYAM RAS	-5,62	-0,11	KACANG PANJANG	-35,83	-0,08
		DAGING AYAM RAS	-4,10	-0,10	CABAI RAWIT	-13,08	-0,08	BAWANG PUTIH	-3,51	-0,03
		BAWANG MERAH	-2,71	-0,02	KOL PUTIH/KUBIS	-26,64	-0,06	EMAS PERHIASAN	-1,22	-0,02
		BUKU TULIS BERGARIS	-1,00	-0,01	CABAI MERAH	-16,47	-0,05	DAGING AYAM RAS	-0,70	-0,02

2.5. PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2026

Program pengendalian inflasi pada tahun 2026, terutama selama triwulan II 2026, difokuskan untuk menjaga ketahanan pangan strategis. Sebagai langkah jangka pendek pengendalian inflasi oleh TPID Kalimantan Barat mencakup penyelenggaraan Operasi Pasar (OP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sinergi Pemerintah Daerah (Pemda), Bank Indonesia, Bulog, BUMD, perbankan, kelompok petani, pelaku usaha, dan mitra kerja strategis. OP/GPM yang dilakukan di beberapa pasar di beberapa kabupaten/kota dengan fokus komoditas andil inflasi. Keberlanjutan program ketahanan pangan baik optimalisasi lahan (oplah) dan

swasembada padi-jagung terus dioptimalkan dengan sinergi TNI/POLRI. Lebih lanjut, pelaksanaan program dilakukan melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) dengan mengacu pada peta jalan (*roadmap*) program pengendalian inflasi Kalimantan Barat, melalui strategi utama 4K, yang telah dilaksanakan meliputi:

- Keterjangkauan harga: (1) Realisasi penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) periode Maret – Desember 2026, s.d. 27 Juni 2026 mencapai 10,61 ribu ton (36,99% dari target realisasi beras SPHP 2026), dengan stok beras terjaga di 19,82 ribu ton; (2) Realisasi distribusi

- Minyakita per 27 Juni 2026 sebesar 2,35 juta liter; (3) Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan (SABER) diakselerasi secara masif setiap hari oleh Polda Kalbar, dan melibatkan OPD Pemda untuk menindak pedagang yang menjual di atas harga yang telah ditentukan (HET/HAP); (4) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan program 'Gerai-Ku', penyaluran secara mingguan khusus untuk komoditas telur ayam ras langsung dari peternak pada tingkat harga modal, menyesuaikan kebutuhan Pemda serta kondisi harga telur di daerah; (5) Pemerintah daerah terus menggiatkan GPM/OP, termasuk Go-Link (GPM Keliling), untuk komoditas beras, bawang merah, minyak goreng, dan gula pasir, serta bahan bakar RT seperti LPG, di beberapa titik a.l. Pontianak, Landak, Sintang, Sanggau, Bengkayang, dan Kubu Raya.
- b. Ketersediaan pasokan: (1) Realisasi pengadaan jagung per 20 Juni 2026 sebesar 1.076 ton (6,56 dari target realisasi 16.400 ton di 2026); (2) Per 27 Juni 2026, penyaluran Bantuan Pangan terealisasi sebanyak 10,56 ribu ton beras dan 2,11 juta liter Minyakita. Capaian ini berkontribusi signifikan dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan komoditas pangan pokok di tengah tantangan distribusi; (2) Upaya swasembada pangan diperkuat melalui penanaman jagung hibrida di Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang dengan luas lahan sekitar 2 hektar. Selain itu, di Kabupaten Kubu Raya didistribusikan 150 ribu *polybag* cabai pada kelompok tani. (3) Upaya swasembada pangan turut diperkuat melalui keberhasilan produksi padi di Sambas hingga 9,6 ton per hektar melalui pemanfaatan benih unggul (M70D dan Inpari 32), alsintan, pupuk, serta inovasi dalam pengelolaan lahan secara konsisten. (4) Kabupaten Sintang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai kawasan pengembangan bawang putih nasional seluas 5.000 hektare untuk mengurangi impor melalui budidaya di daerah dataran tinggi yang didukung benih dan pupuk khusus guna mencapai produktivitas 3 ton per hektare; (5) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bekerja sama dengan Pertamina wilayah Sintang menggelar gerakan pasar murah dengan harga Rp24 ribu per tabung untuk LPG 3 kg pada Juni 2026.
- c. Kelancaran distribusi: (1) Kalimantan Barat pada Juni 2026 secara resmi menerima program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah yang mencakup pembangunan dan peningkatan 34,72 km jalan guna memperkuat konektivitas wilayah, memperlancar distribusi logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; (2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar pada tahun 2026 untuk pembangunan ruas Jalan Suti Semarang di Kab. Bengkayang guna menjaga konektivitas antarwilayah dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat; (3) Progres relokasi jalan Sui. Duri – Kijing, Kabupaten Mempawah telah mencapai 100% pengerjaan pada 25 Mei 2026. Proyek ini mendukung konektivitas kawasan dan memperlancar arus logistik di Kalimantan Barat; (4) Pembangunan jembatan Sungai Bakau Besar Darat telah mencapai 40% pada Juni 2026, yang diharapkan meningkatkan kelancaran distribusi hasil usaha dan pertanian melalui akses transportasi yang lebih memadai; (5) Pembangunan jalan penghubung Desa Semayang – Desa Persiapan Tanak di Kabupaten Sanggau telah mencapai progress 80% untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kelancaran logistik masyarakat; (6) PT Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan distribusi BBM dengan penambahan armada sebanyak 9 armada mobil tangki melalui skema *spot charter*, terdiri dari 5 unit dari Pulau Jawa dan 4 unit dari Kalimantan Selatan, sehingga total armada menjadi 46 unit, serta menambahkan frekuensi pengiriman yang lebih tinggi ke SPBU prioritas. Selain itu, Pertamina juga berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan pihak terkait untuk mempercepat distribusi.
- d. Komunikasi efektif: (1) Pemerintah Kota Pontianak memperkuat koordinasi dan komunikasi antarlembaga melalui Rapat Koordinasi dan *High Level Meeting* Pengendalian Inflasi Daerah menjelang HBKN dan Iduladha 1447 H sebagai

langkah menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi di Pontianak yang dilaksanakan Mei 2026; (2) Pemerintah Kota Pontianak memperkuat koordinasi dengan BMKG dan pemerintah pusat untuk menjaga ketersediaan serta kualitas air bersih selama musim kemarau. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia mendorong penguatan kedaulatan pangan melalui optimalisasi lahan, pengawalan distribusi pupuk, hilirisasi, dan menjaga stabilitas pasokan pangan; (3) Merespon aspirasi masyarakat, Gubernur Kalimantan Barat mendorong percepatan penyaluran BBM bersubsidi di Sungai Laur, Kab. Ketapang melalui

tindak lanjut oleh DisperindagESDM dan Pertamina Patra Niaga, dilaksanakan paling lambat pada 26 Juni 2026; (4) Sinergi antara Dinas Perkebunan dan Peternakan Proinsi Kalimantan Barat bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Provinsi Kalimantan Barat dalam menggelar gerakan pangan murah, khususnya untuk komoditas telur; dan (5) KPw BI Kalbar pada Juni 2026 bekerjasama dengan Politeknik Negeri Pontianak mengadakan seminar nasional bertajuk *smart spending* dan belanja bijak untuk memperkuat pemahaman masyarakat dan menjaga ekspektasi inflasi di Kalbar.

Bab 3

Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM



Pertumbuhan Kredit*

*Kredit Kalimantan

Triwulan II 2026

17,77% (yoy)

Triwulan I 2026
9,97% (yoy)

Triwulan II 2025
2,42% (yoy)

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan

Triwulan II 2026

8,48%

Triwulan I 2026
9,98%

Triwulan II 2025
4,09%

Pertumbuhan Kredit UMKM*

*Lokasi Proyek

Triwulan II 2026

1,56%

Triwulan I 2026
2,83%

Triwulan II 2025
2,67%

Loan to Deposit Ratio Perbankan

Triwulan II 2026

89,14%

Triwulan I 2026
88,32%

Triwulan II 2025
89,79%

Non Performing Loan Perbankan

Triwulan II 2026

1,70%

Triwulan I 2026
1,75%

Triwulan II 2025
2,24%



Kredit perbankan wilayah Kalimantan Barat tumbuh sebesar 17,77% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,97% (yoy). Sementara itu, pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 11,57% (yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya 8,91% (yoy). Pertumbuhan kredit segmen UMKM tercatat 1,56% (yoy), mengalami pelemahan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,83% (yoy). Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan Kalimantan Barat tumbuh 9,13% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 9,98% (yoy), yang didorong oleh perlambatan jenis pertumbuhan DPK giro dan DPK deposito. Selain itu, risiko kredit bermasalah di Kalimantan Barat mengalami perbaikan dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) sebesar 1,70%, mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya 1,75%, jauh di bawah threshold 5%.

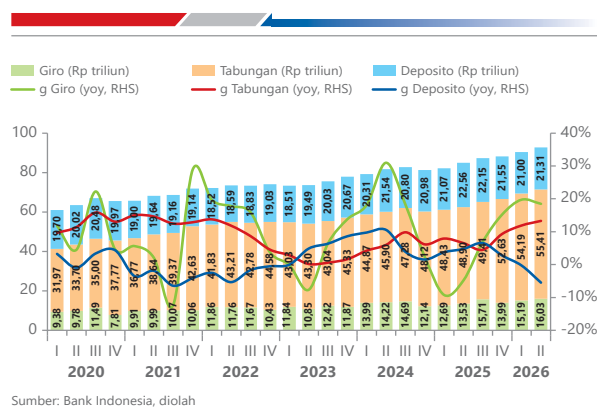


3.1. PERKEMBANGAN PERBANKAN SECARA UMUM⁸

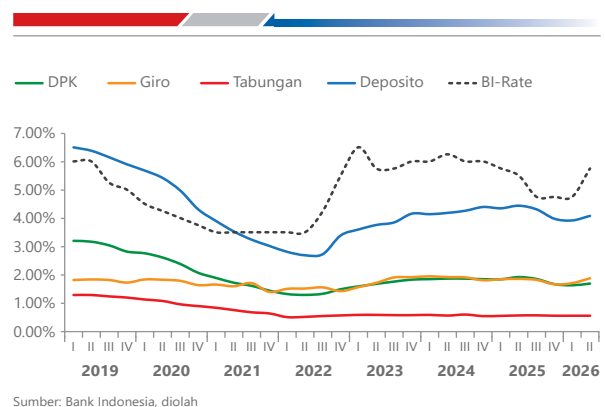
3.1.1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp92,20 triliun, tumbuh 8,48% (yoy). Pertumbuhan DPK tersebut menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,98% (yoy). Berdasarkan grafik 3.1 diketahui bahwa penurunan didorong oleh pertumbuhan jenis giro sebesar 18,47% (yoy) pada triwulan II 2026, menurun dari sebelumnya sebesar 19,73% (yoy) pada triwulan I 2026. Selain itu, pertumbuhan jenis Deposito juga mengalami kontraksi lebih dalam menjadi 5,52% (yoy) pada triwulan II 2026 dari triwulan I 2026 yang sudah terkontraksi sebesar 0,32%. Di sisi lain, Perbaikan kinerja terjadi pada jenis tabungan dari 11,91% (yoy) pada triwulan sebelumnya, menjadi tumbuh sebesar

13,30% (yoy). Selanjutnya, dilihat dari grafik 3.2 diketahui bahwa suku bunga tertimbang (SBT) DPK di Kalimantan Barat terpantau meningkat di tingkat 1,69% pada triwulan II 2026, dari sebelumnya 1,63% pada triwulan I 2026. SBT tersebut diakibatkan oleh peningkatan SBT pada jenis DPK giro dan deposito pada triwulan II 2026 masing – masing menjadi sebesar 1,88% dan 4,08%, dibandingkan DPK giro dan deposito triwulan sebelumnya yang masing – masing tumbuh sebesar 1,71% dan 3,92%. Sementara itu, DPK tabungan tercatat stabil sebesar 0,56%. Berdasarkan kepemilikan, DPK di Kalimantan Barat masih didominasi oleh DPK perseorangan sebesar Rp62,16 triliun atau dengan pangsa 67,14% pada triwulan II 2026. Pangsa DPK perseorangan tersebut sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya 67,81%. Hal ini didorong oleh penurunan pangsa DPK Pemerintah dari 5,96% menjadi 5,33%.



Grafik 3.1. Perkembangan Jenis DPK Perbankan



Grafik 3.2. Perkembangan SBT DPK Perbankan

Tabel 3.1. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)* (Rp triliun)

Cakupan (Rp Triliun)	2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Nasional	8.005,58	8.042,10	8.147,17	8.458,75	8.601,22	8.722,03	8.720,78	8.837,24	9.010,15	9.329,00	9.695,43	10.059,19	10.232,42	10.283,26
Kalbar	73,38	73,64	75,49	77,87	79,16	81,65	82,76	81,25	82,18	85,00	87,27	88,20	90,39	92,20
g Kalbar (% yoy)	1,61	0,12	3,02	5,16	7,89	10,89	9,63	4,34	3,82	4,09	5,45	8,56	9,98	8,48
Kaltim	148,18	152,76	158,81	155,44	157,19	165,78	166,87	168,92	162,59	158,74	162,99	158,98	155,11	154,48
Kalsel	76,15	77,25	76,63	79,75	81,94	85,68	87,40	91,74	94,11	93,97	98,79	95,45	98,10	97,42
Kaltara					19,05	19,21	19,81	18,88	18,48	18,38	18,95	18,47	18,19	17,76
Kalteng	35,32	36,32	39,07	42,18	42,61	44,65	46,53	45,69	48,97	50,76	55,47	54,24	52,36	52,80

Sumber: Bank Indonesia, diolah

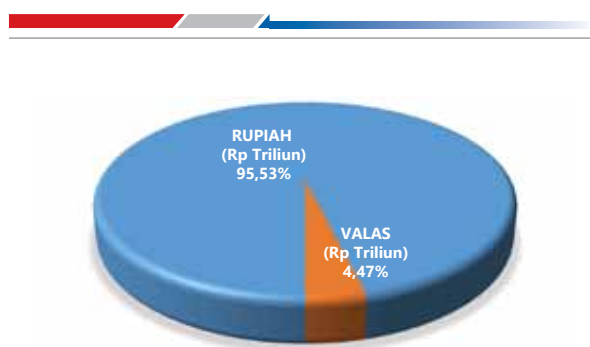
*) Pada 2022-2023, Data DPK Kalimantan Utara sebelumnya masih terhitung dalam DPK Kalimantan Timur

8. Hanya menggunakan data bank umum, data bank perkreditan rakyat (BPR) tidak dimasukkan.

Pada wilayah Kalimantan, total DPK Kalimantan Barat berada di posisi terbesar ketiga setelah Kalimantan Timur (Rp154,48 triliun) dan Kalimantan Selatan (Rp97,42 triliun) pada triwulan II 2026. Berdasarkan tingkat pertumbuhan, DPK Kalimantan Barat tumbuh sebesar 8,48% (yoy) atau berada di posisi⁹ pertama di Kalimantan. Berdasarkan grafik 3.3, komposisi DPK di Kalimantan Barat terdiri atas DPK Rupiah sebesar Rp88,08 triliun atau 95,53% dan dalam valuta asing sebesar Rp4,12 triliun atau 4,47%.

Berdasarkan kegiatan bank yang terlihat pada grafik 3.4, penghimpunan DPK masih didominasi oleh DPK bank umum konvensional yang mencapai sebesar Rp5,09 triliun atau 92,28% dari total DPK Kalimantan Barat, menurun dari pangsa triwulan sebelumnya yaitu 93,20%. DPK bank umum konvensional Kalimantan Barat menurun dari 9,89% (yoy) pada triwulan sebelumnya, menjadi 7,05% (yoy) pada triwulan II 2026. Sementara itu, DPK perbankan syariah pada periode laporan tercatat sebesar Rp7,12 triliun atau sebesar 7,72% dari total DPK Kalimantan Barat, meningkat dari pangsa triwulan sebelumnya yang sebesar 6,80%. Di sisi lain, DPK perbankan syariah tumbuh meningkat dari 11,30% (yoy) pada triwulan sebelumnya, menjadi 29,19% (yoy) pada triwulan II 2026.

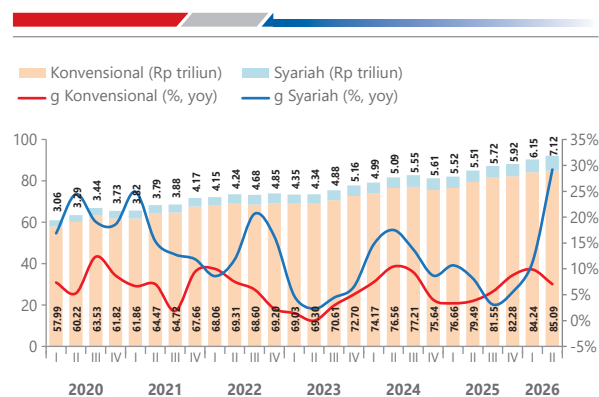
Berdasarkan kepemilikan, pada grafik 3.5, DPK di Kalimantan Barat masih didominasi oleh DPK perseorangan sebesar Rp62,16 triliun atau dengan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.3. Posisi Valuta DPK Perbankan TW III 2025 (Rp triliun)

9. Data perbankan Kalimantan Utara sebelum 2024 masih masuk dalam data perbankan Kalimantan Timur.

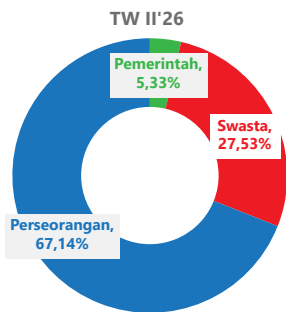


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.4. Perkembangan DPK Perbankan Berdasarkan Kegiatan Bank

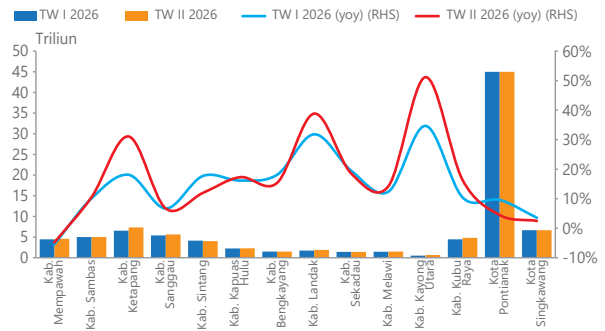
pangsa 67,14% pada triwulan II 2026. Pangsa DPK perseorangan tersebut menurun dibandingkan triwulan sebelumnya 67,81%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh normalisasi aktivitas konsumsi pasca-HBKN, yang mendorong penggunaan sebagian dana masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Pangsa DPK Pemerintah juga mengalami penurunan dari 5,96% menjadi 5,33% pada triwulan II 2026 yang diperkirakan dipengaruhi oleh penggunaan dana untuk mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah. Di sisi lain, DPK swasta tumbuh meningkat dari sebelumnya 26,23% (yoy) pada triwulan I 2026, menjadi tumbuh sebesar 27,53% (yoy) pada triwulan II 2026. Peningkatan pangsa DPK Swasta mencerminkan peningkatan aktivitas perusahaan yang membuat surplus kas ditempatkan di perbankan, hal ini sejalan dengan membaiknya aktivitas sektor usaha, terutama industri pengolahan dan ekspor, yang tercermin dari peningkatan produksi CPO dan alumina.

Sedangkan DPK perseorangan tumbuh meningkat pada triwulan II 2026 menjadi 6,83% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,54% (yoy). Hal ini sejalan dengan pertumbuhan DPK perseorangan jenis giro yang sebelumnya 14,09% (yoy) menjadi 17,19% dan DPK perseorangan jenis tabungan yang tumbuh hingga 9,62% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,34% (yoy) serta DPK perseorangan jenis deposito yang mengalami perbaikan kontraksi menjadi 4,61% (yoy) dari sebelumnya terkontraksi sebesar 5,34% (yoy).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.5. Pangsa DPK berdasarkan Golongan Nasabah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.6. Pertumbuhan Penghimpunan DPK Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat

Tabel 3.2. Perkembangan Nominal DPK Kalimantan Barat Per Kabupaten/Kota (Rp Triliun)

Wilayah	2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Kalimantan Barat	73,38	73,64	75,49	77,87	79,16	81,65	82,76	81,25	82,18	85,00	87,27	88,20	90,39	92,20
Kab. Mempawah	4,33	4,45	4,43	4,48	4,60	5,11	5,27	4,75	4,71	4,79	4,62	4,86	4,45	4,56
Kab. Sambas	4,03	3,95	3,99	4,14	4,16	4,18	4,35	4,43	4,53	4,50	4,69	4,92	4,99	4,98
Kab. Ketapang	4,68	4,68	4,89	5,13	5,32	5,28	5,46	5,35	5,53	5,60	6,04	6,44	6,53	7,34
Kab. Sanggau	4,43	4,38	4,39	4,43	4,46	4,67	4,87	4,93	5,06	5,27	5,42	5,24	5,40	5,62
Kab. Sintang	3,00	2,96	3,02	3,05	3,16	3,19	3,31	3,33	3,49	3,58	3,73	3,81	4,11	4,01
Kab. Kapuas Hulu	1,79	1,68	1,71	1,88	1,82	1,79	1,93	1,96	1,91	1,94	2,04	2,29	2,22	2,28
Kab. Bengkayang	1,21	1,16	1,17	1,13	1,18	1,19	1,27	1,19	1,26	1,28	1,32	1,45	1,49	1,48
Kab. Landak	1,18	1,11	1,17	1,18	1,21	1,27	1,32	1,26	1,31	1,36	1,44	1,67	1,73	1,89
Kab. Sekadau	1,11	1,08	1,08	1,13	1,14	1,19	1,24	1,15	1,17	1,19	1,28	1,39	1,39	1,42
Kab. Melawi	1,20	1,18	1,20	1,22	1,25	1,33	1,32	1,27	1,30	1,30	1,35	1,42	1,46	1,48
Kab. Kayong Utara	0,37	0,33	0,40	0,39	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,44	0,48	0,47	0,51	0,67
Kab. Kubu Raya	3,11	3,28	3,49	3,49	3,55	3,76	3,87	3,83	4,02	4,13	4,18	4,21	4,43	4,80
Kota Pontianak	37,19	37,63	38,73	40,28	40,95	42,11	41,95	41,22	41,08	43,09	44,12	43,66	45,01	45,01
Kota Singkawang	5,74	5,77	5,80	5,94	6,00	6,21	6,24	6,19	6,44	6,51	6,57	6,38	6,67	6,67

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Secara spasial, sebaran DPK masih terkonsentrasi di Kota Pontianak dengan nominal mencapai Rp45,01 triliun atau dengan pangsa 48,81%. Kemudian disusul oleh Kabupaten Ketapang dengan nominal sebesar Rp7,34 triliun dengan pangsa 7,96%, dan Kota Singkawang sebesar Rp6,67 triliun atau pangsa 7,23%. Ketiga kota tersebut merupakan daerah konsentrasi DPK sejalan dengan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat baik utamanya pada aktivitas perdagangan, perkebunan, dan industri pengolahan. Di sisi lain, pertumbuhan DPK tertinggi terjadi di Kabupaten Kayong Utara sebesar 51,20% (yoy). Kondisi tersebut sejalan dengan

tingginya aktivitas investasi dan pembangunan kawasan industri yang masih dalam tahap konstruksi, yang mendorong peningkatan perputaran serta penempatan dana pada perbankan.

3.1.2. Penyaluran Kredit

Penyaluran kredit tercatat sebesar Rp115,21 triliun pada triwulan II 2026, tumbuh 17,77% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,97% (yoy). Penyaluran kredit di Kalimantan Barat berada di posisi kedua di wilayah Kalimantan dengan pangsa 19,97% dari total kredit Kalimantan. Kalimantan

Timur masih menjadi lokasi dengan penyaluran kredit terbesar di wilayah Kalimantan dengan pangsa sebesar 37,40%. Apabila dibandingkan dengan kredit nasional, penyaluran kredit di Kalimantan Barat berkontribusi sebesar 1,14% pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan dengan level triwulan sebelumnya sebesar 1,09%.

Pertumbuhan kredit di Kalimantan Barat yang meningkat pada triwulan II 2026 didorong oleh kredit investasi yang tumbuh menjadi 39,90% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 20,85% (yoy). Hal ini diprakirakan sejalan dengan berlanjutnya aktivitas pengembangan dan peningkatan kapasitas usaha, terutama pada sektor industri pengolahan, seiring membaiknya produksi alumina dan CPO. Kredit Modal Kerja (KMK) juga tercatat tumbuh sebesar 6,08% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,68% (yoy). Peningkatan KMK diperkirakan didorong oleh menguatnya aktivitas produksi dan perdagangan, tercermin dari pertumbuhan ekspor yang meningkat menjadi 10,63% (yoy) pada triwulan II 2026 dari 3,38% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan volume ekspor alumina menjadi 881,28 ribu ton dari 706,45 ribu ton turut mendorong kebutuhan pembiayaan operasional, khususnya untuk pengadaan bahan baku dan aktivitas perdagangan. Sedangkan, kredit konsumsi tumbuh sedikit melambat pada triwulan II 2026 menjadi 4,65% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,04% (yoy). Peningkatan kredit investasi yang lebih tinggi dibandingkan kredit konsumsi diprakirakan mencerminkan kecenderungan

perbankan untuk lebih hati-hati serta memprioritaskan penyaluran pembiayaan pada sektor produktif dibandingkan konsumtif.

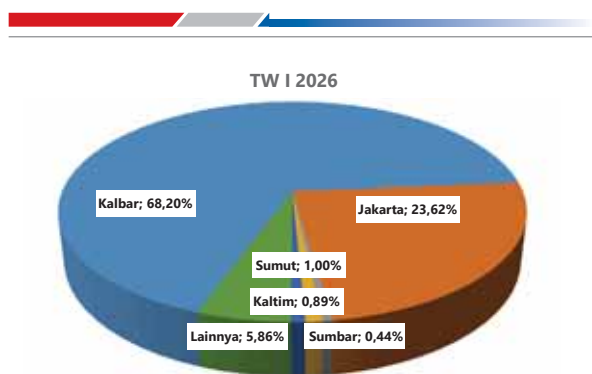
Total kredit dari perbankan yang memiliki kantor pusat/kantor cabang berlokasi di Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp73,62 triliun atau 63,90% dari total nominal kredit pada triwulan II 2026 sebesar Rp115,21 triliun, mengalami peningkatan nominal dari triwulan sebelumnya Rp72,90 triliun dan peningkatan pada pangsa perbankan Kalimantan Barat dari sebelumnya 68,20%. Sebagian pangsa kredit di Kalimantan Barat pada triwulan II 2026, berasal dari perbankan yang berlokasi di provinsi lain terutama DKI Jakarta sebesar Rp31,37 triliun (pangsa 27,23%), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat Rp25,24 triliun (pangsa 23,62%). Peningkatan penyaluran kredit oleh perbankan luar daerah, khususnya DKI Jakarta, menunjukkan semakin besarnya peran intermediasi perbankan luar wilayah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan aktivitas ekonomi di Kalimantan Barat, di tengah penyaluran kredit oleh perbankan lokal yang tetap tumbuh secara nominal.

Perbankan dengan kantor pusat/kantor cabang yang berlokasi di Kalimantan Barat turut menyalurkan kredit pada triwulan II 2026 sebesar Rp8,57 triliun ke provinsi lain di luar Kalimantan Barat atau sekitar 10,43% dari total kredit yang disalurkan perbankan Kalbar (82,19 triliun). Pangsa tersebut meningkat dibandingkan dengan triwulan I 2026 yang tercatat sebesar Rp6,93 triliun atau 8,68% dari total kredit Rp79,83 triliun yang disalurkan. Pangsa terbesar disalurkan kepada Provinsi

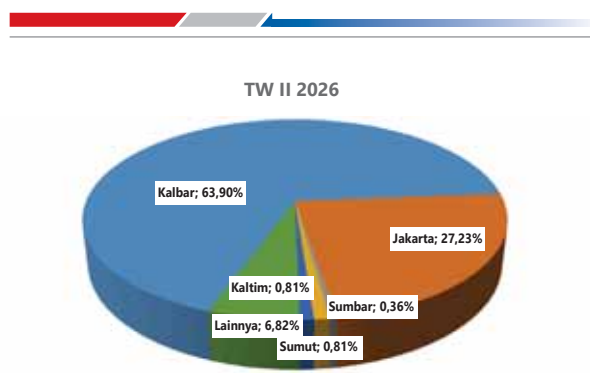
Tabel 3.3. Perkembangan Kredit Perbankan di Kalimantan (Rp Triliun)

Wilayah	2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Kalimantan Barat	87,33	89,13	90,67	93,77	94,55	95,52	96,49	99,10	97,20	97,83	98,45	105,86	114,34	126,04
g Kalbar (% yoy)	2,21	2,96	6,05	8,53	8,27	7,16	6,42	5,68	2,80	2,42	2,04	6,82	17,63	28,84
Kalimantan Tengah	69,48	73,11	75,68	78,03	78,55	80,07	79,72	80,98	80,96	85,11	85,94	87,89	95,14	104,99
Kalimantan Selatan	90,52	88,21	90,27	92,26	92,46	95,28	93,89	102,32	103,71	103,60	106,44	108,33	115,56	116,36
Kalimantan Timur	166,31	172,48	170,45	185,02	182,15	182,04	182,81	192,51	187,67	181,73	187,14	199,04	220,36	236,03
Kalimantan Utara	14,92	15,18	17,58	18,18	18,28	18,73	19,26	21,82	23,16	26,54	29,91	36,65	44,34	47,64
Nasional	6.517	6.723	6.908	7.188	7.337	7.568	7.673	7.943	8.020	8.167	8.264	8.694	10.495	11.049
g Nasional (% yoy)	10,16	7,80	8,99	10,62	12,59	12,56	11,08	10,51	9,31	7,92	7,70	9,46	30,86	35,28

Sumber: Bank Indonesia, diolah



Sumber: Bank Indonesia, diolah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.7. Persentase Lokasi Bank Asal Penyalur Kredit berdasarkan Jumlah Penyaluran Kredit di Kalimantan Barat

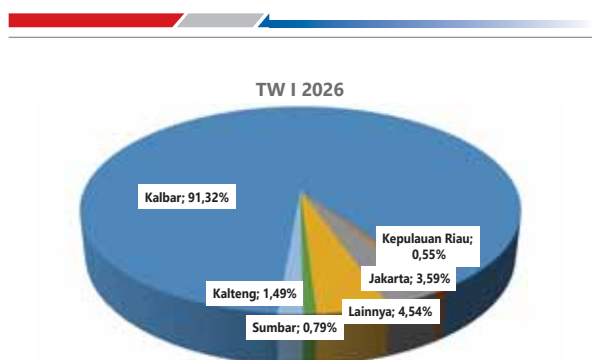
DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Tengah masing-masing sebesar Rp3,08 triliun (pangsa 3,75%) dan Rp2,00 triliun (pangsa 2,43%) dari total Rp82,19 triliun.

Kredit produktif masih mendominasi penyaluran kredit di Kalimantan Barat, dengan total nilai Rp76,40 triliun (pangsa 66,31%) yang terdiri dari kredit investasi yang meningkat sebesar Rp49,50 triliun (pangsa 42,97%) dan kredit modal kerja yang tumbuh meningkat sebesar Rp26,90 triliun (pangsa 23,35%). Tetapi, pertumbuhan kredit konsumsi yang tumbuh melambat 4,65% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,04% (yoy).

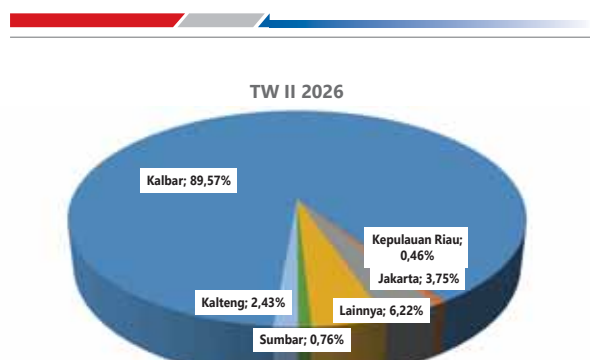
Perlambatan kinerja kredit konsumsi (KK) terjadi di tengah kenaikan suku bunga tertimbang menjadi 9,93% dari 9,66% pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, kinerja kredit investasi (KI) didukung oleh peningkatan penyaluran kredit pada sektor

industri pengolahan yang mencapai Rp8,50 triliun pada triwulan II 2026, meningkat dari Rp4,50 triliun pada triwulan sebelumnya. Hal ini seiring dengan pembangunan kawasan industri di Kab. Kayong Utara, Kab. Sanggau, Kab. Ketapang yang sedang dalam proses konstruksi.

Selanjutnya, tercermin dari grafik 3.10 bahwa kebijakan Bank Indonesia (BI) pada triwulan II 2026 yang meningkatkan BI Rate pada level 5,75% sejak 18 Juni 2026 memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menentukan keputusan pembiayaan. Kondisi tersebut tercermin dari Suku Bunga Tertimbang (SBT) kredit pada triwulan II 2026 mengalami penurunan menjadi 8,86%, dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 9,98%. Penurunan SBT kredit di Kalimantan Barat tersebut didorong oleh penurunan SBT pada kedua jenis penggunaan kredit, baik kredit modal



Sumber: Bank Indonesia, diolah

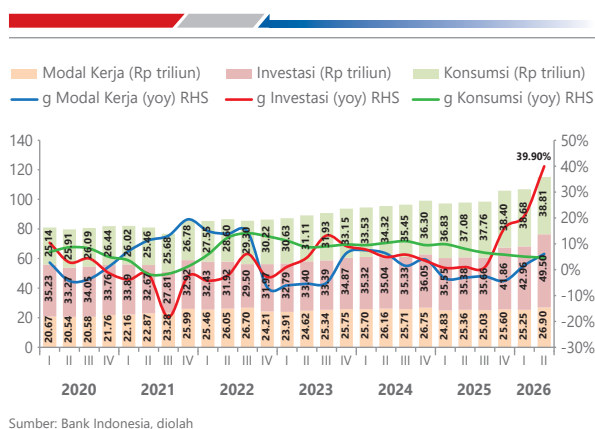


Sumber: Bank Indonesia, diolah

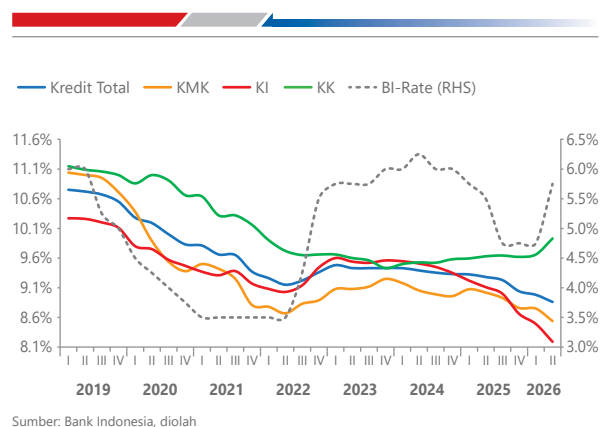
Grafik 3.8. Lokasi Penyaluran Kredit oleh Perbankan Asal Kalimantan Barat

kerja, maupun kredit investasi. SBT kredit modal kerja mengalami penurunan dari 8,75% menjadi 8,54% pada triwulan II 2026. Sementara, SBT kredit investasi mengalami penurunan dari 8,49% menjadi 8,19% pada triwulan II 2026. Penurunan suku bunga kredit mencerminkan berlanjutnya transmisi kebijakan moneter ke sektor perbankan, didukung oleh kondisi likuiditas yang relatif terjaga dan persaingan antarbank dalam mendorong penyaluran kredit. Namun demikian, pertumbuhan kredit modal kerja yang masih mengalami perlambatan menunjukkan bahwa ruang ekspansi pembiayaan kepada dunia usaha masih terbuka. Oleh karena itu, penurunan SBT kredit modal kerja diharapkan dapat meningkatkan minat pelaku usaha dalam memanfaatkan pembiayaan perbankan untuk mendukung kebutuhan operasional dan ekspansi kegiatan usaha.

Dari sisi kualitas kredit, *Non-Performing Loan* (NPL) perbankan di Kalimantan Barat menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan NPL mencerminkan membaiknya kualitas penyaluran kredit dan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga turut memoderasi peningkatan risiko kredit secara keseluruhan pada Triwulan II 2026. NPL pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 1,70%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,75%. Sebagaimana tergambar pada grafik 3.12, Penurunan NPL turut terjadi pada jenis kredit KMK dan KI yang masing-masing sebesar 3,33% dan 0,56% dari triwulan sebelumnya 3,46% dan 0,64%. Sedangkan pada KK terjadi peningkatan NPL dari 1,87% menjadi 2,01%. Jika ditelaah lebih



Grafik 3.9. Jenis Kredit Perbankan di Kalimantan Barat



Grafik 3.10. Suku Bunga Tertimbang (SBT) Kredit Perbankan di Kalimantan Barat

dalam, penurunan NPL triwulan II 2026 didukung oleh menurunnya NPL penyaluran kredit di beberapa sektor, antara lain industri jasa perorangan yang melayani rumah tangga, industri pengolahan, dan pertambangan dan penggalan yang masing-masing memiliki NPL sebesar 2,28%, 1,08%, dan 0,10% dari sebelumnya yang sebesar 3,60%, 2,01%, dan 0,29%. Sementara itu, penurunan NPL kredit Kalimantan Barat pada beberapa sektor tertahan oleh meningkatnya NPL kredit sektor jasa perantara keuangan, jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya, dan sektor kontruksi yang masing-masing tumbuh meningkat sebesar 3,28%, 3,24%, dan 4,47% dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,87%, 3,09%, dan 4,35% yang mengindikasikan meningkatnya risiko kredit dan potensi penurunan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Kenaikan NPL Kalimantan Barat pada ke tiga sektor tersebut perlu menjadi perhatian perbankan dalam menjaga kualitas pembiayaan yang sehat serta memastikan kemampuan bayar debitur, baik dari sektor dunia usaha maupun rumah tangga. Pemantauan berkelanjutan serta penerapan strategi mitigasi risiko kredit tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan daerah dan mengantisipasi peningkatan risiko kredit pada sektor-sektor tertentu. Pemantauan berkelanjutan serta penerapan strategi jangka pendek dan menengah tetap dibutuhkan untuk mengatasi hambatan kualitas kredit. Dari sisi lainnya, pada grafik 3.11, intermediasi perbankan berdasarkan *Loan to Deposit Ratio* mengalami peningkatan menjadi

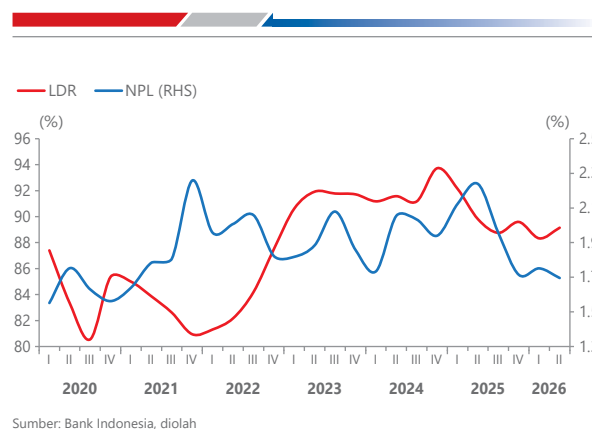
89,14% pada triwulan II 2026, dari triwulan sebelumnya yang sebesar 88,32%. Peningkatan rasio tersebut mengindikasikan pertumbuhan kredit yang relatif lebih tinggi dibandingkan DPK, mencerminkan penguatan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor riil, dengan likuiditas perbankan tetap perlu dijaga untuk memastikan keberlanjutan ekspansi kredit.

Secara spasial, penyaluran kredit terkonsentrasi di Kota Pontianak dengan pangsa sebesar 22,68% (Rp26,13 triliun) dari total kredit di Kalimantan Barat, disusul oleh Kabupaten Ketapang dengan pangsa sebesar 13,84% (Rp15,94 triliun), dan Kabupaten Kubu Raya 9,41% (Rp10,84 triliun). Sebaran kredit pada ketiga kabupaten/kota tersebut sejalan dengan data perekonomian/PDRB Kalimantan Barat yang utamanya berkontribusi oleh Pontianak dan Ketapang. Lebih

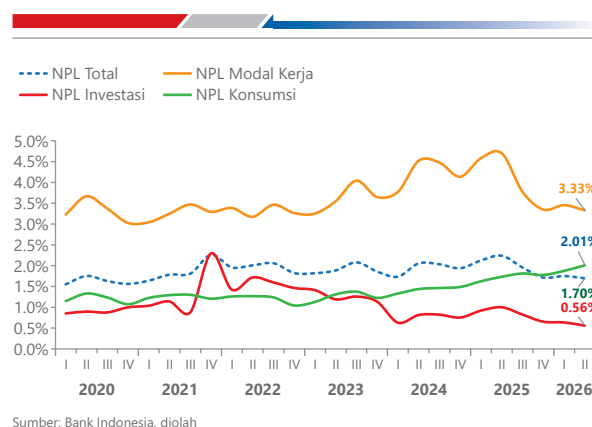
lanjut, pangsa Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kubu Raya mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya memiliki pangsa kredit sebesar 24,68%, 13,45%, dan 10,01%. Peningkatan pangsa tersebut turut didorong oleh penurunan pangsa kredit di wilayah Kabupaten Landak dan Kota Singkawang, yang sekaligus merupakan dua wilayah dengan pangsa penyaluran kredit terendah pada triwulan II 2026, masing-masing menurun dari sebesar 3,03% (Rp3,49 triliun) dan 3,23% (Rp3,72 triliun) pada triwulan I 2026, menjadi 3,04% (Rp3,92 triliun) dan 3,67% (Rp3,25 triliun) pada triwulan II 2026.

Dari sisi pertumbuhan, Kabupaten Kayong Utara merupakan daerah dengan pertumbuhan kredit paling tinggi yaitu sebesar 839,29% (yoy), disusul oleh Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Mempawah dengan pertumbuhan kredit masing-masing 97,19% (yoy) dan 30,46% (yoy). Pertumbuhan negatif terjadi di Kabupaten Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu dan Kota Singkawang yang masing – masing berkontraksi 0,69% (yoy), 2,92% (yoy), 5,25% (yoy), dan 1,63% (yoy) pada triwulan II 2026. Berdasarkan risiko kredit, seluruh kabupaten/kota mencatatkan NPL yang terjaga. NPL tertinggi berada di Kota Pontianak 2,93% yang sedikit menurun dari sebelumnya 2,94%, disusul oleh Kabupaten Mempawah sebesar 2,38% yang menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,47%.

Berdasarkan kegiatan usaha bank, grafik 3.13 menunjukkan bahwa perbankan konvensional masih mendominasi penyaluran kredit dengan total penyaluran kredit mencapai Rp103,01 triliun (pangsa 89,41%), lebih tinggi dibandingkan pembiayaan oleh perbankan syariah sebesar 12,20 triliun (pangsa 10,59%). Pada triwulan laporan, kredit perbankan konvensional tumbuh meningkat sebesar 18,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 10,10% (yoy) pada triwulan I 2026. Di sisi lain, pembiayaan perbankan syariah juga mencatat peningkatan pertumbuhan dari 8,91% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 11,57% (yoy) pada triwulan II 2026. Kinerja pembiayaan syariah tersebut terus didorong oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan visi RPJMD dan tujuan



Grafik 3.11. Perkembangan LDR dan Rasio NPL Perbankan



Grafik 3.12. Perkembangan Rasio NPL Perbankan Berdasarkan Jenis Penggunaan

Tabel 3.4. Perkembangan Nominal Kredit Berdasarkan Kabupaten/Kota (Rp Miliar)

Wilayah	2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Kalimantan Barat	87.327	89.135	90.666	93.772	94.553	95.520	96.487	99.095	97.204	97.828	98.452	105.856	106.891	115.211
Kab. Mempawah	6.776	6.824	6.812	6.968	7.182	6.276	6.467	6.352	6.166	5.994	6.122	6.381	6.325	7.820
Kab. Sambas	4.137	4.212	4.197	4.606	4.603	4.949	4.948	5.150	5.144	5.109	5.032	5.210	5.010	5.279
Kab. Ketapang	10.900	12.396	13.108	13.412	14.021	14.057	14.163	14.951	13.380	13.449	13.391	14.046	14.375	15.944
Kab. Sanggau	5.864	6.117	5.937	5.906	5.777	5.912	6.399	6.750	6.351	6.462	6.341	6.643	6.446	6.417
Kab. Sintang	8.605	8.668	8.677	8.357	8.607	8.451	8.468	9.148	9.061	9.225	8.842	8.511	8.387	8.956
Kab. Kapuas Hulu	6.436	6.011	5.994	5.988	5.938	5.991	6.106	6.119	6.038	5.997	6.071	6.086	6.138	5.683
Kab. Bengkayang	2.633	2.481	2.503	2.578	2.567	2.918	2.992	3.031	3.021	3.022	3.062	3.071	3.100	5.958
Kab. Landak	2.577	2.608	2.613	2.702	2.705	2.731	2.777	2.827	2.895	2.947	3.024	3.409	3.248	3.493
Kab. Sekadau	3.388	3.410	3.401	3.822	3.761	3.695	3.741	3.776	3.757	3.718	3.762	3.831	3.915	4.103
Kab. Melawi	2.090	2.124	2.250	2.566	2.614	2.692	2.754	2.810	2.980	3.671	3.584	3.643	3.659	3.781
Kab. Kayong Utara	577	583	605	656	652	668	705	716	741	755	788	4.655	5.290	7.087
Kab. Kubu Raya	7.011	7.317	7.431	7.698	7.797	8.485	8.496	8.674	9.082	9.221	10.245	10.496	10.697	10.837
Kota Pontianak	23.162	23.164	23.775	24.983	24.730	25.037	24.815	25.067	24.828	24.479	24.343	26.034	26.380	26.135
Kota Singkawang	3.171	3.220	3.362	3.531	3.599	3.659	3.657	3.726	3.760	3.778	3.844	3.841	3.921	3.716

Sumber: Bank Indonesia, diolah

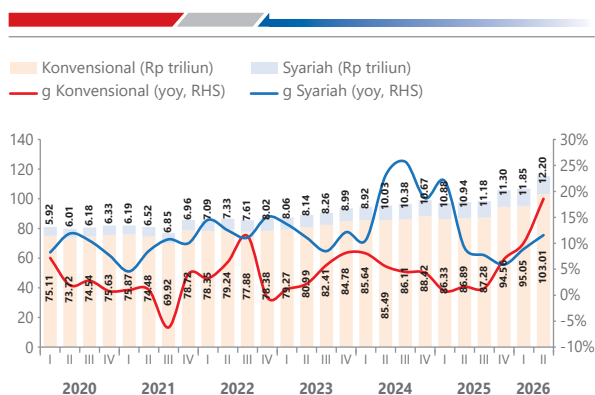
Tabel 3.5. Perkembangan NPL Berdasarkan Kabupaten/Kota

Wilayah	2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Kalimantan Barat	1,82%	1,88%	2,08%	1,86%	1,73%	2,05%	2,03%	1,94%	2,12%	2,24%	1,95%	1,71%	1,75%	1,70%
Kab. Mempawah	2,28%	1,44%	1,99%	1,98%	2,04%	2,36%	2,38%	2,37%	3,02%	3,36%	2,96%	2,40%	2,47%	2,38%
Kab. Sambas	0,68%	0,73%	1,22%	1,06%	1,06%	1,07%	1,23%	1,17%	1,26%	1,23%	1,16%	1,14%	1,23%	1,33%
Kab. Ketapang	2,82%	2,69%	2,28%	2,28%	1,36%	0,88%	0,87%	0,86%	1,13%	1,20%	1,18%	1,12%	1,16%	1,23%
Kab. Sanggau	2,74%	2,48%	1,37%	1,26%	1,50%	1,63%	1,56%	1,40%	1,66%	1,67%	1,91%	1,51%	1,53%	1,51%
Kab. Sintang	0,84%	0,88%	0,95%	0,90%	0,94%	0,91%	0,90%	0,75%	0,79%	0,82%	0,82%	0,75%	0,83%	0,91%
Kab. Kapuas Hulu	0,82%	0,85%	0,83%	0,85%	0,94%	1,07%	1,25%	1,08%	1,33%	1,46%	1,34%	1,19%	1,29%	1,28%
Kab. Bengkayang	1,82%	2,08%	2,67%	2,67%	2,70%	2,93%	2,55%	2,56%	2,85%	2,84%	2,78%	2,58%	2,71%	1,50%
Kab. Landak	1,55%	1,42%	1,50%	1,33%	1,40%	1,47%	1,42%	1,32%	1,53%	1,68%	1,62%	1,65%	1,63%	1,90%
Kab. Sekadau	0,42%	0,49%	0,46%	0,44%	0,57%	0,60%	0,63%	0,59%	0,66%	0,70%	0,65%	0,71%	0,73%	0,65%
Kab. Melawi	1,65%	1,97%	1,67%	1,08%	1,12%	1,09%	1,25%	1,30%	1,37%	1,17%	1,22%	1,08%	1,23%	1,49%
Kab. Kayong Utara	0,71%	0,63%	0,63%	0,46%	0,47%	0,52%	0,60%	0,48%	0,54%	0,69%	0,47%	0,07%	0,04%	0,05%
Kab. Kubu Raya	0,82%	1,17%	1,31%	1,33%	1,48%	1,64%	1,72%	1,67%	1,65%	1,82%	1,69%	1,70%	1,73%	1,73%
Kota Pontianak	2,46%	2,53%	0,00%	2,98%	2,81%	3,96%	3,96%	3,90%	4,02%	4,31%	3,31%	2,93%	2,94%	2,93%
Kota Singkawang	1,38%	1,35%	1,42%	1,40%	1,59%	2,43%	1,79%	1,41%	1,56%	1,56%	1,72%	1,59%	1,67%	1,45%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

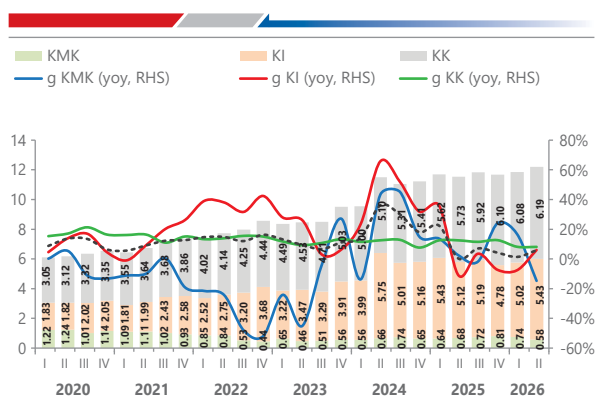
pembangunan Kalimantan Barat melalui meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis potensi unggulan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dari sisi kualitas, seluruh jenis pembiayaan syariah memiliki tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pada triwulan

II 2026 sangat terjaga sebesar 1,46% di bawah *threshold* 5%. Secara spasial, kualitas pembiayaan syariah terjaga hampir diseluruh kabupaten/kota, dengan Kabupaten Mempawah yang perlu mendapatkan perhatian karena memiliki tingkat NPF sebesar 5,44%.



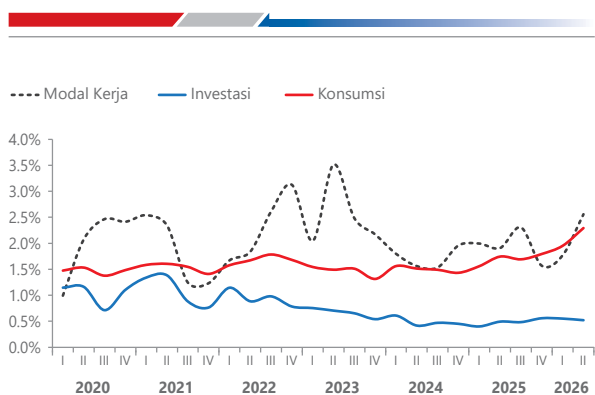
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.13. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Berdasarkan Kegiatan Bank



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.14. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.15. Perkembangan Non Performing Finance (NPF) Pembiayaan Syariah

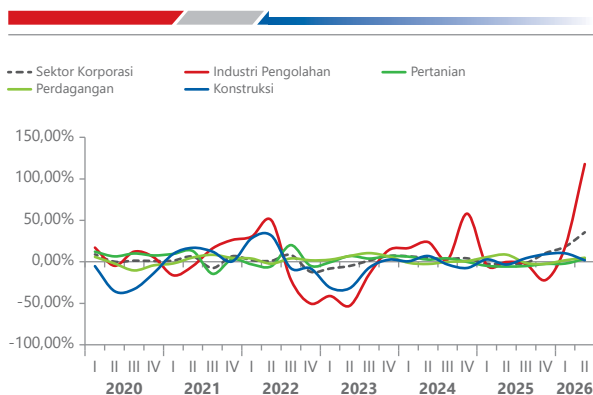
3.2. KETAHANAN SEKTOR KORPORASI¹⁰

Kinerja sektor korporasi mengalami perbaikan tercermin dari penyaluran kredit kepada sektor korporasi yang tumbuh menjadi 35,41% (yoy) atau Rp54,70 triliun, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 18,34% (yoy).

Perbaikan kinerja kredit korporasi sejalan dengan kredit sektor industri pengolahan yang tumbuh 117,92% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 18,26% (yoy). Hal ini sejalan dengan kinerja KMK sektor industri pengolahan yang tumbuh lebih tinggi menjadi 62,14% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 38,28% (yoy). Perbaikan ini sejalan dengan meningkatnya kapasitas produksi beberapa industri alumina sehingga beberapa perusahaan mulai membutuhkan tambahan modal kerja untuk membeli bahan baku, menambah persediaan, dan menjaga kelancaran produksi.

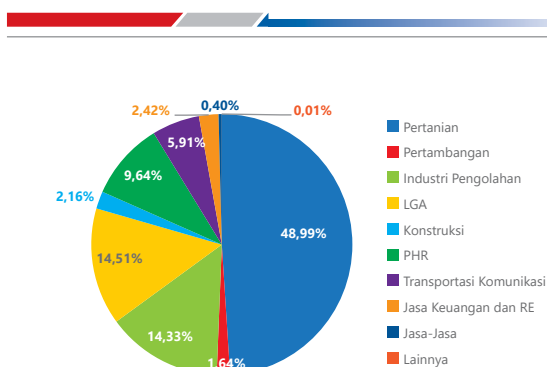
Lebih lanjut, pertumbuhan kredit korporasi yang lebih tinggi juga didorong oleh kinerja kredit korporasi sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Kredit pertambangan dan penggalian tumbuh 77,67% (yoy) pada triwulan II 2026, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 27,47% (yoy), sementara kredit sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan tumbuh 3,66% (yoy), lebih tinggi dibandingkan sebelumnya yang berkontraksi 2,13% (yoy). Perbaikan sektor pertambangan dan penggalian didorong oleh eskalasi pada sektor industri pengolahan alumina di Kalimantan Barat yang turut mendorong eskalasi dari sisi pertambangan bauksit, sementara perbaikan sektor pertanian seiring dengan membaiknya harga CPO global serta kepastian permintaan CPO domestik seiring implementasi program B50 dari pemerintah.

10. Mulai triwulan I 2016, kredit kepada sektor korporasi dipersempit pengertiannya dengan mengeluarkan beberapa unsur berdasarkan golongan pemilik yakni (i) penduduk yang merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah serta badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah, (ii) bukan penduduk, dan (iii) bank. Selain itu, untuk pembahasan ketahanan sektor korporasi juga ditambahkan perhitungan DPK dengan berdasarkan penggolongan pemilik yang sama.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.16. Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Ekonomi Utama



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.17. Komposisi Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor Ekonomi

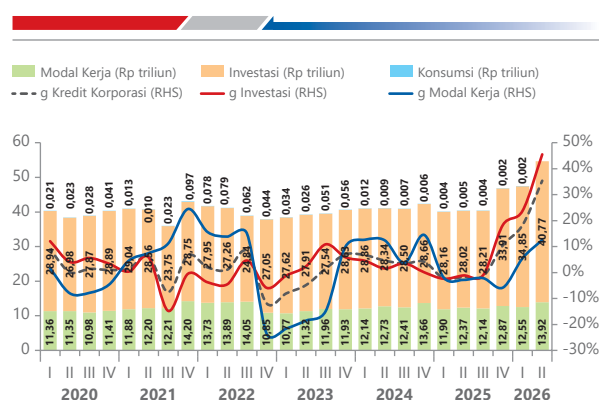
Seperti pada Grafik 3.18, berdasarkan jenis penggunaan, mayoritas kredit sektor korporasi disalurkan untuk penggunaan investasi dengan nilai sebesar Rp40,77 triliun (pangsa 74,54%) dan modal kerja sebesar Rp13,92 triliun (pangsa 25,46%). Kredit korporasi dalam bentuk investasi tumbuh 45,50% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 23,77% (yoy). Sementara itu, kredit modal kerja tumbuh 12,58% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,53% (yoy).

Berdasarkan lokasi proyek, daerah penyaluran kredit korporasi terbesar adalah Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara masing-masing sebesar Rp13,05 triliun (pangsa 23,86%), Rp9,93 triliun (pangsa 18,16%), dan Rp6,32 triliun (pangsa 11,56%). Peningkatan kredit korporasi pada

triwulan II 2026 terutama bersumber dari kredit korporasi di Kabupaten Mempawah yang tumbuh 77,99% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 29,76% (yoy). Peningkatan pertumbuhan kredit korporasi di Kabupaten Mempawah didorong oleh dinamika aktivitas investasi di sektor industri pengolahan.

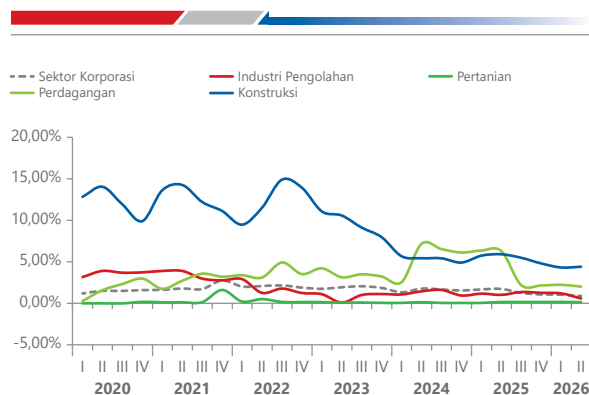
Kualitas kredit korporasi menguat yang tercermin dari rasio NPL sebesar 0,89%, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,05%, seperti terlihat pada Grafik 3.19. Berdasarkan sektor ekonomi, penurunan rasio NPL tersebut terutama berasal dari sektor pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan masing-masing mencatatkan rasio NPL sebesar 0,07% dan 0,58%, mengalami perbaikan dari triwulan sebelumnya yang tercatat 0,20% dan 1,19%. Penurunan NPL sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan ini sejalan dengan pertumbuhan berbagai kawasan industri di Kalimantan Barat yang turut meningkatkan permintaan komoditas tambangnya.

Selanjutnya, berdasarkan Grafik 3.20, DPK sektor korporasi tercatat sebesar Rp25,48 triliun, tumbuh sebesar 16,24% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 22,01% (yoy). Perlambatan DPK korporasi terjadi pada jenis giro dan deposito yang masing-masing tumbuh menjadi 16,43% (yoy) dan -8,11% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh 24,61% (yoy) dan 6,76% (yoy). Di sisi lainnya, DPK



Sumber: Bank Indonesia, diolah

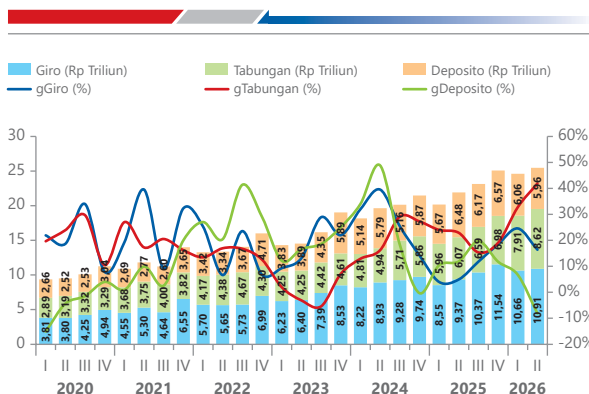
Grafik 3.18. Penyaluran Kredit kepada Sektor Korporasi di Kalimantan Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan



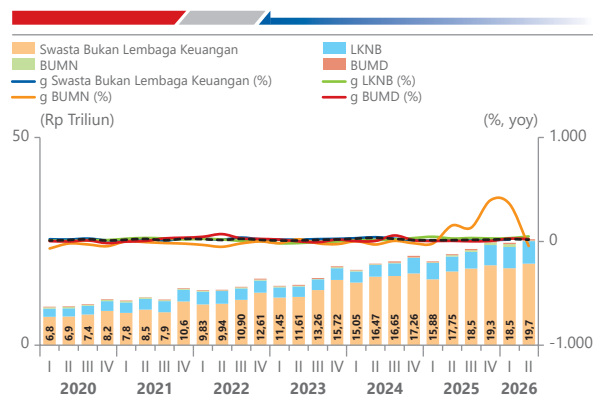
Grafik 3.19. NPL Kredit kepada Sektor Korporasi di Kalimantan Barat

Korporasi jenis tabungan pada triwulan II 2026 tumbuh menjadi 41,94% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 32,79% (yoy).

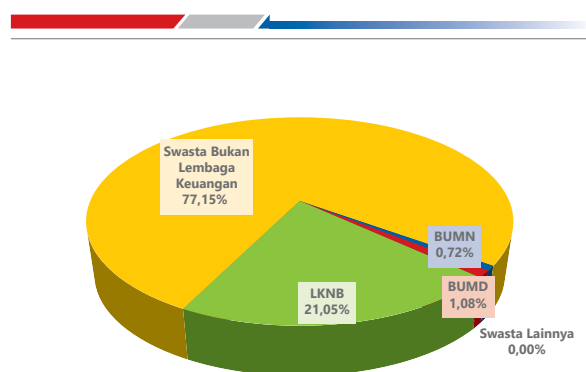
Berdasarkan golongan pemilik, mayoritas DPK tetap disumbangkan oleh korporasi sektor swasta - bukan lembaga keuangan. Penghimpunan dana dari sektor swasta - bukan lembaga keuangan pada triwulan II 2026 mencapai Rp19,7 triliun (pangsa 77,15% dari DPK Korporasi), tetapi tumbuh sebesar 10,78% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 16,59% (yoy).



Grafik 3.20. Perkembangan Jenis DPK Korporasi Kalimantan Barat



Grafik 3.21. Perkembangan DPK Sektor Korporasi pada KC/KCP di Kalimantan Barat Berdasarkan Golongan Pemilik



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.22. Pangsa DPK Sektor Korporasi pada KC/KCP di Kalimantan Barat Berdasarkan Golongan Pemilik

3.3. KETAHANAN SEKTOR PERSEORANGAN¹¹

Sektor Perseorangan/Rumah Tangga (RT) di Kalimantan Barat terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang tercermin dari realisasi pertumbuhan konsumsi RT pada PDRB Kalimantan Barat sebesar 4,17% (yoy) pada triwulan II 2026. Konsumsi Rumah Tangga juga mendominasi pangsa PDRB dari sisi pengeluaran sebesar 48,24%. Kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan II didorong oleh

11. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tidak cukup hanya melihat ketahanan individu. Interkoneksi yang terjadi antara komponen juga perlu dilihat untuk memitigasi terjadinya risiko sistemik. Di Kalimantan Barat, rumah tangga merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian dan sistem keuangan baik dari sisi kontribusi maupun keterkaitannya dengan perbankan, pemerintah, lembaga keuangan lainnya dan korporasi.

perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP) di hampir semua sektor, serta terjaganya harga komoditas unggulan seperti CPO dan alumina, yang turut menjaga daya beli masyarakat dan rumah tangga yang stabil, sehingga berdampak pada tingkat konsumsi rumah tangga yang terjaga kuat.

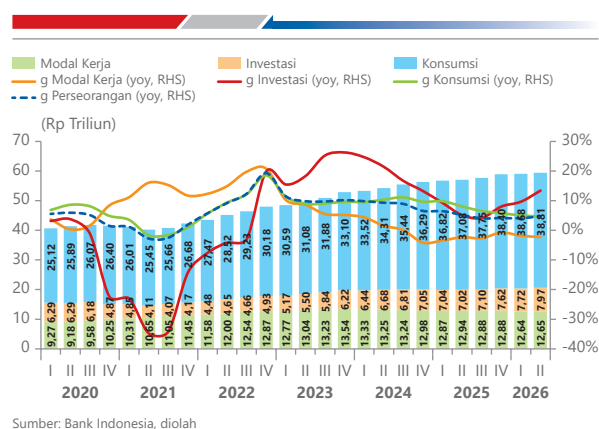
Realisasi DPK perbankan dari nasabah perseorangan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp61,69 triliun atau tumbuh sebesar 6,02% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 5,54% (yoy). Pertumbuhan DPK tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan DPK jenis tabungan dengan pangsa mencapai 75,61% dengan andil 7,03%, yang tumbuh 9,62% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,34% (yoy). DPK perseorangan jenis giro juga tumbuh sebesar 17,19% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 14,09% (yoy). Sementara itu, DPK deposito perseorangan terkontraksi 4,61% (yoy), lebih dangkal dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 5,34% (yoy).

Sementara itu, jumlah penyaluran kredit kepada debitur perseorangan mengalami pertumbuhan, yakni tercatat sebesar Rp59,74 triliun atau tumbuh sebesar 4,73% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh hingga 4,09% (yoy). Pertumbuhan tersebut sejalan dengan pertumbuhan

kredit investasi perseorangan yang tumbuh 13,43% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,68% (yoy). Namun, pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh kredit konsumsi yang tumbuh melambat menjadi 4,66% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,05% (yoy). Melihat lebih rinci pada kredit rumah tangga, kredit kendaraan roda empat terkontraksi 19,72% (yoy) pada triwulan II 2026, meski lebih dangkal dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 20,01% (yoy). Hal ini ditunjukkan pada Grafik 3.24.

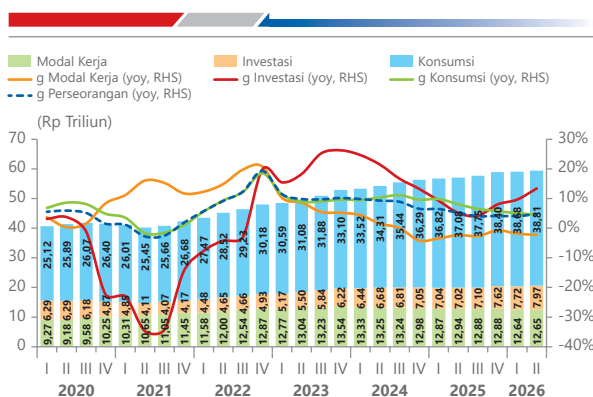
Selanjutnya, pertumbuhan kartu kredit nasabah perseorangan mengalami peningkatan dan tercatat dengan nominal sebesar Rp521,59 miliar, tumbuh 8,20% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,61% (yoy). Jumlah rekening kartu kredit juga tumbuh meningkat 2,68% (yoy) pada triwulan II 2026, dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,64% (yoy).

Lebih lanjut, pada Grafik 3.26, kualitas kredit perseorangan tercatat dengan rasio NPL meningkat menjadi 2,46% pada triwulan II 2026, dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,33%. Rasio NPL tersebut terjaga pada *level* yang aman, di bawah *threshold* 5%. Peningkatan rasio NPL kredit perseorangan pada triwulan II 2026 didorong oleh kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi yang memiliki rasio NPL sebesar 3,58%, 2,96%, dan 1,07% pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 3,42%, 2,80%, dan 1,87%. Rasio NPL tertinggi tercatat pada kredit modal kerja perseorangan dikarenakan eksposur risiko usaha/bisnis masyarakat. *Monitoring* rasio NPL kredit perseorangan, khususnya kredit modal kerja, dapat diupayakan stabil terjaga untuk mendukung pembiayaan sektor perseorangan dalam mendukung pertumbuhan total kredit dan keseluruhan perekonomian Kalimantan Barat yang berkelanjutan.



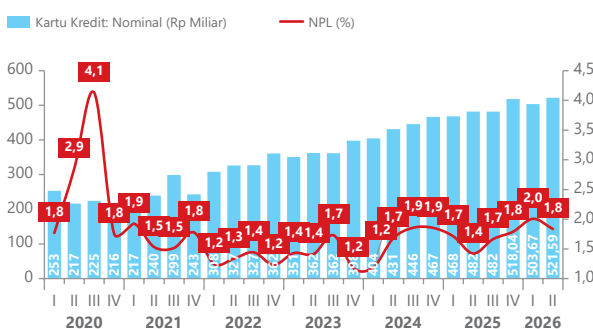
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.23. Pertumbuhan DPK Perseorangan Berdasarkan Jenis Penempatan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.24. Perkembangan Kredit Perseorangan



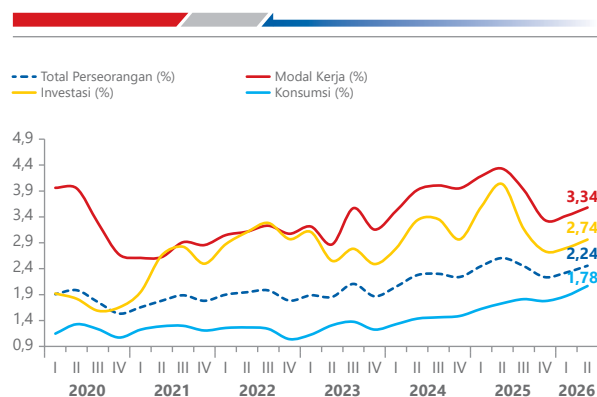
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.25. Nominal dan NPL Kartu Kredit Perseorangan

3.4. KETAHANAN SEKTOR UMKM¹²

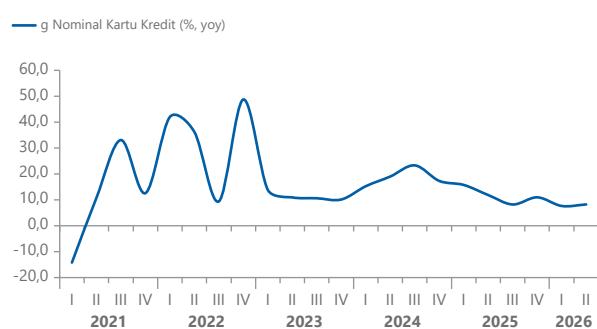
Pembiayaan UMKM masih menunjukkan pertumbuhan dengan kualitas kredit yang cukup terjaga. Pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp30,34 triliun atau tumbuh 1,56% (yoy), mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,83% (yoy). Pangsa pembiayaan UMKM sebesar 26,34% dari total penyaluran kredit, lebih rendah dibandingkan dengan pangsa pada triwulan sebelumnya yang sebesar 28,49%. Rasio NPL kredit UMKM tercatat sebesar 3,05%, sedikit meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,82%.

12. Pengertian UMKM adalah sesuai UU No. 20 Tahun 2008. Mulai triwulan I 2016, pengertian kredit kepada sektor UMKM dipersempit yakni kredit kepada UMKM yang merupakan bagian dari sektor korporasi dan perseorangan yang merupakan penduduk.



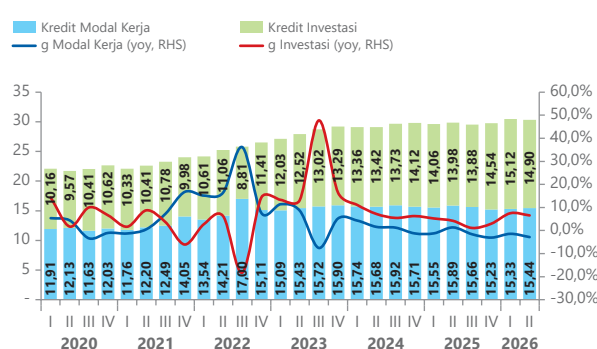
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.26. Perkembangan Rasio NPL Kredit Perseorangan Berdasarkan Jenis Penggunaan



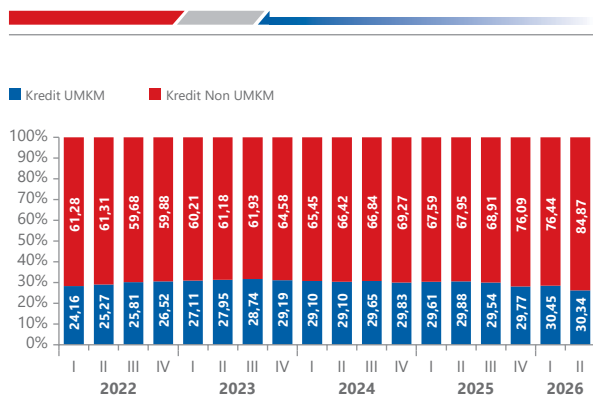
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.27. Pertumbuhan Nominal Kartu Kredit Perseorangan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.28. Pembiayaan UMKM Kalbar Berdasarkan Jenis Penggunaan

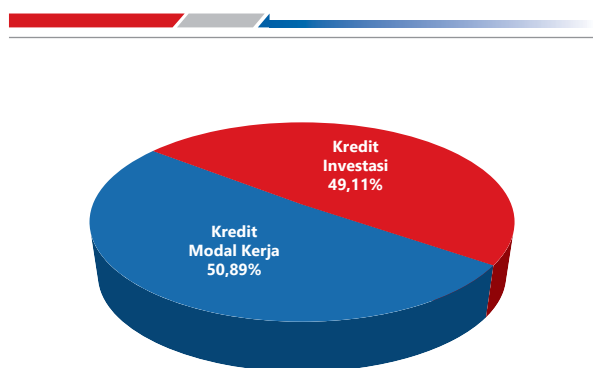


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.29. Perkembangan Pembiayaan UMKM

Berdasarkan jenis penggunaan, perlambatan pembiayaan UMKM terjadi seiring perlambatan kredit investasi UMKM yang tumbuh 6,55% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,52% (yoy). Begitu pula dengan kredit modal kerja UMKM yang pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -1,41% (yoy), pada triwulan II 2026 melambat menjadi -2,83% (yoy). Berdasarkan pangsa, mayoritas pembiayaan UMKM disalurkan dalam bentuk modal kerja dengan pangsa 50,89% (Rp15,44 triliun), sedangkan sisanya disalurkan untuk investasi yang memiliki pangsa 49,11% (Rp14,90 triliun), seperti pada Grafik 3.30.

Perbaikan kinerja kredit UMKM sejalan dengan peningkatan penyaluran kredit UMKM sektor pertanian yang tumbuh lebih tinggi 7,42% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,92% (yoy). Sektor ini berkontribusi terhadap

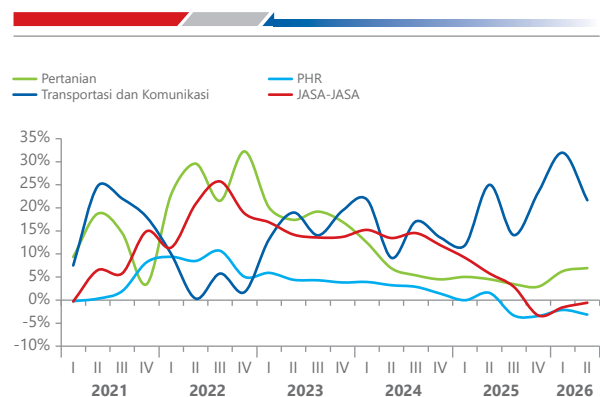


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.30. Pangsa Pembiayaan UMKM Kalbar berdasarkan Jenis Penggunaan

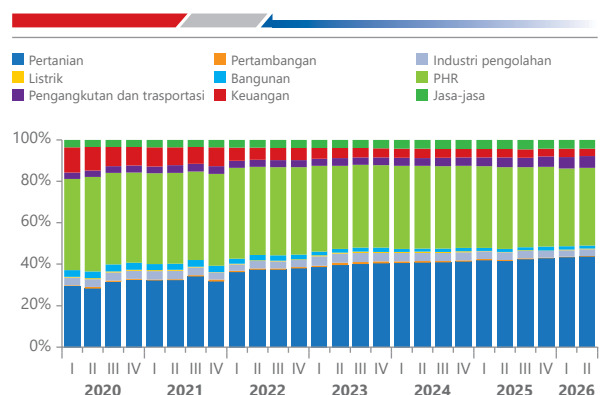
peningkatan pembiayaan UMKM dengan andil pertumbuhan 2,97%. Berdasarkan sektor ekonomi, pembiayaan UMKM didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan serta sektor PHR. Pangsa sektor pertanian serta perdagangan, hotel, dan restoran terhadap pembiayaan UMKM masing-masing sebesar 43,65% (Rp13,24 triliun) dan 37,56% (Rp11,40 triliun).

Berdasarkan skala usaha seperti yang ditunjukkan oleh Grafik 3.33, kredit UMKM lebih banyak disalurkan untuk kredit usaha mikro dan usaha kecil yang masing-masing dengan pangsa 38,49% (Rp11,68 triliun) dan 35,11% (Rp10,65 triliun), sementara kredit menengah memiliki pangsa sebesar 26,39% (Rp8,01 triliun). Berdasarkan pertumbuhannya, kredit usaha mikro tumbuh 5,15% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,00% (yoy).



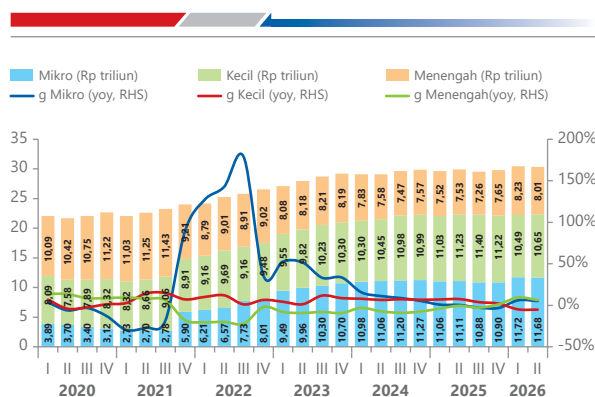
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.31. Pendorong Pertumbuhan Pembiayaan UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: Bank Indonesia, diolah

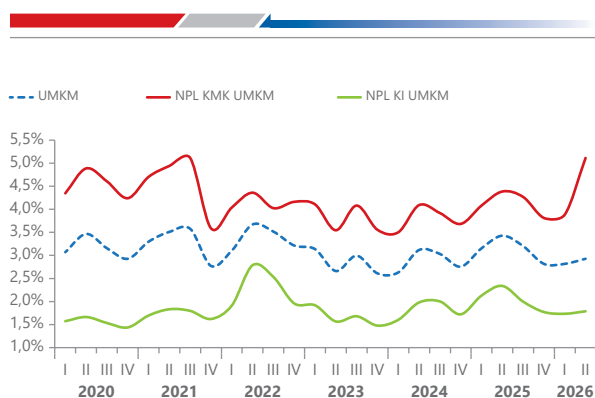
Grafik 3.32. Pangsa Pembiayaan UMKM Kalbar Berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: Bank Indonesia, diolah

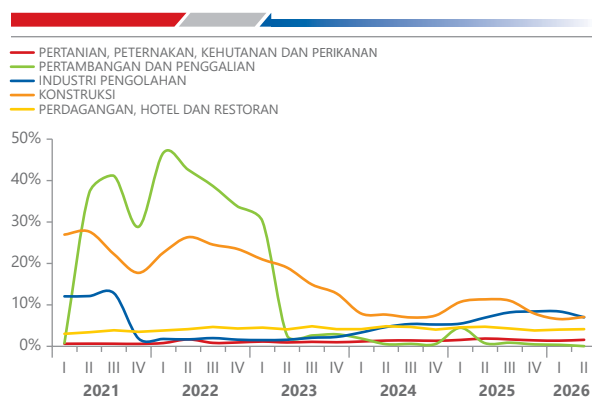
Grafik 3.33. Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Kategori Debitur

Sedangkan penyaluran kredit kepada usaha kecil terkontraksi sebesar 5,16% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 4,85% (yoy). Sementara itu, penyaluran kredit kepada usaha menengah tumbuh 6,29% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I yang tumbuh 9,44% (yoy).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.34. Perkembangan NPL Kredit UMKM



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.35. Perkembangan NPL Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha

Kualitas kredit UMKM tetap terjaga pada level NPL yang aman sebesar 2,91%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,82%. NPL kredit berdasarkan jenis penggunaan ditunjukkan oleh Grafik 3.34, dimana rasio NPL kredit modal kerja tercatat sebesar 3,99%, mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya yang sebesar 3,88%, sementara rasio NPL kredit investasi tercatat sebesar 1,79%, lebih tinggi pula dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,73%. Sementara itu, berdasarkan lapangan usaha yang ditunjukkan oleh Grafik 3.35, peningkatan rasio NPL kredit UMKM berasal dari rasio NPL sektor konstruksi dan pertanian yang masing-masing tercatat sebesar 7,04% dan 1,40% pada triwulan II 2026, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 6,55% dan 1,37%. Berdasarkan NPL per sektor, diperlukan perhatian khusus dalam menjaga perbaikan NPL pada kredit UMKM sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan dengan rasio NPL diatas 5%.

BOKS 2

Rabbani Khatulistiwa 2026: Mendorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Syariah dan Akses Pembiayaan UMKM

Kalimantan Barat memiliki ruang pengembangan ekonomi syariah yang besar, didukung oleh **60,2% penduduk yang beragama Islam** dengan potensi permintaan produk halal diperkirakan mencapai **Rp33,96 triliun per tahun**, berdasarkan asumsi jumlah penduduk muslim dikalikan pengeluaran per kapita masyarakat Kalimantan Barat. Potensi tersebut didukung oleh keberadaan **5.173 pelaku usaha halal** serta perkembangan positif pembiayaan perbankan syariah yang pada triwulan II 2026 tumbuh **11,57% (yoy)**, meningkat dari **8,91% (yoy)** pada triwulan sebelumnya, dengan kualitas pembiayaan yang tetap terjaga sebagaimana tercermin dari NPF sebesar **1,46%**, jauh di bawah *threshold* 5%. Kondisi tersebut menunjukkan besarnya ruang untuk memperkuat keterhubungan antara sisi permintaan, kapasitas pelaku usaha, dan akses pembiayaan dalam ekosistem halal Kalimantan Barat.

Dalam konteks tersebut, **Rabbani Khatulistiwa 2026** merupakan rangkaian aksi kolaborasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang diselenggarakan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat pada **18–20 Juni 2026**, dengan mengusung tema **“Penguatan Rantai Nilai Halal dan Halal Lifestyle untuk Kemandirian Pesantren dan Umat Kalimantan Barat.”** Mengusung konsep flagship event yang mengintegrasikan edukasi, *capacity building*, pendampingan, kompetisi, showcase, hingga business matching, kegiatan diarahkan untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha sekaligus memperluas akses pasar dan pembiayaan. Pendekatan tersebut mempertemukan berbagai elemen ekosistem ekonomi syariah, mulai dari UMKM, pesantren, lembaga ZISWAF, perbankan syariah, komunitas, hingga masyarakat umum.

Sepanjang rangkaian kegiatan, Rabbani Khatulistiwa 2026 mencatat **10.999 partisipan**, termasuk **726 peserta kegiatan literasi dan edukasi ekonomi syariah**. Dari sisi penguatan UMKM, kegiatan

melibatkan 124 UMKM dalam berbagai agenda perluasan akses pasar melalui *exhibition* dan *business matching*. Dengan basis **5.173 pelaku usaha halal** yang teridentifikasi, cakupan tersebut setara dengan sekitar **2,4%** dari populasi pelaku usaha halal, menunjukkan bahwa Rabbani telah menjadi salah satu kanal fasilitasi untuk mempertemukan pelaku usaha dengan peluang pasar dan sumber pembiayaan. Rangkaian perluasan akses pasar tersebut menghasilkan outcome penjualan dan/atau business matching penjualan sebesar **Rp1,70 miliar**, atau mencapai **154,7% dari target Rp1,10 miliar**.

Penguatan akses pembiayaan menjadi bagian penting dari intervensi tersebut. Melalui business matching kredit/pembiayaan Road to FESyar, realisasi pembiayaan mencapai **Rp4,94 miliar**, atau **117,5% dari target Rp4,20 miliar**. Dengan demikian, total transaksi penjualan dan business matching pembiayaan mencapai **Rp6,64 miliar**, dibandingkan biaya penyelenggaraan sebesar **Rp922,81 juta**, sehingga menghasilkan *Benefit Cost Ratio* sebesar **719,14%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara showcase, pendampingan, temu bisnis, dan fasilitasi pembiayaan mampu menghasilkan economic leverage yang signifikan sekaligus memperluas akses UMKM terhadap pasar dan sumber pembiayaan.

Selain capaian transaksi, efektivitas Rabbani Khatulistiwa 2026 tercermin dari tingginya jangkauan kegiatan kepada masyarakat. Realisasi visitasi mencapai **10.999**, atau **207,65% dari target 5.297 visitasi**, dengan *engagement* media sosial Instagram mencapai **754 ribu views/impressions** dan *positive media sentiment* sebesar **100%**. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan ekosistem yang menggabungkan sisi permintaan melalui literasi dan promosi halal dengan sisi penawaran melalui penguatan UMKM serta akses pembiayaan mampu memperluas dampak kegiatan di luar transaksi langsung selama *event*.

Ke depan, penguatan Rabbani Khatulistiwa diarahkan pada **perluasan segmentasi peserta, peningkatan publikasi digital dan media engagement, serta penguatan integrasi edukasi, pendampingan, akses pembiayaan, dan akses pasar.** Dengan memanfaatkan besarnya potensi pasar halal Kalimantan Barat dan

memperluas keterhubungan antar-aktor dalam rantai nilai halal, Rabbani diharapkan semakin berperan sebagai katalisator pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Kalimantan Barat.



Pembukaan Rabbani Khatulistiwa oleh Sekda Kalbar dr Harrison M. Kes



Sambutan sekaligus *keynote speech* Rabbani Khatulistiwa oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar Bp Doni Septadijaya



Pemenang Rabbani Future Business: Roat to IKRA 2027



Pelaksanaan Capacity Building Lembaga ZISWAF se – Kalimantan Barat



Pelaksanaan Training of Trainer Sharia Content Creator

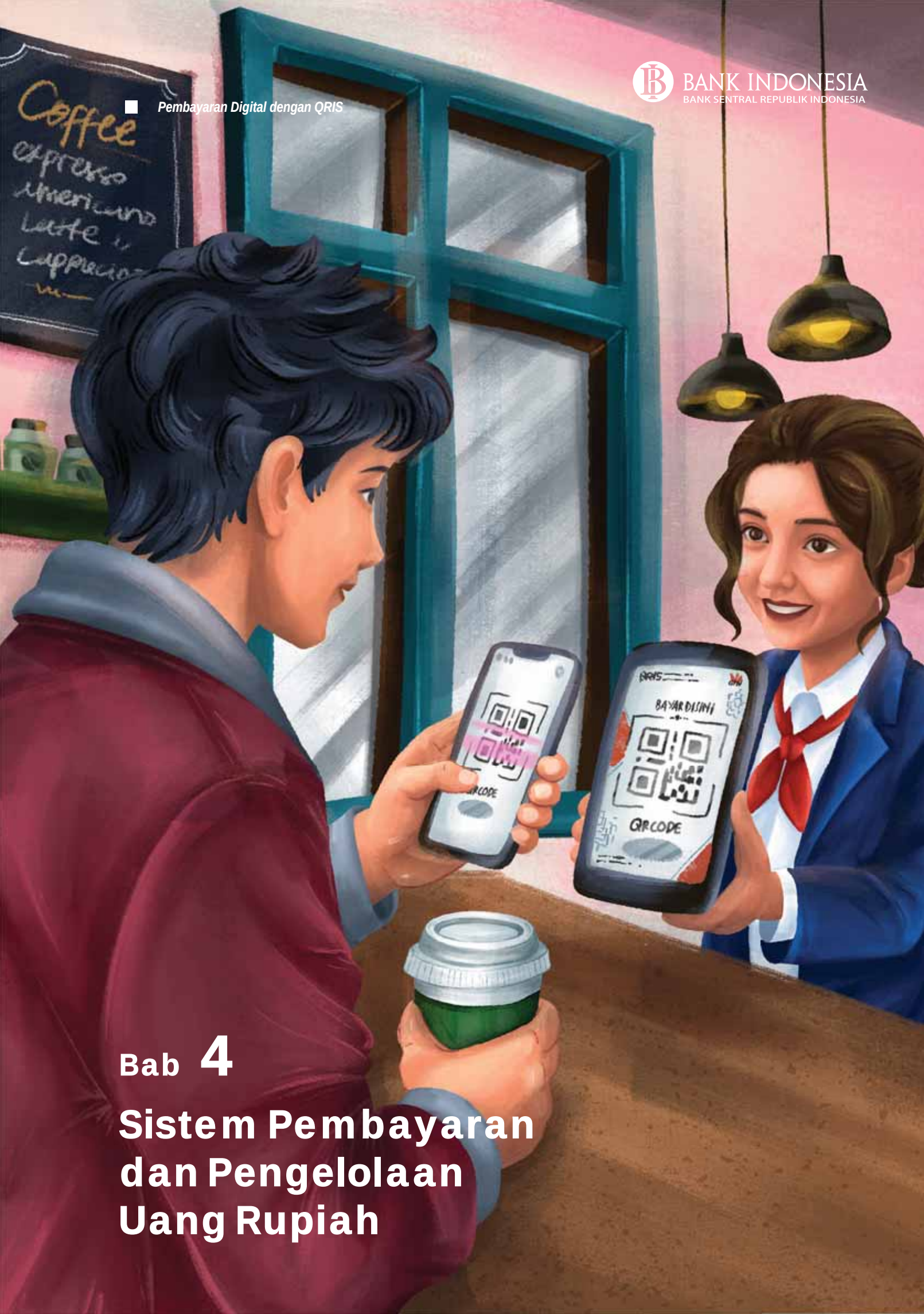


Pelaksanaan Training of Trainer Guru Ekonomi SMA/ MA se Kalimantan Barat



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

■ Pembayaran Digital dengan QRIS



Bab 4

Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Net Flow

Triwulan II 2026

582,65 M

Triwulan I 2026
-130,27 M

Triwulan II 2025
1,066 T

Pertumbuhan Nominal Transaksi RTGS

Triwulan II 2026

Rp43,164 T

Triwulan I 2026
Rp56,038 T

Triwulan II 2025
Rp35,461 T

Pertumbuhan Nominal Transaksi SKN BI

Triwulan II 2026

Rp5,787 T

Triwulan I 2026
Rp6,179 T

Triwulan II 2025
Rp5,922 T

Pertumbuhan Nominal Transaksi UE

Triwulan II 2026

Rp1,743 T

Triwulan I 2026
Rp1,671 T

Triwulan II 2025
Rp945,72 M

Jumlah Merchant QRIS

Triwulan II 2026

552.673

Triwulan I 2026
503.209

Triwulan II 2025
428.636

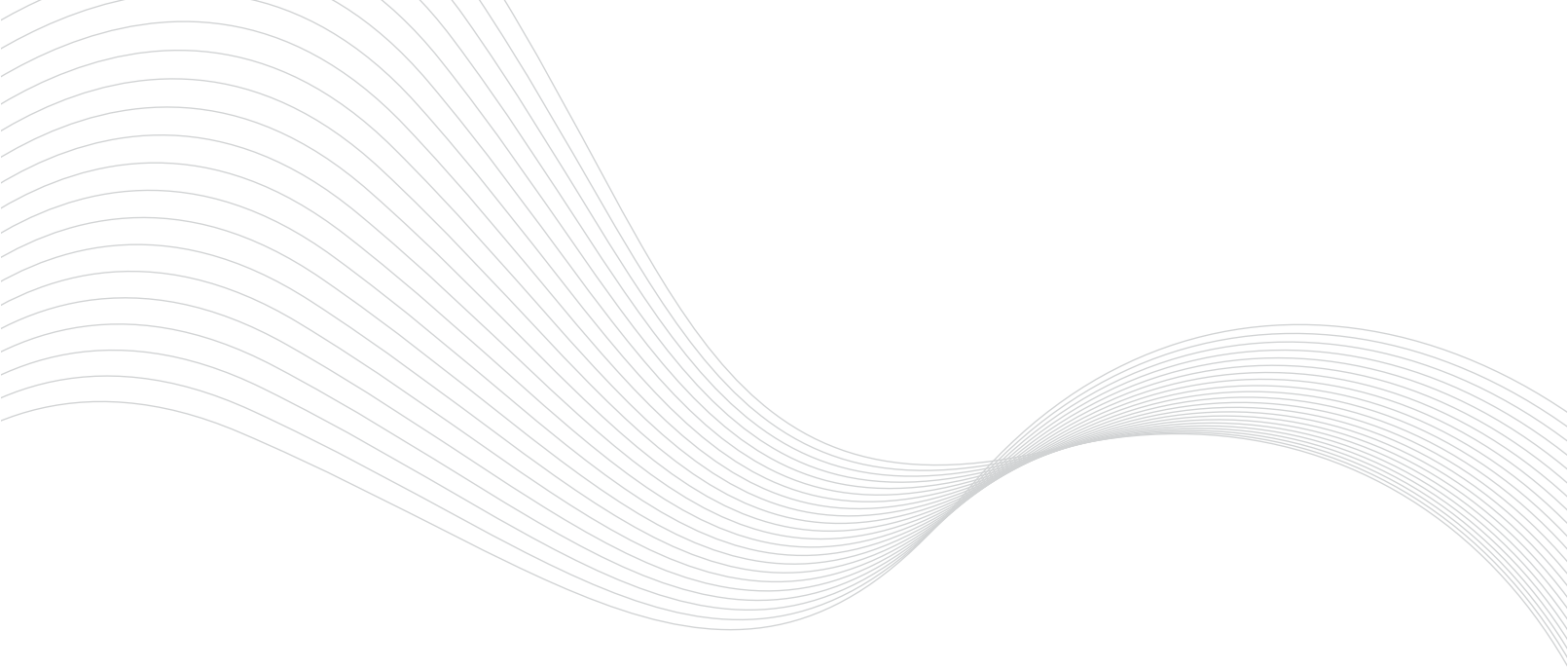
Jumlah User QRIS

Triwulan II 2026

875.440

Triwulan I 2026
817.969

Triwulan II 2025
740.276



Peredaran uang kartal di Provinsi Kalimantan Barat pada Triwulan II 2026 mengalami kondisi net-inflow, sedangkan pembayaran nontunai di Provinsi Kalimantan Barat secara umum tumbuh stabil. Transaksi nontunai bernilai besar (SKNBI dan BI-RTGS) maupun ritel (BI-FAST, Kartu debit dan kredit, dan uang elektronik) tumbuh di Triwulan II 2026,

***Implementasi elektronifikasi transaksi keuangan di Kalimantan Barat terus menunjukkan kemajuan yang signifikan.** Hingga akhir Triwulan II 2026, jumlah merchant QRIS, pengguna, dan volume transaksi tumbuh secara akseleratif. Bank Indonesia melakukan berbagai inisiatif untuk mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), antara lain implementasi QRIS dinamis melalui platform pemerintah daerah yang sudah diimplementasikan di Kota Pontianak (E-Ponti), Kota Singkawang (SIGAP), Kab. Sambas (E-Pakatan), Kab. Landak (SAPALA), Kab. Mempawah (Si Perjaka), Provinsi Kalbar (Samsat)*

***Aktivitas transaksi antar negara menunjukan sedikit terkoreksi di triwulan II 2026 secara tahunan.** Hal ini tercermin dari penurunan transaksi jual/beli UKA dan transaksi incoming-outgoing melalui Layanan Remitansi, menunjukkan adanya moderasi aktivitas lintas negara.*



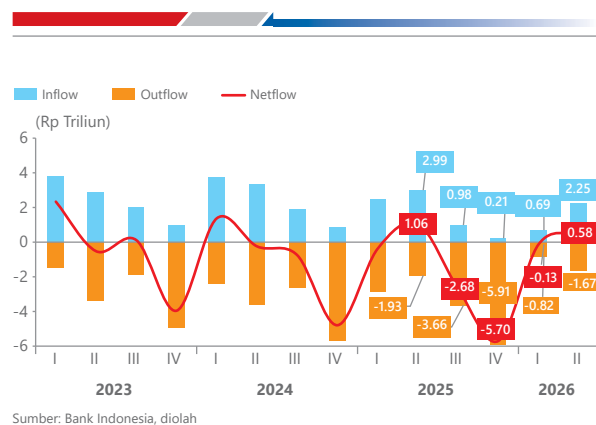
4.1. SISTEM PEMBAYARAN TUNAI

4.1.1. Perkembangan Pengelolaan Uang Rupiah

Aliran uang kartal pada Triwulan II 2026 menunjukkan posisi *net-inflow* sebesar Rp0,58 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat Rp1,06 triliun seperti yang ditunjukkan pada Grafik 4.1.

Sepanjang triwulan II 2026, tercatat *outflow* sebesar Rp1,67 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar 103,66% dibanding triwulan sebelumnya (qtq) dan turun sebesar 57,51% dibanding triwulan yang sama pada tahun sebelumnya (yoy). Penurunan *outflow* signifikan terjadi pada bulan April 2026, hal tersebut disebabkan oleh arus balik pasca Idul Fitri.

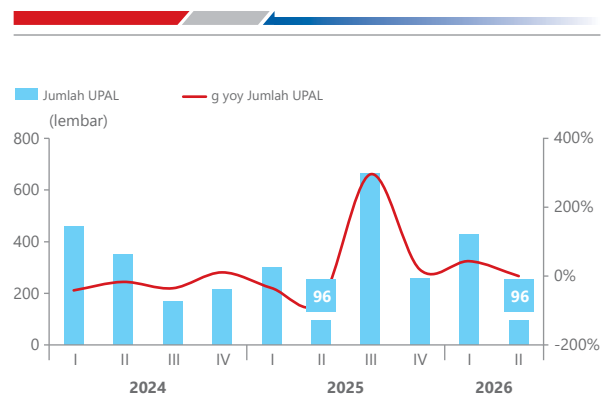
Aliran uang kartal yang masuk Bank Indonesia pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp2,25 triliun. Berbeda dengan tren *outflow*, terjadi peningkatan sebesar 225,58% dibanding triwulan sebelumnya (qtq) dan kontraksi sebesar 24,78% dibanding triwulan yang sama pada tahun sebelumnya (yoy). Pertumbuhan *inflow* (qtq) yang besar dapat disebabkan oleh *base effect* besaran *inflow* akibat arus balik pasca Idul Fitri. Kondisi ini juga mengindikasikan bergesernya pola transaksi masyarakat Kalimantan Barat dari uang tunai menuju pembayaran digital sejalan dengan terus meningkatnya volume transaksi QRIS di Kalimantan Barat.



Grafik 4.1. Perkembangan *Inflow-Outflow* di KPwBI Prov. Kalimantan Barat

4.1.2. Penanganan Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya

Temuan uang Rupiah yang diragukan keasliannya selama Triwulan II 2026 mencapai 96 bilyet yang didominasi oleh pecahan besar yaitu Rp100.000 sebanyak 53 bilyet dan pecahan Rp50.000 sebanyak 43 bilyet dengan nilai mencapai Rp7,45 juta. Jumlah tersebut sama dibandingkan dengan Triwulan II 2025, seperti ditunjukkan pada Grafik 4.3. Berdasarkan sumbernya, temuan tersebut didominasi oleh temuan Perbankan sebesar 99% dan 1% lainnya berasal dari Penyedia Jasa Pengelolaan Uang Rupiah (PJPU), masyarakat, dan Mesin Sortasi Uang Kas (MSUK) ksetoran Bank di Kas Bank Indonesia.



Grafik 4.2. Perkembangan temuan UPAL di Kalimantan Barat



Grafik 4.3. Perbandingan Kontributor temuan UPAL di Kalimantan Barat pada TW II 2025 & 2026

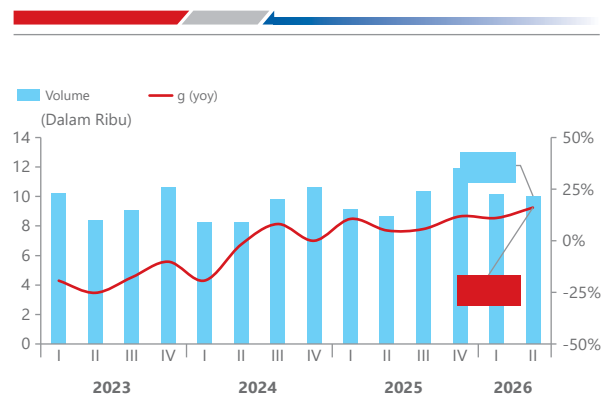
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat senantiasa memperkuat sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi vertikal untuk memitigasi peredaran uang Rupiah palsu. Pada Januari 2026, KPw BI Kalbar menginisiasi Rapat Koordinasi Teknis Unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) Kalimantan Barat yang dihadiri oleh perwakilan BINDA, POLDA, Kejaksaan Tinggi, Bea Cukai, dan Bank Indonesia. Kegiatan ini bertujuan sebagai forum penyegaran fungsi sekaligus langkah awal penyusunan strategi pembentukan Forum Botasupal Kalimantan Barat berdasarkan amanat Perpres No. 123 Tahun 2012. Seluruh unsur yang hadir berkomitmen penuh mendukung percepatan formalisasi forum ini, yang ditargetkan berlanjut hingga pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Botasupal Kalimantan Barat. Dalam jangka menengah, setelah langkah-langkah teknis disepakati, forum ini membidik pelaksanaan pemusnahan Rupiah palsu secara terintegrasi. Penguatan kelembagaan ini diharapkan dapat membangun sinergi pengawasan yang solid, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang rentan terhadap kejahatan pemalsuan uang.

Selain itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat secara rutin melakukan peningkatan pemahaman masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah ke berbagai lapisan masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih cermat dalam mengenali ciri – ciri keaslian uang Rupiah. Sepanjang Triwulan I dan II 2026, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat secara masif melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi Cinta Bangsa Paham Rupiah di berbagai kesempatan seperti *flagship events* SERAMBI, Saprahan Khatulistiwa, Ekspedisi Rupiah Berdaulat maupun melalui media sosial seperti Instagram.

4.2. SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

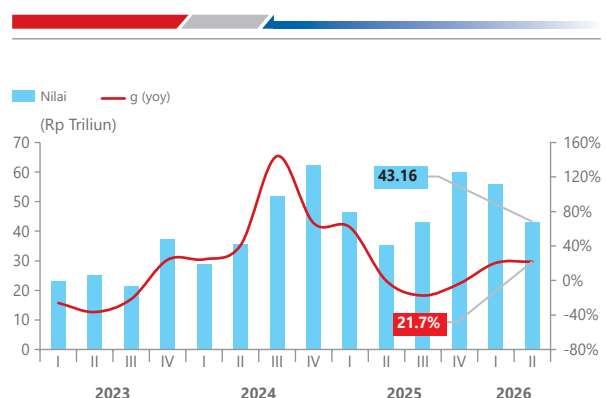
4.2.1. Perkembangan Transaksi BI-Real Time Gross Settlement

Pada Triwulan II 2026, volume transaksi melalui Sistem Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) di Kalimantan Barat tercatat sebesar 10,3 ribu transaksi atau tumbuh sebesar 16,0% (yoy) dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 4,96% (yoy) seperti yang ditunjukkan pada Grafik 4.4. Berikutnya, nominal transaksi BI-RTGS tercatat sebesar Rp43,16 triliun, tumbuh moderat sebesar 21,7% (yoy) dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang tercatat kontraksi sebesar 0,51% (yoy).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.4. Perkembangan Volume Transaksi BI-RTGS di Kalimantan Barat

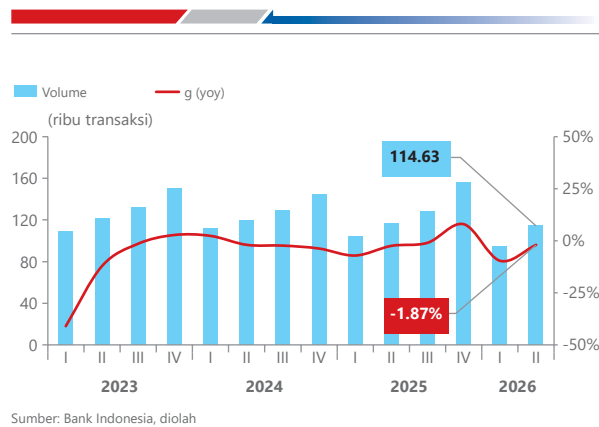


Sumber: Bank Indonesia, diolah

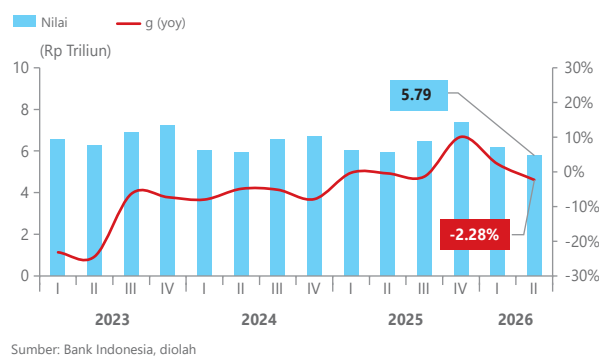
Grafik 4.5. Perkembangan Nominal Transaksi BI-RTGS di Kalimantan Barat

4.2.2. Perkembangan Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

Pada Triwulan II 2026, seperti yang ditunjukkan pada Grafik 4.6, volume transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di Kalimantan Barat tercatat sebesar 94,71 ribu transaksi atau terkontraksi sebesar 1,87% (yoy) dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang tercatat terkontraksi lebih rendah sebesar 2,34% (yoy). Kemudian pada Grafik 4.7, nominal transaksi SKNBI tercatat mencapai Rp5,79 triliun atau terkontraksi sebesar 2,28% (yoy) dibandingkan dengan triwulan IV 2024 yang tercatat terkontraksi sebesar 0,42% (yoy).



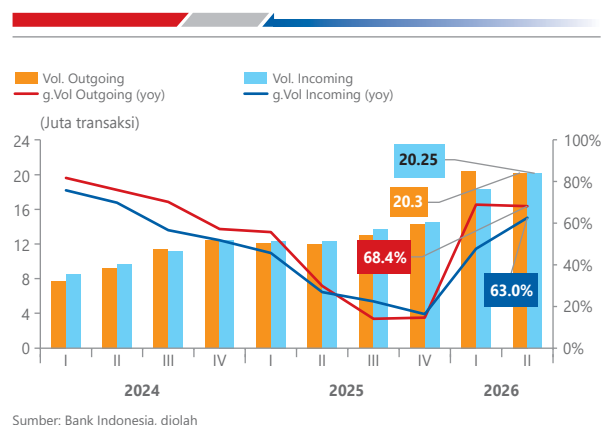
Grafik 4.6. Perkembangan Volume Transaksi SKNBI di Kalimantan Barat



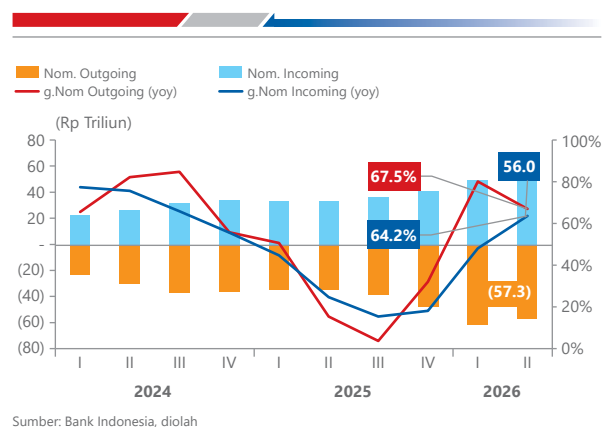
Grafik 4.7. Perkembangan Nominal Transaksi SKNBI di Kalimantan Barat

4.2.3. Perkembangan Transaksi BI-FAST

Untuk sistem pembayaran ritel secara real-time settlement, nilai transaksi *incoming* melalui BI-FAST ke Kalimantan Barat pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp56,0 Triliun dengan volume 20,25 juta transaksi. Pada periode yang sama, nilai transaksi *outgoing* tercatat sebesar Rp57,3 Triliun dengan volume 20,30 juta transaksi. Baik volume dan nominal transaksi mengalami pertumbuhan pesat dibandingkan beberapa triwulan terakhir sebagaimana yang ditunjukkan pada Grafik 4.8. dan Grafik 4.9. Nilai Perkembangan transaksi BI-RTGS dan SKNBI ini turut dipengaruhi oleh adanya *shifting behaviour* masyarakat dalam menggunakan BI-FAST yang menawarkan transaksi real time dengan biaya transaksi yang lebih murah untuk transfer dana hingga Rp250 juta per transaksi.



Grafik 4.8. Perkembangan Volume Transaksi BI-FAST di Kalimantan Barat

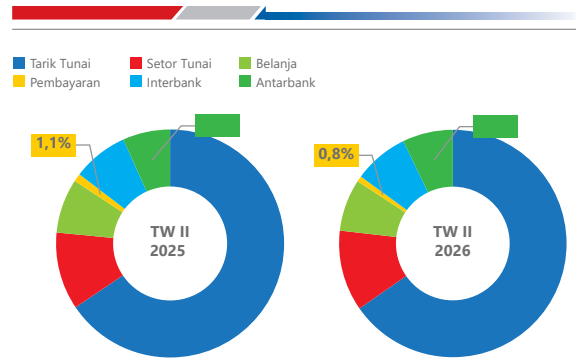


Grafik 4.9. Perkembangan Nominal Transaksi BI-FAST di Kalimantan Barat

4.2.4. Perkembangan Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

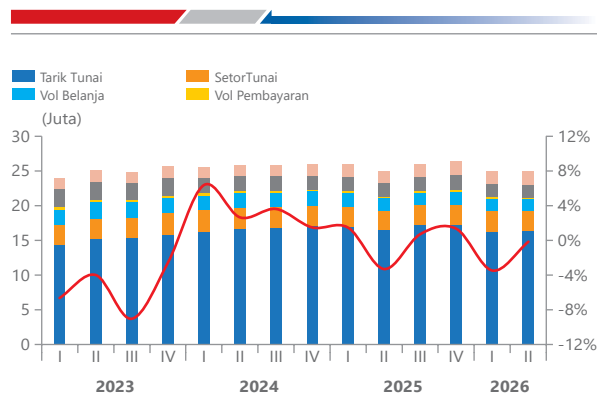
Penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) seperti kartu ATM/debit mencatatkan tren pertumbuhan di Kalimantan Barat. Seperti yang ditunjukkan pada Grafik 5.10, volume transaksi kartu debit tercatat 24,9 juta transaksi atau terkontraksi sebesar 0,16% (yoy) dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang tercatat terkontraksi sebesar 3,31% (yoy). Berikutnya pada Grafik 4.11, nominal transaksi kartu debit tercatat mencapai Rp33,7 triliun atau tumbuh sebesar 7,93% (yoy) dibandingkan dengan Triwulan II 2025 yang tumbuh sebesar 3,59% (yoy). Dari segi jenis transaksi, penggunaan kartu debit didominasi oleh aktivitas tarik dan setor tunai dengan pangsa sebesar 62,27%. Adapun aktivitas transfer interbank, antarbank, pembayaran dan belanja memiliki proporsi

relatif tidak besar seperti ditunjukkan pada Grafik 4.12. Sampai akhir Triwulan II 2026, jumlah kartu ATM/Debit tercatat sebanyak 15,6 juta kartu dan jumlah mesin ATM sebanyak 4.475.



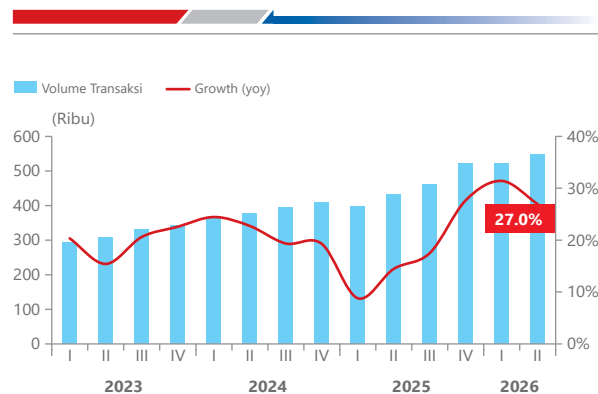
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.12. Perbandingan Pangsa Penggunaan Kartu Debit di Kalimantan Barat pada TW II 2025 & 2026



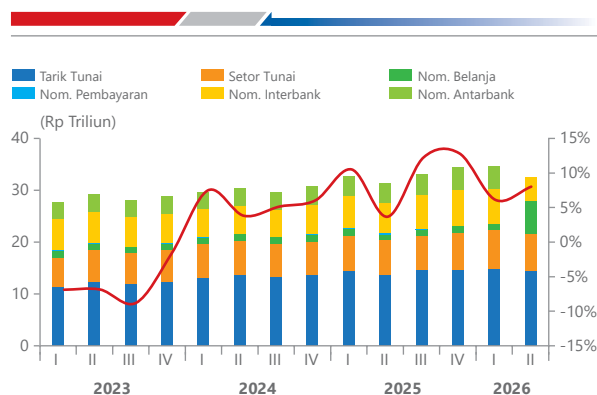
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.10. Perkembangan volume transaksi Kartu Debit di Kalimantan Barat



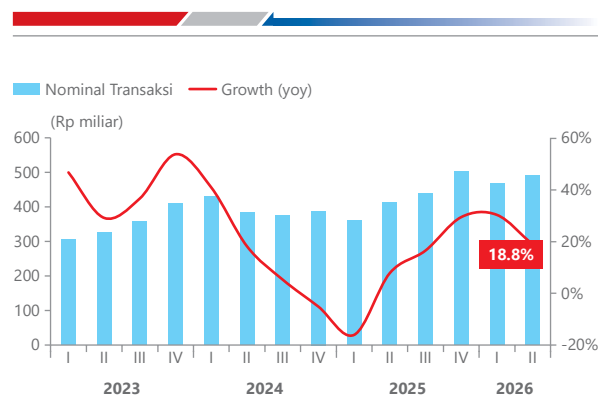
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.13. Perkembangan volume transaksi Kartu Kredit di Kalimantan Barat



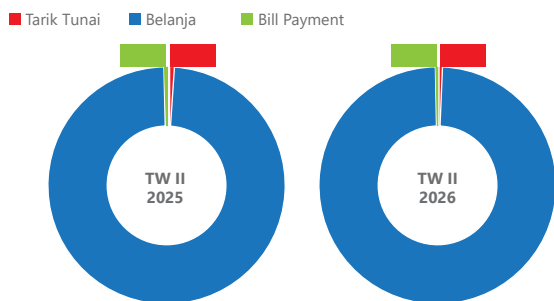
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.11. Perkembangan nominal transaksi Kartu Debit di Kalimantan Barat



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.14. Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit di Kalimantan Barat



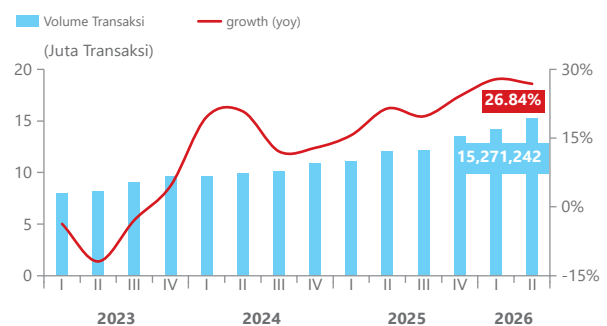
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.15. Perbandingan Pangsa Penggunaan Kartu Kredit di Kalimantan Barat pada TW II 2025 & 2026

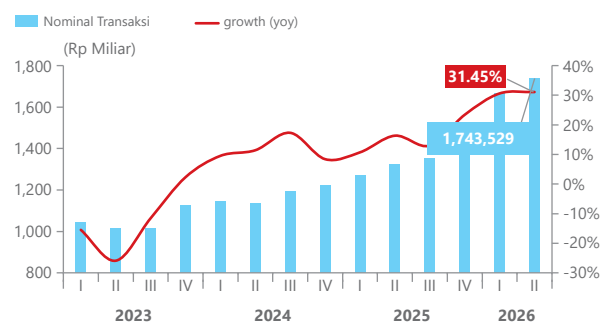
Nilai transaksi kartu kredit pada triwulan II 2026 mengalami peningkatan dari sisi nominal dan sisi volume transaksi. Seperti yang ditunjukkan pada Grafik 4.13, volume transaksi kartu kredit tercatat 548,73 ribu transaksi atau tumbuh meningkat sebesar 27,0% (yoy), dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 14,5% (yoy). Berikutnya pada Grafik 4.14, nominal transaksi kartu kredit tercatat mencapai Rp490,98 miliar atau tumbuh lebih tinggi sebesar 18,8% (yoy) dibandingkan dengan Triwulan II 2025 tercatat sebesar 7,8% (yoy). Berdasarkan jenis transaksi, penggunaan kartu kredit didominasi dari aktivitas belanja dengan pangsa sebesar 99,2%. Aktivitas tarik tunai dan bill payment memiliki proporsi relatif kecil seperti ditunjukkan pada Grafik 4.18. Adapun jumlah kartu kredit yang beredar pada triwulan laporan tercatat sebanyak 150.065 kartu, turun dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 154.136

4.2.5. Perkembangan Transaksi Uang Elektronik

Perkembangan pesat ekonomi keuangan digital juga diiringi berbagai alternatif alat pembayaran, uang elektronik (UE), baik *chip based* maupun *server based*. Seperti yang ditunjukkan pada Grafik 4.16, volume transaksi UE tercatat mencapai 15,2 juta transaksi atau tumbuh sebesar 26,8% (yoy), lebih



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.16. Perkembangan Volume Transaksi UE di Kalimantan Barat

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.17. Perkembangan Nominal Transaksi UE di Kalimantan Barat

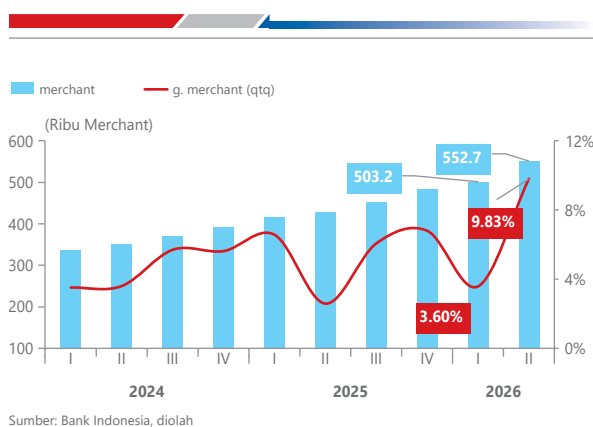
tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 21,48% (yoy). Dilihat dari Grafik 5.17, nominal transaksi UE pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp1,7 triliun atau tumbuh drastis sebesar 31,45% (yoy) dibandingkan dengan Triwulan II 2025 yang tumbuh sebesar 16,62% (yoy). Kemudian dari segi jenis transaksi, penggunaan UE didominasi oleh aktivitas belanja yang berkontribusi 88,8% dari keseluruhan volume transaksi. Adapun aktivitas transfer dan tarik tunai memiliki proporsi relatif kecil seperti ditunjukkan pada Grafik 4.18. Sampai akhir Triwulan II 2026, jumlah UE, baik *chip based* maupun *server based* pada triwulan laporan tercatat sebanyak 4,005 juta.

4.3. PENGEMBANGAN LAYANAN KEUANGAN NONTUNAI

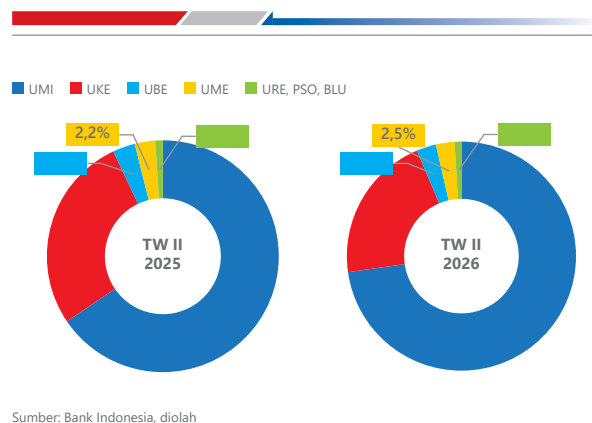
4.3.1. Perkembangan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*

Implementasi elektronifikasi transaksi keuangan menggunakan QRIS di Kalimantan Barat terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hingga Triwulan II 2026, jumlah *merchant* QRIS di Kalimantan Barat telah mencapai 552,7 ribu *merchants*, mencatatkan pertumbuhan sebesar 9,83% dibandingkan triwulan sebelumnya dan 28,9% dibandingkan dengan Triwulan I 2025 seperti ditunjukkan pada Grafik 4.19. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya akseptasi QRIS pada dunia usaha.

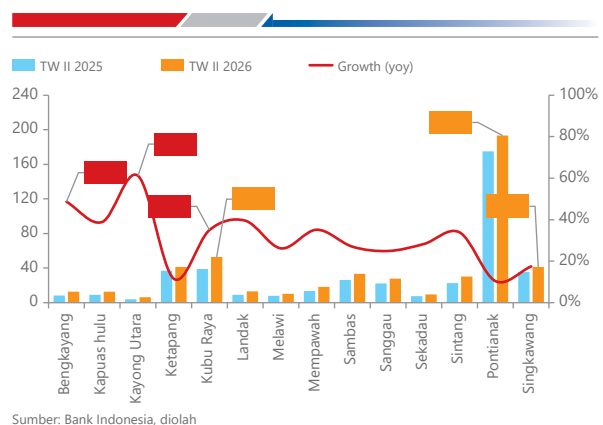
Data Triwulan II 2026 mencatat bahwa sebaran wilayah *merchant* QRIS di Kalimantan Barat masih didominasi Kota Pontianak yang mencapai 206,21 ribu *merchants*. Wilayah lainnya dengan kontribusi signifikan adalah Kabupaten Kubu Raya (59,1 ribu *merchants*) dan Kota Singkawang (44,5 ribu *merchants*). Apabila dilihat dari sisi pertumbuhan jumlah *merchants*, Kab. Kayong Utara mencatat kenaikan terbanyak sebesar 54,2% dibandingkan triwulan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tinggi juga tercatat di Kab. Bengkayang (51,99%) dan Kab. Sambas (35%) seperti ditunjukkan pada Grafik 4.22. Dari segi kategori, mayoritas *merchant* QRIS berasal dari Usaha Mikro (UMI) sebanyak 415,54 ribu *merchants*, diikuti oleh Usaha Kecil (UKE) yang mencapai 104,49 ribu *merchants*. Kedua kategori ini berkontribusi terhadap 94,13%, dari



Grafik 4.19. Perkembangan Posisi *Merchant* QRIS di Kalimantan Barat



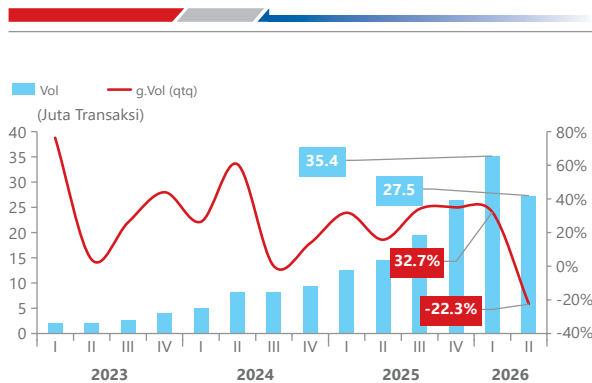
Grafik 4.20. Pangsa Kategori *Merchant* Pengguna QRIS di Kalimantan Barat



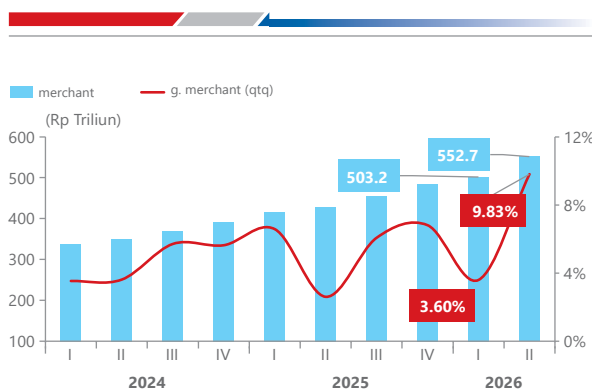
Grafik 4.21. Persebaran Jumlah *Merchant* QRIS secara Spasial di Kalimantan Barat

keseluruhan *merchant* QRIS seperti yang ditunjukkan pada Grafik 4.20.

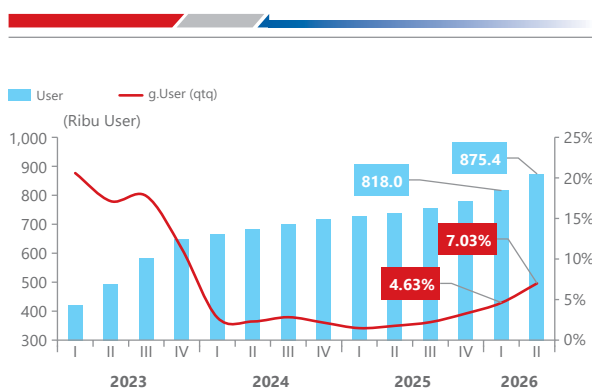
Peningkatan penggunaan QRIS juga terlihat dari jumlah pengguna yang terus bertumbuh. Hingga Triwulan II 2026, jumlah pengguna QRIS di Kalimantan Barat mencapai 875,4 ribu *users*, mengalami pertumbuhan 7,03% dibandingkan triwulan sebelumnya dan 18,26% dibandingkan dengan Triwulan II 2025 seperti ditunjukkan pada Grafik 4.24. Pertumbuhan ini didorong oleh upaya perluasan QRIS melalui sosialisasi dan akuisisi secara masif kepada masyarakat di Kalimantan Barat, yang merupakan hasil kolaborasi dengan pemerintah daerah, perbankan, lembaga sosial, lembaga pendidikan, pasar tradisional dan modern, komunitas informal, serta berbagai pihak lainnya. Secara keseluruhan, akseptasi QRIS di



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.22. Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Kalimantan Barat

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.23. Perkembangan Nominal Transaksi QRIS di Kalimantan Barat

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.24. Perkembangan Posisi Pengguna QRIS di Kalimantan Barat

Kalimantan Barat semakin berkembang baik dari sisi jumlah *merchant*, volume dan nilai transaksi, maupun jumlah pengguna, yang mencerminkan keberhasilan implementasi sistem pembayaran digital ini di daerah tersebut.

4.3.2. Perkembangan Program Elektronifikasi Transaksi Keuangan

Akselerasi digitalisasi pembayaran di Kalimantan Barat juga terus didorong melalui perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah daerah di Kalimantan Barat dan seluruh anggota Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), melakukan berbagai inisiatif untuk mempercepat ETPD dan digitalisasi pembayaran, termasuk memperluas penggunaan instrumen dan kanal pembayaran QRIS terutama QRIS dinamis, memanfaatkan *platform e-commerce* untuk pembayaran pajak dan retribusi, serta mengoptimalkan peran Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui perluasan kanal-kanal pembayaran digital. Saat ini, sudah diimplementasikan QRIS dinamis untuk pembayaran pajak daerah di enam Pemerintah Daerah yaitu Kota Pontianak (E-Ponti), Kota Singkawang (SIGAP), Kab. Sambas (E-Pakatan), Kab. Landak (SAPALA), Kab. Mempawah (Si Perjaka), Provinsi Kalbar (Samsat) melalui kerjasama Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait dengan Bank RKUD.

Lebih lanjut, elektronifikasi transaksi keuangan pada penyaluran bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (PS) terus dilakukan. Penyaluran PKH tahap II 2026 disalurkan dengan secara non tunai oleh Himbara-BSI. Bank Penyalur di Kalimantan Barat yaitu PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Mandiri dan PT Bank Rakyat Indonesia. Penyerapan bantuan sosial PKH sebesar 92,27% dengan jumlah KPM sebanyak 143.894. Lebih lanjut, tingkat penyerapan Program Sembako (PS) di Kalimantan Barat pada posisi bulan Juni 2026, tercatat sebesar 92,13% dengan KPM sebanyak 231.680.

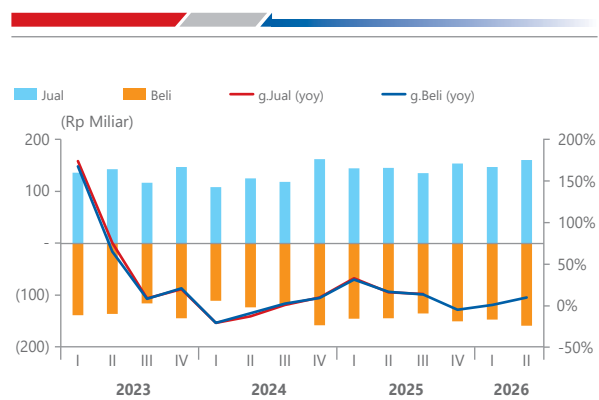
Adapun pada Triwulan II 2026 transaksi *e-commerce* mengalami peningkatan sebesar 36,83% dibandingkan dengan nominal transaksi pada Triwulan II 2025. Jumlah nominal transaksi *e-commerce* pada Juni 2026 mencapai Rp818.144.458.717,- dengan kontribusi terbesar berasal dari Kota Pontianak sebesar 22% dan total transaksi di Kalimantan Barat. Lebih lanjut, metode transaksi yang dimininati dalam transaksi *e-commerce* yaitu transaksi non tunai mencakup kartu kredit/debit online, kredit tanpa kartu, transfer

bank dan uang elektronik yang mencapai 55,17% sedangkan metode pembayaran COD/tunai dengan kontribusi sebesar 44,70%. Kondisi ini mengindikasikan adanya *shifting behaviour* masyarakat Kalimantan Barat dalam bertransaksi, hal tersebut didukung pula dengan semakin meningkatnya akseptasi pembayaran digital QRIS di Kalimantan Barat.

4.4. PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK (KUPVA BB) DAN PENYEDIA JASA PEMBAYARAN LAYANAN REMITANSI (PJP LR)

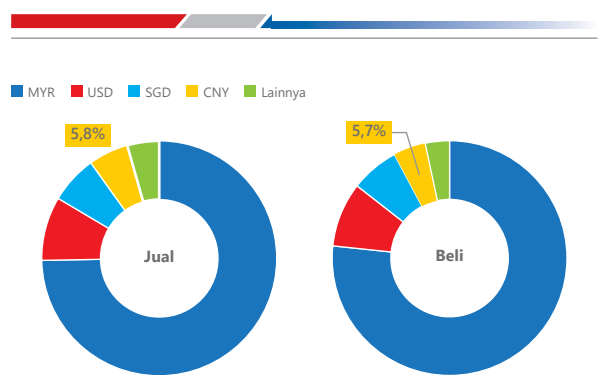
Transaksi pembelian dan penjualan uang kertas asing (UKA) oleh KUPVA Bukan Bank (KUPVA BB) di Kalimantan Barat secara umum mengalami peningkatan baik secara tahunan maupun triwulanan seperti ditunjukkan Grafik 4.25. Pada triwulan II 2026, total pembelian UKA oleh KUPVA BB tercatat sebesar Rp161,7 miliar atau meningkat sebesar 10,77% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan II 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 16,24% (yoy). Jumlah pembelian UKA meningkat sebesar 9,41% (qtq) dibandingkan triwulan I 2026 yang berkontraksi sebesar 4,47%. Kemudian, total penjualan UKA oleh KUPVA BB tercatat sebesar Rp158,54 miliar atau tumbuh sebesar 10,28% (yoy) dibandingkan Triwulan I 2026 yang tercatat tumbuh sebesar 1,09%. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, jumlah penjualan tumbuh sebesar 9,41% (qtq) dibandingkan triwulan I 2026 yang berkontraksi sebesar 2,70% (qtq).

Berdasarkan jenis mata uang, Ringgit Malaysia (MYR) masih mendominasi transaksi valas di KUPVA BB di Kalimantan Barat. Pada triwulan II 2026, transaksi penjualan UKA MYR memiliki pangsa terbesar, yakni sebesar 72,1%, diikuti oleh Dolar US (USD) yang mencapai sebesar 6,36% dan Chinese Yuan (CNY) sebesar 5,91%. Letak geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadi penyebab dominasi transaksi valas di Kalimantan Barat oleh Ringgit Malaysia (MYR). Dari sisi pembelian,



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.25. Transaksi Valuta Asing di Prov. Kalimantan Barat



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.26. Transaksi Valuta Asing di Prov. Kalimantan Barat

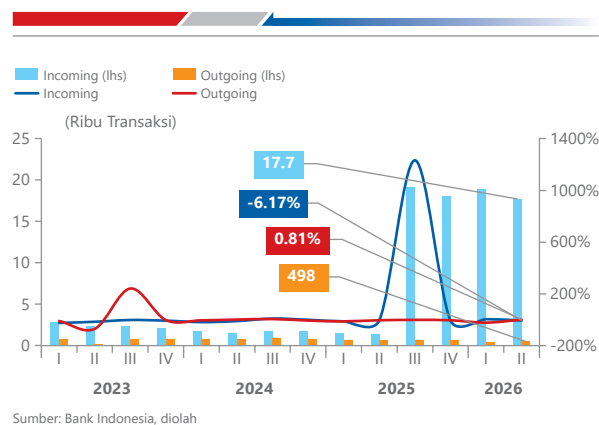
transaksi UKA MYR juga memiliki pangsa terbesar, yaitu 72,2%, diikuti oleh USD sebesar 4,49% dan CNY sebesar 6,16%.

Volume dan nilai pengiriman uang dari dan ke luar negeri melalui Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) di Kalimantan Barat pada Triwulan IV 2025 secara umum mengalami penurunan. Volume transaksi incoming tercatat mencapai 17,7 ribu transaksi atau berkontraksi sebesar 6,17% (qtq) sedangkan volume transaksi outgoing mencapai 498 transaksi atau sedikit meningkat sebesar 0,81% (qtq) seperti ditunjukkan pada Grafik 4.27. Lebih lanjut, nominal transaksi *incoming* tercatat mencapai Rp164,96 juta atau menurun sebesar 7,00% (q-to-q), sedangkan nominal *outgoing* tercatat mencapai Rp8,42 juta atau berkontraksi sebesar 26,57% (q-to-q) seperti ditunjukkan pada Grafik 4.28.

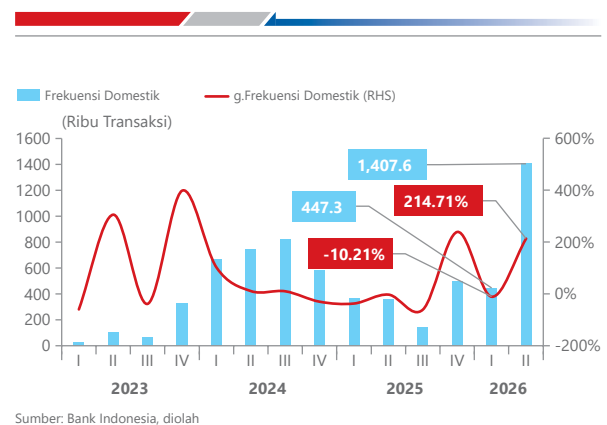
Kondisi tersebut menyebabkan terjadi *net-inflow* sebesar Rp156,54 miliar juta, menurun dibandingkan Triwulan I 2026 yang tercatat *net-inflow* sebesar Rp165,90 miliar. Besarnya proporsi transaksi *incoming* pada Triwulan II 2026 ditopang kegiatan penerusan dana antara salah satu PJP dalam negeri yang merupakan anak usaha PJP yang berlokasi di Singapura.

Secara karakteristik, transaksi PJP LR di Kalimantan Barat didominasi oleh transaksi domestik. Hal ini tampak dari volume transaksi yang tercatat sebesar 1.047,59 ribu transaksi atau tumbuh sebesar 214,71%

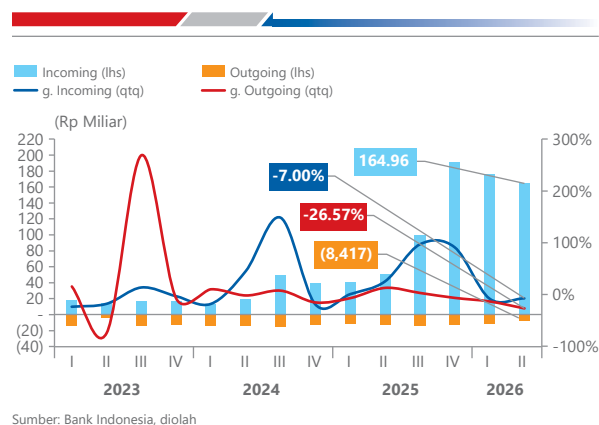
seperti pada Grafik 4.29. Secara nominal, transaksi domestik mencatatkan Rp2,46 miliar atau terkontraksi 28,82% (qtq) seperti ditunjukkan Grafik 4.30. Model bisnis transaksi di Kalimantan Barat didominasi oleh transaksi luar negeri *incoming*, setelah sebelumnya terjadi pergeseran preferensi ke transaksi domestik. Baik frekuensi dan nominal transaksi PJP LR ditopang transaksi domestik dan luar negeri *incoming*. Tren tersebut disebabkan proses akuisisi serta kegiatan pengembangan usaha PJP LR di wilayah Kalimantan Barat seperti ditunjukkan Grafik 4.31 dan Grafik 4.32.



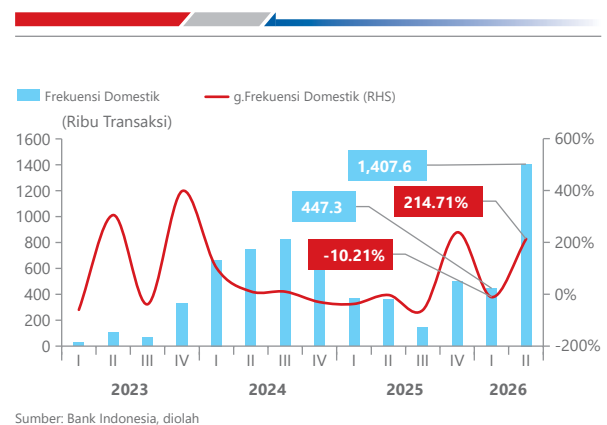
Grafik 4.27. Perkembangan Frekuensi Transaksi *Incoming* & *Outgoing* PJP LR di Kalimantan Barat



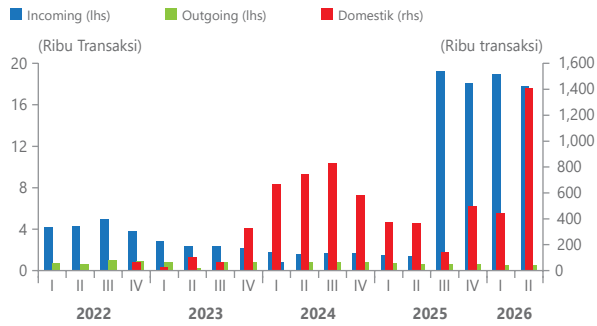
Grafik 4.29. Perkembangan Frekuensi Transaksi Domestik PJP LR di Kalimantan Barat



Grafik 4.28. Perkembangan Nominal Transaksi *Incoming* & *Outgoing* PJP LR di Kalimantan Barat

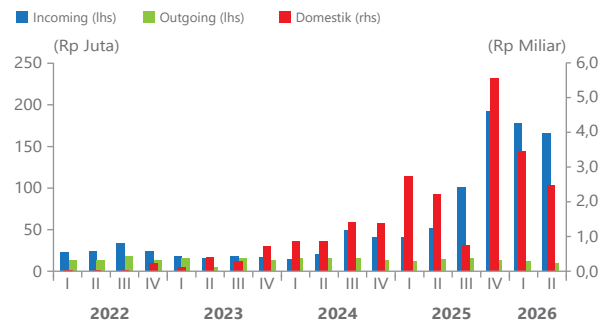


Grafik 4.30. Perkembangan Nominal Transaksi Domestik PJP LR di Kalimantan Barat



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.31. Perkembangan Frekuensi Transaksi Domestik PJP LR di Kalimantan Barat



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.32. Perkembangan Nominal Transaksi Domestik PJP LR di Kalimantan Barat

BOKS 3 Lentera Batas Negeri Entikong 2026

Wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Malaysia merupakan kawasan strategis yang berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara, baik dari aspek wilayah, ekonomi, maupun sosial budaya. Tingginya intensitas interaksi lintas negara di wilayah perbatasan menjadikan kawasan ini memiliki dinamika ekonomi yang unik, termasuk dalam hal penggunaan alat pembayaran. Dalam konteks tersebut, masih terdapat tantangan terkait penguatan kedaulatan ekonomi, khususnya dalam mendorong penggunaan Rupiah sebagai simbol kedaulatan NKRI.

Sejalan dengan tugas dan mandatnya, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah serta memastikan kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan jangkauan distribusi uang Rupiah, memperkuat literasi masyarakat melalui program Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah, serta mendorong digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS, termasuk QRIS Cross Border. Selain itu, Bank Indonesia juga berperan dalam memberikan edukasi perlindungan konsumen (PeKA) serta mendukung pengendalian inflasi melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS).

Setelah penyelenggaraan Lentera Batas Negeri di PLBN Aruk pada tahun 2025, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Sanggau, Badan Nasional Pengelola Perbatasan PLBN Entikong, Bapenda Provinsi Kalimantan Barat, Bapenda Kabupaten Sanggau, PT Jasa Raharja, PT Jasaraharja Putera, BPD Kalbar, BNI, Imigrasi Entikong, Rumah BUMN, serta UPT Puskesmas Entikong menyelenggarakan Lentera Batas Negeri Entikong pada tanggal 23 – 25 Juni 2026 yang terdiri dari 7 (tujuh) rangkaian acara sebagai berikut:

a. Layanan Penukaran Uang

Layanan penukaran uang dilakukan di Pasar Sanggau (23 Juni 2026), Pasar Balai Karangan (24 Juni 2026) dan PLBN Entikong (25 Juni 2026) bekerja sama dengan BPD Balai Karangan dan BNI Balai Karangan. Dalam pelaksanaannya, total modal kerja yang dibawa sebesar Rp1,5 miliar dan terserap sebesar 100%. Dari total uang yang diterima dari masyarakat, Tim Kas Keliling berhasil menyerap Uang Tidak Layak Edar (UTLE) sebesar Rp1,335 miliar atau 89%, sedangkan Uang Layak Edar (ULE) tercatat sebesar Rp165 juta atau 11%.

b. Edukasi CBP, QRIS, dan Belanja Bijak

Pelaksanaan Edukasi CBP Rupiah, QRIS *Cross Border*, Literasi Keuangan dan Pelindungan Konsumen (PeKa) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Rupiah. Sosialisasi penggunaan QRIS, termasuk potensi transaksi lintas negara, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan melalui program PeKa. Kegiatan edukasi tersebut menjangkau berbagai segmen peserta, antara lain 27 UMKM pada kegiatan *Business Matching*; 100 peserta di Kantor Kecamatan Entikong; serta sekitar 1.000 masyarakat pada puncak kegiatan.

c. Pasar Batas Nusantara

Pasar Batas Nusantara UMKM dilaksanakan melalui kerja sama dengan Rumah BUMN Sanggau sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Pasar Batas Nusantara merupakan bagian dari upaya penguatan UMKM di wilayah perbatasan melalui expo produk unggulan. Kegiatan ini melibatkan 23 UMKM binaan Rumah BUMN Sanggau yang bergerak di berbagai sektor, antara lain makanan, minuman, fashion, dan kerajinan. Konsep kegiatan mengusung *Collective Space*, yaitu seluruh produk UMKM dijual dalam satu area terpadu agar masyarakat dan

pengunjung lebih mudah melihat, mengenal, serta memilih produk yang tersedia. Pada acara Lentera Batas Negeri 2026 di PLBN Entikong, UMKM Pasar Batas Nusantara berhasil terjual sebanyak 131 produk dengan omzet total mencapai Rp 4.540.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

d. **Gerakan Pangan Murah (GPM)**

Kegiatan GPM dilaksanakan dengan sasaran masyarakat di sekitar PLBN Entikong, khususnya di Desa Entikong, Neken, Semangat, Pala Pasang, dan Suluh Tembawang. Kegiatan ini merupakan hasil sinergi antara KPwBI Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, serta mitra pelaksana lainnya. Bentuk kegiatan meliputi pelaksanaan GPM dan Edukasi Belanja Bijak sebagai upaya mendukung stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi melalui perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Total paket yang disediakan dalam kegiatan ini sebanyak 1.000 paket. Adapun kegiatan Edukasi Belanja Bijak menargetkan dihadiri oleh 1.000 orang peserta. Sebagai bentuk dukungan kegiatan, diberikan souvenir kepada peserta berupa minyak goreng 1 liter dan telur 1 paket yang berisi 10 butir.

e. **Sinergi Layanan Kas (SILAKAS)**

Pada kesempatan ini, kami juga mengajak beberapa *Stakeholder* terkait (Imigrasi, Bapenda, Jasa Raharja dan Puskesmas Entikong) untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Bentuk sinergi tersebut meliputi layanan informasi Imigrasi, Layanan SAMSAT Go Kecamatan (SAMSAT GOKATAN), Layanan Sosialisasi Keselamatan Transportasi dan layanan cek kesehatan gratis secara terpadu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas layanan publik khususnya di wilayah perbatasan.

f. **Rupiah Corner Perbatasan**

Rupiah Corner merupakan pojok edukasi yang menyediakan informasi terkait rupiah, sistem

pembayaran, edukasi (CBP, QRIS-PeKa), serta peran Bank Indonesia yang bertujuan sebagai pusat literasi keuangan yang mudah diakses masyarakat, sekaligus memperkuat pemahaman dan kecintaan terhadap rupiah dan produk Bank Indonesia lainnya. Pada pojok tersebut terdapat user experience dalam penggunaan alat untuk mendeteksi keaslian uang rupiah meliputi lampu UV dan kaca pembesar yang terhubung dengan layar LED. Selanjutnya terdapat beberapa *fun games* untuk menambah keseruan pada Rupiah Corner Perbatasan.

g. **Business Matching UMKM**

Business Matching UMKM di PLBN Entikong berhasil meningkatkan pemahaman dan kesiapan UMKM dalam mengakses pasar ekspor, khususnya Malaysia. Dari 27 UMKM peserta, teridentifikasi 11 UMKM dengan produk yang sesuai kebutuhan pasar dan diminati buyer. Sampel produk tersebut akan ditindaklanjuti kepada buyer potensial di Kuala Lumpur, dan apabila terdapat ketertarikan, akan difasilitasi Business Matching lanjutan secara daring melalui Atase Perdagangan RI di Malaysia bersama Disperindag Kalbar. Ke depan, sinergi antarinstansi akan terus diperkuat untuk meningkatkan jumlah UMKM siap ekspor dan memperluas akses pasar internasional bagi produk unggulan Kalimantan Barat.

Melalui seluruh rangkaian kegiatan tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmen untuk memperkuat kedaulatan Rupiah di wilayah perbatasan melalui penyediaan layanan kas dan penukaran uang, meningkatkan literasi masyarakat mengenai CBP Rupiah dan perlindungan konsumen, mendorong digitalisasi ekonomi melalui adopsi QRIS *Cross Border*, serta memperkuat pemberdayaan UMKM dan akses pasar internasional. Sinergi lintas instansi tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat kehadiran Rupiah sekaligus mendukung pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.



Gambar 1. PLBN Entikong



Gambar 2. Opening Ceremony PLBN Entikong



Gambar 3. Layanan Kas Keliling



Gambar 4. Pasar Batas Nusantara



Gambar 5. Edukasi CBP Rupiah



Gambar 6. Business Matching UMKM



Gambar 7. Gerakan Pangan Murah



Gambar 8. Rupiah Corner Perbatasan

Bab 5
**Ketenagakerjaan
Dan Kesejahteraan**

Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja

Triwulan II 2026

67,76%

Triwulan I 2026
69,65%

Triwulan II 2025
67,64%

Tingkat Pengangguran Terbuka

Triwulan II 2026

4,46%

Triwulan I 2026
4,57%

Triwulan II 2025
4,23%

Nilai Tukar Petani (rata-rata triwulan)

Triwulan II 2026

176,87

Triwulan I 2026
172,56

Triwulan II 2025
167,54

Tingkat Kemiskinan

Triwulan II 2026

5,78%

Triwulan I 2026
5,97%

Triwulan II 2025
6,16%

Gini Ratio

Triwulan II 2026

0,311

Triwulan I 2026
0,308

Triwulan II 2025
0,316



Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat relatif stabil. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026 tercatat sebesar 4,46%, menurun 0,11% dibandingkan Februari 2026. Rasio kemiskinan pada Maret 2026 tercatat 5,78%, menurun sebesar 0,19% dibandingkan September 2025. Sejalan dengan itu, jumlah penduduk miskin Kalimantan Barat pada Maret 2026 mengalami penurunan sebanyak 9.17 ribu orang atau turun 0,03% dibandingkan September 2025.

Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 176,87 mengalami peningkatan 2,5% (qtq) dibandingkan Triwulan I 2026. Peningkatan ini mengindikasikan adanya peningkatan terhadap daya beli petani. Pada periode tersebut, indeks harga yang diterima petani (It) tercatat sebesar 225,61, sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 127,56.



5.1. GAMBARAN UMUM

Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Barat menunjukkan dinamika yang mencerminkan perkembangan perekonomian daerah. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Mei 2026, jumlah angkatan kerja sebanyak 2,98 juta orang menurun sebanyak 71,86 ribu orang dibanding Februari 2026. Di sisi lain, jumlah penduduk usia kerja (>15 tahun) pada Mei 2026 mencapai 4,39 juta jiwa, meningkat sebesar 0,36% atau 15,6 ribu orang dari Februari 2026. Situasi ini mencerminkan struktur penduduk yang masih produktif dan potensi peningkatan partisipasi angkatan kerja.

Berdasarkan komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama, penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang menyumbang 43,27% dari total tenaga kerja. Tingginya proporsi ini mengindikasikan bahwa struktur perekonomian Kalimantan Barat masih bergantung pada sektor primer. Hal ini juga terlihat dari daerah tempat tinggal, yakni TPT perkotaan sebesar 6,73% lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan yang tercatat 2,69%. TPT perkotaan mengalami kenaikan 0,87% sedangkan TPT perdesaan mengalami penurunan 0,94% bila dibandingkan dengan Februari 2026.

Lapangan pekerjaan yang mencatat peningkatan jumlah tenaga kerja terbesar dibandingkan Februari 2026 adalah Pertambangan sebanyak 15,28 ribu orang dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebanyak 14,39 ribu orang. Sementara itu, lapangan usaha yang mengalami penurunan terbesar adalah pertanian, kehutanan, dan penggalian sebesar 99,10 ribu orang dan industri sebanyak 22,08 ribu orang.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu sebanyak 99,10 ribu orang. Meskipun mengalami penurunan yang cukup besar, sektor ini masih menjadi sektor terbesar yang menyerap tenaga kerja di Kalimantan Barat. Sebaliknya, sektor pertambangan dan penggalian menyerap lebih banyak tenaga kerja daripada sektor lainnya pada Mei 2026 yakni naik sebesar 15,28 ribu orang. Maka dari itu, kondisi ini mengindikasikan efisiensi proses pertanian dengan

memanfaatkan teknologi, serta adanya persepsi bahwa sektor pertanian kurang menguntungkan dan memiliki prospek yang terbatas, sehingga banyak tenaga kerja, terutama generasi muda, beralih ke sektor lain yang dianggap lebih menjanjikan, seperti sektor jasa, pertambangan, dan konstruksi.

Pada Triwulan II 2026, Nilai Tukar Petani (NTP) di Kalimantan Barat tercatat sebesar 176,87 atau mengalami peningkatan sebesar 2,5% dibandingkan dengan NTP pada akhir Triwulan I 2026 sebesar 172,56. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan pada tingkat kesejahteraan petani.

Peningkatan NTP ini mengindikasikan bahwa kenaikan indeks harga yang diterima petani (Ib) yang mencerminkan biaya produksi dan konsumsi rumah tangga petani, lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang dibayar petani (It), yaitu harga hasil produksi pertanian yang mereka jual.

Pada Maret 2026, tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat tercatat sebesar 5,78%, menurun dibandingkan September 2025 yang sebesar 5,97%. Jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan sebanyak 9.17 ribu orang, sehingga menjadi 313,37 ribu jiwa. Penurunan rasio kemiskinan ini menandakan adanya perbaikan daya beli masyarakat serta meningkatnya akses terhadap kebutuhan dasar, yang merupakan dampak dari perbaikan kondisi ekonomi secara bertahap. Dengan semakin sedikitnya jumlah penduduk miskin, hal ini juga mencerminkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan dan pengendalian inflasi mulai memberikan hasil positif bagi masyarakat di Kalimantan Barat.

5.2. KETENAGAKERJAAN

Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Barat menunjukkan dinamika yang mencerminkan perkembangan perekonomian daerah. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Februari 2026, jumlah angkatan kerja sebanyak 3,04 juta orang meningkat sebanyak 131,64 ribu orang dibanding Februari 2025. Di sisi lain, jumlah penduduk usia kerja (>15 tahun) pada Februari 2026 mencapai 4,37 juta jiwa, meningkat sebesar 1,51% atau 64,66 ribu

orang dari Februari 2025. Situasi ini mencerminkan struktur penduduk yang masih produktif dan potensi peningkatan partisipasi angkatan kerja.

Secara umum, ketenagakerjaan di Kalimantan Barat menunjukkan kondisi yang cukup stabil. Jumlah penduduk yang bekerja termoderasi, dari 2,90 juta jiwa pada Februari 2026 menjadi 2,84 juta jiwa pada Mei 2026 (Tabel 6.1). Namun demikian, TPT pada Mei 2026 tercatat sebesar 4,46%, menurun 0,11 poin persentase dibandingkan Februari 2026 serta tetap berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 4,65% pada Mei 2026. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi pasar tenaga kerja secara umum masih relatif terjaga dan mencerminkan ketahanan pasar kerja daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi.

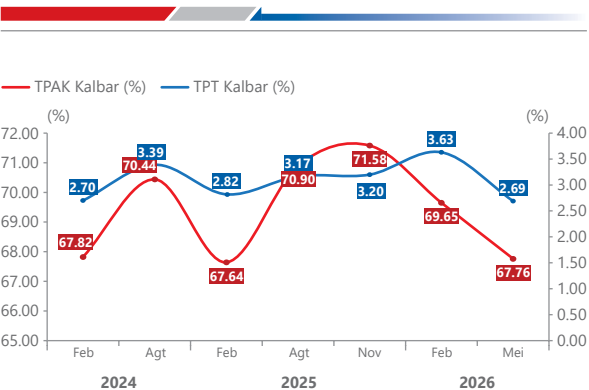
Sementara, penyerapan tenaga kerja 64,74% dari total tenaga kerja. Tingginya proporsi ini mengindikasikan bahwa struktur perekonomian Kalimantan Barat masih bergantung pada sektor primer. Hal ini juga terlihat dari daerah tempat tinggal, dimana TPT perkotaan 5,86% lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan yang tercatat 3,63%. TPT perkotaan mengalami penurunan 0,60% sedangkan TPT perdesaan mengalami peningkatan 0,81% bila dibandingkan dengan Februari 2025.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbesar, yakni sebesar 43,27%. Sektor selanjutnya adalah Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 12,61%; Industri sebesar 6,05%; serta konstruksi sebesar 5,99%.

Tabel 5.1. Indikator Ketenagakerjaan (Ribu jiwa)

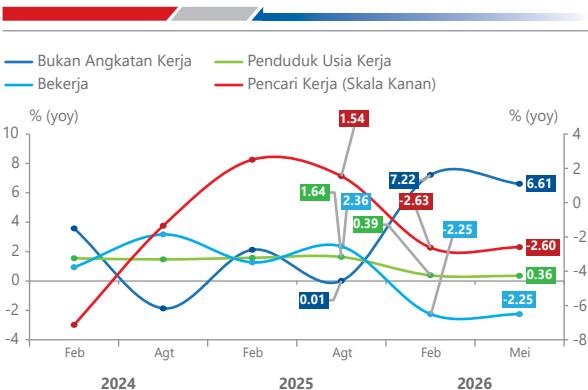
Keterangan (Ribu Jiwa)	2024		2025			2026		Perubahan Feb '26 terhadap Feb'26 (%)
	Feb	Agt	Feb	Agt	Nov	Feb	Mei	
Jumlah Penduduk Usia Kerja	4.242	4.272	4.309	4.342	4.357	4.374	4.390	0,36
Angkatan Kerja	2.877	3.009	2.915	3.079	3.119	3.046	2.975	-2,36
a. Bekerja	2.756	2.863	2.791	2.930	2.974	2.907	2.842	-2,25
b. Pencari Kerja	120	146	123	148	144	139	133	-4,58
Bukan Angkatan Kerja	1.365	1.263	1.394	1.263	1.238	1.327	1.415	6,61
TPAK Kalbar (%)	67,82	70,44	67,64	70,90	71,58	69,65	67,76	-1,89
TPT Kalbar (%)	4,20	4,86	4,23	4,82	4,63	4,57	4,46	-0,11
a. TPT Perkotaan (%)	6,96	7,24	6,46	7,26	6,76	5,86	6,73	0,87
b. TPT Perdesaan (%)	2,70	3,39	2,82	3,17	3,20	3,63	2,69	-0,94

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah



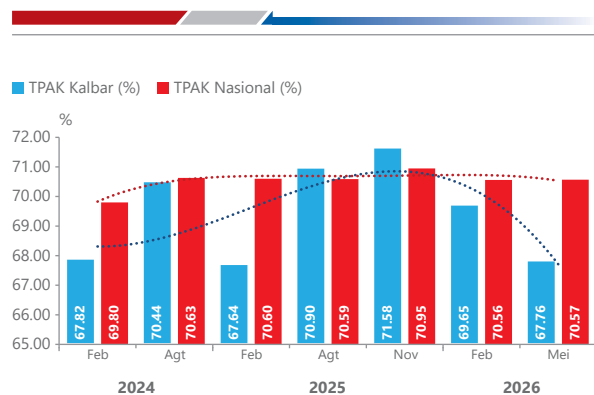
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 5.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Barat

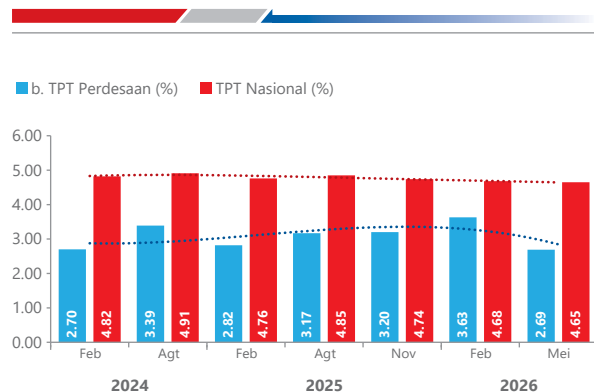


Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 5.2. Tingkat Pertumbuhan Indikator Ketenagakerjaan



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 5.3. Perkembangan Tingkat Penyerapan Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Barat dan Nasional

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 5.4. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Barat dan Nasional

Namun demikian, pertumbuhan tenaga kerja di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkurang sebesar 99,1 ribu orang dibandingkan Februari 2026. Lebih lanjut, sektor pertambangan dan penggalian mencatatkan penambahan tenaga kerja tertinggi, yaitu 15,28 ribu orang, diikuti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 14,39 ribu orang.

Berdasarkan status pekerjaan utama, sebagian besar angkatan kerja masih bekerja di lapangan usaha informal¹³. Hal ini terlihat dari jumlah pekerja informal pada Mei 2026 yang mencapai 1,65 juta jiwa, setara dengan 58,09% dari total penduduk bekerja dan sebanyak 1,19 juta pekerja atau 41,91% bekerja di lapangan usaha formal. Dibandingkan rilis Ketenagakerjaan oleh BPS pada Februari 2026, penduduk bekerja pada kegiatan formal maupun nonformal mengalami penurunan, masing-masing sebesar 1,24% dan 2,96%. Penurunan jumlah pekerja formal terutama didorong oleh penurunan -2,65% pekerja berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar dari saat pekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai juga turun sebesar -1,12%. Untuk pekerja informal, penurunan terbesar tercatat pada pekerja keluarga (-27,48%) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar (-3,55%). Di sisi lain, pekerja bebas meningkat signifikan sebesar 15,93% dan berusaha sendiri sebesar 6,83%. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha saat ini masih didominasi oleh pekerja informal.

Tabel 5.2. Persentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha (Ribu Jiwa)

Lapangan Pekerjaan Utama	2024		2025		2026		Feb '26 Terhadap Feb '25	
	Feb	Agt	Feb	Agt	Feb	Mei	Growth	Indikator
Pertanian	1.264	1.318	1.279	1.251	1.329	1.229	-7,49%	
Manufaktur*	338	409	426	483	514	511	-0,66%	
Jasa**	813	1.136	1.086	1.197	1.064	1.102	3,52%	

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

*) Lapangan usaha Manufaktur terdiri dari industri pengolahan, pertambangan, listrik, gas, air, dan konstruksi

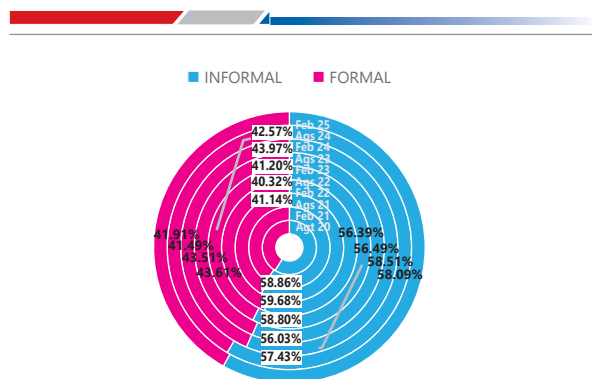
**) Lapangan usaha Jasa terdiri dari perdagangan, transportasi, lembaga keuangan, dan jasa lainnya

13. Status pekerjaan informal adalah pekerja yang memiliki status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non-pertanian serta pekerja keluarga tidak dibayar.

Tabel 5.3. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Status Utama Pekerja (Ribuan Jiwa)

STATUS PEKERJAAN	2024		2025			2026		Perubahan Mei '26 thd	
	Feb	Agt	Feb	Agt	Nov	Feb	Mei	Nov '25 (%)	Feb '25 (%)
INFORMAL	1.621	1.604	1.603	1.653	1.681	1.701	1.651	-1,78%	-2,96%
Berusaha sendiri	564	641	546	609	536	554	592	10,45%	6,83%
Berusaha dibantu buruh tdk tetap	456	378	415	408	444	451	435	-1,99%	-3,55%
Pekerja Bebas	179	197	251	235	295	274	318	7,80%	15,93%
Pekerja Keluarga	422	387	391	401	406	422	306	-24,65%	-27,48%
FORMAL	1.136	1.259	1.188	1.278	1.294	1.206	1.191	-7,97%	-1,24%
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	102	97	125	113	116	113	110	-4,79%	-2,65%
Buruh/ karyawan/pegawai	1.034,00	1.162,00	1.063,00	1.164,36	1.178,68	1.093,24	1.081,01	-8,29%	-1,12%

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 5.5. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Formal dan Informal

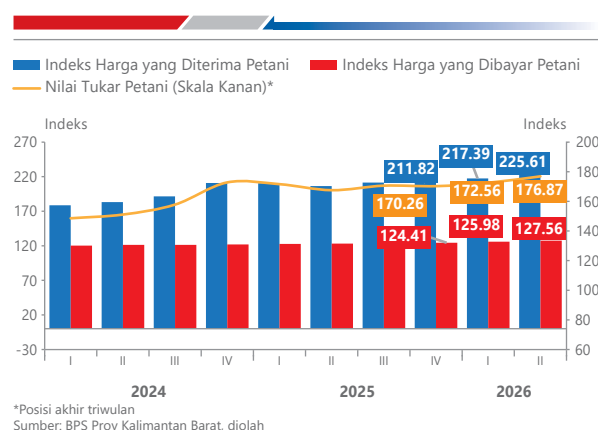
Sebagai sektor dengan pangsa terbesar yaitu 20,96% dari PDRB Kalbar pada triwulan II 2026, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan turut menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, yaitu 43,27% dari total penduduk bekerja per Mei 2026. Tren ini juga terjadi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dengan sumbangan di bawah sektor pertanian yakni 14,31% dari PDRB Kalbar, sektor ini menyerap 12,61% dari total penduduk bekerja. Meski sektor industri pengolahan hanya menyerap sebagian kecil tenaga kerja sekitar 6,05%, sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB sebesar 16,27%, mencerminkan produktivitas yang tinggi. Sektor pertambangan memiliki keseimbangan relatif antara tenaga kerja (5,62%) dan kontribusi PDRB (7,29%). Sektor Konstruksi juga menunjukkan tren positif, dengan penyerapan tenaga kerja 5,99% dan kontribusi terhadap PDRB sebesar 12,63%. Secara keseluruhan

71,46% dari total PDRB disumbang dari lima sektor utama yaitu Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Hal ini menandakan dominannya sektor tersebut dalam struktur ekonomi daerah, sejalan dengan proporsi tenaga kerja yang diserap.

5.3. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERDESAAN

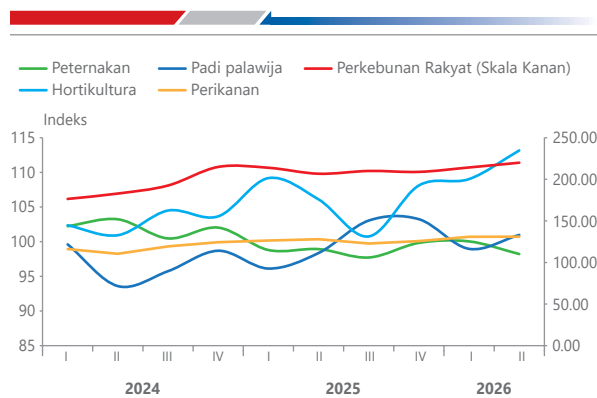
5.3.1. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh melalui perbandingan antara indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP juga mengukur daya tukar produk pertanian terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi. Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat bahwa semakin tinggi NTP semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan petani.



*Posisi akhir triwulan
Sumber: BPS Prov Kalimantan Barat, diolah

Grafik 5.6. Perkembangan NTP Kalimantan Barat



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 5.7. Perkembangan NTP Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Klasifikasi Subsektor

NTP Kalimantan Barat menunjukkan nilai stabil pada akhir triwulan II 2026 dan masih berada di atas batas sejahtera (100). NTP Kalimantan Barat meningkat sebesar 2,5% (qtq) dari 172,56 pada akhir triwulan I 2026 menjadi 176,87 pada akhir triwulan II 2026. Peningkatan NTP pada triwulan II 2026 disebabkan oleh meningkatnya nilai tukar pada subsektor

hortikultura sebesar 3.79%, perkebunan rakyat sebesar 2,66%, padi palawija sebesar 2,03% dan perikanan sebesar 0,02%. Peningkatan lebih tinggi tertahan oleh kinerja subsektor peternakan yang turun sebesar -1.81% (qtq).

5.3.2. Perbandingan dengan NTP Provinsi Lain di Kalimantan

Pada triwulan II 2026, perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di regional Kalimantan menunjukkan tren peningkatan. Kalimantan Barat mencatatkan peningkatan NTP sebesar 2,50% (qtq) menjadi 176,87 setelah sebelumnya mencatat posisi tertinggi di triwulan I 2026 sebesar 172,56 (Tabel 6.5). Kalimantan Selatan mencatat kenaikan NTP tertinggi sebesar 4,24% menjadi 131,90, saat Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur mencatat penurunan NTP masing-masing menjadi 116.44 (-0,58%; yoy), 136.74 (0,73%; yoy), dan 143,88 (-2,78%; yoy).

Tabel 5.4. Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Barat

No	Uraian	2025												2026						Pertumbuhan (qtq)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
1.	Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	207,06	206,02	210,57	210,60	207,34	206,40	207,32	208,48	211,42	214,99	211,74	211,82	209,60	214,51	217,39	221,32	226,79	225,61	3,78%
1.1.	Padi Palawija	120,07	119,14	119,00	119,29	120,06	122,17	128,13	129,39	128,76	130,56	130,19	129,68	127,09	126,43	126,12	126,71	128,62	130,11	3,16%
1.2.	Hortikultura	129,42	133,85	134,34	129,82	130,35	131,21	128,99	121,87	125,28	124,37	122,36	135,07	137,25	137,90	138,12	130,78	132,28	144,93	4,93%
1.3.	Perkebunan Rakyat	256,16	254,70	261,92	262,17	256,64	254,23	253,37	255,18	259,94	264,65	259,82	259,36	256,74	264,51	269,14	275,55	283,84	280,06	4,06%
1.4.	Peternakan	119,84	118,34	117,93	117,32	117,87	118,41	119,52	118,20	117,47	120,14	120,15	120,60	120,30	122,59	122,07	121,30	120,22	120,55	-1,25%
1.5.	Perikanan	123,36	123,38	123,08	123,23	123,74	123,64	124,00	124,36	123,45	125,03	124,69	124,50	125,21	125,96	126,63	127,34	127,91	128,26	1,29%
1.5.1.	Perikanan Tangkap	125,28	125,17	124,55	124,83	125,58	125,48	125,66	125,90	124,67	126,25	125,67	125,13	125,38	126,01	126,63	127,15	127,54	127,79	0,92%
1.5.2.	Perikanan Budidaya	114,85	115,45	116,59	116,16	115,60	115,48	116,62	117,55	118,05	119,67	120,32	121,74	124,48	125,75	126,59	128,17	129,55	130,36	2,98%
2.	Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	121,46	121,42	122,71	123,30	122,96	123,19	123,54	124,20	123,94	123,99	124,07	124,41	124,77	125,65	125,98	126,52	127,14	127,56	1,25%
2.1.	Padi Palawija	122,56	122,57	123,80	124,37	123,89	124,20	124,53	125,28	124,95	124,92	125,12	125,60	126,17	127,19	127,43	127,80	128,53	128,85	1,11%
2.2.	Hortikultura	121,90	121,80	123,06	123,66	123,31	123,67	123,91	124,57	124,35	124,34	124,49	124,94	125,51	126,50	126,69	127,04	127,62	128,07	1,09%
2.3.	Perkebunan Rakyat	121,16	121,09	122,45	123,05	122,77	122,98	123,35	124,00	123,74	123,84	123,84	124,12	124,39	125,24	125,61	126,26	126,85	127,31	1,35%
2.4.	Peternakan	118,54	118,58	119,36	119,80	119,57	119,69	119,78	120,40	120,21	120,25	120,47	120,80	121,15	121,68	122,02	122,16	122,50	122,73	0,58%
2.5.	Perikanan	121,77	121,72	122,88	123,41	123,07	123,19	123,44	123,98	123,78	123,73	124,05	124,39	124,77	125,35	125,75	126,18	126,97	127,35	1,27%
2.5.1.	Perikanan Tangkap	122,31	122,39	123,39	123,87	123,53	123,69	123,96	124,48	124,23	124,21	124,45	124,79	125,13	125,75	126,11	126,49	127,37	127,71	1,27%
2.5.2.	Perikanan Budidaya	119,37	118,76	120,65	121,37	121,06	120,95	121,10	121,77	121,80	121,64	122,28	122,62	123,17	123,56	124,13	124,80	125,18	125,75	1,31%

Tabel 5.4. Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Barat Lanjutan

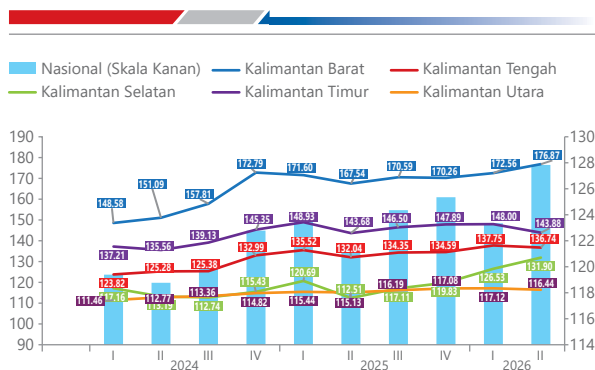
No	Uraian	2025												2026						Pertumbuhan (qtq)
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
3.	Nilai Tukar Petani	170,48	169,67	171,60	170,81	168,63	167,54	167,83	167,85	170,59	173,39	170,66	170,26	167,99	170,72	172,56	174,93	178,38	176,87	2,50%
3.1.	Padi Palawija (NTPP)	97,96	97,20	96,13	95,91	96,91	98,37	102,88	103,29	103,05	104,52	104,05	103,25	100,73	99,40	98,97	99,15	100,07	100,98	2,03%
3.2.	Hortikultura (NTPH)	106,17	109,89	109,17	104,99	105,71	106,10	104,09	97,84	100,75	100,02	98,29	108,11	109,36	109,01	109,03	102,94	103,65	113,16	3,79%
3.3.	Perkebunan Rakyat (NTPR)	211,43	210,33	213,91	213,05	209,04	206,73	205,41	205,79	210,07	213,69	209,79	208,95	206,40	211,20	214,27	218,25	223,37	219,98	2,66%
3.4.	Peternakan (NTPt)	101,10	99,80	98,80	97,93	98,58	98,93	99,79	98,18	97,72	99,92	99,73	99,83	99,30	100,75	100,04	99,30	98,14	98,22	-1,82%
3.5.	Perikanan (NTPN)	101,31	101,36	100,16	99,95	100,54	100,36	100,45	100,30	99,73	101,05	100,51	100,09	100,36	100,49	100,70	100,92	100,74	100,72	0,02%
3.5.1.	Perikanan Tangkap	102,43	102,27	100,94	100,77	101,66	101,44	101,37	101,14	100,35	101,64	100,98	100,27	100,20	100,21	100,42	100,52	100,13	100,06	-0,36%
3.5.2.	Perikanan Budidaya	96,21	97,21	96,64	95,71	95,49	95,48	96,30	96,53	96,92	98,39	98,39	99,28	101,06	101,77	101,98	102,70	103,49	103,66	1,65%

Sumber: BPS Prov Kalimantan Barat, diolah

Tabel 5.5. Perbandingan NTP dengan Provinsi Lain di Kalimantan dan Nasional

PROVINSI	2024				2025				2026		Pertumbuhan Tw I 2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	(qtq)	(yoy)
Kalimantan Barat	148,58	151,09	157,81	172,79	171,60	167,54	170,59	170,26	172,56	176,87	2,50%	5,57%
Kalimantan Tengah	123,82	125,28	125,38	132,99	135,52	132,04	134,35	134,59	137,75	136,74	-0,73%	3,56%
Kalimantan Selatan	117,16	113,19	112,74	115,43	120,69	112,51	117,11	119,83	126,53	131,90	4,24%	17,23%
Kalimantan Timur	137,21	135,56	139,13	145,35	148,93	143,68	146,50	147,89	148,00	143,88	-2,78%	0,14%
Kalimantan Utara	111,46	112,77	113,36	114,82	115,44	115,13	116,19	117,08	117,12	116,44	-0,58%	1,14%
Nasional (Skala Kanan)	119,39	118,77	120,3	122,78	123,72	121,72	124,36	125,35	123,35	127,84	3,64%	5,03%

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 5.8. Pergerakan NTP Antar Provinsi di Kalimantan

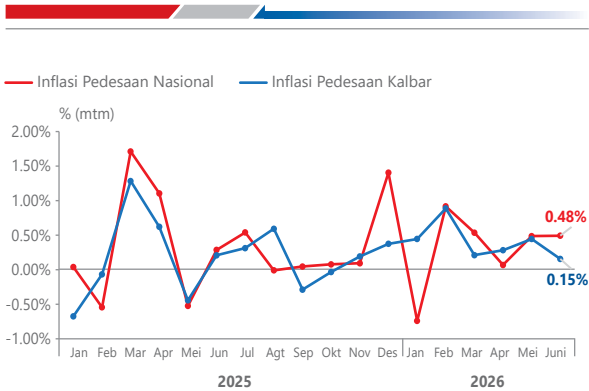
5.4. INFLASI PERDESAAN

Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) pada triwulan II 2026 menunjukkan peningkatan menjadi 128,72 naik dari 127,62 pada triwulan I 2026 (Tabel 6.6). Peningkatan ini mencerminkan perbaikan daya beli dan konsumsi masyarakat perdesaan. Di saat yang sama, inflasi perdesaan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 0,15% (mtm), lebih rendah dibandingkan inflasi perdesaan pada tingkat nasional yang tercatat 0,48% (mtm), mengindikasikan bahwa tekanan harga di wilayah perdesaan Kalbar relatif lebih terkendali dibandingkan nasional.

Tabel 5.6. Perkembangan Inflasi Pedesaan

Uraian	2025										2026						mtm	ytd	yoy
	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun			
Konsumsi Rumah Tangga	123,87	124,63	124,07	124,32	124,70	125,43	125,06	125,01	125,24	125,70	126,25	127,36	127,62	127,97	128,53	128,72	0,15%	3,35%	3,54%
Indeks Biaya Produksi Dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	119,45	119,54	119,88	120,10	120,35	120,80	120,86	121,27	120,86	120,80	120,60	120,71	121,17	122,34	123,32	124,45	0,92%	2,19%	3,62%

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah



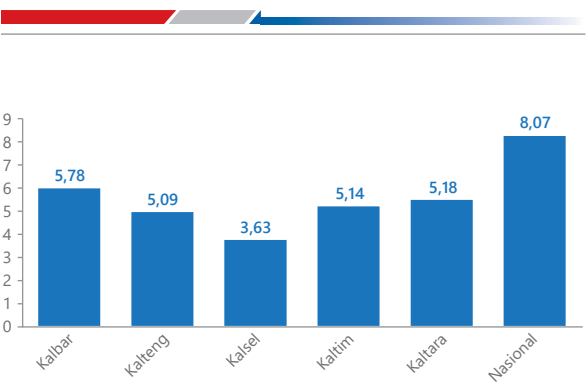
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 5.9. Perbandingan Inflasi Pedesaan Kalimantan Barat dan Nasional (mtm)

5.5. PROFIL KEMISKINAN DAN PEMERATAAN

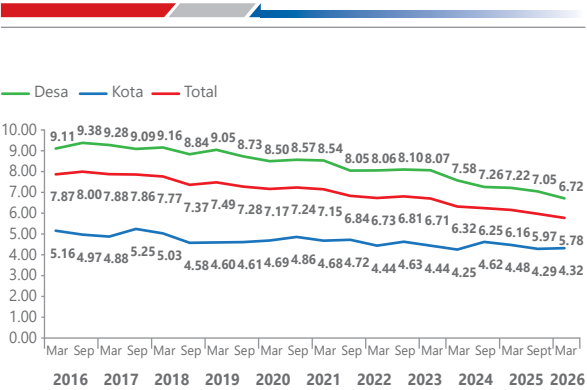
Jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat 313,37 ribu orang (5,78% dari total penduduk), menurun sebesar 0,19% dibandingkan dengan September 2025 yang tercatat sebesar 322,54 ribu orang (5,97% dari total penduduk). Proporsi penduduk miskin masih didominasi oleh penduduk daerah perdesaan dengan dengan jumlah 221,54 ribu orang atau 6,72% dari total penduduk miskin di Kalimantan Barat. Jumlah penduduk miskin perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,05% atau 10.730 orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebesar 232,27 ribu orang. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 tercatat berjumlah 91,83 ribu orang (4,32% dari penduduk perkotaan), meningkat 1,55% dari jumlah penduduk miskin pada September 2025 yang tercatat 90,28 ribu orang. Perubahan jumlah penduduk miskin perdesaan dan perkotaan dipengaruhi oleh perubahan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan

dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan pada Maret 2026 sebesar 675.653/kapita/bulan, meningkat 3,59% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp652.220/kapita/bulan.



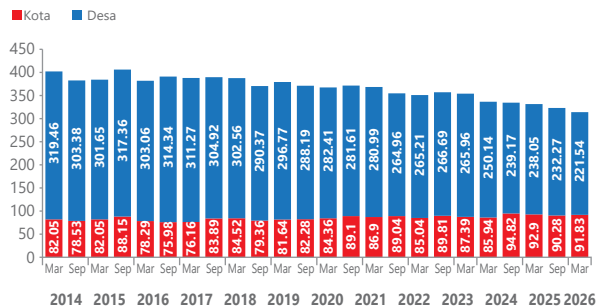
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 5.10. Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kalimantan dan Nasional



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 5.11. Perkembangan Persentase Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Barat



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

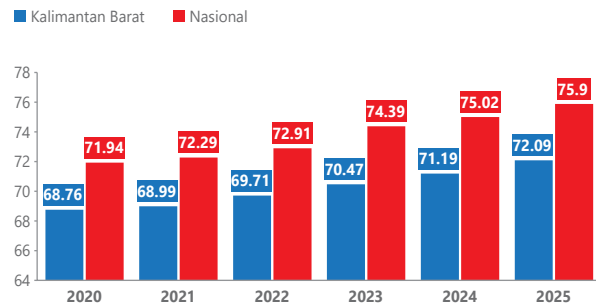
Grafik 5.12. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kalimantan Barat

Persentase angka kemiskinan di Kalimantan Barat pada Maret 2026 sebesar 5,78%, lebih rendah dibandingkan persentase angka kemiskinan nasional yang sebesar 8,07%. Namun demikian, Kalimantan Barat masih menempati posisi tertinggi dalam persentase angka kemiskinan dibandingkan dengan provinsi lainnya di wilayah Kalimantan (Grafik 6.9).

5.6. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA¹⁴

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan sebesar 1,26% (yoy) dari 71,19 pada tahun 2024 menjadi 72,09 pada tahun 2025 (Grafik 6.11). IPM Provinsi Kalimantan Barat saat ini telah berada dalam kategori tinggi seperti halnya IPM nasional yang mencapai 75,02. IPM dikategorikan tinggi bila berada pada rentang nilai IPM 70-80. Peningkatan IPM Provinsi Kalimantan Barat sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. IPM diukur berdasarkan beberapa dimensi, diantaranya umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Oleh karena itu, upaya untuk mempercepat peningkatan IPM terus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui peningkatan akses

14. Nilai IPM yang digunakan merupakan angka IPM dengan menggunakan metode perhitungan IPM Tahun 2014. Terdapat penggantian komponen tahun dasar PNB Per Kapita dari tahun 2005 ke 2011. Metode agregasi indeks menggunakan rata-rata ukur (geometrik).



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 5.13. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat dan Nasional

terhadap pendidikan, peningkatan akses terhadap kesehatan, peningkatan standar hidup masyarakat, dan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah.

Hingga tahun 2025, seluruh provinsi di regional Kalimantan menunjukkan peningkatan angka IPM dan telah berada pada kategori tinggi (Tabel 6.7), namun jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Kalimantan, IPM Kalimantan Barat merupakan yang terendah. Kalimantan Timur merupakan provinsi di wilayah kalimantan yang menempati posisi tertinggi dengan IPM berada pada angka 79,39. Kondisi ini perlu menjadi perhatian terutama dari pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Barat untuk terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Seluruh komponen IPM mengalami peningkatan pada tahun 2025. Pengeluaran per kapita meningkat dari Rp10.321 pada tahun 2024 menjadi Rp10.689 pada tahun 2025. Sementara itu, dimensi pengetahuan yang dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga mengalami kenaikan dalam skala yang relatif terbatas. HLS di Kalimantan Barat sebesar 12,69 tahun yang mengindikasikan bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk berada pada jenjang pendidikan formal hingga 12,69 tahun atau

Tabel 5.7. IPM Provinsi Wilayah Kalimantan 2020-2025

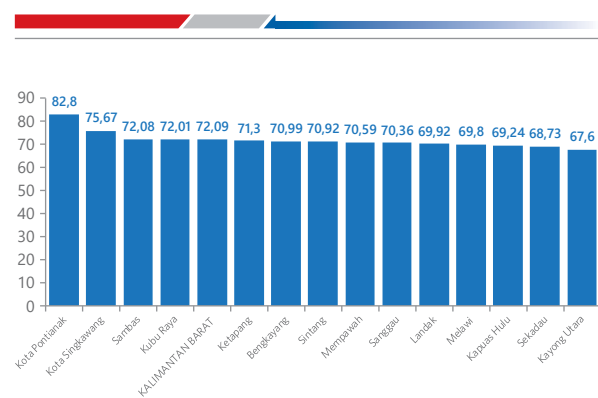
Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia						g 2024-2025 (% yoy)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Kalimantan Barat	68,76	68,99	69,71	70,47	71,19	72,09	1,26%
Kalimantan Tengah	71,05	71,25	71,63	72,2	74,28	74,86	0,78%
Kalimantan Selatan	70,91	71,28	71,84	72,5	75,19	76,1	1,21%
Kalimantan Timur	76,24	76,88	77,44	78,5	78,79	79,39	0,76%
Kalimantan Utara	70,63	71,19	71,83	71,83	73,41	74,04	0,86%
Nasional	71,94	72,29	72,91	74,39	75,02	75,9	0,85%

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

hingga lulus SMA/ SMK. Sejalan dengan peningkatan pada HLS, RLS di wilayah Kalimantan Barat juga menunjukkan peningkatan dari 7,78 tahun pada 2024 menjadi 8,07 tahun pada 2025. Berdasarkan indikator tersebut, diketahui bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas sekurang-kurangnya telah mengenyam pendidikan hingga SMP kelas I.

Saat ini di Kalimantan Barat terdapat 9 kabupaten/ kota dengan status IPM tinggi (Grafik 6.14) yakni Kota Pontianak 82,8; Singkawang 75,67; Kabupaten Sambas 72,67; Kubu Raya 72,01; Bengkayang 70,99; Ketapang 71,3; Sintang 70,92; Mempawah 70,59; dan Sanggau 70,36. Kota Pontianak menjadi satu-satunya kabupaten/kota dengan status pembangunan manusia sangat tinggi. Pencapaian status IPM tersebut didorong oleh komitmen pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan penyediaan infrastruktur pendidikan, penyediaan dan perluasan peluang lapangan pekerjaan, peningkatan program dan infrastruktur kesehatan maupun rekreasi yang kian lengkap dan memadai. Sementara itu, status IPM

di tujuh kabupaten/kota lainnya masih termasuk dalam klasifikasi sedang. Keseluruhan data ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah harus lebih fokus dalam melakukan koordinasi, memberikan perhatian, dan menjalankan komitmen dalam peningkatan IPM agar semakin merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat.



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 5.14. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Kalimantan Barat**Tabel 5.8.** Perkembangan IPM Kalimantan Barat berdasarkan komponennya

Komponen	Satuan	Indeks Pembangunan Manusia							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70,18	70,56	73,21	73,26	73,47	73,71	73,94	74,28
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,55	12,58	12,60	12,65	12,66	12,67	12,68	12,69
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,12	7,31	7,37	7,45	7,59	7,71	7,78	8,07
Pengeluaran Perkapita Pertahun	Rp 000	8.860	9.055	8.930	8.974	9.355	9.810	10.321	10.689
IPM		66,98	67,65	68,76	68,99	69,71	70,47	71,19	72,09
Pertumbuhan IPM	%	1,09%	1,00%	1,64%	0,33%	1,04%	1,09%	1,02%	1,26%

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Bab 6
Prospek
Perekonomian Daerah

**Prospek
Pertumbuhan Global**

3,0%_(yoy)

***Proyeksi**

**Prospek
Pertumbuhan Nasional**

4,9% - 5,7%_(yoy)

***Proyeksi**

**Prospek Pertumbuhan
Kalimantan Barat**

4,9% - 5,7%_(yoy)

***Proyeksi**

**Inflasi
Kalimantan Barat**

2,5 ± 1%_(yoy)

***Proyeksi**



Prospek perekonomian global tahun 2026 diperkirakan melambat menjadi 3,0%, di tengah ketidakpastian pasar keuangan yang tinggi dan divergensi pertumbuhan antarnegara. Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi global terutama dipengaruhi oleh berlanjutnya perang Timur Tengah dan tensi geopolitik. Harga minyak dan komoditas dunia meningkat tinggi diikuti dengan disrupsi rantai pasok perdagangan antarnegara yang semakin dalam. Dari sisi keuangan global, ruang penurunan FFR masih terbuka, namun yield US Treasury tenor panjang tetap tinggi karena risiko defisit fiskal AS, mendorong aliran modal ke emerging markets secara selektif.

*Perekonomian Kalimantan Barat tahun 2026 diperkirakan tumbuh di kisaran 4,9-5,7% (yoy) **dan inflasi yang terjaga.** Perekonomian Kalbar didukung oleh kinerja lapangan usaha utama, seperti industri pengolahan dan pertanian, diimbangi dengan tingkat konsumsi masyarakat yang diperkirakan masih terjaga. Sementara itu, secara keseluruhan tahun 2026, inflasi di Kalimantan Barat diperkirakan stabil terjaga pada rentang sasaran target inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy).*



6.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA

Prospek perekonomian global dalam tren melambat dengan ketidakpastian pasar keuangan yang telah tinggi. Kinerja pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2026 diperkirakan melambat dari 3,3% pada 2025 menjadi 3,0% dan dibarengi dengan divergensi pertumbuhan antarnegara. Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi global terutama dipengaruhi oleh berlanjutnya perang Timur Tengah dan tensi geopolitik. Harga minyak dan komoditas dunia meningkat tinggi diikuti dengan disrupsi rantai pasok perdagangan antarnegara yang semakin dalam.

Dari sisi negara mitra dagang utama, prospek pertumbuhan menunjukkan divergensi. Perekonomian Tiongkok pada 2026 diperkirakan tumbuh 4,6%, melambat dibandingkan tahun sebelumnya sejalan dengan masih lemahnya permintaan domestik dan tantangan struktural, sementara Malaysia diperkirakan tumbuh 4,7% dan India 6,7%. Kondisi tersebut memberikan implikasi yang berbeda bagi Kalimantan Barat, mengingat Tiongkok dan Malaysia merupakan pasar penting bagi komoditas ekspor daerah, sementara India menjadi salah satu sumber tambahan permintaan global.

Dari pasar keuangan global, ruang pelonggaran kebijakan moneter menjadi semakin terbatas. Bank Indonesia memprakirakan inflasi global sekitar 4,5% pada 2026 dan Federal Funds Rate (FFR) berpotensi kembali meningkat pada akhir 2026, sementara yield US Treasury diperkirakan tetap tinggi seiring ekspektasi kenaikan FFR dan tingginya defisit fiskal Amerika Serikat. Kondisi tersebut berpotensi mempertahankan volatilitas pasar keuangan dan tekanan terhadap nilai tukar negara *emerging markets*, sehingga perlu diantisipasi melalui penguatan ketahanan eksternal dan bauran kebijakan yang kredibel. Selain itu, dari sisi komoditas, prospek masih bersifat *mixed* dan dipengaruhi perkembangan kondisi geopolitik global. Harga komoditas energi dan logam mengalami volatilitas tinggi sepanjang 2026, begitu juga dengan harga alumina/aluminium pada Juli 2026 tercatat menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bagi Kalimantan

Barat mengingat struktur ekspor daerah masih memiliki keterkaitan kuat dengan komoditas berbasis pertambangan, alumina, dan kelapa sawit.

Dengan demikian, prospek ekonomi global diperkirakan belum menjadi sumber dorongan yang kuat bagi perekonomian Kalimantan Barat, namun masih memberikan ruang pertumbuhan melalui permintaan dan diversifikasi pasar. Risiko utama berasal dari perlambatan negara mitra dagang, volatilitas harga komoditas, eskalasi geopolitik, fragmentasi perdagangan, serta kondisi keuangan global yang lebih ketat. Sebaliknya, peningkatan permintaan komoditas strategis, diversifikasi tujuan ekspor, serta penguatan hilirisasi domestik dapat menjadi faktor yang menahan dampak perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian Kalimantan Barat.

6.2. PROSPEK EKONOMI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026

Perekonomian Kalimantan Barat tahun 2026 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,9 – 5,7% (yoy), ditopang oleh kinerja lapangan usaha khususnya industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Kinerja ekonomi Kalimantan Barat menunjukkan dinamika yang menarik, khususnya ketika ditinjau dari struktur LU yang memiliki keterkaitan kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lintas sektor. Dua LU utama, yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta industri pengolahan, tercatat sebagai LU yang tidak hanya tumbuh positif, tetapi juga memiliki indeks keterkaitan ke depan (*forward linkage*/IFL) yang tinggi, masing-masing sebesar 1,35 dan 1,34. Ini menandakan peran keduanya sebagai industri hulu strategis yang mampu menjadi penggerak LU lainnya di wilayah tersebut. Namun demikian, sektor dengan nilai IFL tertinggi justru berasal dari LU pengadaan listrik dan gas, dengan indeks mencapai 1,53. Sektor ini tidak hanya berperan sebagai pendorong (hulu), tetapi juga sebagai pengguna utama input dari sektor lain (hilir), tecermin dari tingginya indeks keterkaitan ke belakang (*backward linkage*/IBL) sebesar 1,50. Peran ganda ini menjadikan pengadaan listrik dan

gas sebagai simpul kunci yang menghubungkan sisi hulu dan hilir perekonomian. Dengan semakin berkembangnya industri pengolahan dan kawasan industri di Kalimantan Barat, ketersediaan energi yang andal dan kompetitif menjadi semakin penting untuk memastikan kapasitas produksi dapat berkembang dan investasi baru dapat direalisasikan.

Dari sisi lapangan usaha, industri kelapa sawit tetap menjadi sektor unggulan Kalimantan Barat. Permintaan akan kebutuhan CPO diperkirakan semakin meningkat, terutama permintaan domestik seiring dengan kebutuhan pangan dan biodiesel. Selain itu, pertumbuhan pangsa biodiesel dalam konsumsi CPO domestik terutama dipengaruhi oleh kebijakan B40 oleh Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN), di mana pada tahun 2026, target pemenuhan biodiesel oleh perusahaan di Kalimantan Barat meningkat hingga 30% (APROBI, 2026). Lebih lanjut, perkembangan kebijakan *mandatory* B50 yang ditargetkan pada semester kedua tahun 2026 juga memberikan dampak peningkatan permintaan terhadap CPO. Namun demikian, tingginya permintaan perlu diikuti pula oleh peningkatan produktivitas. Data menunjukkan bahwa produktivitas TBS dan CPO di Kalimantan Barat justru melambat, antara lain akibat meningkatnya luas tanaman tidak menghasilkan (TTM) yang mencapai 7,11% dari total lahan atau setara 47 ribu hektare. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dengan dukungan dana optimal sebesar Rp60 juta per hektar. Di saat yang sama, dinamika kebijakan global dan nasional terkini yang mendorong gejolak harga di pasar dari sisi global hingga di level petani, perlu terus dicermati dan diantisipasi guna menjaga stabilitas produksi, pendapatan pelaku usaha, serta keberlanjutan investasi pada sektor kelapa sawit. Ketidakpastian yang masih berlangsung tersebut mulai mendorong sikap *wait and see* di kalangan pelaku usaha.

Saat ini, struktur industri sawit Kalimantan Barat masih didominasi oleh aktivitas hulu dan menengah seperti pengolahan CPO, PKO, dan olein. Sementara kegiatan hilir masih terbatas hanya dilakukan oleh sejumlah BU BBN dan perusahaan produk hilirisasi *downstream*.

Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan pelaku industri untuk mendorong investasi dan membangun ekosistem hilirisasi yang lengkap dan berdaya saing. Pembangunan industri tentu tidak dapat dilepaskan dari peran sektor konstruksi yang kinerjanya di Kalimantan Barat juga tumbuh positif. Sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek investasi swasta, serta pengembangan infrastruktur daerah turut menopang pertumbuhan sektor ini. Kabupaten Ketapang misalnya, menunjukkan peningkatan realisasi investasi untuk pengembangan kawasan industri, yang membutuhkan dukungan infrastruktur dasar yang memadai. Begitu pula Kabupaten Mempawah yang kini berpeluang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), menjadi lokasi alumina skala besar dan calon sentra hilirisasi produk kelapa sawit, didukung oleh PSN Pelabuhan Kijing sebagai punggawa krusial efisiensi distribusi barang dan pengembangan ekonomi kawasan tersebut. Lebih lanjut, posisi geografis Kalimantan Barat sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia dengan empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta jaringan jalan paralel perbatasan, menempatkan Kalimantan Barat sebagai salah satu koridor strategis konektivitas bilateral Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan. Dalam jangka menengah, penguatan konektivitas antarkawasan seiring berkembangnya Ibu Kota Nusantara (IKN) turut berpotensi memperluas peran Kalimantan Barat tidak hanya sebagai wilayah perbatasan, melainkan juga sebagai simpul perdagangan, logistik, dan pariwisata. Potensi ini perlu dimanfaatkan melalui pengembangan infrastruktur konektivitas darat yang andal, serta penguatan jaringan antarwilayah yang akan mendukung mobilitas barang dan jasa lintas batas. Peluang ini sekaligus dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar industri lokal dan mendorong akselerasi pembangunan kawasan perbatasan. Namun, seluruh potensi tersebut tidak dapat dioptimalkan tanpa dukungan sektor energi, khususnya pengadaan listrik dan gas. Kalimantan Barat hingga saat ini masih menjadi satu-satunya provinsi di Kalimantan yang belum terintegrasi dalam sistem interkoneksi kelistrikan regional. Bahkan, sejumlah kawasan dengan potensi industri besar, seperti Kabupaten Ketapang,

belum terhubung dengan sistem kelistrikan provinsi. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan investasi yang lebih besar dalam pembangunan pembangkit dan jaringan transmisi baru. Padahal, dari sisi konsumsi, Kalimantan Barat menempati posisi ketiga di Kalimantan dengan porsi penggunaan listrik sebesar 20,18%. Ketertinggalan dalam interkoneksi listrik ini berpotensi menjadi hambatan utama dalam menarik investasi baru dan mengoptimalkan pertumbuhan lapangan usaha lain yang sangat bergantung pada ketersediaan energi. Oleh karena itu, penguatan sektor kelistrikan perlu menjadi prioritas pembangunan ke depan, tidak hanya sebagai pendukung teknis, tetapi sebagai katalis utama pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat secara menyeluruh.

Dari sisi pengeluaran, kinerja konsumsi rumah tangga diperkirakan masih tumbuh positif pada tahun 2026 dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Peningkatan kinerja konsumsi RT sejalan dengan terjaganya optimisme dan tingkat pendapatan masyarakat seiring masih tumbuhnya kinerja berbagai LU utama terutama LU pertanian, industri, serta perdagangan, didukung oleh peningkatan UMP Kalimantan Barat sebesar 6,12%. Hal ini juga tercermin melalui Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih berada dalam zona optimis. Meski demikian, tingkat penyerapan dan ketersediaan lapangan kerja di LU utama tersebut perlu terus dikawal dan menjadi perhatian utama, mengingat pangsa terbesar pekerja aktif di Kalimantan Barat yang berkisar 30 – 40% merupakan buruh/pegawai/karyawan. Selain itu, momen HBKN yang tersentralisasi berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat sejalan dengan berbagai bentuk perayaan, festival, maupun kegiatan massal yang diselenggarakan. Daya beli masyarakat masih menghadapi risiko tekanan akibat potensi kenaikan harga bahan pangan dan komoditas strategis yang dapat mengurangi pendapatan riil rumah tangga. Apabila tekanan harga berlangsung dalam periode yang panjang, maka konsumsi non-esensial berpotensi tertahan sehingga dapat memengaruhi laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga ke depan.

Pertumbuhan kinerja investasi diperkirakan tetap terjaga, namun sangat bergantung pada realisasi dan laju eksekusi proyek hilirisasi pada tahun 2026. Prospek investasi utamanya didorong oleh rencana pengembangan proyek strategis *refinery* alumina dan *smelter* aluminium di Kawasan Industri Ketapang, serta penambahan investasi dalam rangka Fase 2 SGAR Alumina di Mempawah. Lebih lanjut, kondisi permintaan domestik CPO dan turunannya yang menunjukkan peningkatan ditengah mulainya implementasi kebijakan B40 dan rencana B50 ke depan, menjadikan investasi pada perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan turunan minyak kelapa sawit diperkirakan akan meningkat. Namun demikian, beberapa proyek yang telah memasuki tahap penyelesaian berpotensi menimbulkan *base effect* terhadap pertumbuhan investasi. Oleh karenanya, keberlanjutan pertumbuhan investasi akan ditentukan oleh kemampuan mengonversi *pipeline* proyek menjadi realisasi fisik, termasuk melalui kepastian perizinan, kesiapan lahan, ketersediaan energi, infrastruktur dasar, dan kepastian regulasi.

Terkait prospek ekonomi Kalimantan Barat tahun 2026 tersebut, terdapat beberapa risiko yang memerlukan perhatian, diantaranya:

1. Risiko perlambatan ekonomi global dan akibat divergensi pertumbuhan antarnegara yang terus berlanjut di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi;
2. Penurunan harga dan permintaan komoditas ekspor utama Kalimantan Barat akibat peningkatan pasokan komoditas global, pemulihan produksi substitusi, perubahan pola perdagangan dan perlambatan aktivitas perekonomian negara tujuan utama ekspor;
3. Penurunan tingkat produktivitas komoditas perkebunan akibat berlanjutnya proporsi tanaman belum dan tidak menghasilkan (TBM dan TTM) kelapa sawit dan pelaksanaan *replanting* di beberapa perusahaan serta perkebunan rakyat;
4. Anomali cuaca dan bencana hidrometeorologi (kebakaran hutan-lahan dan banjir) yang berpotensi berdampak negatif terhadap produksi tanaman pertanian dan pangan;

5. Kendala realisasi belanja pemerintah daerah dan pusat, seiring dinamika efisiensi dan realokasi APBN dan APBD di tahun 2026;
6. Perlambatan realisasi investasi swasta, terutama apabila terdapat kendala dalam kesiapan lahan, perizinan infrastruktur dasar, kelistrikan, maupun perubahan *business sentiment* di tengah ketidakpastian global.
7. Penurunan daya beli masyarakat akibat peningkatan harga pangan dan komoditas strategis, serta penurunan pendapatan dan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja yang berisiko menahan pertumbuhan aktivitas konsumsi rumah tangga.

6.3. PRAKIRAAN INFLASI DAERAH TAHUN 2026

Secara keseluruhan tahun 2026, inflasi IHK di Provinsi Kalimantan Barat diperkirakan tetap stabil dan berada dalam rentang sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$ secara tahunan. Merujuk Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia bulan Agustus 2026, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75% sejak 18 Juni 2026. Kebijakan tersebut konsisten dengan upaya menjaga inflasi tahun 2026 dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global, serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasarannya dan stabilitas nilai tukar Rupiah yang sesuai fundamental, dengan tetap mencermati ruang untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan domestik. Namun demikian, perlu mewaspadaikan faktor-faktor pendorong inflasi.

Dari sisi inflasi inti (*core inflation*), risiko terutama bersumber dari masih tingginya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Konflik geopolitik yang berkepanjangan berpotensi mempertahankan permintaan terhadap emas sebagai aset aman dan mendorong harga emas dunia tetap tinggi. Kondisi tersebut, apabila disertai pelemahan nilai tukar rupiah, akan meningkatkan harga emas dalam denominasi

rupiah dan selanjutnya ditransmisikan kepada harga emas perhiasan di tingkat konsumen. Risiko ini perlu mendapat perhatian mengingat emas perhiasan secara konsisten menjadi salah satu komoditas utama penyumbang inflasi tahunan Kalimantan Barat. Selain itu, peningkatan harga minyak bumi dan komoditas global dapat menimbulkan *second-round effect* atau efek lanjutan melalui kenaikan biaya input produksi, kemasan plastik, pelumas, angkutan barang, dan jasa transportasi.

Pada kelompok harga yang diatur pemerintah (*administered price*), perkembangan harga energi dan transportasi diperkirakan tetap menjadi sumber risiko inflasi. Penyesuaian harga LPG nonsubsidi, BBM nonsubsidi, dan tarif tambahan angkutan udara yang telah berlangsung pada triwulan II 2026 telah meningkatkan tingkat harga dan dapat memberikan dampak tidak langsung melalui kenaikan biaya produksi serta distribusi. Di samping itu, musim kemarau, El Niño pada taraf ringan sampai moderat, serta hambatan distribusi pasokan akibat risiko alam seperti intrusi air laut, penurunan tinggi muka air sungai, dan pendangkalan, juga turut meningkatkan potensi inflasi lebih tinggi. Sebagai Informasi, bahan bakar minyak bensin dan bahan bakar rumah tangga merupakan salah satu komoditas utama dalam menentukan dinamika inflasi di Kalimantan Barat dengan pangsa masing-masing yakni sekitar 4,47% dan 2,31% dari total nilai konsumsi di kabupaten/kota sampel inflasi di Kalimantan Barat. Dengan demikian perkembangan harga bensin dan bahan bakar rumah tangga masih akan mempengaruhi dinamika inflasi. Namun demikian, risiko tersebut diperkirakan tertahan oleh komitmen Pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM hingga akhir 2026 serta keberlanjutan fungsi APBN sebagai peredam gejolak harga energi dengan memanfaatkan bantalan fiskal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). Dukungan stimulus transportasi berupa PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas tiket pesawat kelas ekonomi pada periode tertentu, termasuk yang direncanakan pada periode Natal dan Tahun Baru, juga berpotensi mengurangi tekanan tarif angkutan udara. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut tetap bergantung pada besaran permintaan, ketersediaan penerbangan, harga bahan

bakar pesawat, dan mekanisme penerapan insentif pada tingkat konsumen.

Dari kelompok makanan bergejolak (*volatile food*), risiko inflasi terutama berasal dari gangguan produksi dan distribusi bahan pangan akibat El Niño serta puncak musim kemarau. Berdasarkan pemantauan BMKG hingga dasarian II Agustus 2026, kondisi El Niño telah berada pada kategori sangat kuat. Kondisi ini meningkatkan risiko berkurangnya ketersediaan air, mundurnya jadwal tanam, penurunan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, serta meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selama Januari–Agustus 2026, luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dilaporkan telah mencapai lebih dari 38 ribu hektare. Meskipun dampaknya terhadap produksi pangan perlu dikonfirmasi berdasarkan lokasi dan komoditas terdampak, kondisi tersebut meningkatkan risiko gangguan produksi dan aktivitas distribusi di wilayah sentra. Penurunan debit sungai selama musim kemarau juga dapat menghambat kelancaran distribusi pangan terutama ke wilayah yang masih bergantung pada transportasi sungai. Selain itu, ketergantungan sebagian wilayah Kalimantan Barat terhadap pasokan pangan dari kabupaten lain maupun luar provinsi menyebabkan gangguan produksi dan distribusi di daerah pemasok dapat lebih cepat ditransmisikan kepada harga konsumen. Namun demikian, tekanan tersebut diperkirakan tertahan oleh peningkatan produksi melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, penguatan cadangan pangan pemerintah, penyaluran bantuan pangan, operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah, serta perluasan kerja sama antardaerah (KAD) baik intraprovinci maupun antarprovinci di Kalimantan Barat. Penyaluran bantuan pangan dapat menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi tekanan permintaan pada pasar beras komersial, sedangkan kerja sama antardaerah dapat membantu menutup defisit komoditas antarwilayah. Namun demikian, efektivitasnya perlu ditopang oleh pemetaan neraca pangan yang diperbarui secara berkala, kepastian waktu dan volume pasokan, serta kelancaran sarana transportasi dan pergudangan.

Mencermati risiko tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus melakukan berbagai upaya dalam jangka pendek, menengah, panjang, termasuk upayanya dalam Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS) sebagai langkah pengendalian inflasi guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

6.4. REKOMENDASI

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan pengendalian inflasi yang stabil, maka dibutuhkan koordinasi, sinergi, dan partisipasi proaktif langsung dari seluruh peran yang terlibat dalam menghadapi dan mengantisipasi risiko yang berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sebagai upaya mewujudkan perekonomian Kalimantan Barat yang kuat, diperlukan pertimbangan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. **Mendorong percepatan realisasi APBD dan belanja pemerintah secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berkualitas, terutama pada belanja yang memiliki *multiplier effect* tinggi terhadap perekonomian daerah**, dengan memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, konektivitas, ketahanan pangan, serta program yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan UMKM, di tengah tekanan perekonomian global dan domestik.
2. **Mempercepat realisasi investasi strategis melalui harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, penyederhanaan proses perizinan, kepastian tata ruang dan lahan, serta penyelesaian hambatan infrastruktur dasar**, khususnya untuk pengembangan kawasan industri, hilirisasi bauksit–alumina–aluminium, industri CPO, dan infrastruktur logistik seperti Pelabuhan Kijing. Penguatan koordinasi perlu diarahkan pada penyelesaian *bottleneck* proyek secara spesifik agar *pipeline* investasi dapat lebih cepat dikonversi menjadi realisasi fisik, peningkatan kapasitas produksi, dan penciptaan lapangan kerja.

3. Mendukung kebijakan untuk memperbaiki tata niaga CPO Kalbar guna mendukung keberlanjutan pasokan CPO kepada industri hilir turunan minyak kelapa sawit di Kalimantan Barat guna memenuhi kebutuhan permintaan, terutama kebutuhan domestik untuk pangan dan biodiesel.
4. Sebagai bentuk dukungan terhadap penciptaan ekosistem industri alumina yang menopang industri hijau nasional, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
 - a. Memastikan interkoneksi dan stabilitas pasokan kelistrikan di sentra industri alumina (khususnya Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sanggau sebagai pusat cadangan bauksit) untuk lebih lanjut dapat terhubung pada Sistem Khatulistiwa Kalimantan Barat dan Sistem Interkoneksi Kalimantan;
 - b. Mendukung ketersediaan kebutuhan SDM lokal sesuai dengan spesifikasi teknis keperluan industri melalui program magang, kerjasama dengan perusahaan untuk pembentukan sekolah vokasi, dan/atau pengajuan kepada K/L terkait mengenai urgensi pengembangan SDM lokal.
 - c. Memfasilitasi *financing matching* antara calon pelaku usaha alumina dengan sindikasi perbankan dalam & luar negeri.
 - d. Mendorong pemda kabupaten/kota untuk memfasilitasi penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) guna menciptakan perencanaan tata ruang wilayah yang sesuai peruntukan dalam mendukung daya tarik masuknya investor dan mempercepat proses pengajuan perizinan. Misalnya,
 - e. Bentuk koordinasi dan dukungan bersama pemerintah pusat: 1) mendukung kebijakan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk, *tax holiday*, dan *tax allowance* bagi pelaku usaha yang membangun *refinery* alumina; 2) mendorong lebih banyak proyek *refinery* alumina untuk didaftarkan sebagai PSN yang mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah; 3) mendorong pengembangan KI dan KEK yang berkelanjutan; 4) mendorong sinergi antar Kementerian/Lembaga; serta 5) mengoptimalkan koordinasi kebijakan pusat dan daerah, utamanya terkait konsistensi implementasi dan rancangan kebijakan pemerintah dalam mendorong hilirisasi.
- f. Dalam hal *net zero emission*, sebagaimana arah pengembangan spasial dalam RPJPD Kalimantan Barat klaster Kapuas Hulu, Sintang, dan Melawi dapat dikembangkan menjadi pusat *carbon fund & trading* melalui pelestarian dan konservasi hutan dengan modal hamparan sekitar 55-65% dari kawasan hutan Kalbar.
5. Mendorong program pendampingan petani kebun agar memenuhi syarat program Perkebunan Sawit Rakyat (PSR) untuk mendukung penguatan kapasitas dan kapabilitas petani, serta kelembagaan kebun sebagai upaya untuk memperoleh sertifikasi ISPO/RSPO. Selain itu, perlu mendorong replikasi model kemitraan sawit perusahaan inti dan petani plasma untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.
6. Mengoptimalkan pemberdayaan UMKM melalui penciptaan permintaan terutama melalui himbauan kepala daerah kepada ASN, instansi, perbankan, dan masyarakat di daerah untuk menggunakan produk lokal/UMKM. Serta, melakukan *business matching* UMKM potensial dengan *buyer* ataupun *aggregator* dalam negeri maupun luar negeri.
7. Menstimulus dan mengawasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan mikro lainnya untuk mendorong daya ungkit kepada pelaku UMKM di tengah risiko perlambatan pembiayaan dan peningkatan NPL pada UMKM.
8. Akselerasi digitalisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas, termasuk implementasinya untuk mendukung fiskal daerah salah satunya mengimbau pembiasaan pemanfaatan transaksi elektronik (*cashless*), baik melalui transfer, uang elektronik maupun QRIS. Di samping itu, akselerasi program Elektronifikasi

Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) perlu untuk terus didorong, sehingga dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), *governance*, serta efisiensi dan efektivitas transaksi pemerintah daerah.

9. **Mendorong peningkatan pergerakan wisatawan nusantara dan mengoptimalkan pembukaan pariwisata** yang lebih luas untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui strategi aksi pariwisata 3A2P, yaitu akses, atraksi, amenitas, promosi, dan pelaku pariwisata. Selain itu, proaktif berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan *stakeholders* terkait guna mengadakan kegiatan *Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions* (MICE) baik skala nasional dan internasional di Kalimantan Barat.
10. **Mendorong diversifikasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lainnya** yang memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian lokal, terutama yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, inklusif, dan hijau yang berkelanjutan.
11. **Mendorong, memfasilitasi, dan memastikan keberlanjutan wilayah Kalimantan Barat sebagai *international hub*** baik melalui infrastruktur pelabuhan, bandar udara, dan transportasi darat guna mendukung interkoneksi Ibu Kota Nusantara dan Malaysia.
12. **Penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS).**

Sementara itu, upaya pengendalian inflasi daerah secara konsisten telah dilakukan melalui TPID dan juga GPIPS bekerjasama dengan *stakeholders* terkait. Berbagai upaya tetap diperlukan untuk mencegah terjadinya gejolak harga komoditas antara lain:

- a. Keterjangkauan harga
 - 1) Untuk mengurangi fluktuasi harga, diperlukan strategi pemenuhan kebutuhan bahan baku pangan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) agak tidak berasal

dari pasar utama tujuan konsumen rumah tangga, tetapi pemenuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dilakukan langsung dari kelompok tani atau distributor besar sehingga tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan rumah tangga, serta membuat diversifikasi variasi menu agar tidak terjadinya lonjakan permintaan komoditas tertentu pada waktu yang bersamaan. Dukungan *business matching* juga dapat diberikan dengan *offtaker* kelompok tani dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan BUMDes untuk memenuhi kebutuhan MBG, serta mendorong diversifikasi usaha BUMD *existing* menjadi kios pangan penyeimbang.

- 2) Monitoring harga aneka cabai, beras, daging dan telur ayam ras, horti daun (al. kangkung, sawi, dan bayam), bahan bakar rumah tangga, dan komoditas lainnya sesuai data historis 5 tahun terakhir seiring kondisi potensi kenaikan harga serta gangguan distribusi dan produksi akibat cuaca dan dampak karhutla. Mengintensifkan pemantauan pasar khususnya di pasar referensi penghitungan IHK antara lain Pasar Flamboyan (Kota Pontianak) dan Pasar Melati (Kab. Ketapang) sebagaimana pangsa nilai konsumsi terbesar di Kalimantan Barat dengan mengikutsertakan aparat penegak hukum.
- 3) Gerakan Pasar Murah (GPM) dilaksanakan secara terarah, adaptif, dan berbasis indikator. Frekuensi GPM dapat ditingkatkan menjadi mingguan ketika harga komoditas strategis menunjukkan kenaikan persisten, berada di atas HET/HAP, terjadi defisit pasokan, atau memasuki periode HBKN. Di luar kondisi tersebut, GPM dilaksanakan sesuai kebutuhan agar intervensi tetap efisien dan tidak menekan harga di tingkat produsen. Salah satu GPM yang dapat lebih diintensifkan adalah di kota Pontianak untuk komoditas dengan tren peningkatan harga seperti cabai rawit, beras, daging ayam, dan telur ayam.

- 4) Melakukan pemantauan berkala terhadap tarif angkutan, biaya logistik, dan distribusi barang strategis pasca penyesuaian harga BBM nonsubsidi.
- b. Ketersediaan pasokan
 - 1) Melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami defisit pasokan untuk menyiapkan skema pemenuhan dari daerah surplus melalui distribusi antardaerah dan melakukan percepatan masa tanam untuk mengantisipasi kemarau yang datang lebih awal. Untuk itu perlu dukungan Pemda dan K/L terkait penyediaan bibit/benih tahan kemarau, distribusi pupuk subsidi tepat waktu, perbaikan jaringan pompanisasi dan irigasi existing agar berfungsi optimal, serta ketersediaan BBM untuk mendukung operasionalisasi mesin pompa air.
 - 2) Mempersiapkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk antisipasi risiko perluasan hotspot dan karhutla yang dapat berdampak negatif pada produksi hortikultura dan distribusi logistik, didukung Satgas Dalkarhutla.
 - 3) Terkait penguatan nilai tukar ringgit terhadap Rupiah, perlu dilakukan pengawasan di wilayah perbatasan terkait risiko penyelundupan bapokting yang dapat berdampak pada pasokan lokal.
 - 4) Memperluas Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan meningkatkan volume KAD eksisting untuk komoditas defisit, terutama aneka cabai dan aneka bawang, serta memperkuat komitmen produsen dan distributor minyak goreng dalam mengalokasikan dan menyalurkan pasokan bagi kebutuhan Kalimantan Barat.
 - 5) Mendorong fasilitasi distribusi pangan didukung penguatan koordinasi dengan importir dan distributor guna memastikan kelancaran pengadaan komoditas strategis, khususnya kedelai, gula, pupuk petrokimia, dan sarana produksi pertanian (saprotan), sehingga risiko gangguan pasokan akibat volatilitas nilai tukar maupun hambatan rantai pasok global dapat diminimalkan.
- c. Kelancaran distribusi
 - 1) Mempertahankan penyerapan gabah/beras CBP sesuai target serta mendorong penyaluran beras SPHP secara berkesinambungan melalui perluasan channel penjualan a.l. toko kios modern, *mini distribution center* (Kios TPID/ Toko Inflasi), dan/atau GPM/OP/PM. Upaya ini juga dapat didorong dengan program KAPUAS KOMPAK dari Bulog Kalimantan Barat melalui pengendalian HET beras premium dengan memotong rantai distribusi dari produsen langsung kepada agen-agen pengecer Bulog dengan melakukan fasilitasi distribusi pangan (FDP) berupa subsidi ongkos angkut;
 - 2) Meningkatkan efektivitas GPM/OP/PM melalui penetapan titik lokasi strategis (pasar/pusat keramaian lainnya) dan penetapan frekuensi/waktu kegiatan dengan memperhatikan periode meningkatnya permintaan masyarakat.
 - 3) Optimalisasi komponen belanja daerah selain TKD (seperti BTT) untuk:
 - a. upaya pengendalian inflasi pangan melalui pelaksanaan GPM/OP/PM rutin.
 - b. subsidi ongkos angkut untuk bapokting yang terdampak kenaikan biaya logistik dan gangguan rantai pasok dari daerah sentra produksi.
 - c. upaya perbaikan infrastruktur jalur distribusi darat sebagai substitusi jalur distribusi sungai yang berisiko surut saat El Nino atau kemarau panjang.
 - 4) Mendorong prioritas bongkar muat komoditas bapokting melalui BUMN logistik/pelayaran dan otoritas pelabuhan pemasok guna memitigasi dampak *dwelling time* pelabuhan. Serta, penguatan integrasi distribusi energi dan pangan melalui *monitoring* ketersediaan BBM, LPG, dan listrik guna memastikan kelancaran proses produksi, penyimpanan, dan distribusi komoditas pangan di Kalimantan Barat.

d. Komunikasi efektif

Dalam mengelola ekspektasi masyarakat dalam rangka menjaga kestabilan harga komoditas dan ketersediaan pasokan diperlukan program komunikasi yang efektif yang mencakup:

- 1) Mendorong pembentukan BUMD/BLUD atau diversifikasi bisnis BUMD existing yang fokus menangani bisnis pangan dalam rangka meningkatkan penguasaan pasar sekitar 20-30%.
- 2) Penguatan strategi komunikasi publik melalui penyampaian pernyataan, konten media sosial dan rilis media lokal yang menyampaikan kehadiran pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan upaya menjamin ketersediaan pasokan yang dilakukan secara periodik dan antisipasi *special event* terutama menjelang hari libur nasional dan hari besar keagamaan nasional (HBKN), guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.

- 3) Melanjutkan komitmen peta jalan TPID 2025 – 2027 dan Forum KAD dan diakselerasi dengan peningkatan kualitas neraca pangan daerah yang terintegrasi antar kabupaten/kota sebagai dasar pengambilan kebijakan serta penguatan implementasi KAD melalui sinergi TPIP-TPID dalam Rakorwil dan HLM yang berbasis data dan risiko.
- 4) Memperkuat strategi komunikasi kebijakan melalui pengendalian ekspektasi yang terkoordinasi melalui Forum SIKADA (Sinergi Keuangan Daerah) antara kepala daerah, tokoh masyarakat, dan otoritas terkait guna mengelola ekspektasi inflasi masyarakat serta mendorong pola konsumsi dan belanja yang bijak, a.l. komoditas BBM dan LPG.

•••**DAFTAR ISTILAH**•••

Clean money policy adalah kebijakan Bank Indonesia untuk menarik uang tidak layak edar dan menyediakan uang layak edar bagi masyarakat.

CPO (*Crude Palm Oil*) atau dikenal sebagai minyak sawit mentah. Minyak sawit atau minyak kelapa sawit adalah minyak nabati yang dapat dikonsumsi, yang didapatkan dari *mesocarp* buah pohon kelapa sawit.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

Dana Perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun perbankan dari masyarakat yang berupa giro, tabungan, atau deposito.

Disagregasi Inflasi adalah penguraian komponen inflasi menjadi 3 kelompok (*inti*, *volatile foods*, dan *administered prices*) berdasarkan faktor yang mempengaruhinya.

Ekspor adalah keseluruhan barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

Impor adalah seluruh barang yang masuk ke suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) adalah salah satu komponen pembentuk IKK. Indeks ini menunjukkan tingkat keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi saat ini.

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu. Sejak bulan Januari 2020 menggunakan tahun dasar 2018 = 100.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) adalah indeks yang menunjukkan tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang.

Industri adalah suatu kegiatan yang mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya, menjadi yang lebih tinggi nilainya termasuk kegiatan jasa industri, pekerjaan perakitan (*assembling*) dari bagian suatu industri.

Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara umum dalam satu periode. Umumnya inflasi diukur dengan perubahan harga sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang tercermin pada perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Inflow adalah uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia, misalnya melalui kegiatan setoran yang dilakukan oleh bank umum.

Investasi adalah kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.

Liaison adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

Month to Month (mtm) adalah perbandingan data antara suatu bulan dengan bulan sebelumnya.

Netflow adalah selisih antar *inflow* dan *outflow*.

Non-Performing Loan (NPL) adalah kredit di perbankan yang masuk dalam kriteria kurang lancar, bermasalah, diragukan, dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

Outflow adalah uang kartal yang dikeluarkan Bank Indonesia melalui proses penarikan tunai bank umum dari giro di Bank Indonesia atau pembayaran tunai melalui Bank Indonesia.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku adalah penjumlahan nilai tambah bruto (NTB) yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan pajak tidak langsung dari seluruh lapangan usaha.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya. Tahun dasar yang digunakan saat ini adalah 2010 = 100.

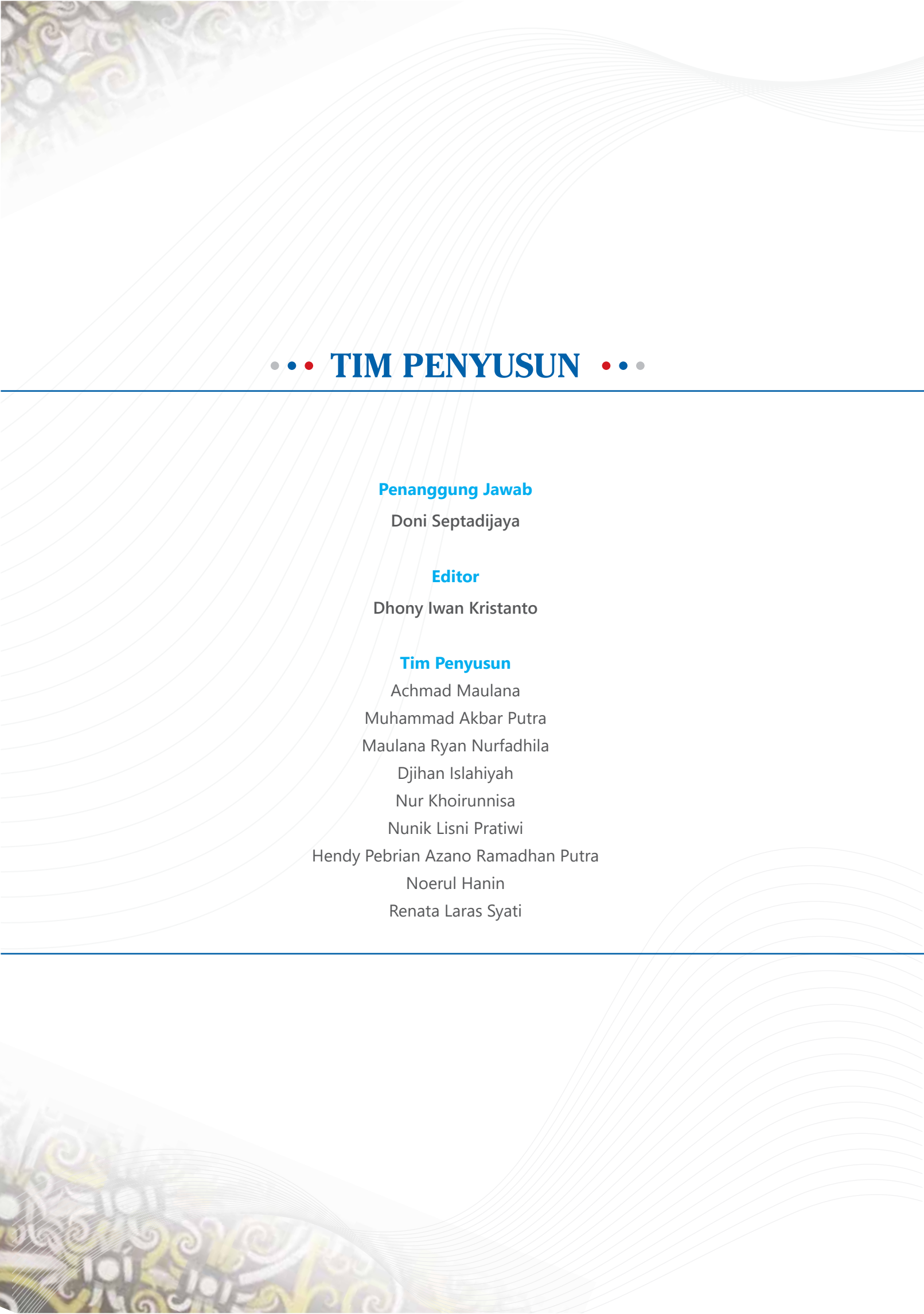
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kelayakan daerah. Dana perimbangan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Quarter to Quarter (qtq) adalah perbandingan data antara suatu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Share of Growth adalah kontribusi suatu lapangan usaha atau komponen ekonomi terhadap total pertumbuhan PDRB.

Standard International Trade Classification (SITC) adalah sistem penggolongan produk yang dikembangkan pada tahun 1962 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SITC dibuat dengan tujuan untuk mengklasifikasikan produk yang diperdagangkan tidak hanya didasarkan atas sifat material dan fisik produk tetapi, juga sesuai dengan tahap pengolahan serta fungsi ekonomi produk tersebut dalam rangka memfasilitasi analisis ekonomi

Year on Year (yoy) adalah perbandingan data antara suatu tahun dengan tahun sebelumnya.



••• **TIM PENYUSUN** •••

Penanggung Jawab

Doni Septadijaya

Editor

Dhony Iwan Kristanto

Tim Penyusun

Achmad Maulana

Muhammad Akbar Putra

Maulana Ryan Nurfadhila

Djihan Islahiyah

Nur Khoirunnisa

Nunik Lisni Pratiwi

Hendy Pebrian Azano Ramadhan Putra

Noerul Hanin

Renata Laras Syati



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA